ISSN 2986-9205
Vol. 5, 2022

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global

SATIESP

@iespfebuntan

jurusaniesp@ekonomi.untan.ac.id

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

ISSN 2986-9205
Vol. 5, 2022

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

"Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global"

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

ISSN 2986-9205
Vol. 5, 2022

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

"Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global"

Editor:
Metasari Kartika, Diah Arminingsih

Cover Design and Layout:
Muhammad Wahyu Hidayat

Penerbit:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Hadari Nawawi. Pontianak – Kalimantan Barat (78121)
Website : https://feb.untan.ac.id/
Email : jurusaniesp@ekonomi.untan.ac.id

REVIEWER & EDITOR
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Steering Committee	:	Dr. Barkah, S.E., M.Si Muz'an Sulaiman, S.E, M.M. Dr. Haryono, S.E., M.Si., A.k, C.A., CPA., Asean CPA Juanda Astarani, S.E., M.SC., CSRS
Reviewer	:	Nurul Bariyah, SE, MSi, Phd (SINTA ID 6041704; SCOPUS ID 57211642141) Dr. Sri Kurniawati, SE, MSc (SINTA ID 6690033) Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si (SINTA ID 6144221; SCOPUS ID 57809272600) Dr. Memet Agustiar, SE, MA (SINTA ID 6155000; SCOPUS ID 57211000318) Dr. Rosyadi, SE, MSi (SINTA ID 6721872) Dr. Bustami, SE, MSi (SINTA ID 6721808) Dr. Windhu Putra, SE, MSi (SINTA ID 6187202) Dr. Restiatun, SE, MSi (SINTA ID 6644328; SCOPUS ID 57194503964)
Editor	:	Metasari Kartika, S.E., M.E. Diah Arminingsih, SEI, ME
Kontributor	:	Reninta Dewi Nugraheni (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Pratiwi Kurniati, Abdul Hannan, Dini Lestary, Firdaus Achmad, Dinda Nursaini (IAIN Pontianak) Atin Sumaryanti, Hence Made Aryasa, Delta Fenisa, Giarti Astriana, Pratika Linanda (Universitas OSO) Ekawati, Rahmatullah Rizieq (Universitas Panca Bhakti)
Keynote Speaker	:	Irfan Syauqi Beik, Phd (IPB University)

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 5 Tahun 2022 dapat diterbitkan. Prosiding ini merupakan publikasi dari artikel peserta Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan V 2022 (SATIESP) dengan tema "Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Global". Kegiatan Seminar telah terlaksana dengan baik pada tanggal 2 Desember 2022, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Perekonomian dunia yang sebelumnya telah melemah karena Pandemi COVID-19, kembali dihadapkan pada berbagai goncangan, inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi China, perang Rusia-Ukraina.Inflasi yang tinggi mengakibatkan turunnya standar hidup, sehingga pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meningkatkan bantuan fiskal untuk mengatasi inflasi, pada saat yang sama, penerimaan keuangan negara-negara juga sedang mengalami penurunan akibat belum pulihnya kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan pemerintah. Berbagai teori pembangunan yang telah dirumuskan para ahli ekonomi dan sosial untuk menjawab permasalahan yang muncul juga masih menghadapi pro dan kontra di dunia empiris.

Mitigasi dan *recovery* demi menata masa depan berkelanjutan harus dilakukan. Segala upaya bersama perlu dilakukan termasuk oleh para akademisi melalui sumbangsih ide, gagasan, saran yang diaktualisasikan dalam Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka turut serta berperan menghadirkan berbagai bentuk solusi atau model filantropi dalam Ilmu Ekonomi.

"Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan V 2022 (SATIESP) merupakan salah satu ajang bagi para Akademisi untuk bertukar hasil penelitian dan PKM di bidang ilmu ekonomi dan praktek/ kebijakan pembangunan secara umum serta pengembangan berbagai sektor ekonomi. Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti bidang ilmu ekonomi dari Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah membahas berbagai bidang kajian dalam ilmu ekonomi, dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran akademisi dalam menata masa depan berkelanjutan. Hasil seminar kemudian dipublikasikan dalam bentuk Prosiding Nasional.

Penghargaan dan ucapan terima kasih teristimewa kami sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si., Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura dan Irfan Syauqi Beik, Ph.D dari IPB University yang telah berkenan menjadi *keynote speakers* dalam kegiatan ini. Apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemakalah dan pelaksana Seminar serta seluruh pihak yang turut serta menyelenggarakan dan mesukseskan acara seminar dan publikasi Prosiding ini.

Akhir kata, semoga kebermanfaatan Prosiding ini memberikan dampak seluas-luasnya serta memperoleh ridho dan catatan amal kebaikan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 22 Mei 2023
Dekan,

Dr. Barkah, S.E., M.Si.
NIP. 196502201990032004

KATA SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan ijin-Nya rangkaian kegiatan SATIESP V Tahun 2022 dapat dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Desember 2022 secara luring dan daring serta Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 5 Tahun 2022 dapat diterbitkan.

Pada SATIESP V 2022 dipresentasikan artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kalangan dosen dan mahasiswa dengan menghadirkan *keynote speakers* Prof. Dr. Hj. Jamliah, S.E., M.Si., Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura dan Irfan Syauqi Beik, Ph.D dari IPB University. Adapun topik tahun ini adalah Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Global.

Selain itu dilaksanakan lomba poster Pengabdian Kepada Masyarakat, Workshop CIBEST Model dan Bedah Buku Perekonomian Indonesia karya Dr. Windhu Putra dengan pembahas Prof.Dr.Ir. Rahmatullah Rizieq, M.Si, Guru Besar Universitas Panca Bhakti dan Dr. H. Helman Fachri, S.E., M.M. dari Universitas Muhamadiyah Pontianak. Kegiatan lomba poster PKM diadakan dengan dewan Juri pada kegiatan ini adalah Dr.Eng. Ferry Hadary, S.T., M.Eng. IPM dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Dr. Ir. Yohana S. K. Dewi, MP dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Artikel serta poster yang dipresentasikan pada kegiatan tersebut, selanjutnya dipublikasikan pada Prosiding SATIESP V.

Terselenggaranya rangkaian kegiatan dan publikasi Prosiding Nasional tidak terlepas dari dukungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu kami mengucapkan penghargaan atas kontribusinya dalam rangkaian kegiatan SATIESP V. Menyadari kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan kegiatan ini di masa yang akan datang. Besar harapan agar kegiatan ini membawa manfaat dan meningkatkan atmosfir akademis bagi civitas akademika serta masyarakat secara umum. Semoga Allah SWT berkenan memberikan ridho-Nya atas kegiatan ini. Aamiin.

Pontianak, 22 Mei 2023
Ketua Jurusan IESP FEB UNTAN

Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 196912011994032004

DAFTAR ISI

Pemberdayaan Masyarakat Kampong Wisata Caping Pontianak Manuju Destinasi Ekowisata ……... 1

Analisis Prediksi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Menggunakan Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) ……. 6

Pola Migrasi Internal Dan Potensi Penyebaran COVID-19 Di Kalimantan Barat …… 15

Hubungan Antara Keterampilan Berwirausaha, Pengetahuan Dan Kesuksesan Bisnis … 25

Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Barat 2016-2020……. 41

COVID-19 Pandemic, Poverty Alleviation And SDGS In Kalimantan Barat …….. 48

Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Metode RGEC dan SCNP Model Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2016-2020…….. 68

Efektifitas Kebijakan Ekonomi Di Kalimantan Barat ……... 87

Analisis Kerja Sama Sapi Potong Dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap ……... 97

Potensi Pendapatan Syariah Kota Pontianak……..... 122

Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan Dan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat……..... 137

Analisis Ketersediaan Beras Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Barat: Pendekatan Dinamika Sistem 154

Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pertambahan Jumlah Kendaraan 170

Bonus Demografi dan Capaian Indikator Pembangunan Sosial Ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak ……..…… 180

Platform Sebagai Alternatif Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pontianak ……..…… 193

Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Barat ……... 202

Eksternalitas Kegiatan Perusahaan Kelapa Sawit ……. 212

Determinan Ekspor Batubara Indonesia ……..…… 220

Perkembangan Credit Union Di Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia Tahun 2015-2019 ……..……..... 226

Perilaku Kreatif Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Barat ……... 232

Keunggulan Dinamis Dalam Perspektif *Resource Based View* Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan ……...…… 239

The Influence of Financial and Non-Financial Company Factors on the Stock Prices of Indonesian Banking Sector Firms……...…….. 250

Pemahaman Pegawai Bank Syariah Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah …… 261

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPONG WISATA CAPING PONTIANAK MENUJU DESTINASI EKOWISATA

Atin Sumaryanti[1]
Hence Made Aryasa [2]
Delta Fenisa [3]
Giarti Astriana [4]
Pratika Linanda[5]
[1,2,3,4,5)]*Universitas OSO, Indonesia*

ABSTRAK

Pengabdian yang dilaksanakan di Kampong Wisata Caping Pontianak memiliki tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tepian sungai Kapuas mengenai pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar serta menjaga keaslian alam dan budaya sebagai daya tarik wisata, lingkungan yang pada dasarnya memiliki pemandangan indah namun kurang bersih menjadi keprihatinan dan menggugah kami untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya destinasi wisata baru berbasis budaya kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk paket wisata termasuk kuliner, infrastruktur berupaa rumah budaya dan kampung yang aman, bersih dan kreatif bisa menjadi peranan penting bagi kampung lain yang akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Pariwisata sering dianggap sebagai salah satu penyumbang kerusakan terbesar bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur pendukungnya ditempat yang tidak semestinya. Ekowisata dipandang sebagai salah satu alternatif kebijakan yang dapat dijadikan solusi terhadap persoalan ini. Dengan pendekatan kualitatif, kajian ini dilakukan dengan tujuan merumuskan model ekowisata berkelanjutan berbasis nilai-nilai budaya, sosial dan kearifan lingkungan yang akan mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata di Pontianak. Dengan tersusunnya model kebijakan tersebut, kedepannya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan nasional di bidang pariwisata berkelanjutan pada khususnya serta mendukung kemandirian ekonomi di daerah.

Kata Kunci: *Destinasi, Wisata, Ekowisata*

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya. Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang di dapat dari biaya perjalanan wisata yang juga digunakan untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Di sisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan

[1] Email: sumaryantiatin@gmail.com

kebudayaan lokal serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demografi. Pergeseran konsep kepariwisataan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata buatan. Oleh karena itu, peluang ini selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan asing mengunjungi objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal.

Kegiatan ini lebih diarahkan untuk mengenalkan masyarakat tepian sungai kapuas terkait mengenai pengelolaan dan pengembangan kawasan tepian sungai kapuas menjadi daerah kawasan ekowisata yang di harapkan dapat memberikan dampak perekonomian bagi warga lokal setempat di tepian sungai kapuas hal ini sangat di mungkinkan menjadi daya tarik wisata mengingat tepian sungai kapuas masih menyimpan keasliaan alam dan adat serta budaya yang masih kental serta keunikan yang ada di daerah kawasan kampung caping

Pengenalan serta pengembangan desa wisata tepian sungai Kapuas dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis ekowisata yang di harapkan dapat menjaga ekosistem dan kelestarian serta kebersihan daerah desa setempat dan dapat memberikan alternatif kepada masyarakat di desa sekitar tepian sungai kapuas dalam menciptakan peluang produktifitas untuk menambah pendapatan. Membantu pelestarian lingkungan, baik parit-parit, sungai dan kawasan yang terdampak akibat pembuangan sampah rumah tangga yang tidak semestinya, agar masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki kebiasaan yang baik dalam menjaga dan mengelola serta melestarikan daerah kawasan sungai kapuas.

Membantu pengembangan konsep dan pemasaran berbasis digital marketing sehingga hasil kerajinan di desa kampung caping sehingga lebih menarik dan melakukan pelatihan serta pendampinggan terkait UKM (usaha kecil dan menengah) sehingga dapat menciptakan ide dan gagasan di dalam berwirausaha terkait pengembanggan produk baru. Mendorong pemerintah daerah untuk terus mendukung dan mebantu gerakan-gerakan yang melakukan perbaikan dalam pengelolaan eko wisata dimasyarakat.

Kajian pustaka diperoleh dari penelitian Barika (2009) dengan hasil kegiatan pembangunan yang mempunyai manfaat ganda *multiplier effect* secara ekonomi bagi pemerintah daerah melalu peningkatan pendapatan asli daerah dan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Penelitian Chaerunisa (2008) dengan hasil kawasan wisata pesisir yang cukup potensial di kota Tegal adalah kawasan Pantai Alam Indah (PAI) yang mengandalkan keindahan alam khususnya laut dan pantai sebagai aset wisata. Penelitian Irawati (2009) dengan hasil persoalan yang ada yaitu belum adanya investor yang benar-benar mau untuk menginvestasikan dananya guna membangun kawasan wisata karena rencana pemerintah belum dapat terealisasi.

2. METODA PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersifat seminar dialog-partisipatif dengan cara mengajak warga masyarakat Kelurahan Bansir Laut untuk terlibat langsung dan memahami lebih dalam kegiatan yang di lakukan Kegiatan ini langsung menghadirkan dosen FEB UNOSO dan pengelola kampong caping yang telah berhasil dalam melakukan pengelolaan desa wisata kampong caping guna mendapatan pemasukan tambahan bagi mereka di mana hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi komunitas lain yang belum bergabung.

Adapun jumlah peserta kegiatan yang hadir yaitu, 30 orang terdiri dari 8 anggota relawan kampong caping, 14 masyarakat Kelurahan Bansir Laut yang belum bergabung di desa wisata, 3

mahasiswa Universitas OSO dan 5 Dosen Universitas OSO. Dalam seminar ini, narasumber yang didatangkan adalah Praktisi Kampung Caping yang memiliki pengalaman pratik dan keahlian yang telah teruji dibidangnya, sehingga dapat menjadi *lesson learn* dan juga memberikan inspirasi serta memotivasi munculnya gerakan kampung wisata di komunitas masing-masing. Adapun narasumber yang dipilih adalah Beny Tan Heri, S.Hut. (Ketua Pengelola Kampung Caping, yang mengembangkan Kampung Caping yang berbasis Ekowisata, skala individu, kelompok dan komunitas serta bekerjasama dengan instansi-instansi lain) dan Hence Made Aryasa, SE,M.M. (Dosen di Universtas OSO selaku penyampai materi mengenai pemberdayaan produk dan UMKM serta Setrategi pemasaran yang di terapkan melalui media sosial yang kekinian).

Pemilihan narasumber dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam produksi dan tehnis pemasaran, serta memberikan pandangan lain mengenai peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pengembangan penjualan kerajinan yang dapat di optimalkan sesuai sumber daya alam yang ada sehingga lebih optimal dan mempunyai nilai jual. Kegiatan seminar ini terdiri dari dua narasumber dengan menampilkan presentasi narasumber dan sesi diskusi dimasing-masing sesi presentasi. Pada sesi pertama narasumber menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan pengenalan Kampung Caping, pengelolaan Desa Ekowisata yang dilakukan kampung caping serta memberikan pemaparan atas hasil dari penerapan desa berbasis wisata. Sesi kedua narasumber menyampaikan materi mengenai tehnis pemberdayaan hasil bumi dan hasil kerajinan masyarakat setempat serta pentingnya pemberdayaan UMKM menuju desa yang berbasis Ekowisata serta tehnis dan setrategi pemasaran kerajinan yang dihasilkan Kampung Caping melalui media sosial yang lebih kekinian sehingga diharapkan dapat memberikan dampak besar pada pemasaran kerajinan kelak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar Kelurahan Bansir Laut kecamatan Pontianak Tenggara dengan kriteria yang wilayah yang sudah memahami dan mengetahui akan pentingnya ekowisata dan menjaga kebersihan lingkungan sungai dan permukiman tempat tinggal masing – masing. Diharapkan wilayah yang belum memilki kesadaran akan menjaga lingkungan dapat saling bertukar informasi dan saling memberikan motivasi akan pentingnya menjaga lingkungan demi mewujudkan desa yang berbasis Ekowisata yang pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga setempat, setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan serta pengetahuan akan UKM yang di harapkan dapat memberdayakan dan mengoptimalkan hasil alam dan kerajinan masyarakat lokal di sekitaran Kampung Wisata Caping.

3.2 Pembahasan

Kegiatan pertama menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan pengenalan Kampung Wisata Caping, pengelolaan Desa Ekowisata yang dilakukan kampung caping serta memberikan pemaparan atas hasil dari penerapan desa berbasis wisata, kegiatan kedua menyampaikan materi mengenai tehnis pemberdayaan hasil bumi dan hasil kerajinan masyarakat setempat serta pentingnya pemberdayaan UKM menuju desa yang berbasis Ekowisata serta tehnis dan setrategi pemasaran kerajinan yang dihasilkan Kampung Wisata Caping melalui media sosial yang lebih kekinia sehingga diharapkan dapat memberikan dampak besar pada pemasaran kerajinan kelak, pemberdayaan masyarakat ini menjadi sebuah tantangan yang bukan hanya harus diselesaikan oleh pemerintah setempat tetapi hal ini juga harus diselesaikan bersama dengan melibatkan masyarakat sekitar karena

berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah. Kesadaraan bersama akan memberikan dampak besar bagi pengembangan desa tepian sungai kapuas yang berbasis Ekowisata.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Komunitas Kampung Caping Pontianak diyakinin dapat mendorong masyarakat menjadi agen perubahan dilingkungan mereka. Dengan adanya pengenalam lebih luas mengenai pengelolaan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestariaan alam diharapkan kedepannya masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kelestarian alam tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu *alternative income* seperti yang sudah dikembangkan oleh Kampung Caping.

4.2 Rekomendasi

Melakukan pelatihan pemasaran produk untuk usaha kecil menengah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Serta memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran dan memberikan keterampilan kepada pemilik usaha kecil menengah dalam meningkatkan produknya. Meningkatkan kunjungan wisata dengan melalukan promosi di media soaial karena masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan Kampung Wisata Caping dan diperlukannya ciri khas khusus yang menjadi daya tarik wisatawan. Meningkatkan perekonomian warga sekitar Kampung Caping dengan menjual kuliner dengan ciri khas khusus seperti makanan khas Pontianak yang hampir tidak bisa di dapatkan di tempat makan manapun namun di Kampung Wisata Caping mudah untuk mendapatkannya dan memanfaatkan halaman rumah-rumah warga untuk area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A Putu I. 2017. Jurnal Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisr di Kabupaten Buleleng. Anonim, (2020). RKPD Provensi Kalimantan Barat Tahun 2020. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemerintah Daerah Provensi Kalimantan Barat tahun 2020.Barikan,2009," Kajian Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Bengkulu Studi Kasus Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Tapak Paderi, : Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB.

Chaerun Nisa, Merlian, 2008 " Pengaruh Aktifitas Pariwisata terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Wisata pada Obyek Wisata PAI, Kabupaten Tegal; Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Undip.

Damanik, Janianto dan Helmut F Webwr, 2006" Perencanaa Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi Kerjasama Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit Andi, Yogyakarta.

D Erlin, S Mochamma, R Heru. t.t. Jurnal Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampung Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Pravasanti, Suhesti. (2020). Bank Sampah Untuk Peningkatan Pendapatan Ibu Rumah Tangga. Jurnal BUDIMAS, Vol. 02, No. 01, 2020.

Dirawan, Gurfan Darma, 2006 "Perencanaan Ekowisata (Studi Kasus Suaka Margasatwa Mampie Lampoko) Jurna Kepariwisatan Indonesia.

Irawati, Eka Putra dan Rani, 2009, "Kajian Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Padang (Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Padang-Padang Bay City)' Penelitian DIPA Universitas Andalas.

Karomah, Papti, Marwati, dan Kepti Ariatun, 2007, 'Kesiapan Masyarakat di Obyek Wisata Ciater, Jawa Barat' Jurnal Kepariwisataan Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Vol. 3 No. 4 Desember 3-5.

Kurnianto, Imam Rudi, 2010, 'Pengembangan Ekowisata (ecoturism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal' Tesis, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Kurniati, Cucu, Endang Kamesty Sinaga, Ayu Nurvitsari, Nurkomariah, 'Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kuon Progo, D.I. Yogyakarta, Prosiding PKM-CSR, Vol. 4 (2021) e-ISSN:2655-350.

Analisis Prediksi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Menggunakan Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

Faishol Luthfi[1]
Aya Sofia A.[2]
Diah Arminingsih[†]
Abd. Mubaraq[‡]
M. Iman Taufik[§]
Achmad[6]
[1,2,3,4,5,6)]*Universitas Tanjungpura, Indonesia*

ABSTRACT

The condition of the capital market which is sensitive to various events causes the need for a model to help predict the development of the capital market in the future. The purpose of this study is to analyze and predict the development of the Islamic capital market in Indonesia. This study uses a quantitative approach with the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model. The variable used in this study is the market capitalization value of the Jakarta Islamic Index (JII). The data used is time series data with monthly periods from 2011 to 2022. The results show that the ARIMA model formed to predict the development of the Islamic capital market in Indonesia is the ARIMA model (1,1,1). The estimation results explain that the Islamic capital market in Indonesia is developing. This can be seen from the trend in the market capitalization value of JII which has increased from 2011 to 2022. In addition, an increase in the market capitalization value of JII will still occur in 2023 and 2024.

JEL: D53, E44, G23

Keywords*: Islamic Capital Market, ARIMA*

1. PENDAHULUAN

Investasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan di era saat ini. Investasi secara umum adalah pengumpulan dana atau uang yang kemudian disimpan untuk digunakan pada masa depan atau yang akan datang (Fadilla, 2018). Investasi digunakan juga untuk berjaga-jaga terhadap adanya kondisi yang tidak diharapkan. Investasi dianjurkan dalam Islam seperti dalil berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahan arti: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al Hasyr:18).

Dalil tersebut menjelaskan bahwa sorang muslim dalam kehidupannya harus memperhatikan kondisi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan investasi dimana investasi ditujukan sebagai bekal. Meskipun

[1] Email: faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id

investasi adalah sebuah anjuran dalam Islam, pelaksanaan investasi ataupun transaksi keuangan yang menjadi aktivitas seorang muslim tentu harus sesuai dengan aturan-aturan Islam, misalnya tidak melakukan transaksi dengan cara yang bathil. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan terkait hal tersebut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan arti: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (QS. Al Baqarah:188).

Secara umum, investasi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia terbagi menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim umumnya menginvestasikan uang/harta ke dalam beberapa bentuk investasi seperti deposito di perbankan syariah ataupun berinvestasi saham di pasar modal. Di Indonesia, pasar modal dibedakan menjadi pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Perbedaan keduanya terletak pada aktivitas di pasar rmodal yang mana pasar modal syariah mewajibkan agar seluruh aktivitas di pasar modal tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip Islam.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tergolong pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instrumen investasi berbasis syariah yang diperjualbelikan di dalam pasar modal seperti sukuk, reksa dana, saham, dan lain sebagainya. Saham merupakan salah satu instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal dan diminati oleh investor muslim dikarenakan prinsipnya yang sesuai Islam serta mampu menghasilkan *return* yang tinggi yaitu melalui dividen dan *capital gain*. Salah satu indeks saham syariah yang ada di Indonesia yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII). JII juga merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia.

Saham merupakan instrumen yang rentan perubahan dikarenakan berbagai peristiwa, baik lingkup mikro seperti pada internal perusahaan ataupun lingkup yang lebih luas yaitu kondisi makroekonomi. Harga saham akan berfluktuasi sesuai dengan informasi positif maupun negatif yang terdapat di pasar. Informasi positif akan berakibat pada harga saham yang meningkat sedangkan informasi yang negatif berakibat pada turunnya harga saham. Contoh informasi di lingkup internal perusahaan yang mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain pembagian dividen, merger akuisisi, dan lain sebagainya sedangkan informasi skala makro diperoleh dari kebijakan pemerintah seperti stabilitas ekonomi, krisis finansial global, maupun kondisi politik suatu negara (Sukmaningrum, Madyan, & Hendratmi, 2019).

Kondisi pasar modal yang sensitif dengan berbagai peristiwa maka diperlukan sebuah model untuk membantu memprediksi perkembangan pasar modal syariah ke depannya yaitu *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA). ARIMA adalah suatu metode statistik yang umum digunakan untuk memprediksi variabel secara cepat, sederhana, dan akurat karena hanya memerlukan data variabel yang akan diolah. Model yang dipilih akan diuji lagi dengan data masa lampau untuk melihat kemampuan model dalam merepresentasikan keakuratan data (Hartati, 2017). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prediksi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menggunakan Model ARIMA.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pasar Modal Syariah

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek serta perusahaan publik dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memperdagangkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan berbagai produk turunannya. Contoh instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah Surat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Treasury Bill, Commercial Paper Notes*, *Banker's Acceptence*, dan lain-lain (Faozan, 2013).

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Mardi, 2015). Prinsip instrumen dalam pasar modal syariah tentu berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperjualbelikan di dalam pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang telah memenuhi kriteria-kriteria syariah. Begitu juga instrumen keuangan yang lain seperti misalnya obligasi. Obligasi yang diterbitkan juga harus menggunakan prinsip syariah, seperti *mudharabah, murabahah,, musyarakah, istishna', ijarah,* maupun *salam*.

2.2 Saham dan Kapitalisasi Pasar

Saham adalah tanda bukti keikutsertaan dalam kepemilikan modal suatu perusahaan. Fahmi, (2018) menjelaskan pengertian saham yaitu: 1. Tanda bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, 2. Kertas yang di dalamnya tertulis dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan serta diikuti dengan hak dan kewajiban para pemegangnya, 3. Persediaan yang siap untuk dijual. Kapitalisasi pasar adalah nilai pasar saham yang dikeluarkan/diterbitkan suatu emiten (Raharjo, 2006). Secara sederhana, kapitalisasi pasar adalah nilai pasar dari semua saham yang beredar. Penghitungannya yaitu melalui hasil perkalian antara harga saham saat ini dengan total jumlah saham yang beredar.

2.3 Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah pertama yang ada di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di JII berjumlah 30 saham dimana keseluruhannya merupakan saham syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki otoritas untuk menyeleksi saham-saham syariah yang menjadi konstituen JII dan evaluasinya dilakukan pada bulan Mei dan November setiap tahunnya (Sania, 2021). Konstituen JII merupakan hasil seleksi dari konstituen JII70 yang diurutkan berdasarkan *market capitalization* dan *trading market* selama 12 bulan dengan sistem periodik review setiap 6 bulan (Dewi, Solihin, Hariyadi, Nurfitriyani, & Heriyanto, 2022).

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis prediksi perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kapitalisasi pasar dari Jakarta Islamic Index (JII). Kapitalisasi pasar JII merupakan proksi dari perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Kapitalisasi mampu menggambarkan kondisi pasar karena nilai kapitalisasi saham yang meningkat menunjukkan pertumbuhan positif dari suatu pasar modal. Pasar modal yang tumbuh positif tentu berimplikasi pada peningkatan sumber modal yang ada di dalam negeri. Dana dari sumber modal tersebut yang digunakan untuk pembangunan ekonomi (Rosa & Idward, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis data *time series* dengan rentang waktu bulanan dari tahun 2011 hingga 2022 sehingga diperoleh 144 data.

Penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) yang diolah menggunakan software Eviews 9.0. Langkah-langkah dalam metode ARIMA (Hartati, 2017) yaitu:

1. Langkah 1 (Identifikasi Model): Model ARIMA diterapkan pada data *time series* yang stasioner.
2. Langkah 2 (Identifikasi ACF dan PACF): Tahap ini bertujuan untuk menentukan nilai d, jumlah nilai lag residual (q) dan nilai lag dependen (p) untuk model estimasi ARIMA (p,d,q).
3. Langkah 3 (Pemilihan Model Terbaik): Setelah menemukan model yang terbaik maka tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter untuk *Auto Regressive* (AR) dan *Moving Average* (MA).
4. Langkah 4 (*Diagnostic Checking*): Tahap ini adalah untuk menguji model yang telah ditetapkan.
5. Langkah 5 (*Forecasting*): Prediksi dilakukan pada tahap ini.

Model ARIMA dibedakan menjadi model AR (*Auto Regressive*), MA (*Moving Average*), ARMA (*Auto Regressive Moving Average*), dan ARIMA (*Auto Regressive Moving Average*) (Wei, 1994):

$$\phi_p(B)\dot{Z}_t = \alpha_t \quad \text{.....} \quad (1)$$

Di mana $\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \ldots - \phi_p B^p)$..... (2)

Keterangan:
$\dot{Z}_t$ = nilai variabel pada waktu ke-t
ϕ_p = koefisien regresi untuk i = 1,2,3,…p
α_t = *white noise*
p = ordo AR
B = *operator backward*

Model MA, yaitu:

$$\dot{Z}_t = \theta(B)\alpha_t, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

Di mana $\theta(B) = (1 - \theta_1 B - \ldots - \theta_q B^q)$ …… (4)

Keterangan:
$\dot{Z}_t$ = nilai variabel pada waktu ke-t
θ_t = koefisien regresi untuk i = 1,2,3,…q
α_t = *white noise*
q = ordo
B = *operator backward*

Model ARMA, yaitu:

$$\phi_p(B)\dot{Z}_t = \theta_q(B)\alpha_t \ldots\ldots\ldots\

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif terhadap data nilai kapitalisasi pasar JII dilakukan agar memperoleh gambaran terkait data. Hasil analisis deskriptif yaitu sebagai berikut:

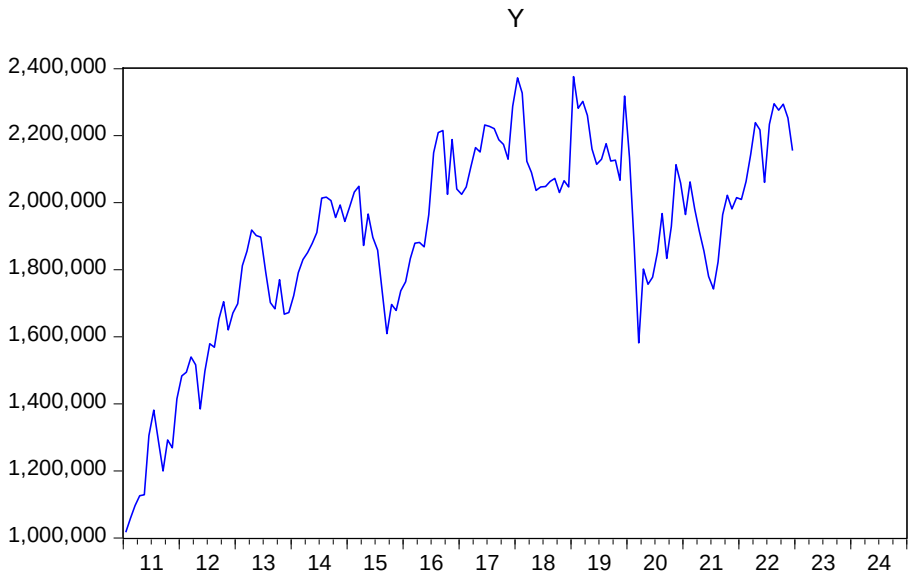

Gambar 1. Grafik Tren Kapitalisasi Pasar JII

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Mean	1899114.
Median	1964724.
Maximum	2376039.
Minimum	1016725.
Std.Dev	297403.4
Observation	144

Gambar 1 menjelaskan bahwa data kapitalisasi pasar JII mengalami fluktuasi dari Januari 2011 hingga Desember 2022 tetapi memiliki tren meningkat. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Tabel 1 menjelaskan hasil analisis deskriptif data di mana dapat disimpulkan bahwa nilai kapitalisasi pasar JII terendah adalah sebesar 1.016 triliun rupiah sedangkan nilai kapitalisasi pasar JII tertinggi yaitu sebesar 2.376 triliun rupiah. Rata-rata nilai kapitalisasi pasar JII yaitu sebesar 1.899 triliun rupiah.

Tabel 2. Hasil *Unit Root Test*

Unit Root Test		Level		1st Difference	
		t-Statistic	Prob.*	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller Test Statistic		-3.040295	0.0336	-12.16882	0.0000
Test Critical value	1% level	-3.476472		-3.476805	
	5% level	-2.881685		-2.881830	
	10% level	-2.577591		-2.577668	

Tahap awal ARIMA yaitu *unit root test* untuk menganalisis stasioneritas data. Tabel 2 menjelaskan hasil *unit root test.* Berdasarkan Tabel 2 maka diperoleh analisis bahwa hasil output dari uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller)* memiliki nilai probabilitas yaitu 0,0000 < 0,05 (signifikan). Selain itu nilai *t-statistic* uji ADF juga menunjukkan nilai -12,16882 yang mana lebih besar jika dibandingkan dengan nilai α = 1% yaitu -3,476805, α = 5% yaitu -2,881830 dan α = 10% yaitu -2,577668 sehingga data dinyatakan stasioner pada *1st Difference*.

Tabel 3. Hasil *Correlogram* Data *1st Difference*

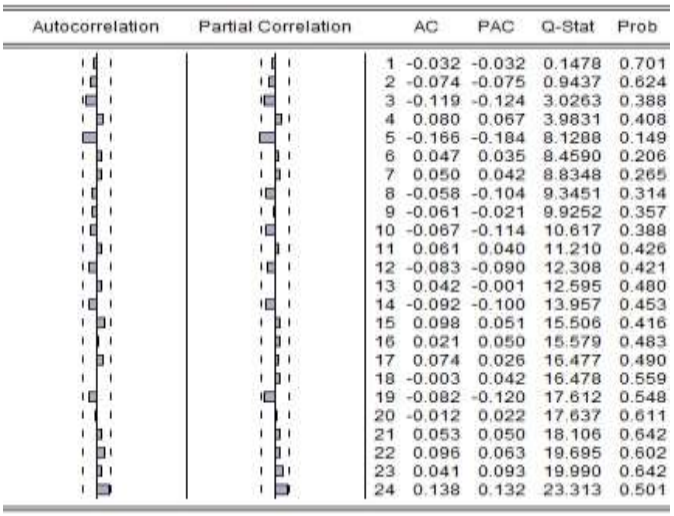

	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	-0.032	-0.032	0.1478	0.701
2	-0.074	-0.075	0.9437	0.624
3	-0.119	-0.124	3.0263	0.388
4	0.080	0.067	3.9831	0.408
5	-0.166	-0.184	8.1288	0.149
6	0.047	0.035	8.4590	0.206
7	0.050	0.042	8.8348	0.265
8	-0.058	-0.104	9.3451	0.314
9	-0.061	-0.021	9.9252	0.357
10	-0.067	-0.114	10.617	0.388
11	0.061	0.040	11.210	0.426
12	-0.083	-0.090	12.308	0.421
13	0.042	-0.001	12.595	0.480
14	-0.092	-0.100	13.957	0.453
15	0.098	0.051	15.506	0.416
16	0.021	0.050	15.579	0.483
17	0.074	0.026	16.477	0.490
18	-0.003	0.042	16.478	0.559
19	-0.082	-0.120	17.612	0.548
20	-0.012	0.022	17.637	0.611
21	0.053	0.050	18.106	0.642
22	0.096	0.063	19.695	0.602
23	0.041	0.093	19.990	0.642
24	0.138	0.132	23.313	0.501

Tabel 3 menjelaskan bahwa pada kolom ACF dan PACF terjadi *cuts off* setelah lag 5. Untuk menentukan nilai AR (p) maka digunakan data PACF (*Partial Correlation*) sedangkan data ACF (*Auto Correlation*) untuk menentukan MA (q). Selain itu, terdapat juga diferensiasi pada tingkat pertama (d=1). Untuk menentukan model sementara maka perlu tambahan informasi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter AR (p) dan MA(q)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7435.403	4961.433	1.498640	0.1364
AR(1)	-0.659406	0.230243	-2.863956	0.0049
AR(2)	-0.452133	0.306938	-1.473042	0.1431
AR(3)	-0.238472	0.315982	-0.754700	0.4518
AR(4)	0.419723	0.273147	1.536617	0.1268
AR(5)	0.526435	0.219387	2.399572	0.0178
MA(1)	0.628118	0.232269	2.704271	0.0078
MA(2)	0.347884	1.561338	0.222811	0.8240
MA(3)	0.048394	1.260738	0.038386	0.9694
MA(4)	-0.497508	0.878598	-0.566252	0.5722
MA(5)	-0.741837	1.175304	-0.631187	0.5290
SIGMASQ	7.90E+09	1.18E+10	0.666851	0.5060

Tabel 4 menjelaskan bahwa signifikansi ordo hanya terdapat pada ordo AR(1), AR(5), dan MA(1) karena nilai probabilitas yang ditunjukkan kurang dari *alpha* (0,05). Untuk itu, perkiraan model ARIMA (p,d,q) yang terbentuk adalah ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1), ARIMA (1,1,1), ARIMA (5,1,0), ARIMA (5,1,1) sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Model ARIMA (p,d,q) Terbaik

Model	Parameter Model	Koefisien	Probabilitas
ARIMA (1,1,0)	ϕ_1	7978.628	0.6077
ARIMA (0,1,1)	θ_1	-0.038089	0.5370
ARIMA (1,1,1).	ϕ_1	0.801776	0.0000
	θ_1	-0.894832	0.0000
ARIMA (5,1,0)	ϕ_5	-0.166760	0.1469
ARIMA (5,1,1)	ϕ_5	-0.165073	0.1655
	θ_1	-0.015526	0.8065

Berdasarkan Tabel 5 maka hanya ARIMA (1,1,1) yang nilai probabilitasnya di bawah *alpha* (0,05) sehingga model terbaik telah diperoleh. Tahap selanjutnya adalah Uji Diagnosa Residual untuk menguji apakah terdapat masalah autokorelasi pada residual data yang ada. Uji Diagnosa Residual dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Residual Model ARIMA (1,1,1)

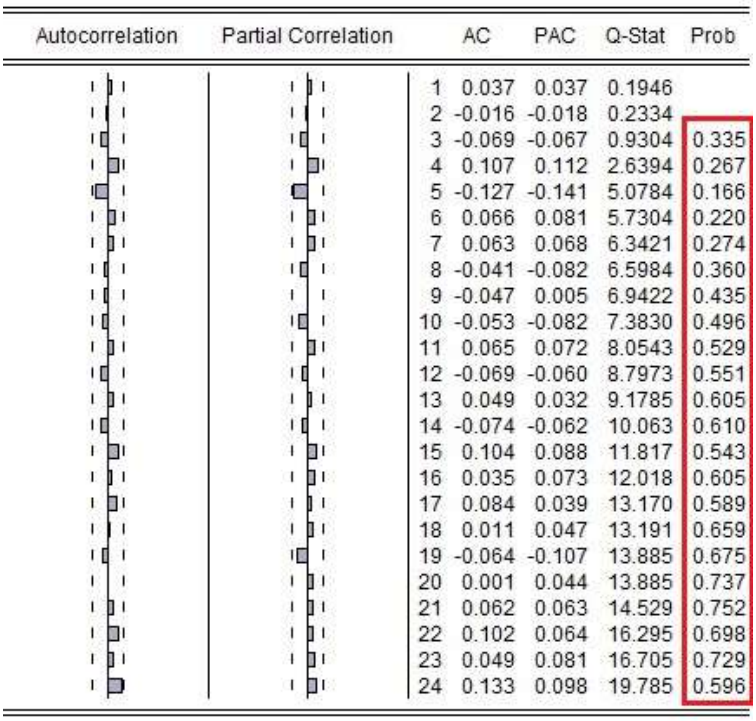

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.037	0.037	0.1946	
		2	-0.016	-0.018	0.2334	
		3	-0.069	-0.067	0.9304	0.335
		4	0.107	0.112	2.6394	0.267
		5	-0.127	-0.141	5.0784	0.166
		6	0.066	0.081	5.7304	0.220
		7	0.063	0.068	6.3421	0.274
		8	-0.041	-0.082	6.5984	0.360
		9	-0.047	0.005	6.9422	0.435
		10	-0.053	-0.082	7.3830	0.496
		11	0.065	0.072	8.0543	0.529
		12	-0.069	-0.060	8.7973	0.551
		13	0.049	0.032	9.1785	0.605
		14	-0.074	-0.062	10.063	0.610
		15	0.104	0.088	11.817	0.543
		16	0.035	0.073	12.018	0.605
		17	0.084	0.039	13.170	0.589
		18	0.011	0.047	13.191	0.659
		19	-0.064	-0.107	13.885	0.675
		20	0.001	0.044	13.885	0.737
		21	0.062	0.063	14.529	0.752
		22	0.102	0.064	16.295	0.698
		23	0.049	0.081	16.705	0.729
		24	0.133	0.098	19.785	0.596

Berdasarkan Tabel 6 maka dapat dijelaskan bahwa model ARIMA (1,1,1) tidak memiliki masalah autokorelasi yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas seluruhnya melebihi tingkat signifikansi *alpha* yaitu 5% (> 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa residual merupakan *white noise* sehingga bisa dilanjutkan ke tahap *forecasting*. Tabel 7 menjelaskan mengenai hasil estimasi parameter untuk Model ARIMA (1,1,1).

Tabel 7. Hasil Estimasi Parameter ARIMA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7354.778	4453.638	1.651409	0.1009
AR(1)	0.801776	0.155560	5.154119	0.0000
MA(1)	-0.894832	0.125844	-7.110620	0.0000
SIGMASQ	8.52E+09	7.88E+08	10.80439	0.0000

Tabel 7 menjelaskan bahwa nilai konstanta mempunyai probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa konstanta tidak signifikan. Hal ini tidaklah menjadi sebuah masalah dan diperbolehkan. Rosyidah & Sukmana (2019) menjelaskan bahwa dalam model ARIMA, konstanta yang tidak signifikan diperbolehkan, yang terpenting adalah koefisien θ dan ϕ. Persamaan model ARIMA dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\dot{Z}_t = \dot{Z}_{t-1} + \phi_1 \dot{Z}_{t-1} + \alpha_t + \emptyset_1 \alpha_{t-1} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (7)$$

$$\dot{Z}_t = \dot{Z}_{t-1} + 0{,}801776\, \dot{Z}_{t-1} + \alpha_t - 0{,}894832 \alpha_{t-1} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (8)$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah bahwa nilai kapitalisasi pasar JII pada saat t sama dengan nilai kapitalisasi pasar JII pada 1 periode sebelumnya yang ditambah dengan 0,801776 kali nilai kapitalisasi pasar JII pada 1 periode sebelumnya dengan ditambah *white noise* dan dikurang dengan 0,894832 kali nilai error pada 1 periode sebelumnya.

Tabel 8. Hasil Prediksi Kapitalisasi JII Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Bulan	Jumlah (Milyar Rupiah)	Tahun	Bulan	Jumlah (Milyar Rupiah)
2023	Januari	2097414.	2024	Januari	2185672.
	Februari	2104769.		Februari	2193026.
	Maret	2112124.		Maret	2200381.
	April	2119479.		April	2207736.
	Mei	2126833.		Mei	2215091.
	Juni	2134188.		Juni	2222446.
	Juli	2141543.		Juli	2229800.
	Agustus	2148898.		Agustus	2237155.
	September	2156253.		September	2244510.
	Oktober	2163607.		Oktober	2251865.
	November	2170962.		November	2259219.
	Desember	2178317.		Desember	2266574.

Tabel 8 menjelaskan bahwa pada tahun 2023 hingga 2024, nilai kapitalisasi pasar JII diprediksi akan mengalami kenaikan. Prediksi kenaikan kapitalisasi pasar JII pada Januari 2023 sebesar 2.097 triliun rupiah sedangkan pada Desember 2024 sebesar 2.266 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kenaikan dari Januari 2023 hingga Desember 2024 sebesar 8,06 persen. Kapitalisasi pasar sendiri menunjukkan jumlah aset yang terdapat di pasar. Kapitalisasi pasar JII yang semakin besar menunjukkan adanya pertumbuhan positif dari sektor pasar modal syariah di Indonesia. Sektor pasar modal syariah yang semakin berkembang akan membuat sumber modal dalam negeri pun juga akan meningkat. Sumber modal ini yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan ekonomi sehingga perekonomian dapat berkembang.

5. SIMPULAN

Model ARIMA yang terbentuk untuk memprediksi perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia adalah ARIMA (1,1,1). Hasil prediksi juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah yang ada di Indonesia semakin berkembang yang dibuktikan dengan tren nilai kapitalisasi pasar JII yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2022. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa masih akan terjadi peningkatan kapitalisasi pasar JII di tahun 2023 dan 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, C. K., Solihin, D., Hariyadi, R. M., Nurfitriyani, & Heriyanto. (2022). *Jakarta Islamic Index Paska Pandemi*. *23*(1), 41–50.

Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *ISLAMIC BANKING*, *3*, 45–56.

Fahmi, I. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan : Teori Dan Soal Jawab*. Bandung: CV. Alfabeta.

Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 287. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310

Hartati, H. (2017). Penggunaan Metode Arima Dalam Meramal Pergerakan Inflasi. *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi*, *18*(1), 1–10. https://doi.org/10.33830/jmst.v18i1.163.2017

Mardi. (2015). Pasar Modal Syariah. *Edunomic*, *3*(1), 137–148.

OJK. (2022). Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Retrieved January 30, 2022, from https://ojk.go.id website: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx#:~:text=Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks,14 persen di tahun 2022.

Raharjo, S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: Gramedia.

Rosa, Y. Del, & Idward. (2018). Pengaruh Kapitalisasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Menara Ekonomi*, *IV*(3), 110–120.

Rosyidah, R., & Sukmana, R. (2019). Aplikasi Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) Pada Peramalan Stabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *5*(3), 200. https://doi.org/10.20473/vol5iss20183pp200-215

Sania, M. (2021). Saham yang Konsisten Masuk JII dalam 10 Tahun Terakhir. Retrieved January 29, 2023, from https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/saham-yang-konsisten-masuk-jii-dalam-10-tahun-terakhir/

Sukmaningrum, P. S., Madyan, M., & Hendratmi, A. (2019). Reaksi Pasar Saham Yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index (Jii) Terhadap Pengumuman Penetapan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, *5*(1), 1. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10087

Wei, W. W. S. (1994). *Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods*. Redwood City: Addison Wesley.

Pola Migrasi Internal dan Potensi Penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat

Fariastuti Djafar*
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to describe the relationship between internal migration patterns and the potential for the spread of the COVID-19 virus in West Kalimantan. The study used secondary data, which was analyzed descriptively. The study results show that every district/city in West Kalimantan has confirmed cases of COVID-19 with varying numbers of cases. Pontianak and Kubu Raya have great potential for COVID-19 cases contributed by returning migrants because these two areas have a large number of outgoing migrants compared to other districts/cities in West Kalimantan.

***Keywords**: Internal-migration, COVID-19, West Kalimantan.*

1. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo mengumumkan dua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Dua pasien tersebut, yaitu seorang wanita berusia 31 tahun disebut dengan kasus 01, dan ibunya yang berusia 61 tahun disebut dengan kasus 02. Kasus 01 tertular COVID-19 dari seorang warga Jepang yang tinggal di Malaysia, yang ditemuinya di satu klub di Jakarta pada 14 Februari 2020. Kasus 01 mulai berobat rawat jalan pada 16 Februari karena mengalami batuk, demam dan lemas, dengan ditemani kasus 02 yang kemudian juga mengalami sakit pada 20 Februari. Keduanya dirawat di rumah sakit pada 26 Februari. Pada 28 Februari, kasus 01 menginformasikan kepada dokter bahwa temannya yang bertemu di klub terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil uji laboratorium, kasus 01dan 02 terkonfirmasi positif COVID-19 (Tirto id, 2020a).

Sebelum ditemukannya kasus 01 dan 02, empat peneliti dari Harvard University memprediksi bahwa Indonesia setidaknya telah memiliki lima kasus impor COVID-19 (de Salazar dkk, 2020). Kasus tersebut dimungkinkan terjadi karena hubungan yang intensif antara Indonesia dan China, termasuk Wuhan sebagai pusat wabah COVID-19 melalui transportasi udara. Namun, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menganggap hasil penelitian tersebut sebagai "penghinaan" terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani kasus COVID-19 (The Jakarta Post, 2020).

Sampai dengan 7 April 2020, tercatat 2.738 kasus positif COVID-19 di Indonesia yang tersebar di 32 provinsi. Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak dengan 1.369 kasus termasuk 135 kasus baru. Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki 10 kasus, yang lebih sedikit dibandingkan Kalimantan Timur (31 kasus), Kalimantan Tengah (20 kasus), Kalimantan Selatan (18 kasus) dan Kalimantan Utara (15 kasus) (Kompas, 2020). Kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalbar terdeteksi pada 14 Maret (kasus 01). Kasus 01 adalah warga Kalbar yang pergi ke Kuala Lumpur pada 8 Februari dan kembali pada 15 Februari melalui Bandara Supadio. Warga tersebut mengalami pilek dan batuk mulai 29 Februari dan dirawat di suatu rumah sakit swasta pada 4 Maret. Hasil uji swab pada 14 Maret,

* Email : fariastuti@ekonomi.untan.ac.id

mengonfirmasi kasus 01 positif COVID-19 yang menjadi negatif pada 26 Maret (Liputan 6, 27 Maret 2020).

Sampai dengan 8 April 2020, Kalbar memiliki sebanyak 69 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang di antaranya 36 PDP terkonfirmasi negatif dan 11 PDP meninggal dunia (Dinas Kesehatan Kalbar, 2020). Dari seluruh PDP yang meninggal, uji cepat telah dilakukan terhadap 8 PDP dan 2 PDP meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 (Kompas, 2020). Gubernur Kalbar akhirnya menggolongkan kasus COVID-19 di Kalbar sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan Surat Edaran 18 Maret (Tirto id, 2020b).

Mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan salah satu faktor yang berpotensi menularkan COVID-19. Beberapa negara bahkan melakukan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) yang berlaku untuk sebagian atau seluruh wilayah dalam negara dalam rangka membatasi mobilitas penduduk. Kasus 01 di Indonesia adalah warga yang bertemu dengan pengunjung warga asing yang saat itu belum mengetahui bahwa dirinya positif COVID-19 sementara kasus 01 di Kalbar adalah warga yang baru kembali dari Malaysia. Pasien COVID-19 pertama yang meninggal dunia di Kalbar (Pontianak) menderita sakit sekembalinya dari Putussibau, Kapuas Hulu. Kematian berikutnya terjadi pada orang yang memiliki riwayat perjalanan ke tempat yang sama. Namun, kematian tersebut terjadi di rumah dan yang bersangkutan tidak pernah menjalani uji laboratorium COVID-19 (Tirto id, 2020b).

Pemerintah Indonesia menghimbau para migran terutama yang bertempat tinggal di daerah pusat wabah seperti Jakarta dan kota besar lainnya, untuk tidak mudik ke kampung halaman sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus ke daerah asal. Pemerintah juga menghimbau Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak kembali ke Indonesia walau negara seperti Malaysia justru memperbolehkan PMI kembali ke negara asalnya untuk meringankan beban negara tersebut pada saat migran sudah tak memiliki pekerjaan. Pengelola kampus di ibukota provinsi juga melarang mahasiswa untuk pulang ke kampung halaman dengan alasan yang sama. Namun, pengontrolan migran kembali tidak selalu mudah dilakukan terutama bagi mereka melalui jalan darat dan jalan laut, baik secara legal maupun ilegal. Pemerintah menghadapi dilemna. Pada satu sisi, pemerintah menganjurkan migran untuk tidak kembali ke tempat asalnya namun pada sisi yang lain pemerintah tidak dapat menjamin kelangsungan hidup migran di tempat tujuan.

Penelitian tentang penyakit menular di kalangan migran cenderung dilakukan di tempat tujuan (Peer, 2015) sementara penelitian tentang hubungan antara migrasi kembali dan kesehatan masih terbatas (Davies dkk, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan antara pola migrasi internal dan potensi penyebaran virus COVID -19 di Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

Migran kembali adalah bagian dari proses migrasi yang merupakan kembalinya seseorang ke tempat asal apakah lintas wilayah dalam suatu negara atau dari negara tujuan ke negara asal (IOM, 2004). Menurut teori ekonomi neoklasik, migrasi kembali disebabkan oleh pertimbangan rasional karena tidak terpenuhinya harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi di tempat tujuan (Todaro,1969).

Pandangan ini dilengkapi oleh teori strukturalis yang menjelaskan bahwa migrasi kembali disebabkan adanya faktor positif, negative dan netral di tempat asal dan di tempat tujuan serta factor rintangan antara (Lee,1966). Untuk di tempat asal, faktor positif (+) yaitu factor yang menahan untuk tidak melakukan migrasi, faktor negatif (-) yaitu factor yang mendorong untuk melakukan migrasi ke

tempat lain dan faktor netral (0) yaitu faktor yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain. Rintangan antara mencakup hal-hal yang cukup berpengaruh terhadap besar kecilnya arus mobilitas penduduk. Rintangan antara dapat berupa: biaya mobilitas, perbedaan topografi antara wilayah asal dan tujuan, dan sarana transportasi. Migrasi juga dipengaruhi oleh faktor individu karena penilaian positif dan negatif terhadap tempat asal dan tujuan dilakukan oleh individu yang akan melakukan migrasi.

Quinn (1995) menggunakan tiga hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara migrasi dan penyebaran Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Uganda. Tiga hipotesis tersebut yaitu truck town hypothesis yaitu penyebaran virus melalui mobilitas antar wilayah oleh supir truk; hipotesis pekerja migran yaitu penyebaran virus melalui pekerja migran di kota yang kembali ke daerah asal; hipotesis pola suku yang terkait dengan perekrutan tentara berdasarkan suku setelah pelengseran Idi Amin.

Gmelch (1980) mengidentifikasi dua hal yang sangat terkait dengan harapan migran sebelum kembali yaitu rencana tinggal di tempat tujuan dan alasan untuk kembali. Terdapat tiga tipologi migran kembali yaitu: migran kembali yang merencanakan migrasi dalam jangka pendek dan telah mencapai targetnya; migran kembali yang merencanakan untuk terus menjadi migran namun terpaksa kembali karena faktor eksternal; migran kembali yang merencanakan untuk terus menjadi migran namun memutuskan untuk kembali karena mereka tidak dapat berintegrasi di negara tujuan atau merasakan keterikatan yang sangat kuat dengan negara (Gmelch, 1980). Menurut teori transnasional, migrasi kembali bukanlah akhir dari proses migrasi. Migrasi yang berulang adalah hal yang umum saat ini. Mobilitas antar tempat yang berbeda semakin sering dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan (Portes dkk. 1999).

Kesehatan migran lebih terkait dengan lingkungan tempat tinggal di tempat tujuan daripada tempat asal migran. Faktor yang menentukan kesehatan migran antara lain adalah alasan bermigrasi, tipe perjalanan, lama tinggal di tempat tujuan dan legalitas. Migran yang menerima upah rendah, tinggal di rumah yang tidak layak, makan makanan yang tidak sehat dan sulit akses terhadap fasilitas kesehatan memiliki resiko tinggi untuk terserang penyakit. Kesehatan migran tersebut lebih buruk dibanding saat meninggalkan tempat asal. Dalam situasi yang ekstrim, migran terpaksa kembali karena kesehatan yang memburuk, penyakit yang kronis dan mematikan dan keinginan meninggal di tempat asal (Clark dkk, 2007; IOM, 2010). Kepulangan migran ke tempat asal yang melalui jalur resmi (IOM, 2011) mencakup migran tanpa dokumen yang biasanya difasilitasi oleh pemerintah atau perusahaan (Davies dkk, 2011).

3. METODA PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kalbar dengan menggunakan data migrasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data COVID-19 yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Kalbar. Data dianalisis secara diskriptif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Setiap kabupaten/kota di Kalbar memiliki kasus tekonfirmasi COVID-19. Sampai dengan 26 Oktober 2020, Pontianak memiliki jumlah kasus tertinggi (503 kasus) sedangkan jumlah kasus terendah terdapat di Sekadau (13 kasus). Dengan jumlah kasus tersebut, Pontianak, bersama Bengkayang,

Landak, Kubu Raya dan Singkawang digolongkan sebagai daerah yang berisiko sedang sementara kabupaten lainnya sebagai daerah berisiko rendah (Gambar 1). Penyebaran COVID-19 dapat disebabkan oleh kedekatan fisik baik yang terjadi antar anggota keluarga dalam satu rumah, antar penduduk dalam satu wilayah dari desa/kelurahan sampai dengan kabupaten/kota, dan dari mereka yang kembali dari suatu tempat atau pendatang.

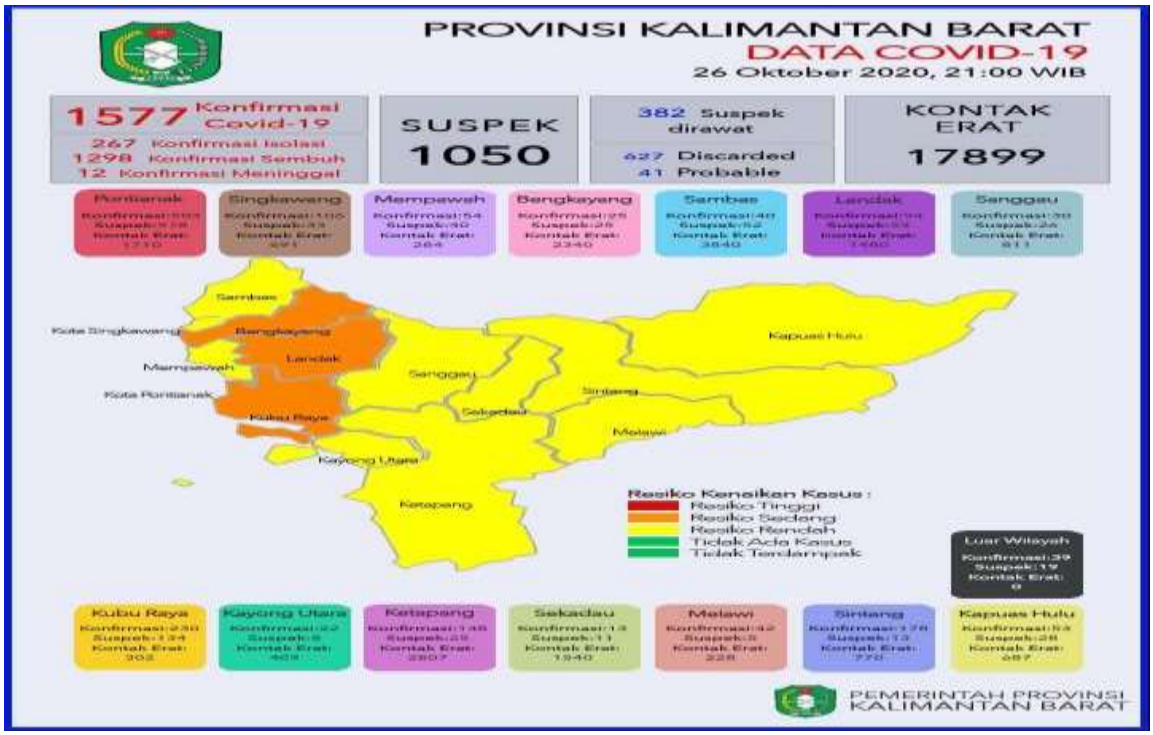

Gambar1. Data COVID-19 Kalimantan Barat
Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2020

Kondisi yang tidak menentu terjadi pada tahun pertama pandemic COVID-19. Kecemasan masyarakat dan berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Kalbar karena ketergantungan yang cukup tinggi daerah ini pada Jawa (Djafar, 2021).

Sebagian warga Kalbar bermigrasi keluar Kalbar baik di Indonesia maupun luar negeri dan berpotensi untuk kembali dengan berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain kehilangan pekerjaan atau tempatnya bersekolah/kuliah yang tidak menyelenggarakan pembelajaran *offline.* Migran tersebut terdiri dari migran seumur hidup yaitu mereka yang lahir di Kalbar atau migrasi risen yaitu mereka yang bertempat tinggal di Kalbar lima tahun sebelum survey. Warga Kalbar yang berstatus migran seumur hidup (185.924) jauh lebih banyak dari yang berstatus migran risen (34.994) dengan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki untuk migran seumur hidup dan sebaliknya untuk migran risen (Tabel 1).

Tabel 1: Migran Seumur Hidup dan Migran Risen Keluar menurut Jenis Kelamin, Kalimantan Barat, 2015

Migran seumur hidup keluar (orang)			Migran risen keluar (orang)		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
91. 202	94. 722	185.924	20.178	14.806	34.994

Sumber: BPS, 2016a

Warga Kalbar juga ada yang kembali dari luar negeri terutama Sarawak, Malaysia. Mereka kebanyakan adalah pekerja migran yang kembali ke Kalbar melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong atau PLBN Aruk tergantung pada jarak antara tempat kerja di Sarawak dengan PLBN. Misalnya, sebagian warga Kabupaten Sambas kembali ke Indonesia melalui PLBN Entikong karena lokasi kerja mereka di Sarawak lebih dekat ke PLBN Entikong daripada melalui PLBN Aruk yang justru terletak di kabupaten asal mereka.

Tabel 2: Kedatangan Warga Indonesia melalui PLBN Entikong dan PLBN Aruk, Maret – Agustus 2020

Bulan	Kedatangan warga Indonesia (orang)	
	PLBN Entikong	PLBN Aruk
Maret	6.486	8.057
April	2.885	5.378
Mei	1.953	4.005
Juni	2.150	1.112
Juli	3.602	2.169
Agustus	3.042	1.179
Total	20.118	21.900

Sumber: PLBN Entikong, 2020; PLBN Aruk, 2020

Sejak Maret sampai dengan Agustus 2020, sebanyak 42.018 warga Indonesia kembali ke Indonesia melalui PLBN Entikong dan PLBN Aruk. Jumlah warga Indonesia yang kembali melalui PLBN Aruk (21.900) lebih besar dari PLBN Entikong (20.118) yang menjadi indikasi banyaknya pekerja migran berasal dari Kabupaten Sambas. PLBN Entikong lebih banyak dilalui oleh warga Indonesia yang berasal dari berbagai daerah termasuk dari luar Kalbar. Entikong lebih dekat ke Pontianak, di mana terletak pelabuhan udara dan laut, yang diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanan keluar Kalbar.

Jumlah kedatangan warga Indonesia yang terbesar adalah pada Maret 2020 (Tabel 2) karena termasuk mereka yang datang sebelum Malaysia melalukan *lockdown* pada 18 Maret 2020. Dari April sampai dengan Agustus 2020, jumlah kedatangan melalui PLBN Entikong, bervariasi dari yang terbanyak pada Juli (3.602) sampai dengan yang terendah pada Mei (1.953). Sementara itu, jumlah kedatangan melalui PLBN Aruk bervariasi dari yang terbesar pada April (5.378) sampai yang terkecil pada Agustus (1.179).

Cara kepulangan warga Indonesia saat pandemic sebenarnya sama dengan saat normal yaitu melalui mekanisme deportasi, repatriasi dan mandiri. Deportasi adalah kepulangan warga Indonesia yang disebabkan karena pelanggaran hukum di luar negeri, repatriasi adalah kepulangan warga Indonesia yang memerlukan bantuan khusus dari pemerintah Indonesia melalui perwakilan pemerintah di luar negeri, sedangkan kepulangan mandiri adalah kepulangan atas biaya sendiri.

Jumlah mereka yang dipulangkan melalui proses deportasi dan repatriasi saat pandemic relative banyak. Hal tersebut merupakan implikasi dari upaya pemerintah Malaysia untuk menjaga agar jumlah tahanan migran tanpa dokumen tidak melebihi kapasitas tempat tahanan agar tempat tersebut tidak menjadi klaster baru dari COVID-19. Guna memudahkan monitoring kepulangan migran, sejak April 2020 pemerintah Indonesia menentukan proses deportasi hanya melalui PLBN Entikong. Jumlah warga Indonesia yang dideportasi setiap kalinya paling banyak 200 orang dan mereka diangkut dengan truk

dari depo penahanan di Sarawak ke PLBN Entikong. Jumlah yang dideportasi sekitar sepertiga dari jumlah total kedatangan setiap bulannya.

Selain dari luar Kalbar, migran kembali juga berasal dari kabupaten/kota di Kalbar. Potensi migran kembali dapat dilihat dari tempat asal migran keluar. Dari empat besar kabupaten/kota asal para migran (Sambas, Sanggau, Kubu Raya dan Pontianak), migran keluar paling banyak berasal dari Pontianak (13.790 orang) sedangkan yang paling sedikit berasal dari Kabupaten Sambas (6.488 orang) (Tabel 3). Jumlah migran keluar dari Pontianak lebih dari satu setengah kali lipat dibanding dengan jumlah migran keluar dari Kubu Raya (8.701 orang) yang memiliki migran keluar terbesar setelah Pontianak.

Tabel 3: Migran Risen Keluar Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Tinggal Asal Lima Tahun yang Lalu, Kalimantan Barat, 2015

Kabupaten/kota tempat tinggal sekarang	Tempat tinggal lima tahun yang lalu						
	Sambas	Sanggau	Kubu Raya	Pontianak	Lainnya	Jumlah	Migran masuk
Kabupaten							
Sambas	456.206	-	221	871	7.596	464.894	8.688
Bengkayang	1.051	142	256	1.024	209.987	212.460	9.568
Landak	206	534	2	-	321.981	322.723	2.345
Pontianak	238	588	242	1.516	225.054	227.638	6.114
Sanggau	150	392.953	474	698	8.432	402.707	9.754
Ketapang	501	66	225	390	428.356	429.538	6.248
Sintang	-	961	-	437	358.386	359.784	3.467
Kapuas Hulu	237	186	168	1.077	221.506	223.174	3.689
Sekadau	288	627	-	167	173.183	174.265	3.895
Melawi	86	-	15	221	176.138	176.460	1.711
Kayong Utara	-	-	226	385	92.978	93.589	1.644
Kubu Raya	837	2.258	478.708	5.877	6.478	494.158	15.450
Kota/*Municipality*							
Pontianak	1.023	2.002	6.646	516.331	24.801	550.803	34.472
Singkawang	1.871	86	226	1.127	183.618	186.928	8.055
Jumlah	462.694	400.403	487.409	530.121	2.438.494	4.319.121	115.100
Migrasi keluar	6.488	7.450	8.701	13.790			

Sumber: BPS, 2016b

Data migran keluar mencerminkan bahwa Pontianak berpotensi menerima migran kembali lebih besar dibanding kabupaten/kota lainnya di Kalbar. Namun, migran keluar dari Pontianak paling banyak menuju Kubu Raya (5.877 orang), demikian pula sebaliknya migran keluar dari Kubu Raya paling banyak menuju Pontianak (6.646 orang) (Tabel 3). Jarak yang relative dekat antara Kubu Raya dan Pontianak dan posisi kedua daerah yang berbatasan langsung dapat menyebabkan migran keluar tidak kembali ke tempat asal saat pandemi. Banyak orang tinggal di Pontianak dan bekerja di Kubu Raya atau sebaliknya.

Tabel 4: Migrasi Risen Masuk dan Alasan Utama Kepindahan Menurut Kabupaten/Kota, Kalimantan Barat, 2015

Kabupaten/ kota tempat tinggal sekarang	Alasan Utama Kepindahan						Jumlah
	Pekerjaan	Mencari Pekerjaan	Pendidikan	Perubahan Status Perkawinan	Ikut Suami/Istri Orangtua/Anak/Saudara	Lainnya	
Sambas	3. 860	220	768	944	2.529	367	8.688
Bengkayang	2 .377	378	518	479	5.539	277	9.568
Landak	449	86	-	614	1.084	112	2.345
Pontianak	801	753	24	241	3.204	1.091	6.114
Sanggau	1.840	704	698	-	6.295	217	9.754
Ketapang	1.344	914	316	268	3.406	0	6.248
Sintang	723	371	444	186	1.629	114	3.467
Kapuas Hulu	1.500	6	171	26	1.986	0	3.689
Sekadau	457	213	254	69	2.506	396	3.895
Melawi	249	161	-	79	1.130	92	1.711
Kayong Utara	450	204	-	27	865	98	1.644
Kubu Raya	2.352	497	654	936	9.795	1.216	15.450
Kota							
Pontianak	6.330	1.528	10.028	1.479	13.689	209	34.472
Singkawang	1.839	510	116	250	4.401	939	8.055
Jumlah	24 571	6.545	13.991	5.598	58.058	5.128	115.100
%	21,34%	5,68%	12,15%	4,86%	50,44%	4,45%	100%

Sumber: BPS, 2016b

Alasan migran keluar menuju kabupaten/kota lain di Kalbar lebih bervariasi dibanding dengan alasan migran ke luar negeri yang didominasi oleh alasan bekerja. Migrasi antar kabupaten/kota di Kalbar (Tabel 4) disebabkan oleh lima alasan utama. Dari kelima alasan tersebut, persentase tertinggi adalah mengikuti anggota keluarga seperti suami/isteri/orangtua/anak (50,44%). Alasan lainnya adalah pekerjaan (21,34%), pendidikan (12,15%) dan mencari pekerjaan (5,68%).

Pontianak sebagai ibukota Kalbar yang menjadi pusat pembangunan social-ekonomi, memiliki jumlah migran masuk yang paling banyak (34.472 orang). Banyaknya migran masuk di Pontianak dengan alasan pekerjaan bukan hanya karena kota ini memiliki lowongan kerja yang lebih banyak tetapi juga karena kota ini sebagai lokasi penempatan karyawan dari pemerintah pusat di daerah. Banyaknya migran pencari kerja dari luar Pontianak mencakup mereka yang sebelumnya berkuliah di kota ini. Pontianak merupakan pusat pendidikan sehingga menarik banyak warga dari kabupaten/kota lainnya untuk bersekolah di kota ini. Potensi kembali bagi mereka yang bersekolah di Pontianak relative besar karena pandemic COVID-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan dalam jaringan.

Jumlah migran masuk di Kabupaten Sambas dengan alasan pekerjaan merupakan yang terbesar kedua setelah Pontianak. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh pembentukan Sambas menjadi kabupaten baru sehingga banyak warga yang sebelumnya tinggal di daerah sekitarnya, seperti Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, pindah ke Sambas untuk lebih dekat ke tempat kerja.

Tabel 5: Migrasi Risen Masuk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pekerjaan, Kalimantan Barat, 2015

Kabupaten/Kota tempat tinggal sekarang	Sektor utama lapangan pekerjaan		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Kabupaten			
Sambas	1.957	1.555	2.374
Bengkayang	3.909	559	1.104
Landak	508	118	574
Pontianak	816	565	1.359
Sanggau	1.029	496	2.943
Ketapang	532	497	2.284
Sintang	398	72	637
Kapuas Hulu	285	95	1.885
Sekadau	1.494	494	349
Melawi	405	325	331
Kayong Utara	229	96	547
Kubu Raya	338	1.665	6.173
Kota Pontianak	1.263	2.416	9.440
Singkawang	685	394	2.768
Jumlah	13.848	9.347	32.768

Sumber: BPS, 2016b

Dari tiga lapangan kerja utama di tempat tujuan bermigrasi, sector jasa merupakan sector yang paling banyak menyerap migran (32.768 orang) dan sekitar setengah dari jumlah tersebut bekerja di Pontianak (9.440 orang) dan Kubu Raya (6.173 orang) (Tabel 5). Pontianak dan Kubu Raya tidak hanya banyak menyerap pekerja migran pada sector jasa, tetapi juga pada sector manufaktur. Pontianak memiliki cukup banyak migran yang bekerja di sector pertanian (1.263 orang). Pontianak menempati peringkat keempat sementara Bengkayang menempati peringkat pertama migran masuk yang bekerja di sektor pertanian (3.909 orang).

4.2. Pembahasan

Kembalinya migran dari Sarawak, daerah lain di Indonesia dan kabupaten/kota di Kalbar disebabkan oleh berbagai alasan seperti tidak ada lagi pekerjaan di perantauan. Para migran yang menurut Todaro (1969) berharap untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik di tempat tujuan, sebagian harus pulang karena kehilangan pekerjaan. Dari pandangan teori structural (Lee, 1966) tempat asal dan tujuan bermigrasi sama-sama dilanda pandemic atau memiliki tanda negative yang mendorong orang untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, ketiadaan keluarga di tempat bermigrasi menjadikan factor negative di tempat tujuan lebih kuat dan mendorong migran untuk kembali ke tempat asal dan berkumpul bersama keluarga dalam melalui masa yang berat selama pandemic. Sebaliknya, faktor positif di tempat asal seperti keluarga, lebih besar dari factor negative sehingga menahan orang tidak melakukan migrasi keluar semasa pandemic.

Migran kembali ke kabupaten/kota asal tidak selalu melalui prosedur protocol kesehatan. Tidak ada prosedur resmi bagi migran yang kembali ke kabupaten/kota di Kalbar karena tidak ada pos penjagaan antar kabupaten/kota. Penjagaan yang relative ketat justru terjadi di beberapa desa yang

mewajibkan migran kembali untuk tinggal di rumah saja selama beberapa hari/karantina mandiri sebagai upaya untuk mencegah penularan virus. Hal ini berbeda bagi mereka yang kembali dari Malaysia melalui PLBN Entikong dan Aruk. Para migran kembali tersebut wajib melalui uji cepat *(rapid test*) sebelum keluar area imigrasi. Dari tiga hipotesis yang diajukan oleh Quinn (1995), hipotesis pekerja migran kemungkinan berlaku di Kalbar karena cukup banyak pekerja migran yang kembali baik dari luar Kalbar maupun kabupaten/kota tempat tujuan bermigrasi di Kalbar. Menurut Davies dkk (2011), migran kembali yang melalui jalur resmi relative terlindungi dari ketularan virus karena pelaksanaan protokol kesehatan.

Potensi kepulangan migran dalam penelitian ini juga kemungkinan masuk dalam ketiga topologi migran (Gmelch, 1980). Ada yang kembali karena targetnya telah tercapai. Hal ini terjadi misalnya di kalangan anak muda yang memiliki target jangka pendek untuk membeli kendaraan bermotor dengan bekerja di Malaysia atau telah menyelesaikan kuliahnya di Pontianak. Ada juga yang terpaksa kembali akibat dari COVID-19 (faktor eksternal) yang berdampak terhadap hilangnya pekerjaan di tempat tujuan bermigrasi. Tipologi lain yang mungkin juga terjadi yaitu migran yang terpaksa kembali karena sulit beradaptasi di luar tempat asalnya terutama dalam jangka waktu yang lama.

5. SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesamaan pola di mana kabupaten/kota yang memiliki jumlah migran keluar yang besar juga memiliki jumlah kasus COVID-19 yang juga besar. Pontianak memiliki potensi yang paling besar untuk kasus COVID-19 yang disumbang oleh migran kembali. Kota ini memiliki jumlah kasus COVID-19 dan migran keluar terbesar di Kalbar. Migran keluar tersebut berpotensi untuk kembali dan membawa virus yang dapat tertular kepada orang lain jika tidak dikontrol secara tepat. Setiap kabupaten/kota di Kalbar memiliki jumlah kasus COVID-19 yang bervariasi. Sampai dengan 26 Oktober 2020, Pontianak memiliki jumlah kasus yang terbanyak sementara Sekadau memiliki jumlah kasus yang paling sedikit. Migrasi kembali dari Malaysia dan dari kabupaten/kota lainnya di Kalbar menuju ke tempat asal adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Penerapan protocol kesehatan di daerah tujuan baik di tempat keramaian maupun di kalangan keluarga harus terus digaungkan dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik/BPS (2016a). Statistik Migrasi Indonesia, Hasil Survei Penduduk antar Sensus 2015. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik/BPS (2016b). Statistik Migrasi Kalimantan Barat: Hasil Survei Penduduk antar Sensus 2015. Jakarta: BPS

Clark SJ, Collinson MA, Kahn K, Tollman SM (2007) Returning home to die: circular labour migrants and mortality in rural South Africa. *Scand J Public Health* 35: 35–44.

Davies AA, Borland RM, Blake C, West HE (2011) The Dynamics of Health and Return Migration. *PLoS Med* 8(6): e1001046. doi:10.1371/journal.pmed.1001046

De Salazar, P, M., Niehus, R., Taylor, A., Buckee, C, O., and Lipsitch, M. (2020). Using Predicted Imports of 2019-nCoV Cases to Determine Locations That May not be Identifying All Imported Cases. DOI: 10.1101/2020.02.04.20020495

Djafar, F. (2021). Pendahuluan dalam F. Djafar (Editor). *Hidup dan Kehidupan saat Pandemi COVID-19: Kasus-kasus pada 100 Desa di Kalimantan Barat (Lives and Livelihood in the Time of Covid-19Pandemic: The Cases from 100 Villages in West Kalimantan)* (Hal. 1 - 31). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Gmelch, G. (1980). Return migration. *Annual Review of Anthropology*, 9, 135–159.

IOM (2004) The migration glossary. Geneva: International Organization for Migration/IOM

IOM (2010) Migration and health in South Africa: A review of the current Situation and recommendations for achieving the World Health Assembly Resolution on the Health of Migrants. Pretoria: International Organization for Migration Regional Office for Southern Africa, Available: Http://iom.org.za/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&limit=5&limitstart=5&order=date&dir=DESC. Accessed 19 May 2011

IOM (2011) Handbook on establishing effective labour migration policies in countries of origin and destination. Reference number: 978-3-9502218-2-4. Geneva: International Organization for Migration.

Jakarta Post (2020). It's meant to help': Harvard professor responds after government dismisses study on undetected coronavirus cases, 15 February https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/14/its-meant-to-help-harvard-professor-responds-after-government-dismisses-study-on-undetected-coronavirus-cases.html

Lee. E.S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3 (1), 47-57

Liputan 6. (2020). Kabar Baik, Pasien Positif COVID-19 Pertama Kalbar Dinyatakan Negatif di Tes Swab Kedua. 11 Maret https://www.liputan6.com/regional/read/4212236/kabar-baik-pasien-positif-COVID-19-pertama-kalbar-dinyatakan-negatif-di-tes-swab-kedua

Peer (2015). The converging burdens of infectious and non-communicable diseases in rural-to-urban migrant Sub-Saharan African populations: a focus on HIV/AIDS, tuberculosis and cardio-metabolic diseases. *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, 1 (6), 1-8.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (2020). Data COVID-19 Kalimantan Barat. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Portes, A., Guarnizo, L. E., & Landolt, P. (1999). The study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research feld. *Ethnic and Racial Studies*, 22(2), 217–237.

Quinn, T. C. (1995). Population Migration and the Spread of Types 1 and 2 Human Immunodeficiency Viruses. National Research Council 1995. Infectious Diseases in an Age of Change: The Impact of Human Ecology and Behavior on Disease Transmission. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/4772

Tirto.id (2020a). Kronologi Penularan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia", 2 April. https://tirto.id/kronologi-penularan-pasien-positif-corona-COVID-19-di-indonesia-eD6x

Tirto.id (2020b) "Kalimantan Barat Tetapkan Status Darurat KLB COVID-19 Corona", 30 Maret". https://tirto.id/kalimantan-barat-tetapkan-status-darurat-klb-COVID-19-corona-eFXF

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less Developed countries. *American Economic Review*, 59(1), 138–148.

Hubungan antara Keterampilan Berwirausaha, Pengetahuan dan Kesuksesan Bisnis

Reninta Dewi Nugraheni*
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

ABSTRACT

Entrepreneurship in Indonesia is dominated by micro, small and medium enterprises (MSMEs). Many Indonesian MSMEs are engaged in the creative craft industry and require skills and knowledge to increase their contribution to the Indonesian economy. This study aims to determine the effect of skills and knowledge of MSME actors on business success. Data was collected through a structured questionnaire to 634 creative industry entrepreneurs in three provinces, namely South Sumatra, West Java, and DI Yogyakarta. This study divides skills in entrepreneurship into six components, namely strategic skills, managerial skills, learning and adaptive skills, social skills, digital skills and process skills. The Structural Equation Model (SEM) analysis method with SMART PLS is used to explore the skills and knowledge of MSME actors on business success. The results showed that strategic skills, managerial skills, social skills, digital skills, process skills and knowledge had a positive and significant effect on business success, but learning and adaptative skills had no effect on business success. The results of the regression analysis also show that knowledge has the largest beta coefficient, while learning and adaptation skills do not contribute significantly to business success.

JEL: J24, L26, L31

Keywords*: Indonesia, entrepreneurship, skills, business success*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan wirausaha baik di sektor formal maupun informal sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Mamun & Fazal, 2019). Usaha mikro, kecil dan menengah menjadi roda penggerak kewirausahaan di Indonesia, mengingat banyak tantangan dalam perekonomian yang dihadapi Indonesia, aktivitas kewirausahaan menjadi tujuan utama bagi pemerintah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk pembangunan ekonomi, memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Botezatu & Hosszu, 2020). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun 2018, sehingga jumlah UMKM mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro dengan proporsi sebesar 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil dengan proporsi 1,22%. Sementara usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit dengan proporsi sebesar 0,1% dan usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Meskipun jumlahnya cukup besar, akan tetapi mayoritas UMKM masih berskala mikro dan kecil dengan tingkat orientasi yang lemah dan produktivitas yang relatif rendah. Menurut Mulyaningsih dan Darwin (2021) UMKM dengan orientasi yang lemah memiliki orientasi inovasi yang rendah, rentan

*Email: *reninta.dewi.nugraheni@brin.go.id*

risiko, kurang mampu memanfaatkan peluang, kurang mampu dalam mengambil keputusan yang tepat bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha. Seorang wirausahawan yang kompeten harus memiliki pengetahuan khusus tentang bisnis, memainkan peran sosial dan tetap terampil, kreatif, bersemangat, memotivasi, optimis, persuasif, fleksibel, banyak akal, menanggung risiko, perencana yang sangat baik, pemecah masalah, dan lainnya (Man et al., 2008). Sehingga para pelaku UMKM diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan seperti sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk dapat menciptakan nilai bisnis dalam perekonomian.

Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan erat antara keterampilan dan pengetahuan dengan kinerja bisnis, selain itu keterampilan merupakan variabel yang sangat berpengaruh positif bagi kinerja usaha, pertumbuhan dan profitabilitas usaha yang menjadi indikator kesuksesan bisnis dalam studi ini (Al Mamun et al, 2019; Bird, 2019; Hurriyati et al, 2016; Mitchelmore dan Rowley, 2010). Keterampilan dalam wirausaha menjadi hal yang penting untuk menentukan penggunaan sumber daya dalam mencapai keunggulan kompetitif (Kim et al. 2011) dan untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam usaha (Dafna, 2008). Sementara Makhbul (2011), Zhou et al (2013) dan Roxas et al (2014) menyatakan bahwa pengetahuan menjadi salah satu prediktor penting keberhasilan wirausaha yang dapat diperoleh dari pengalaman dan pendidikan formal atau informal. Melalui pengetahuan, seorang wirausahawan menjadi lebih inovatif dan memicu munculnya ide-ide serta kreativitas baru, yang memungkinkan wirausahawan untuk mengambil peluang dalam berwirausaha (McDonald, 2002). Pengetahuan menjadi elemen kunci dan fundamental untuk mengidentifikasi kesempatan dalam berbisnis, sehingga dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Oleh karena itu penting untuk berinvestasi pada pengetahuan dalam bidang kewirausahaan (Hamdani & Koubaa, 2019). Fernandes et al (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan wirausahawan berhubungan dengan kemampuan, pengalaman kewirausahaan, investasi dan pengalaman bersosialisasi.

Relevansi peluang pengetahuan dan keterampilan berdasarkan teori memainkan peran kunci dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan wirausahawan ke tingkat keberhasilan usaha yang lebih besar (Cooney, 2012). Pentingnya keterampilan dan pengetahuan sebagai salah satu kunci kesuksesan usaha mendorong penulis untuk melakukan kajian yang intens. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa pengaruh pengetahuan dan keterampilan terhadap kesuksesan bisnis kewirausahaan pelaku UKM di Indonesia. Makalah ini akan disusun mulai dari kajian literatur yang memperkenalkan dasar teoritis untuk model konseptual dan hipotesis untuk membangun teori keterampilan, pengetahuan dan kesuksesan bisnis. Selanjutnya, menggunakan model *structural equation model* (SEM) untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel dan model regresi untuk melihat prediktor mana yang paling berpengaruh pada kesuksesan bisnis. Terakhir menyajikan diskusi dan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

2. KAJIAN LITERATUR

Definisi kewirausahaan yang disampaikan relatif berbeda-beda menurut para ahli dan sumber acuan berdasarkan titik berat perhatian atau penekanannya konteks kewirausahaan. Definisi kewirausahaan berdasarkan teori kewirausahaan destruksi kreatif *(the creative destruction theory of entrepreneurship)* yang disampaikan oleh Schumpeter (1947) menyatakan bahwa wirausahawan dipandang sebagai inovator dan pendorong utama kegiatan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi kreatif. Sementara Barot (2018) mengartikan kewirausahaan sebagai praktik dimulai dengan aktivitas dan penciptaan organisasi baru. Lai dam Jiang (2015) menyatakan bahwa kewirausahaan fokus pada proses manajemen seperti kreativitas dan otonomi, kapasitas untuk beradaptasi, dan menciptakan

nilai seni serta ekonomi dan social. Hessels (2019) menggambarkan kewirausahaan sebagai *intersection* ke arah ekonomi pembangunan, dimana kewirausahaan berkaitan erat dengan pengenalan peluang dan menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan sebagai kemampuan dasar kewirausahaan. Lebih lanjut Hessels menunjukkan bahwa kemampuan kewirausahaan akan membawa inovasi ke pasar melalui proses dan pembelajaran kewirausahaan. Pada akhirnya, pengelolaan kewirausahaan akan menciptakan keberlanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Chen et al., 2018).

Pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan merupakan sumber daya yang berharga dan tidak berwujud dimana menjadi manifestasi utama dalam modal dan mental seorang wirausaha untuk membangun suatu kegiatan ekonomi serta menentukan penggunaan sumber daya sehingga dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis, keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bagi suatu usaha (Campbell et al. 2012; Kim et al. 2011; Liñán and Chen 2009; Tehseen and Ramayah 2015; Wu et al. 2008). Pada beberapa studi, keterampilan dalam kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha, pertumbuhan, dan profitabilitas usaha (Al Mamun et al., 2019; Bird, 2019; Chandler & Jansen, 1992; Cooper et al., 1994; Hurriyati et al., 2016; Lerner & Almor, 2002; Mitchelmore & Rowley, 2010). Herron (1993) berpendapat bahwa keterampilan berkorelasi positif dengan keberhasilan wirausaha. Dafna (2008) menyimpulkan bahwa wirausahawan yang memiliki keterampilan dapat membawa perubahan dan inovasi dalam usaha bisnisnya. Sadq (2019) berasumsi bahwa keterampilan sangat penting untuk proses kewirausahaan, karena membantu membangun hubungan sosial, ekonomi dan bersaing di pasar.

Sebelum menjelaskan lebih rinci tentang keterampilan dan pengetahuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, akan dijelaskan yang dimaksud dengan kinerja bisnis kewirausahaan dan apa yang pelaku usaha kecil maksud dengan *business success*. Makhbul (2011) mengartikan bahwa kesuksesan bisnis merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman dan karakter pribadi, serta pengaruh masyarakat dan lingkungan. Sedangkan Johnson et al (2008) dalam Anjorin dan Ravi (2012) secara spesifik menjelaskan kesuksesan bisnis terkait dengan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh karena keuntungan merupakan tujuan seseorang dalam melakukan usaha. Di sisi lain Simpson et al (2004) dalam Lundberg dan Fredman (2012) menggagas empat definisi sukses dalam bisnis. Pertama, kesuksesan adalah pertumbuhan dan profitabilitas atau disebut *The Empire Builder*. Dalam konteks ini wirausahawan percaya bahwa kesuksesan merupakan kombinasi dari pertumbuhan, profitabilitas, dan kerja tim. Kedua, sukses adalah kebahagiaan atau disebut *The Happiness Seeker* dimana kesuksesan adalah kebahagiaan di tempat kerja, memastikan bahwa karyawan senang dan menikmati pekerjaan mereka, dan pelanggan menikmati hasil kerja mereka. Ketiga, sukses adalah rasa pencapaian atau disebut *The Vision Developer*. Sukses dilihat sebagai pencapaian kolektif dalam perusahaan yang dilihat dari visi dan misi, kemudian telah digambarkan sebagai karakteristik kesuksesan pribadi, dan kriteria keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Keempat, sukses adalah pencapaian dan pengakuan atau disebut *The Challenge Achiever*. Pencapaian dan pengakuan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi pengusaha/manajer pemilik ini. Dalam penelitian ini, definisi yang dikemukakan Simpson lebih sesuai untuk digunakan sebagai acuan karena *business success* yang sesungguhnya tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi psikologis menyangkut perasaan/penilaian diri pelaku usaha. Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis untuk melihat hubungan antara keterampilan dan pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis. Pada penelitian ini membagi keterampilan menjadi 6 keterampilan, yakni *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill, learning and adaptive skill* dan *digital skill.*

2.1. Pengaruh *strategic skill* terhadap kesuksesan bisnis

Keterampilan strategis wirausahawan merupakan sumber daya utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keterampilan strategis dalam kewirausahaan sangat dibutuhkan karena terkait dengan kemampuan analisis, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan (Hurriyati et al, 2016; Saba et al, 2021). Dana (1999) dan Shi dan Dana (2013) berpendapat bahwa kemampuan strategis pemilik menciptakan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.Wirausaha yang sukses pun memiliki kemampuan strategis untuk mengetahui para pesaing mereka dan bagaimana mengambil keputusan serta memposisikan diri dalam menghadapi pasar yang terus berkembang (Chwolka dan Raith, 2012; De Clercq, 2012; Saba et al, 2021). Keterampilan strategis akan menciptakan kesempatan dalam mengolah sumber daya yang efektif yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja usaha (Shi dan Dana, 2013). Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_1: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara strategic skill dan business success.*

2.2. Pengaruh *social skil*l terhadap kesuksesan bisnis

Lamine et al. (2014) mengidentifikasi keterampilan sosial wirausahawan dapat menangani serangkaian masalah dalam konteks kewirausahaan seperti kelangkaan sumber daya, ketidakpastian dan kelangsungan dalam usaha baru. Selain itu keterampilan sosial sangat diperlukan dalam kewirausahaan (Al Mamun et al 2019; Hurriyati et al, 2016) terkait dengan bagaimana teknik berkomunikasi dan membangun *networking* dalam berbisnis (Davidsson and Honig, 2003). *Networking* memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha. Keterampilan sosial yang dibangun bertujuan menjaga hubungan dengan partner bisnis atau *networking*, merektrut dan mempertahankan klien mereka (Baron and Markman, 2003). Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_2: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara social skill dan business success.*

2.3. Pengaruh *managerial skill* terhadap kesuksesan bisnis

Menjadi seorang wirausahawan artinya menjadi manajer bagi diri kita sendiri, sekaligus sebagai manajer orang lain. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus dapat mengatur waktu, karyawan, pelanggan, penjualan, keuangan, dan substansi lainnya secara efektif (Hussain & Li, 2022). Dalam konteks UKM, keterampilan manajerial sangat penting untuk keberhasilan (Badger et al., 2003). Lowden (1998) memaparkan terdapat empat hal yang perlu dikembangkan bagi seorang wirausahawan yakni (1) perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan cara mencapainya; (2) pengorganisasian, yaitu mengatur orang agar bekerja untuk mencapai tujuan; (3) kepememimpinan, yaitu mendorong faktor manusia dalam bekerja; dan (4) pengontrolan, yaitu memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *managerial skill* adalah keterampilan penting dalam mendukung keberhasilan usaha (Ghosh et al., 1993; Hurriyati et al., 2016; Yusuf, 1995). Menariknya, Smith (2003) menemukan hubungan positif antara perilaku manajemen kewirausahaan dan pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_3: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara managerial skill dan business success.*

2.4. Pengaruh *process skill* terhadap kesuksesan bisnis

Keterampilan ini terkait pada keterampilan khusus yang berkaitan tentang proses atau teknis dalam pembuatan produk usaha. Keterampilan teknis dalam kewirausahaan disebutkan dalam studi yang dilakukan oleh Hurriyati et al. (2016). Sule et al (2020) berpendapat bahwa komponen

keterampilan teknis memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pengembangan kewirausahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_4: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara process skill dan business success*.

2.5. Pengaruh *learning and adaptive skill* terhadap kesuksesan bisnis

Keterampilan belajar dan adaptasi merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan yang memungkinkan suatu usaha dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungannya melalui asumsi tentang konsumen dan kompetisi (Atuahene-Gima & Ko, 2001). Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_5: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara learning and adaptive skill dan business success.*

2.6. Pengaruh *digital skill* terhadap kesuksesan bisnis

Menjajaki era modern keterampilan digital menjadi salah satu keterampilan yang cukup penting dalam kewirausahaan pada berbagai aspek dalam lingkungan usaha, seperti pemasaran, penjualan, dan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi pengusaha dan pelanggan (Hamburg et al., 2017; Nedumaran et al., 2020). Keterampilan digital merupakan kemampuan menggunakan dan mengaplikasikan teknologi digital pada usaha (Cukier et al., 2021; Saba et al., 2021). Potekhina et al. (2020) juga menambahkan penggunaan keterampilan digital dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi produksi dan tenaga kerja. Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_6: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara digital skill dan business success.*

2.7. Pengaruh pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis

Pengetahuan merupakan faktor penting yang mendorong kinerja dan pertumbuhan perusahaan (March & Sutton, 1997; Omerzel & Antončič, 2008). Kesuksesan suatu usaha bisa dikaitkan pada pengetahuan pelaku usaha (Hambrick & Mason, 1984) dan seberapa baik pelaku usaha mengelola pengetahuan yang dimilikinya (Desouza & Awazu, 2006). Pengetahuan ini menjadi faktor yang dapat membantu pelaku usaha untuk mengorganisir lingkungan bisnis (Beijerse, 2000) dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya (Marvel et al., 2016). Pengetahuan menjadi pondasi kinerja usaha yang dapat memperkuat keunggulan kompetitif dan berdampak pada pertumbuhan suatu usaha (Novak & Bojnec, 2005). Ilmu pengetahuan dapat membantu seorang wirausahawan untuk menjadi inovatif dan memicu ide-ide baru untuk menangkap peluang dalam mengembangkan usahanya (Makhbul, 2011). Pengetahuan utama dalam kewirausahaan adalah pengetahuan mengenai manajemen. Bagi usaha kecil dan menengah (UKM), seorang pemilik usaha memiliki peran ganda sebagai pemilik dan sebagai manajer, sehingga pengetahuan manajemen usaha dan organisasi perusahaan sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan suatu usaha (Omerzel & Antončič, 2008). Pengetahuan manajemen ini antara lain pengetahuan mengenai manajemen produksi dan operasional (Barney, 1991; Grant, 2009; Tehseen & Ramayah, 2015), manajemen keuangan (Muñoz-Murillo et al., 2020; Yuesti et al., 2020), manajemen pemasaran (Jaworski & Kohli, 1993), manajemen sumber daya manusia (Lowden, 1988) dan manajemen strategik (Omerzel & Antončič, 2008). Staniewski (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki kekuatan prediktif untuk mencapai keberhasilan wirausaha. Dengan kata lain, wirausahawan yang memiliki pengetahuan dapat mencapai kesuksesan wirausaha yang lebih besar. Berdasarkan pembahasan tersebut maka berhipotesis yang diajukan adalah

H_7: *Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan dan business success.*

Studi ini menganalisis hubungan antara keterampilan dan pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis seorang wirausaha. Gambar 1 merupakan kerangka penelitian dengan menggunakan metode *structural equation model* dimana mengasumsikan variable-variabel *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill, learning adaptive skill, digital skill,* dan pengetahuan (*knowledge*) mempengaruhi kesuksesan bisnis.

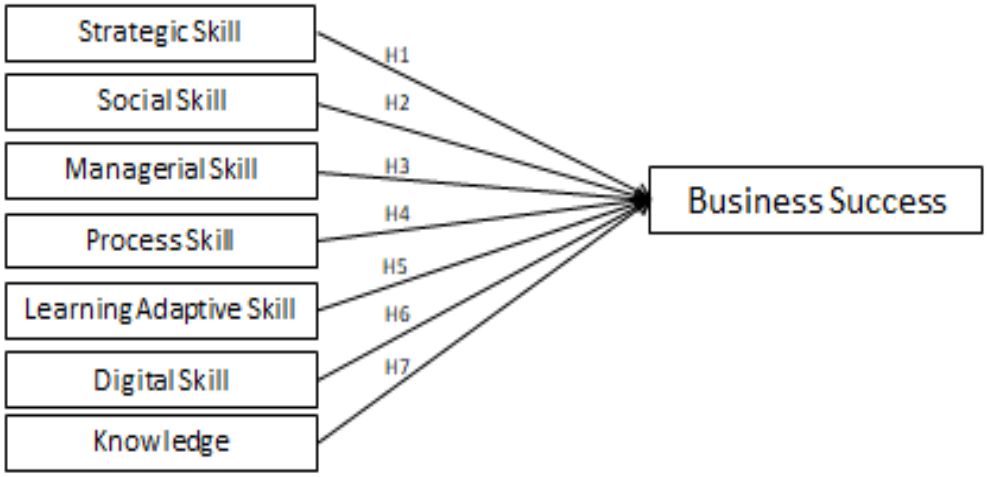

Gambar 1. Model Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *self-administered questionnaire* yang diberikan kepada 634 responden. Pemilihan responden menggunakan *purposive random sampling* dari 3 provinsi (Sumatera Selatan, Jawa Barat dan DI Yogyakarta) yang relatif berkembang ekosistem dan tinggi porsi industri ekonomi kreatifnya (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019).

Tabel 1 Jumlah Item Dalam Kuesioner Dan Acuan Teori

Variabel	**Jumlah Indikator**	**Referensi**
Keterampilan/*Skill*:		Item kuesioner diadaptasi secara selektif dari kuesioner penelitian Kyndt dan Bert (2015) dan Mamun et al. (2017), berdasarkan studi:
a. Strategic skill	5 items	Bracker et al. 1988; Dana 1999; Hurriyati et al. 2016; McManus 1995; Saba et al. 2021; Shi and Dana, 2013
b. Managerial skill	11 items	Lowden (1988)
c. Social skill	6 items	(Al Mamun, Fazal, and Muniady 2019; Hurriyati et al. 2016
d. Learning and adaptive skill	8 items	(Atuahene-Gima & Ko, 2001).
e. Process/technical skill	6 items	Hurriyati et al. (2016) dan Katz (1955)
f. Digital skill	6 items	Nedumaran, Saroja, and phil Scholar (2020) dan Potekhina et al. (2020)
Pengetahuan/*Knowledge*	12 items	Teori yang digunakan dan item kuesioner diambil secara terpilih dari studi Omerzel and Antončič (2008).
Business Success	10 items	Simpson (2004)

Studi ini menggunakan analisis *structural equation model* (SEM) untuk mengkaji pengaruh keterampilan dan pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis pelaku usaha UKM di Indonesia. Beberapa studi lain sudah menggunakan metode *structural equation model* (SEM) ini untuk melihat hubungan antara berbagai variabel kewirausahaan dengan *business success*, seperti Karimi et al (2011), Rumengan et al (2018), Ahmed et al (2019), Akinwale dan Ababtain (2019) dan Imran et al. (2019). Oleh karena itu, model SEM menggunakan SMART PLS layak dipakai untuk menguji pengaruh keterampilan dan pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis pelaku. Tabel 1 menunjukkan jumlah item yang digunakan dalam kuisioner dan acuan teori yang digunakan dalam masing-masih variabel.

Abdullah et al (2018) menggunakan model regresi berganda untuk mengetahui apa prediktor terbaik dari kesuksesan bisnis. Penelitian ini juga menggunakan model regresi berganda untuk mengetahui predictor terbaik dari variabel *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill, learning adaptive skill, digital skill,* dan pengetahuan (*knowledge*) yang mempengaruhi kesuksesan bisnis. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \beta 5X5 + \beta 6X6 + \beta 7X7 + \beta 8X8 + \varepsilon \quad (1)$$

dimana :

Y = Kesuksesan Bisnis
X1 = *Strategic Skill*
X2 = *Managerial Skill*
X3 = *Social Skill*
X4 = *Learning and Adaptive Skill*
X5 = *Process/Technical Skill*
X6 = *Digital Skill*
X7 = *Pengetahuan*
β = parameter koefisien regresi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Seluruh responden dalam penelitian berjumlah 634 dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 54,90% dan perempuan 45,10%. Para wirausaha di bidang industry kriya kreatif sebanyak 13,2% berpendidikan SD, 18,6% berpendidikan SMP, 18,6% berpendidikan SMA sebesar 57,1%, dan memiliki gelar sarjana atau sederajat sebesar 11%. Sekitar 65,50% responden merintis usaha sendiri dan sisanya merupakan usaha turunan dari keluarga atau orangtua. Sebanyak 34,9% responden berasal dari Jawa Barat, sebanyak 33,1% dari Sumatera Selatan dan sebanyak 32% dari DI Yogyakarta.

4.2. Analisis *Structural Equation Model (SEM)*

Model SEM yang baik sangat dipengaruhi oleh validitas indikator dan reliabilitas konstruk. Sehingga, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas untuk setiap indikator. *Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah nilai faktor loading > 0,5. Nilai yang lebih tinggi umumnya menunjukkan tingkat keandalan yang lebih tinggi. Namun, nilai 0,95 dan lebih tinggi akan mengurangi validitas konstruk dan juga menunjukkan kemungkinan pola respons yang tidak diinginkan (Hair et al., 2019). Nilai *outer* loading masing-masing indikator > 0.7 dan tidak ada yang melebihi 0,91 sehingga dapat dikatakan variabel yang diteliti memenuhi asumsi valid secara konvergen. Tabel 2 menunjukkan nilai *path coeffiients* setiap variabel pembentuk *skill*, pengetahuan dan

kesuksesan bisnis, dimana *rule of thumb* model SEM yang baik yakni memiliki nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,6 dan AVE ≥ 0,5.

Tabel 2 *Construct Reliability and Validity*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Bussiness Success	0,943	0,951	0,661
Digital Skill	0,948	0,959	0,795
Knowledge	0,960	0,965	0,698
Learning Adaptive Skill	0,920	0,939	0,755
Managerial Skill	0,950	0,958	0,716
Process Skill	0,923	0,940	0,722
Social Skill	0,929	0,945	0,740
Strategic Skill	0,884	0,928	0,812

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, berdasarkan pengujian hipotesis nilai p-value yang diperoleh dalam penelitian ini kurang dari 5% untuk *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill,* dan *digital skill* (Tabel 3). Temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menemukan bahwa keterampilan merupakan variabel yang sangat berpengaruh positif bagi kinerja usaha, pertumbuhan dan profitabilitas usaha yang menjadi beberapa indikator kesuksesan bisnis dalam studi ini (Al Mamun et al 2019; Hurriyati et al. 2016; Lerner dan Almor 2002; Bird 2019). Keterampilan dalam kewirausahaan ini penting untuk menentukan penggunaan sumber daya dalam mencapai keunggulan kompetitif (Kim et al. 2011) dan untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam usaha (Dafna 2008).

Tabel 3 Pengujian Hipotesis

Hypothesis	**Hubungan**	**Standard Deviation (STDEV)**	**T Statistics (|O/STDEV|)**	**P Values**	**Keterangan**
H1	*Strategic Skill -> Bussiness Success*	*0,052*	*3,416*	0,001	*Supported*
H2	*Managerial Skill -> Bussiness Success*	*0,057*	*3,386*	0,001	*Supported*
H3	*Learning Adaptive Skill -> Bussiness Success*	*0,037*	*1,646*	0,100	*Not Supported*
H4	*Social Skill -> Bussiness Success*	*0,061*	*2,694*	0,007	*Supported*
H5	*Process Skill -> Bussiness Success*	*0,050*	*1,968*	0,050	*Supported*
H6	*Digital Skill -> Bussiness Success*	*0,039*	*2,813*	0,005	*Supported*
H7	*Knowledge -> Bussiness Success*	*0,056*	*4,649*	0,000	*Supported*
Nilai Koefisien Determinasi		R^2 = 0,702		R^2 *Adjusted* = 0,699	

Sementara variabel *learning and adaptive skill* yang memiliki nilai p-value lebih dari 5%. Artinya variabel *learning and adaptive skill* tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap *business success*. Hal ini berlawanan dengan hipotesis dimana keterampilan belajar dan adaptasi dimana wirausahawan dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungannya melalui asumsi tentang konsumen dan kompetisi dalam pasar. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses belajar dan adaptasi pelaku UKM kemungkinan dapat terjadi dalam derajat bisnis dan cara yang berbeda tergantung di mana pelaku wirausaha berada dalam siklus bisnisnya. Misalnya, ketika wirausahawan mengadopsi suatu inovasi (sebagai bentuk adaptasi) hal ini tentunya akan menciptakan keadaan yang berbeda dalam jenis dan tingkat antara perusahaan kecil dan perusahaan besar (Lengnick-hall, 1992).

Dalam kewirausahaan, adaptasi mencakup tuntuan terkait dengan produk, pasar, *networking*, dan pemasaran yang berpotensi mengubah lanskap bisnis. Ini berarti bahwa pemilik bisnis tidak dapat secara akurat memprediksi tren pasar dan membuat rencana jangka menengah dan panjang seperti dulu. Wirausahawan perlu membiasakan diri dengan perencanaan adaptif, terus menyesuaikan diri dalam menanggapi perubahan bisnis. Apakah hal ini menjadi salah satu ciri perilaku dari wirausaha Indonesia yang cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan di dunia wirausaha? Kondisi ini perlu diteliti lebih lanjut. Sementara Markóczy (2017) menyarankan konteks *adaptive skill* diperluas mencakup praktik dan struktur organisasi/UKM dalam beradaptasi di lingkungan tertentu. Dengan demikian, dapat dilihat kemampuan pelaku UKM adalah akibat langsung dari kemampuannya untuk belajar secara kolektif tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi usaha tersebut. Lain halnya dengan variabel pengetahuan yang memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap *business success*. Seorang wirausahawan yang memiliki pengetahuan dapat mencapai kesuksesan wirausaha yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya (March and Sutton 1997; Omerzel dan Antončič, 2008; Makhbul, 2011; Marvel, et al 2016; Staniewski, 2016).

4.3. Model Regresi

Tabel 4 menunjukkan hasil korelasi Pearson. Terlihat dari tabel, koefisien korelasi tertinggi sebesar 0,692 adalah antara pengetahuan dan kesuksesan bisnis. Disusul oleh *manajerial skill* dan kesuksesas bisnis sebesar 0,672, selanjutnya *social skill* dan kesuksesan bisnis sebesar 0,667, *strategic skill* dengan kesuksesan bisnis sebesar 0,645 dan yang terakhir *learning and adaptive skill* dengan kesuksesan bisnis sebesar 0,536.

Tabel 4 *Pearson Correlation Matrix*

		Strategic Skill	Managerial Skill	Learning Adaptive Skill	Sosial Skill	Process Skill	Digital Skill	Knowledge	Bussiness Success
Strategic Skill	Pearson Correlation	1,000							
	Sig								
Managerial Skill	Pearson Correlation	0,780**	1,000						
	Sig	0,000							
Learning Adaptive Skill	Pearson Correlation	0,527**	0,537**	1,000					
	Sig	0,000	0,000						
Sosial Skill	Pearson Correlation	0,639**	0,684**	0,664**	1,000				
	Sig	0,000	0,000	0,000					
Process Skill	Pearson Correlation	0,684**	0,732**	0,558**	0,757**	1,000			
	Sig	0,000	0,000	0,000	0,000				
Digital Skill	Pearson Correlation	0,435**	0,493**	0,525**	0,589**	0,541**	1,000		
	Sig	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Knowledge	Pearson Correlation	0,588**	0,658**	0,605**	0,705**	0,668**	0,734**	1,000	
	Sig	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Bussiness Success	Pearson Correlation	0,645**	0,672**	0,536**	0,667**	0,654**	0,573**	0,692**	1,000
	Sig	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Notes: **Significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis regresi juga menunjukkan temuan yang sama pada model SEM, dimana variabel *learning and adaptive skill* tidak signifikan. Sementara pengetahuan menjadi predictor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis dengan koefisien korelasi sebesar 0,188, disusul *strategic skill* sebesar 0,174. Secara intuitif, hasil yang disajikan pada Tabel 5, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan 100 poin pengetahuan wirausaha akan menghasilkan perubahan 18,8 poin dalam keberhasilan binis. Hasil tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Abdullah et al (2018). Secara keseluruhan, nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa bisnis sukses industrI kriya kreatif dapat ditingkatkan dengan meningkatkan keterampilan wirausaha dengan lebih menekankan pada pengetahuan, *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill,* dan *digital skill*.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Nilai p-value
	Beta	Std. Error		
(Constant)	1,176	0,128	9,207	0,000
Strategic Skill	0,174	0,040	4,353	0,000
Managerial Skill	0,143	0,044	3,278	0,001
Learning and Adaptive Skill	0,012	0,024	0,482	0,630
Social Skill	0,119	0,040	2,992	0,003
Process Skill	0,081	0,042	1,923	0,055
Digital Skill	0,058	0,021	2,702	0,007
Knowledge	0,188	0,035	5,403	0,000

Hasil analisis regresi juga mengimplikasikan bahwa UKM di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus pada variabel *digital skill* dimana memiliki nilai koefiein beta yang paling rendah untuk meningkatkan *business success*. Rendahnya nilai beta pada *digital skill* disebabkan karena objek penelitian dalam studi ini adalah usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Sementara jumlah UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital masih sedikit. Pada Mei 2021, hanya ada 12 juta UMKM, yang hanya menyumbang 18% dari seluruh UMKM, yang telah menerapkan teknologi digital (Arifin dan Ananda, 2020)(Wicaksono, 2022). Rahayu dan Day (2015) menambahkan bahwa mayoritas UKM di Indonesia masih berada pada tingkat kesiapan adopsi teknologi digital yang rendah, dibandingkan dengan UKM di negara maju kondisi ini tentu masih jauh tertinggal. Rendahnya kemampuan digital disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, mayoritas UKM mengetahui fenomena digitalisasi, namun saat ini mereka belum siap untuk beradaptasi atau menggunakan berbagai inovasi dalam bisnis mereka (Rafiah et al, 2022). Wicaksono (2022) berpendapat bahwa UKM menggunakan keterampilan digital untuk memasarkan dan mempromosikan produk dan layanan mereka, namun juga memperluas klien dalam pengadaan barang dan jasa, komunikasi ekstrenal, meningkatkan citra perusahaan, dan produktivitas karyawan.

5. SIMPULAN

Temuan studi ini membawa implikasi akademis pada penambahan pengetahuan, khususnya tentang dinamika hubungan dan interaksi berbagai variabel, dalam studi ini adalah keterampilan dan pengetahuan pada perspektif kesuksesan bisnis UKM. Studi ini setidaknya juga mencoba membuka

ruang diskusi ilmiah terhadap pentingnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM sebagai salah satu faktor utama bagi suksesnya bisnis UMKM. Dalam hal implikasi praktis, temuan memberikan wawasan tentang peningkatan kinerja UMKM untuk turut andil dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan ini sebagai referensi untuk mengatasi ketidak berkembangnya UMKM selama ini yang terutama dengan fokus pada variabel dapat ditingkatkan dan lebih menekankan pada pengetahuan, *strategic skill, social skill, manajerial skill, process skill,* dan *digital skill.* Sangat disadari bahwa studi ini masih terbatas pada objek UKM di industri kreatif. Diketahui bahwa tiap industri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan studi lebih lanjutan tentang kondisi kewirausahaan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N., Lumpur, U. K., & Hadi, N. U. (2018). *The nexus between entrepreneur skills and successful business : A decompositional analysis The nexus between entrepreneur skills and successful business : a decompositional analysis Naziruddin Abdullah and Noor Ul Hadi * Léo-Paul Dana*. *January*. https://doi.org/10.1504/IJESB.2018.092029

Ahmed, T., Klobas, J. E., & T, R. (2019). Personality Traits, Demographic Factors and Entrepreneurial Intentions : Improved Understanding from a Moderated Mediation. *Entrepreneurship Research Journal*, 1–16. https://doi.org/10.1515/erj-2017-0062

Akinwale, Y. O., & Ababtain, A. K. (2019). Entrepreneurial Interest Among University Students In Saudi Structural Equation Model Analysis Of Factors Influencing Entrepreneurial Interest Among University Students In. *Journal of Entrepreneurship Education*, *22*(4).

Al Mamun, A., Fazal, S. A., & Muniady, R. (2019). Entrepreneurial knowledge, skills, competencies and performance. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *13*(1), 29–48. https://doi.org/10.1108/apjie-11-2018-0067

Anjorin, J. A., & Ravi, P. V. (2012). *Business Models : Assessment of the dynamic aspects and non-dynamic aspects*. School of Management.

Arifin, M., & Ananda, A. (2020). *Entrepreneurship Knowledge and Entrepreneurial Interest of the Students in Universitas Negeri Padang*. *504*(ICoIE), 217–221.

Atuahene-Gima, K., & Ko, A. (2001). An Empirical Investigation of the Effect of Market Orientation and Entrepreneurship Orientation Alignment on Product Innovation. *Organization Science*, *12*(1), 54–74. https://doi.org/10.1287/orsc.12.1.54.10121

Badger, B., Chaston, I., & Pradhan, R. (2003). Managerial Behavior , Entrepreneurial Style , and Small Firm Performance. *Journal of Small Business Management*, *41*(1), 47–67.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, *17*(1), 99–120.

Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). *Beyond social capital: The role of entrepreneurs'social competence in their financial success*. *18*, 41–60. https://doi.org/doi:10.1016/S0883-9026(00)00069-0

Barot, H. (2018). Entrepreneurship - A Key to Success. *The International Journal of Business & Management*, *January 2015*.

Beijerse, R. P. U. (2000). Knowledge management in small and medium-sized companies: Knowledge management for entrepreneurs. *Journal of Knowledge Management*, *4*(2), 162–179.

https://doi.org/10.1108/13673270010372297

Bird, B. (2019). Toward a theory of entrepreneurial competency. *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth*, *21*, 115–131. https://doi.org/10.1108/S1074-754020190000021011

Botezatu, M. A., & Hosszu, A. (2020). Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): The Engine of Economic Growth through Investments and Innovation. *Sustainability (Switzerland)*, *12(1)*, 347. https://doi.org/10.3390/su12010347

Campbell, B. A., Ganco, M., Franco, A. M., & Agarwal, R. (2012). Who Leaves, Where to, and Why Worry? Employee Mobility, Entrepreneurship and Effects on Source Firm Performance. *Strategic Management Journal*, *33*(1), 65–87. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.943

Chandler, G. N., & Jansen, E. (1992). The founder's self-assessed competence and venture performance. *Journal of Business Venturing*, *7*(3), 223–236. https://doi.org/10.1016/0883-9026(92)90028-P

Chen, F., Fu, L., Wang, K., & Tsai, S. (2018). The Influence of Entrepreneurship and Social Networks on Economic Growth — From a Sustainable Innovation Perspective. *Sustainability*, *10*(2510), 1–19. https://doi.org/10.3390/su10072510

Chwolka, A., & Raith, M. G. (2012). The value of business planning before start-up - A decision-theoretical perspective. *Journal of Business Venturing*, *27*(3), 385–399. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.01.002

Cooney, T. M. (2012). Entrepreneurship Skills for Growth-Orientated Businesses. *Report for the Workshop on 'Skills Development for SMEs and Entrepreneurship.'*

Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J., & Woo, C. Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. *Journal of Business Venturing*. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90013-2

Cukier, W., McCallum, K. E., Egbunnonu, P., & Bates, K. (2021). The mother of invention: Skills for innovation in the post-pandemic world. In *Public Policy Forum* (Issue June).

Dafna, K. (2008). Managerial performance and business success. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, *Vol. 2*(4), 300–331. https://doi.org/10.1108/17506200810913890

Dana, L. P. (1999). Small business as a supplement in the People's Republic of China. *Journal of Small Business Management*, *37*(3), 76–80.

Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, *18*(3), 301–331. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00097-6

De Clercq, D., Sapienza, H. J., Yavuz, R. I., & Zhou, L. (2012). Learning and knowledge in early internationalization research: Past accomplishments and future directions. *Journal of Business Venturing*, *27*(1), 143–165. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.09.003

Desouza, K. C., & Awazu, Y. (2006). Knowledge management at SMEs: Five peculiarities. *Journal of Knowledge Management*, *10*(1), 32–43. https://doi.org/10.1108/13673270610650085

Fernandes, C., Ferreira, J., Raposo, M., Hernández, R., Diaz-casero, J. C., Fernandes, C., Ferreira, J., Raposo, M., Hernández, R., Diaz-casero, J. C., Fernandes, C., Hernández, R., & Diaz-casero, J. C. (2017). *Knowledge and entrepreneurship creation : what is the connection ?* https://doi.org/10.1108/WJEMSD-11-2016-0052

Ghosh, B. C., Kim, T. S., & Meng, L. A. (1993). Factors contributing to the success of local SMEs: an insight from Singapore. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, *10*(3), 33–46.

https://doi.org/10.1080/08276331.1993.10600426

Grant, R. M. (2009). The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. In *Knowledge and Strategy* (Vol. 33, Issue 3). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-7088-3.50004-8

Hambrick, D. C., & Mason, P. a. (1984). Echelons : of Reflection The Its Organization as Top a. *Management*, *9*(2), 193–206.

Hamburg, I., Vladut, G., & O'Brien, E. (2017). Fostering skills for digital social innovations in entrepreneurship education. *Balkan Region Conference on Engineering and Business Education*, *3*(1), 99–105. https://doi.org/10.1515/cplbu-2017-0014

Hamdani, K., & Koubaa, S. (2019). *Knowledge-Based Entrepreneurship : The Role Of Networks Khadija Hamdani and Salah Koubaa*. *December 2018*.

Herron, L. (1993). A Structural Model Of The Effects Of Entrepreneurial Characteristics On Venture Performance. *Journal of Business Venturing*, *8(3)*, 281–294.

Hessels, J. (2019). The Intersection Of The Fields Of Entrepreneurship And Development Economics : A Review Towards A New View. *Journal OfEconomic Surveys*, *33*(2), 389–403. https://doi.org/10.1111/joes.12286

Hurriyati, R., Razati, G., Sulastri, S., & Perdana Putra, N. (2016). Entrepreneur Skills on Business Performance of Small and Medium Enterprise. *Business and Management Research*, *15*(January 2016), 795–797. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.148

Hussain, N., & Li, B. (2022). *Entrepreneurial Leadership and Entrepreneurial Success : The Role of Knowledge Management Processes and Knowledge Entrepreneurship*. *March*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.829959

Imran, T., Ahmed, R. R., Streimikiene, D., & Soomro, R. H. (2019). Assessment of Entrepreneurial Traits and Small-Firm Performance with Entrepreneurial Orientation as a Mediating Factor. *Sustainability*, *11*(5301), 1–23.

Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market Orientation : Antecedents and Consequences. *Journal of Marketing*, *57*(3), 53–70.

Karimi, S., Biemans, H. J. A., Lans, T., Arnhem, H., & Arasti, Z. (2011). *Application of Structural Equation Modelling to Assess the Effect of Entrepreneurial Characteristics on Students ' Entrepreneurial Intentions*. *January*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2152932

Katz, R. L. (1955). Skills of an Effective Administrator. *Harvard Business Review*, *33*(1), 33–42.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)* (Issue 1).

Kim, G., Shin, B., Kim, K. K., & Lee, H. G. (2011). IT capabilities, process-oriented dynamic capabilities, and firm financial performance. *Journal of the Association for Information Systems*, *12*(7), 487–517. https://doi.org/10.17705/1jais.00270

Lai, C., & Jiang, Y. (2015). *Entrepreneurial Knowledge and the Influence of Entrepreneurship Education on Students ' Entrepreneurial Abilities*. *July*, 1–6.

Lamine, W., Fayolle, A., & Mian, S. (2014). How do social skills enable nascent entrepreneurs to enact perseverance strategies in the face of challenges ? A comparative case study of success and failure. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, *20(6)*(September), 517–541. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2013-0020

Lengnick-hall, C. A. (1992). Innovation and competitive advantage : what we know and what we need to learn. *Journal of Management*, *18*(2), 399+.

Lerner, M., & Almor, T. (2002). Relationships among strategic capabilities and the performance of women-owned small ventures. *Journal of Small Business Management*, *40*(2), 109–125. https://doi.org/10.1111/1540-627x.00044

Liñán, F., & Chen, Y.-W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *33*(3), 593–617.

Lowden, J. S. (1988). Managerial Skills for the Entrepreneur. In *Management Decision*. https://doi.org/10.1108/eb001505

Lundberg, C., & Fredman, P. (2012). Current Issues in Tourism Success factors and constraints among nature-based tourism entrepreneurs. *Current Issues in Tourism*, *15*(7), 37–41. https://doi.org/10.1080/13683500.2011.630458

Makhbul, Z. M. (2011). *Entrepreneurial Success : An Exploratory Study among Entrepreneurs*. *6*(1), 116–125.

Mamun, A. Al, & Fazal, S. A. (2019). *Entrepreneurial knowledge, skills, competencies and performance: A study of micro-enterprises in Kelantan, Malaysia*. *13*(1), 29–48. https://doi.org/10.1108/APJIE-11-2018-0067

Man, T. W. Y., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. *Journal of Business Venturing*, *17*(2), 123–142. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00058-6

Man, T. W. Y., Lau, T., & Snape, E. (2008). Journal of Small Business & Entrepreneurship Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises : An Investigation through a Framework of Competitiveness. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, *21(3)*(December 2014), 257–276. https://doi.org/10.1080/08276331.2008.10593424

March, J. G., & Sutton, R. I. (1997). Organizational Performance as a Dependent Variable. *Organization Science*, *8*(6), 698–706. https://doi.org/10.1287/orsc.1030.0054

Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003). Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others. *Human Resource Management Review*, *13*(2), 281–301. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00018-4

Markóczy, L. (2017). International Studies of Management & Organization Modes of Organizational Learning Modes of Organizational Learning. *International Studies of Management & Organization*, *8825*(December), 5–30. https://doi.org/10.1080/00208825.1994.11656642

Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human Capital and Entrepreneurship Research: A Critical Review and Future Directions. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, *40*(3), 599–626. https://doi.org/10.1111/etap.12136

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of Successful Entrepreneurs. *The Journal of Creative Behavior*, *21*(3), 219–233. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1987.tb00479.x

McDonald, R. E. (2002). *Knowledge Entrepreneurship: Linking Organizational Learning and Innovation*. University of Connecticut.

Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, *16*(2), 92–111. https://doi.org/10.1108/13552551011026995

Muñoz-Murillo, M., Álvarez-Franco, P. B., & Restrepo-Tobón, D. A. (2020). The role of cognitive abilities on financial literacy: New experimental evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Economics , 84*. https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101482

Nedumaran, G., Saroja, R., & phil Scholar, M. (2020). A Study on Support Digital Entrepreneurship. *Dogo Rangsang Research Journal*, *10*(6).

Novak, M., & Bojnec, Š. (2005). Human capital and economic growth by municipalities in Slovenia. *Managing Global Transitions*, *3*(2), 157–177.

Omerzel, D. G., & Antončič, B. (2008). Critical entrepreneur knowledge dimensions for the SME performance. *Industrial Management and Data Systems*, *108*(9), 1182–1199. https://doi.org/10.1108/02635570810914883

Potekhina, E. V., Gulina, I. V., Dmitrieva, O. V., Frolova, V. B., & Semenova, J. A. (2020). Increasing Labor Efficiency in the Area of Digital Entrepreneurship. *Revisia Inclusiones*, *7*, 137–145.

Rafiah, K. K., Widianto, S., Kamal, I., Shofiana, A., Malik, A., & Rudini, A. A. (2022). DIGITAL READINESS OF SMES : AN INSIGHT FROM INDONESIA. *AFEBI Management and Business Review*, 12–26.

Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country : Evidence from Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *195*, 142–150. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.423

Rezaei-Zadeh, M., Hogan, M., O'Reilly, J., Cleary, B., & Murphy, E. (2014). Using Interactive Management to Identify, Rank and Model Entrepreneurial Competencies as Universities' Entrepreneurship Curricula. *Journal of Entrepreneurship*, *23*(1), 57–94. https://doi.org/10.1177/0971355713513353

Roxas, B., Battisti, M., & Deakins, D. (2014). Learning , innovation and firm performance : knowledge management in small firms. *Knowledge and Manajement Research & Practice*, *12*(4), 443–453. https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.66

Rumengan, A. E., Rumengan, J., Wibisono, C., & Otok, B. W. (2018). *Structural Equation Modeling In Business Performance Through Competitive Advantage With Information Technology As Moderating*. *9*(10), 632–644.

Saba, T., Blanchettte, S., & Kronfli, C. (2021). *Supporting Entrepreneurship and SMEs: A Post-Pandemic Skills and Training Agenda* (Issue June).

Sadq, Z. M. (2019). THE ROLE OF LEADERSHIP SOFT SKILLS IN PROMOTING THE. *Journal of Process Management – New Technologies, International*, *7*(1), 31–48. https://doi.org/10.5937/jouproman7-20122

Schumpeter, J. A. (1947). The Creative Response in Economic History. *The Journal of Economic History*, *7(02)*, 149–159. https://doi.org/doi:10.1017/s0022050700054279

Shi, H. X., & Dana, L. P. (2013). Market orientation and entrepreneurship in Chinese family business: A socialisation view. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, *20*(1), 1–16. https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.055690

Smith, G. F. (2003). *Beyond Critical Thinking And Decision Making : Teaching Business Students How To Think* (Vol. 27, Issue 1). https://doi.org/10.1177/1052562902239247

Sule, A., Ojonimi, U., & Mohammed, A. (2020). Technical Skill and Entreprenuership Development in Nigeria. *International Journal of Entrepreneurship Studies*, *8*(4), 129–148.

Tehseen, S., & Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial competencies and smes business success: The

contingent role of external integration. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *6*(1), 50–61. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1p50

Wagener, S., Gorgievski, M., & Rijsdijk, S. (2010). Businessman or host? Individual differences between entrepreneurs and small business owners in the hospitality industry. *Service Industries Journal*, *30*(9), 1513–1527. https://doi.org/10.1080/02642060802624324

Whetten, D. A., & Cameron, K. S. (2007). Developing Managerial Skills. In *Prentice Hall*.

Wicaksono, T. Y. (2022). *Digital Technology Adoption and Indonesia ' s MSMEs during the COVID-19 Pandemic*. *426*.

Wu, W. Y., Chang, M. L., & Chen, C. W. (2008). Promoting innovation through the accumulation of intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation. *R and D Management*, *38*(3), 265–277. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2008.00512.x

Yuesti, A., Rustiarini, N. W., & Suryandari, N. N. A. (2020). Financial literacy in the covid-19 pandemic: Pressure conditions in indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *8*(1), 884–898. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(59)

Yusuf. (1995). Critical success factors for small business: perceptions of South Pacific entrepreneurs. *Journal of Small Business Management*, *33*, 68–73.

Zhou, S., Siu, F., Wang, M., Zhou, S., Siu, F., & Wang, M. (2013). *Effects of social tie content on knowledge transfer Effects of social tie content on knowledge transfer*. https://doi.org/10.1108/13673271011050157

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2016-2020

Fara Dina*
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The research aims to look at the leading sectors in West Kalimantan in 2016-2020. The research method in this study is to use a quantitative descriptive analysis. The type of data used is secondary data and is processed using multiple linear regression equipment. This research is expected to be input for research and useful for students who will conduct research.

***Keywords**: leading sector, economic growth.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran tentang pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju (Soebagiyo dkk, 2015).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan ekonomi. Memiliki luas wilayah sebesar 147.307 km persegi, dengan 12 Kabupaten dan 2 Kota menjadikan banyak yang perlu diperhatikan dalam membangun setiap wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah yang tepat dalam program pembangunan wilayah yang ada di Kalimantan Barat.

Pada saat ini, salah satu cara mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang digunakan adalah dengan melakukan analisis pendapatan provinsi tersebut. Analisis ini dapat berupa analisis internal pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi yang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2021, PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2020 mencapai 134 juta rupiah. Nilai ini dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah Kalimantan Barat selama tahun 2020 (Modes dkk, 2021).

* Email: faradina@ekonomi.untan.ac.id

2. KAJIAN LITERATUR

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,82 persen. Hal ini tak lain dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berefek pada perekonomian secara nasional tak terkecuali Kalimantan Barat. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan pembangunan guna memulihkan kembali perekonomian. Dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah, perlu diketahui sumber daya potensial yang ada di daerah tersebut sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Arsyad dalam Novita, 2013).

Mengenai sektor unggulan dengan ruang lingkup Provinsi Kalimantan Barat pernah dilakukan diantara oleh Achmad (2016) dan Jamaliah dan Kurniawan (2010), namun data yang digunakan bukan data terbaru. Dengan melakukan analisis internal pada PDRB dengan data terbaru, dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi basis dalam perekonomian di Kalimantan Barat terkini. Hal ini dapat membantu penentu kebijakan dalam memahami sektor yang potensial, perlu diperhatikan, dan harus didahulukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya sesuai dengan potensi yang ada saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai sektor unggulan agar dapat menjadi landasan strategi kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara umum menjelaskan bagaimana suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat yang dimaksudkan adalah kemajuan secara material, sehingga pembangunan lebih sering diartikan sebagai kemajuan yang diperoleh masyarakat dibidang ekonomi (Budiman 2000).

Teori Rostow dalam pembangunan ekonomi merupakan perubahan suatu negara dari ekonomi primitif menuju ekonomi maju yang dijelaskan dalam suatu tahapan yang dilewati suatu negara. Rostow membagi tahapan dari proses pembangunan tersebut menjadi lima tahapan yaitu (Todaro dan Smith 2003):

a. Tradisional, merupakan salah satu tahapan yang mana masyarakat pada umumnya berproduksi relatif masih primitif. Selain itu juga kehidupannya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai irasional yang berasalkan kebiasaan turun temurun. Pada tahapan ini sektor pertanian sebagai sektor utama.
b. Tahap prasyarat tinggal landas, merupakan tahapan transisi di mana masyakarat mulai mempersiapkan diri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini masyarakat mulai sadar akan pentingnya tabungan dan sejalan itu akan meningkatkan investasi. Selain itu, masyarakat mulai menemukan cara berproduksi lebih efisien untuk menekan biaya produksi.
c. Tahap tinggal landas, merupakan tahapan yang memiliki perubahan drastis dari dua tahapan sebelumnya. Masyarakat mulai menemukan inovasi-inovasi baru, terbukanya pasar-pasar baru, dan tentu saja adanya peningkatan investasi yang akan mengakibatkan laju pertumbuhan meningkat cepat. Selain itu terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sector)
d. Tahap menuju kedewasaan, merupakan tahapan yang mana masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi secara efektif dan mampu meningkatkan kegiatan produksi. Selain itu,

pada tahapan ini akan muncul leading sector baru yang akan menggantikan leading sector yang lama. Leading sector yang baru diasumsikan akan ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, kebijakan pemerintah, dan sifat-sifat dari tahap lepas landas.

e. Tahap konsumsi tinggi, merupakan tahapan akhir dari teori rostow yang mana atensi masyarakat akan ada kepada permasalahan konsumsi dan kesejahteraan, bukan lagi tentang bagaimana memproduksi secara efisein dan efektif. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ataupun menurunkan pertumbuhan. Kesuksesan Pembangunan dapat diindakasi melalui pertumbuhan ekonomi (Baxter dan Davis 2004). Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi, maka akan berakibat pada peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Prof. Simon Kuznets juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai meningkatnya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat Oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan teknologi yang maju. Definisi yang ia paparkan lainnya mengenai pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan secara berkelanjutan dalam produk per kapita dan sekaligus meningkatnya Jumlah penduduk serta adanya perubahan struktural ekonomi (Jhingan 1993).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah ialah peningkatan pendapatan per kapita suatu daerah melalui kenaikan nilai tambah yang terjadi di daerah tersebut. Pada awalnya, perhitungan pendapatan wilayah dibuat dengan menggunakan harga berlaku tahun yang dihitung dan diganti dengan menggunakan harga konstan atau harga yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperlihatkan bagaimana pertambahan nilai akhir barang dan jasa dari waktu ke waktu. Penerimaan regional merupakan bentuk timbal balik dari faktor produksi yang digunakan diwilayah tersebut dan menunjukkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Suatu wilayah dapat ditentukan kemakmuran dari besaran nilai tambah yang terjadi dan besaran transfer payment, yaitu dana yang didapat dari luar wilayah atau biasa disebut dana perimbangan (Tarigan 2005).

2.3 Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi memiliki landasan pandangan bahwasannya laju pertumbuhan ekonomi suatu regional berdasarkan besaran tingkat ekspor dari regional itu. (Tarigan 2005) menyebutkan mengenai teori basis ekonomi yang dikemukan oleh Tiebout. Tiebout menjelaskan adanya pembagian kegiatan produksi dalam suatu wilayah berdasarkan pekerjaan dasar (basis) dan pekerjaan service (pelayanan) atau kegiatan non basis. Ketidakbergantungan kondisi internal perekonomian suatu wilayah serta mampu mendorong pertumbuhan jenis pekerjaan lain merupakan sifat kegiatan yang dimiliki oleh kegiatan basis yaitu eksogen. Sedangkan kegiatan non basis ialah kegiatan yang bersifat endogen serta memiliki arti kegiatan penyediaan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhannya bergantung pada kondisi umum perekonomian daerah tersebut. Sektor non basis ialah sektor penyedia barang dan atau jasa untuk dipenuhi didaerah tersebut tanpa mengekspor komoditas dari kegiatan itu.

Berbeda dengan Tiebout yang melihat dari sisi produksi, Richardson melihat dari sisi pengeluaran yang mana meningkatnya permintaan barang dan jasa dari luar wilayah sebagai faktor utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tumbuhanya industri yang berproduksi dengan sumber daya yang dimiliki suatu daerah dalam berproduksi dan menghasilkan komoditas ekspor yang berdampak pada pendapatan serta lapangan pekerjaan merupakan sektor basis. Faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah Ialah sektor basis. Apabila sektor basis tersebut dapat mengekspor Komoditas dalam jumlah besar maka akan membantu memajukan pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, efek ganda akan berdampak pada perekonomian wilayah tersebut. Menurut (Glasson

1974), semakin banyaknya kegiatan basis dalam suatu perekonomian akan mengakibatkan peningkatan penerimaan ke daerah tersebut, meningkatkan permintaan Komoditas sektor tersebut, dan menimbulkan kenaikan volume sektor non basis. Pemilahan antara sektor basis dengan non basis bisa dikatakan cukup sulit.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif dengan pendekatan kuantitaif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara aktual (Kuncoro, 2013), sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara statistik (Sudjana, 2004).

3.1 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan *time series* atau runtut waktu (dari tahun 2016 sampai tahun 2020). Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari pemerintah provinsi kalimantan barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kalimantan Barat dan PDRB Pulau Kalimantan.

3.2 Analisis Data

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi industri. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan.

Teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut adalah (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:21). Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *location quotient* (LQ) yaitu mengidentifikasi PDRB provinsi Kalimantan Barat periode 2016-2020.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan ibukota bernama kota Pontianak. Populasi penduduk Kalimantan Barat sejumlah 5.470.797 orang. Luas wilayah Kalimantan Barat adalah 146.807 km^2, wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat

antar negara dari Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan dua 89 Kota. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia.

4.2 Perkembangan dan Perhitungan PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan PDB Indonesia Tahun 2016-2020 Menggunkan Pendekatan *Location Quotient*

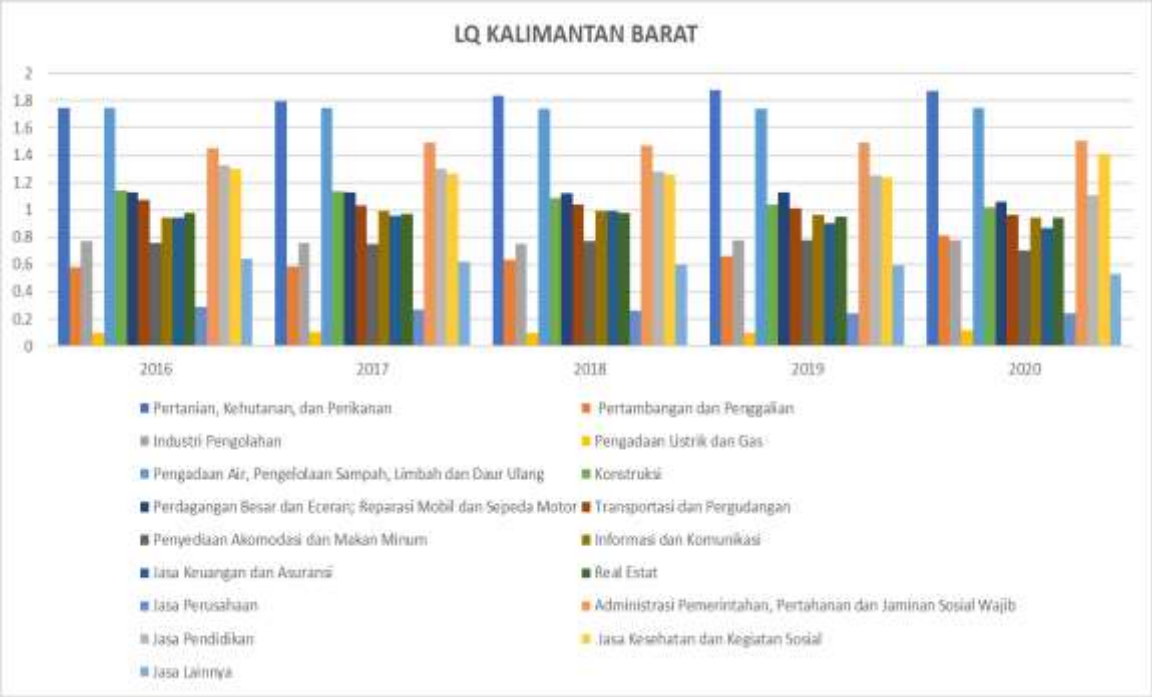

Berdasarkan data PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2016-2020, dilakukan perhitungan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mendapatkan keunggulan komparatif provinsi dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hasil perhitungan *indeks Location Quetient* (LQ) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020, dapat diklasifikasikan menjadi sektor basis dan nonbasis (Tabel 1). Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa terdapat 8 sektor yang memiliki nilai rata rata LQ lebih dari 1 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor-sektor ini merupakan sektor basis, sektor yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil perhitungan formula LQ, data sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan PDB Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rata-Rata LQ Provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia 2016-2020

No	Sektor Ekonomi	Rata-rata LQ	Basis/Non-Basis
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.83	Sektor Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.65	Sektor Non Basis
3	Industri Pengolahan	0.77	Sektor Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	Sektor Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.74	Sektor Basis
6	Konstruksi	1.08	Sektor Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.11	Sektor Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1.02	Sektor Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.75	Sektor Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.97	Sektor Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.93	Sektor Non Basis
12	Real Estat	0.96	Sektor Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.26	Sektor Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.48	Sektor Basis
15	Jasa Pendidikan	1.25	Sektor Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.30	Sektor Basis
17	Jasa Lainnya	0.59	Sektor Non Basis

Berdasarkan. hasil analisis *Location Quotient* (LQ) yang tersaji pada Tabel 1 bahwa sektor yang memiliki keunggulan pada Provinsi kalimantan Barat adalah sektor pertanian karena merupakan salah satu sektor basis di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki nilai LQ sebesar 1.83. Secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat memiliki sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di wilayah tersebut, dapat terlihat dari hasil nilai LQ yang menunjukan bahwa memiliki nilai LQ > 1 di beberapa sektor tertentu. Dengan memiliki nilai LQ > 1 maka dapat disimpulkan bahwa provinsi Kalimantan Barat tersebut memiliki basis di sektor pertanian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor kategori basis dengan nilai LQ yang meningkat secara stabil. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi tertinggi di antara sektor lainnya dalam perekonomian Kalimantan Barat, menjadikan sektor ini kegiatan basis yang sangat bagus untuk dikembangkan karena memberikan dampak positif bagi Provinsi Kalimantan Barat.

5. Kesimpulan

Analisis perhitungan LQ Kalimantan Barat menghasilkan kesimpulan bahwa Provinsi Kalimantan Barat hanya memiliki 8 sektor yang menjadi basis ekonomi dan sisanya 9 sektor merupakan sektor nonbasis. Sektor basis tersebut antara lain Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut menandakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak pilihan dalam sektor basis ekonomi untuk dijadikan fokus dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. Pengatar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1999.

Basuki, M. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 15(1), 52-60.

Basuki, Agus Tri, dan Utari Gayatri. "Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir." Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009: 34-50.

Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 193-205.

Modes, J. T., & Hidayah, R. N. (2021, September). Analisis Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat: *Analysis of Leading Sector in West Kalimantan Province*. In Forum Analisis Statistik (Vol. 1, No. 1, pp. 35-45).

Novita, U. D. (t.thn.). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jurnal Ekonomi, 1-23.

Soebagiyo, D., & Hascaryo, A. S. (2015). Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah.

Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). Analisis Sektor Unggulan Menggunakan data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). Jurnal Gaussian, 219-228.

COVID-19 PANDEMIC, POVERTY ALLEVIATION AND SDGs IN KALIMANTAN BARAT

Nurul Bariyah[*]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic is expected to delay the completion of Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. SDGs in Indonesia, including Kalimantan Barat, aims to alleviate poverty, improve health, education, and food and nutrition security. This study aims to describe the typology of poverty, education, and health, through cross-analysis between poverty and education and between poverty and health in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat for 2014, 2019, and 2021, namely the period before and after the COVID-19 pandemic. This research was done in the form of a quantitative descriptive analysis, using a graphical approach in the form of Cartesian diagrams and scatter diagrams. The estimation results for 2014, 2019 and 2021 show inconsistencies in macro and development indicators in most regencies/cities in West Kalimantan Province. Two regions are consistently in the highest quadrant, with a low poverty level, a high education level, a high health level, and those regions are Kota Singkawang (2014 & 2021) and Kota Pontianak (2019). Meanwhile, one region that is consistently in the lowest quadrant, with a high poverty level, a low education level, a low health level, is Kabupaten Sambas, but only at 2014. Other regencies/cities, both in 2014 and in 2019 were in between these two categories. This research can enrich the empirical analysis of the relationship between poverty levels and education and health indicators as the basis for making policies that support the achievement of the Sustainable Development Goals.

Keywords: *Poverty; Education; Health; Cartesian; Diagram*

1. INTRODUCTION

Already the 16th-largest economy in the world, Indonesia has made enormous strides in its macroeconomic management. Over the past decade, Indonesia's economic growth showed a slowdown, moderate acceleration, and stagnation. The detection of the first COVID-19 case on March 2020 marked a turning point, with fundamental changes in government policy, behavior of the people as well as the general economic and social performance. Despite all efforts, the impact towards growth was quite significant.

Table 1. Human Developmant Indicators of Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021

Tahun	Unemployment	Poverty	HDI	Gini Ratio
2014	4,04%	8,54%	64,89	0,391
2019	4,35%	7,49%	67,65	0,318
2021	5,82%	7,15%	67.90	0,315

[*] Email: nurul.bariyah@ekonomi.untan.ac.id

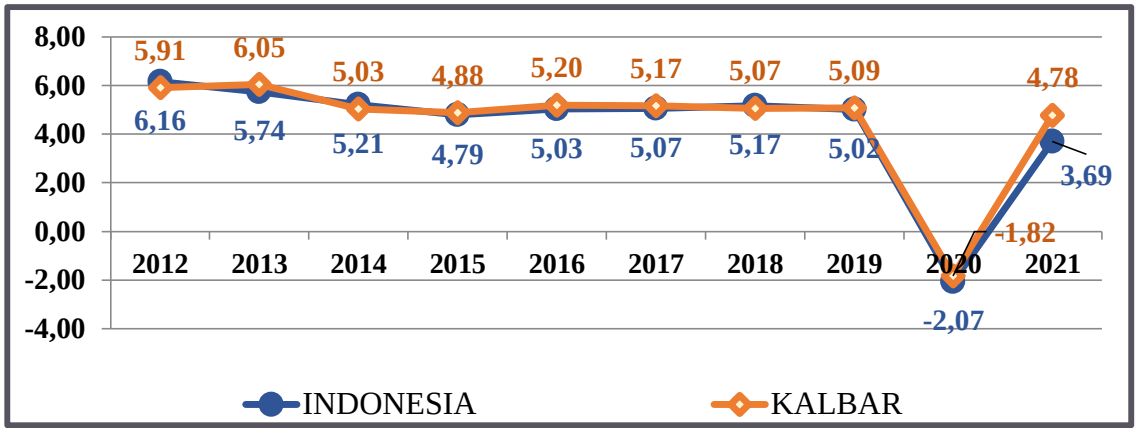

Graph 1. Economic Growth of Indonesia and Kalimantan Barat Province Year 2012-2021

Between 2014 and 2021 the proportion of people living in poverty fell from 10.96% to 9.71%. In 2014, Indonesia's poverty rate was at 10.96% (above the hardcore poverty threshold of 10%), and in 2019 this figure has fallen considerably to 9.22%, but increased to 9.71% in 2021 that occurred due to COVID.

Kalimantan Barat Province showed a slightly different trend with a poverty rate of 8.54% in 2014, 7.49% in 2019, and 7.15% in 2021. The poverty rate of Kalimantan Barat Province is always lower than the national poverty rate. In absolute terms, the number of poor people in Indonesia between 2014-2019 decreased by almost 3 million people, but increased by more than 1.7 million people between 2019-2021; while the poor population of West Kalimantan decreased by more than 11,450 people between 2014-2019, and decreased by more than 16,470 people between 2019-2021 (BPS Province of West Kalimantan, 2021). Other performance of Kalimantan Barat Province over some indicators of human development is presented in a Table 1.

Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia, including Kalimantan Barat, aims to alleviate poverty, improve health, education, and food and nutrition security. This study aims to describe the typology of poverty, education, and health, through cross-analysis between poverty and education and between poverty and health in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat for 2014, 2019, and 2021, namely the period before and after the COVID-19 pandemic

2. METHODOLOGY

In order to achieve the research objectives, this research relies on secondary data. The secondary data is obtained from the Central Statistics Agency and other relevant agencies, in the form of statistical publications and other relevant documents. The secondary data used is cross section data covering 14 regencies/cities in West Kalimantan Province, including social and population data covering poverty, education and health data in 2014, 2019, & 2021. Year 2014 & year 2019 was taken with the consideration that this year is the final year of the West Kalimantan Province Long-Term Development Plan 2005-2025, the second and third stages.

The research location is West Kalimantan Province which is divided into 14 urban regencies, namely Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau,

Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, and Kota Singkawang.

The indicators used in this study consists of" Poverty Level, Expected Years of Schooling, Average Years of Schooling, Life Expectancy, and Percentage of BPJS Kesehatan Participants. This study uses descriptive analysis using a graphical approach to describe patterns or trends and make comparisons of the object under study. The form of analysis used in this part of the research is by analysis of Cartesian diagrams and scatter diagrams.

Cartesian Diagram

The cartesian diagram is defined as a two-dimensional coordinate diagram, which is formed by the intersection of the x-axis and y-axis. The diagram is used to visualized data points on a diagram by showing their position against the two axes.

The Cartesian diagram requires two axes which are used to calculate correctly the position of each data point. The diagram has four quadrants each bounded by half of the axes. Each quadrant is denoted by Roman numerals and named as Quadrant I, Quadrant II, Quadrant III, and Quadrant IV based on their position with respect to the axes.

Each quadrant shows a single dependent variable represented by a vertical line in the center part of its quadrant by "poverty", and independent variables i.e., "health" and "education" by horizontal lines.

- Quadrant I: both x and y-coordinates are positive.
- Quadrant II: the x-coordinate is negative and the y-coordinate is positive.
- Quadrant III: both x and y-coordinates are negative.
- Quadrant IV: the x-coordinate is positive and the y-coordinate is negative.

It should be noted that the quadrants are numbered in an anti-clockwise direction.

In this research, the Cartesian diagram is used as a regional typology analysis tool to determine the pattern and structure of poverty in each region. Regional typology divides regions into four categories, namely (1) areas with high poverty and higher education; (2) areas with low poverty and higher education; (3) areas with low poverty and low education; and (4) areas with high poverty and low education. More details on the classification can be seen in Table 2.

Table 2. Regional Typology of Poverty vs Education

Poverty	**Education**	
	(y_i>y)	**(y_i<y)**
(r_i>r)	Quadrant I: High poverty rate & high education level	Quadrant IV: High poverty rate & low education level
(r_i<r)	Quadrant II: Low poverty rate & high education level	Quadrant III: Low poverty rate & low education level

Whereas:

r : poverty rate of Kalbar Province

y : education level of Kalbar Province

r_i : poverty rate of observed regency/city (i)

y_i : education level of observed regency/city (i)

Furthermore, regional typology analysis also divides regions into four categories, namely (1) areas with high poverty rates and high health outcome; (2) areas with low poverty rates and high health outcome; (3) areas with high poverty rates and low health outcome; and (4) areas with low poverty rates and low health outcome. More details of the classification can be seen in Table 3.

Table 3. Regional Typology of Poverty vs Health

Poverty	**Health**	
	(y_i>y)	**(y_i<y)**
(r_i>r)	Quadrant I: High poverty rate & high health outcome	Quadrant III: High poverty rate & low health outcome
(r_i<r)	Quadrant II: Low poverty rate & high health outcome	Quadrant IV: Low poverty rate & low health outcome

Whereas:
r : poverty rate of Kalbar Province
y : health outcome of Kalbar Province
r_i : poverty rate of observed regency/city (i)
y_i : health outcome of observed regency/city (i)

Scatter Diagram/Scatter Plot

Scatter Diagram is a tool for analyzing the relationship between two variables to determine how closely the two variables are related. In this study, a scatter diagram is used to show the possible relationship (correlation) between pairs of two variables, namely the level of poverty and the level of education, as well as the level of poverty and the outcome of health. Scatter diagrams are used to map the poverty level associated with the two variables above into 4 regional classifications (quadrants) separated by a vertical axis (independent variable) and a horizontal axis (dependent variable). The results of this mapping will form a certain pattern that will provide an overview of the relationship or correlation of the two observed variables.

3. RESULTS

3.1. Poverty Rate and Absolute Poverty

Low income is often considered the main cause of poverty, followed by education (Margareni et al., 2016), but in reality, poverty rarely has a single cause. There are various factors that cause poverty, some of them were the cost of living, wage levels, job opportunities, social security benefits, and access to resources.

In a span of 5 years the poverty rate in Kalimantan Barat Province decreased by 1.05%, from 8.54% in 2014 to 7.49% in 2019; then in the next 3 years decreased again by 0.34% to 7.15% in 2021 (Table 4). Between 2014 and 2019 the three regencies/cities that have the highest poverty reduction rates were Kabupaten Landak (2.24%), Kabupaten Sambas (-1.27%), and Kabupaten Ketapang (-1.06%). Between 2019 and 2021 the three regencies/cities were Kabupaten Kapuas Hulu (-0,69%), Kabupaten Kayong Utara (-0,65%), and Kabupaten Sambas (-0,53%).

Table 4. Poverty Rate of Kabupaten/Kota in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Percent)

Kabupaten/Kota	Poverty Rate by Regencies/Cities (%)		
	2014	2019	2021
Kalimantan Barat Province	8.54	7.49	7.15
Kabupaten Sambas	9.46	8.19	7.66
Kabupaten Bengkayang	7.20	6.96	6.48
Kabupaten Landak	13.71	11.47	10.99
Kabupaten Mempawah	6.00	5.32	5.18
Kabupaten Sanggau	4.47	4.57	4.55
Kabupaten Ketapang	11.60	10.54	10.13
Kabupaten Sintang	9.11	9.65	9.28
Kabupaten Kapuas Hulu	10.03	9.62	8.93
Kabupaten Sekadau	6.31	6.11	6.26
Kabupaten Melawi	12.40	12.38	12.01
Kabupaten Kayong Utara	9.55	9.98	9.33
Kabupaten Kubu Raya	5.45	4.74	4.34
Kota Pontianak	5.15	4.88	4.58
Kota Singkawang	5.88	4.91	4.83

Source: BPS Kalimantan Barat, 2022

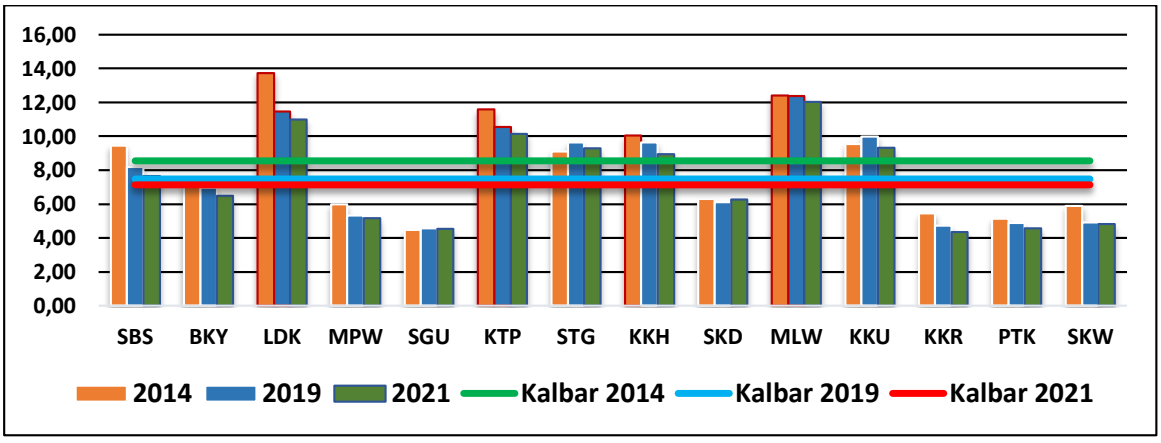

Graph 2. Poverty Rate of Kabupaten/Kota in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Percent)

Meanwhile, between 2014 and 2019 the regencies/cities that experienced an increase in poverty levels were Kabupaten Sanggau (+0.10%), Kabupaten Kayong Utara (+0.43%), and Kabupaten Sintang (+0.54%). Between 2019 and 2021 the increased was only experienced by Kabupaten Sekadau (Graph 2). In 2014, there were four regencies/cities with poverty rates above above 10%, namely Kabupaten Landak (13.71%), Kabupaten Melawi (12.40%), Kabupaten Ketapang (11.60), and Kabupaten Kapuas Hulu (10.03%). In 2019, there were only three, namely Kabupaten Melawi (12.38%), and Kabupaten Landak (11.47%). In 2021, there were Kabupaten Melawi (12.01%), Kabupaten Landak (10.99%), and Kabupaten Ketapang (10.13%).

The percentage of poor people being at 10% is considered the limit of chronic poverty or hardcore poverty in a region. Chronic poverty means empowering programs poverty alleviation will not have much of an effect in pushing people out of poverty. For this reason, a more multi-dimensional approach is needed in mapping problems and determining strategic steps (Lubis, 2017; Siregar, 2019). The data shows that along those years (2014-2021), there were no large increases in poverty in most regencies/cities. The poverty even gradually decreased in most regencies/cities. This is due to the income sectors that was least affected by the pandemic, which in turn lead people to experiencing less severe negative income shocks. The government's support also mitigated the income declines for poor people in general.

3.2. Level of Education

Education is an important means of implementation for sustainable development goals (Kioupi & Voulvoulis, 2019). Theoretically, higher education provides better job opportunities in the formal sector with better incomes, thus enabling a person to move out of poverty. In other words, those with better education tend to leave the informal sector (Taufiq & Dartanto, 2020).

Education is also an important dimension in calculating the Human Development Index (HDI), as measured by Expected Years of Schooling (EYS) and Mean Years of Schooling (MYS) (Yuliani, 2016; Fauzan et al., 2020; Kadri et al., 2020; Mahya & Widowati, 2021). The level of education represented by Expected Years of Schooling (EYS) and Average Years of Schooling (MYS) in Kalimantan Barat Province in year 2014, 2019 and 2021 shows a consistent increase across regencies/cities (Graph 3 and Graph 4).

1. Expected Years of Schooling (EYS)

The Expected Years of Schooling (EYS) in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat Province has exceeded the 9-year compulsory education law. In 2014 there were 4 regencies/cities with better EYS achievements than Kalimantan Barat Province (11.89 years), namely Kota Pontianak (13.84 years), Kota Singkawang (12.80 years), Kabupaten Kubu Raya (12, 34 years), and Kabupaten Landak (12.00 years). The national EYS in this year was 12.39 years. The achievements of these four regencies/cities indicate that people aged 7 years who enter formal education in the same year have the opportunity to attend school equivalent to Diploma I & II (Table 5).

In 2019 better achievements than Kalimantan Barat Province (12.58 years) were obtained by 3 regencies/cities, namely Kota Pontianak (14.99 years), Kabupaten Kubu Raya (13.64 years), and Kabupaten Sambas (12.60 years). Kota Pontianak with the highest EYS achievement indicates the opportunity for children aged 7 years to go to school equivalent to Diploma III, while children of the same age in Kabupaten Kubu Raya have the opportunity to go to school equivalent to Diploma II. The achievements of these two regencies/cities are even better than the national EYS achievement which is at 12.95 years. (UNDP, 2019).

In 2021 there were also 4 regencies/cities with better EYS achievements than Kalimantan Barat Province (12.65 years), namely Kota Pontianak (15.01 years), Kota Singkawang (12.91 years), Kabupaten Kubu Raya (13.87 years), and Kabupaten Mempawah (12.65 years). The national EYS in this year was 13.08 years. The achievements Kota Pontianak indicates that people aged 7 years who enter formal education in the same year have the opportunity to attend school equivalent to bachelor degree.

Table 5. Expected Years of Schooling (EYS) in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

Kabupaten/Kota	Expected Years of Schooling (EYS) by Regencies/Cities (Years)		
	2014	2019	2021
Kalimantan Barat Province	11,89	12,58	12,65
Kabupaten Sambas	11,46	12,60	12,63
Kabupaten Bengkayang	11,11	12,08	12,10
Kabupaten Landak	12,00	12,39	12,43
Kabupaten Mempawah	11,75	12,33	12,65
Kabupaten Sanggau	10,60	11,56	11,59
Kabupaten Ketapang	10,90	11,79	11,81
Kabupaten Sintang	10,25	12,02	12,04
Kabupaten Kapuas Hulu	11,80	12,04	12,08
Kabupaten Sekadau	11,12	11,57	11,89
Kabupaten Melawi	10,65	11,15	11,17
Kabupaten Kayong Utara	10,89	11,81	11,84
Kabupaten Kubu Raya	12,34	13,64	13,87
Kota Pontianak	13,84	14,99	15,01
Kota Singkawang	12,80	12,89	12,91

Source: BPS Kalimantan Barat, 2022

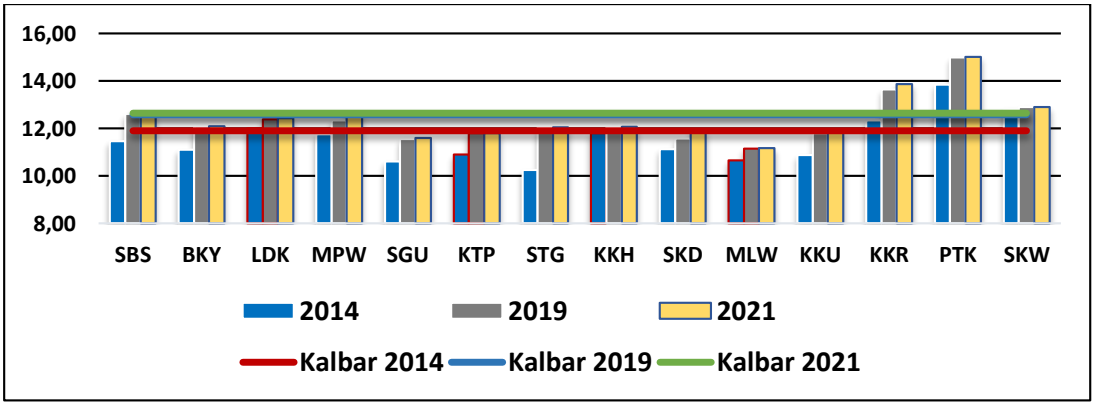

Graph 3. Expected Years of Schooling (EYS) in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

UNDP sets the Expected Years of Schooling (EYS) of 15 years as the maximum number of years in calculating the Human Development Index (HDI). Meanwhile, the new National Education System Bill (RUU Sisdiknas) on 13-year compulsory education noting that in some regencies/cities the achievement has not met the requirements yet. The slow EYS growth rate may be due to one of the reasons for the low educational participation rate of the 13-15 year and the 16–18-year-olds group.

The government needs to pay more attention to the educational dimensions because they are related to the quality of Kalimantan Barat's human resources both in the regional and national arenas. The 12-year compulsory education program to increase school participation, especially in the 16–18-year age group might be the right solution for this.

2. Mean Years of Schooling (MYS)

The Mean Years of Schooling (MYS) has the advantage of describing the distribution of educational attainment in one number. Lestari & Setyadharma (2019) in their research states that the poverty rate has a significant negative effect on the Average Length of Schooling. Wijaya & Suasih (2021) has also made similar statements in relation to government budget allocation.

Table 6. Mean Years of Schooling (MYS) in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

Kabupaten/Kota	Average Years of Schooling (AYS) by Regencies/Cities (Years)		
	2014	2019	2021
Kalimantan Barat Province	6,83	7,31	7,45
Kabupaten Sambas	5,80	6,70	6,72
Kabupaten Bengkayang	5,97	6,53	6,80
Kabupaten Landak	7,05	7,10	7,12
Kabupaten Mempawah	6,33	6,82	7,04
Kabupaten Sanggau	6,37	6,95	7,39
Kabupaten Ketapang	6,22	7,26	7,46
Kabupaten Sintang	6,63	6,89	7,08
Kabupaten Kapuas Hulu	6,65	7,47	7,53
Kabupaten Sekadau	6,54	6,60	6,85
Kabupaten Melawi	6,00	6,67	6,91
Kabupaten Kayong Utara	5,19	6,00	6,02
Kabupaten Kubu Raya	6,41	6,82	7,00
Kota Pontianak	9,62	10,14	10,43
Kota Singkawang	7,26	7,72	7,90

Source: BPS Kalimantan Barat, 2022

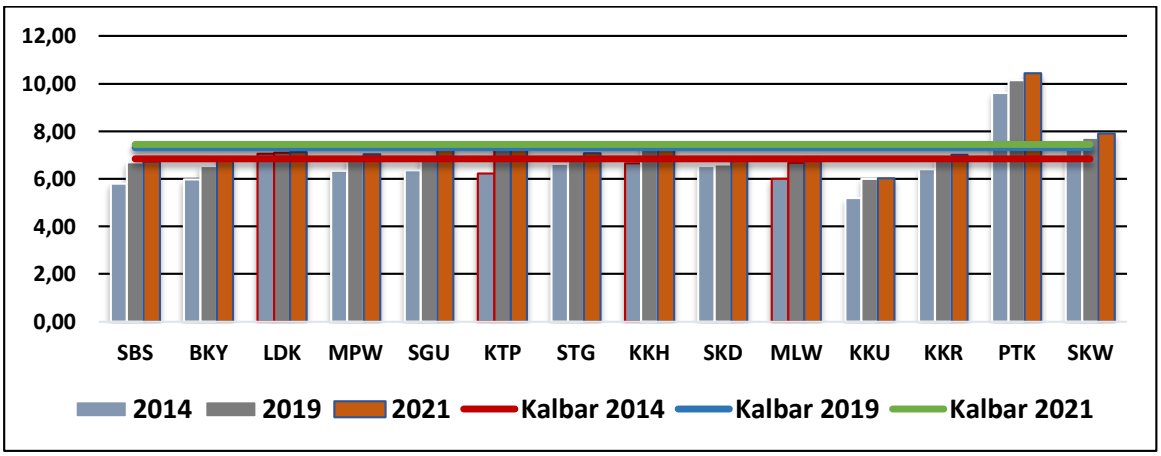

Graph 4. Mean Years of Schooling (MYS) in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

Better regional achievements in terms of MYS compared to Kalimantan Barat Province (6.83 years) in 2014 were obtained by 4 regencies/cities, namely Kota Pontianak (9.62 years), Kota Singkawang (7.26 years), Kabupaten Landak (7 0.05 years), and Kabupaten Melawi (8.00 years). While in 2019, better achievements than Kalimantan Barat Province (7.31 years) were obtained by 3 regencies/cities, namely Kota Pontianak (10.14 years), Kota Singkawang (7.72 years), and Kabupaten Kapuas Hulu (7.47 years). In 2021, better achievements than Kalimantan Barat Province (7.45 years) were obtained by 3 regencies/cities, namely Kota Pontianak (10.43 years), Kota Singkawang (7.90 years), Kabupaten

Kapuas Hulu (7.53 years), and Kabupaten Ketapang (7,46 years) (Table 6).MYS achievements in these 14 regencies/cities are still below the national record of 8.2 (UNDP, 2019), but there may be differences in perception where the Indonesian Central Statistics Agency sets the age of 15 years while UNDP uses the age of 25 as a benchmark in determination of this MYS,

BPS defines MYS as the average number of years spent by residents aged 15 years and over to take all types of education that have been undertaken, regardless of whether they have ever failed a grade or not. Kota Pontianak is the only regency/city based on MYS that is considered capable of exceeding the 9-year basic education target (SMP/MTs/Package B). In 2019 & 2021 Kota Pontianak is again the only regency /cities that achieved this feat.UNDP sets the Mean Years of Schooling (MYS) of 18 years as the maximum number in calculating the Human Development Index (HDI). Kalimantan Barat Province and all 14 regencies/cities in year 2014, 2019 and 2021 are still far from this maximum number.

3.3. Health Level

1. Life Expectancy

The level of healthiness in this study was measured by Life Expectancy and the percentage of BPJS Health participants in each regency/city. All regencies/cities showed a consistent increase from 2014 to 2019, and to 2021 (Table 7, Graph 5)

Table 7. Life Expectancy in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

Kabupaten/Kota	Life Expectancy by Regencies/Cities (Years)		
	2014	2019	2021
Kalimantan Barat Province	69,76	70,56	70,76
Kabupaten Sambas	67,74	68,83	69,08
Kabupaten Bengkayang	72,89	73,67	73,84
Kabupaten Landak	71,97	72,70	73,04
Kabupaten Mempawah	70,28	70,90	71,18
Kabupaten Sanggau	70,28	71,35	71,42
Kabupaten Ketapang	70,51	71,01	71,11
Kabupaten Sintang	70,95	71,62	71,84
Kabupaten Kapuas Hulu	71,94	72,44	72,53
Kabupaten Sekadau	70,80	71,65	72,05
Kabupaten Melawi	72,38	72,88	72,98
Kabupaten Kayong Utara	67,03	68,11	68,48
Kabupaten Kubu Raya	69,64	70,43	70,69
Kota Pontianak	72,01	72,80	73,12
Kota Singkawang	70,84	71,85	72,18

Source: BPS Kalimantan Barat, 2022

In 2014, 2019 and 2021, there were only 3 regencies/cities with lower Life Expectancy than the Kalimantan Barat Province, namely Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, and Kabupaten Kubu Raya in 2014; Kabupaten Sambas, and Kabupaten Kayong Utara in 2019 and 2021. All other regencies/cities have better achievements than the provincial figures. This is generally indicating an improvement in the quality of public health compared to previous years.

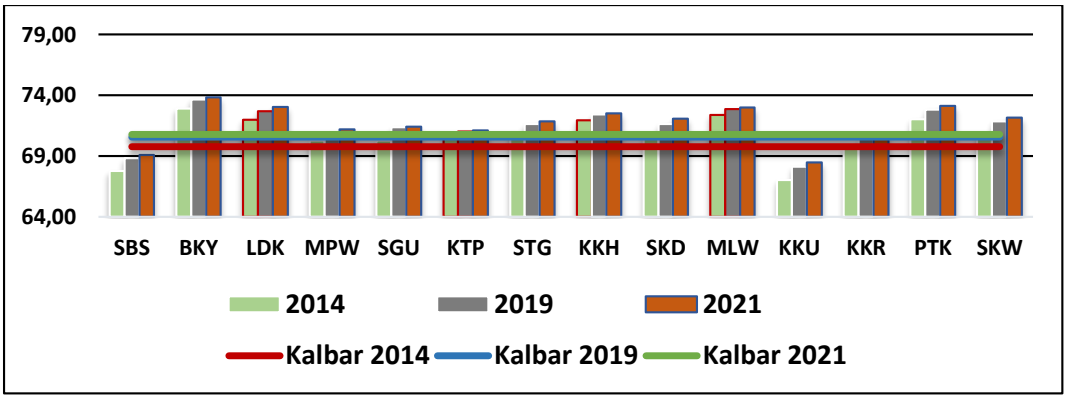

Graph 5. Life Expectancy in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (Years)

2. Percentage of BPJS Health Participants

Better regional achievements in terms of the percentage of BPJS Health participants compared to Kalimantan Barat Province in 2014 were obtained by 7 out of 14 regencies/cities (50%), namely Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, and Kabupaten Kubu Raya (Table 8, Graph 6).

Table 8. Percentage of BPJS Health Participants in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (%)

Kabupaten/Kota	Percentage of BPJS Health Participants by Regencies/Cities (%)		
	2014	2019	2021
Kalimantan Barat Province	42,12	43,67	51,58
Kabupaten Sambas	36,69	42,51	47,85
Kabupaten Bengkayang	39,62	45,96	55,95
Kabupaten Landak	58,48	48,30	61,68
Kabupaten Mempawah	55,51	43,28	56,84
Kabupaten Sanggau	25,04	34,90	41,84
Kabupaten Ketapang	37,56	42,97	42,99
Kabupaten Sintang	43,59	42,30	55,05
Kabupaten Kapuas Hulu	42,99	36,42	46,83
Kabupaten Sekadau	36,86	33,60	44,53
Kabupaten Melawi	38,81	35,03	45,84
Kabupaten Kayong Utara	78,13	64,28	79,64
Kabupaten Kubu Raya	42,72	43,14	49,22
Kota Pontianak	41,03	47,75	53,63
Kota Singkawang	48,96	63,85	69,18

Source: BPS Kalimantan Barat, 2022

In 2019, it was obtained by 5 out of 14 regencies/cities (35,7), namely Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, and Kabupaten Bengkayang. Meanwhile, in 2021, it was obtained by 7 out of 14 regencies/cities (50), namely Kabupaten Kayong

Utara, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, and Kota Pontianak.

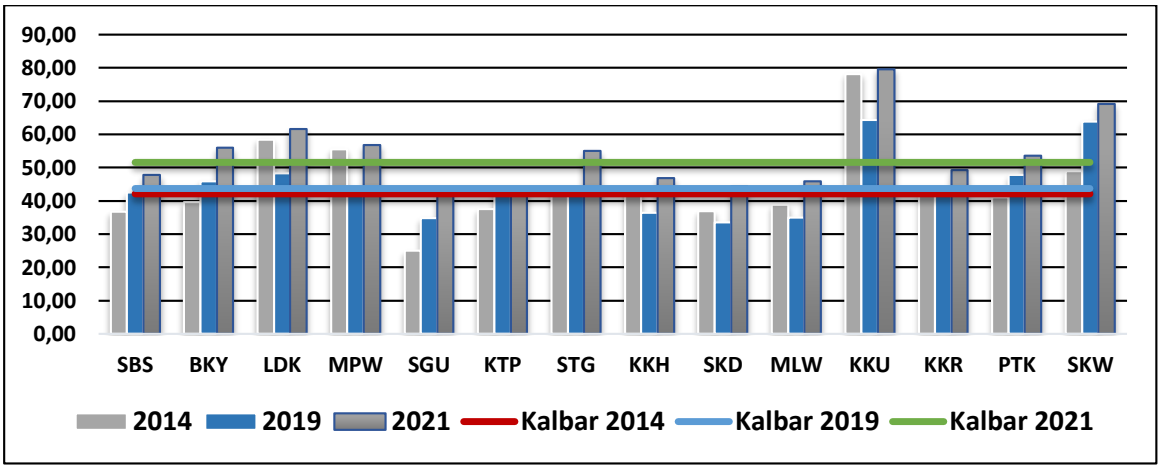

Graph 6. BPJS Health Participants in Kalimantan Barat Province Year 2014, 2019 & 2021 (%)

Although the record of achievement between 2014-2019 shows an increase in 7 regencies/cities, and a decrease in 7 other regencies/cities, BPJS Health membership in West Kalimantan Province and in 14 regencies/cities is still far from Universal Health Coverage (UHC) to be achieved in early 2019 with the number of BPJS Health participants as much as 95 percent of the total population (BPJS Health, 2018). One of the influencing factors is that there are still many people who do not have a more thorough understanding of BPJS Health, both the benefits that can be provided by BPJS Health as well as the purpose of this health insurance program, which in turn affects the interest of the community to register themselves as participants (Thobibah et al., 2020). Between 2019-2021, the percentage of participants in West Kalimantan Province and in 14 regencies/cities increased, significantly with more than 10% increase in 7 out of 14 regencies/cities (50%). Although the figures are still far from 95% target.

3.4. Regional Typology Analysis

Regional typology groups regions by comparing the regional poverty level with the level of education, and comparing the regional poverty level with the health level.

1. Typology of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province based on Poverty Levels and Education Level

Education is human capital, where a person's level of education affects the productivity level of that person. This productivity in turn will also affect income, consumption ability, and the ability to get out of poverty, both individually and regionally. Thus, it can be said that education with poverty has negative direct relationship (Seran, 2017; Suripto & Subayil, 2020; Arfiyani et al., 2020).

In this study, regencies/cities in Kalimantan Barat Province are classified into four quadrants, namely Quadrant I (high poverty and high education level); Quadrant II (low poverty rate and high education level); Quadrant III (low poverty rate and low education level); and Quadrant IV (high poverty rate and low education level). While the scatter diagram for regional typology analysis based on these two variables is shown in the graph.

a. Typology of Poverty and Expected Years of Schooling (EYS)

In 2014 and 2019, out of 14 regencies/cities, only one regency/city (0,07%) were in Quadrant I with a high poverty rate and high EYS, with 3 regencies/cities (21.43%) located in Quadrant II, with low poverty rates and high EYS. The highest number of regencies/cities is in Quadrant IV, with 6 regencies/cities (42.86%) where the poverty rate is high, and the EYS is low. The remaining 4 regencies/cities (28.57%) are in Quadrant III with low poverty rates and low EYS (Table 9).

In 2021, there were only 2 regencies/cities (14,29%) in Quadrant I, while 4 other regencies/cities (28,57%) were in Quadrant II, 3 regencies/cities (21,43%) were in Quadrant III, and the highest number of 5 regencies/cities (35,71%) were in Quadrant IV.

Table 9. Typology of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Expected of Years of Schooling in 2014, 2019 & 2021

QUADRANT I High poverty rate & high EYS			QUADRANT IV High poverty rate & low EYS		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
Landak	Sambas	Sambas	Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	Kapuas Hulu
		Landak	Kayong Utara	Kayong Utara	Kayong Utara
			Ketapang	Ketapang	Ketapang
			Melawi	Melawi	Melawi
			Sintang	Sintang	Sintang
			Sambas	Landak	
QUADRANT II **Low poverty rate & high EYS**			**QUADRANT III** **Low poverty rate & low EYS**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
Pontianak	Pontianak	Pontianak	Mempawah	Mempawah	Sekadau
Singkawang	Singkawang	Singkawang	Sekadau	Sekadau	Bengkayang
Kubu Raya	Kubu Raya	Kubu Raya	Bengkayang	Bengkayang	Sanggau
		Mempawah	Sanggau	Sanggau	

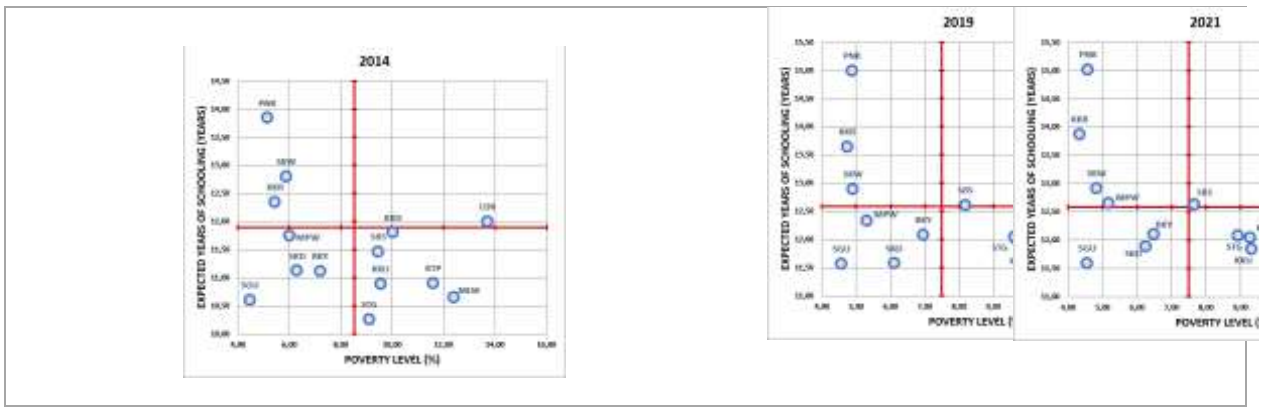

Graph 7. Scatter Diagram on Poverty Levels and EYS Year 2014, 2019 & 2021

From the scatter diagram in Graph 7, it can be seen how far or close the position of each regency/city is to the average axis and ideal conditions which are located in Quadrant II (bottom left), where poverty rates are low and EYS is high. Likewise with changes in position each regency/city can be seen by comparing the scatter diagrams for 2014, 2019, and 2021.

If you look at the distribution of points in the three graphs (2014, 2019, & 2021) there is no clear correlation between the two variables. The data points are spread irregularly and do not form a pattern that tends to be linear. Thus, it can be concluded that there is no correlation. between the poverty level and the Expected Years of Schooling in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat Province in year of 2014, 2019 and 2021.

b. Typology of Poverty Level and Mean Years of Schooling

In 2014, there were 2 regencies/cities each (14.29%) in Quadrant I with a high poverty rate and high MYS and Quadrant II with low poverty rates and high MYS, while the number of regencies/cities in Quadrant III with low poverty rates and low MYS and Quadrant IV where the poverty rate is high, and the MYS is low were each consist of 5 regencies/cities (35.71%) (Table 10).

In 2019, out of 14 regencies/cities only one regency/city (0,07%) were in Quadrant I, with 2 regencies/cities (14.29%) located in Quadrant II. The highest number of regencies/cities is in Quadrant IV, with 6 regencies/cities (42.86%). The remaining 5 regencies/cities (35.71%) are in Quadrant III.

On the other hand, in 2021 , the number of regencies/cities in Quadrant I & IV were the same with the 2014 numbers, with an increase in the number of regencies/cities in Quadrant II from 2 to 3 (21.43%), and decreasing number in Quadrant III from 5 to only 4 (28.57%) .

Table 10. Typology of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Mean of Years of Schooling in 2014, 2019 & 2021

QUADRANT I **High poverty rate & high MYS**			**QUADRANT IV** **High poverty rate & low MYS**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Melawi	◦ Kapuas Hulu	◦ Ketapang	◦ Sintang	◦ Sintang	◦ Sintang
◦ Landak		◦ Kapuas Hulu	◦ Kapuas Hulu	◦ Ketapang	◦ Landak
			◦ Ketapang	◦ Landak	◦ Sambas
			◦ Sambas	◦ Sambas	◦ Kayong Utara
			◦ Kayong Utara	◦ Kayong Utara	◦ Melawi
				◦ Melawi	
QUADRANT II **Low poverty rate & high MYS**			**QUADRANT III** **Low poverty rate & low MYS**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Pontianak	◦ Pontianak	◦ Pontianak	◦ Sanggau	◦ Sanggau	◦ Kubu Raya
◦ Singkawang	◦ Singkawang	◦ Singkawang	◦ Kubu Raya	◦ Kubu Raya	◦ Mempawah
		◦ Sanggau	◦ Mempawah	◦ Mempawah	◦ Sekadau
			◦ Sekadau	◦ Sekadau	◦ Bengkayang
			◦ Bengkayang	◦ Bengkayang	

Graph 8 shows a scatter diagram of the poverty rate against MYS in 14 regencies/cities in West Kalimantan Province, with the axis of the average MYS and the average poverty rate spread into four quadrants which are actually far from the ideal condition which is located in Quadrant II (bottom left), where the poverty rate is low and MYS is high, the change in the position of each regency/city can be seen by comparing the scatter diagrams for 2014, 2019, and 2021.

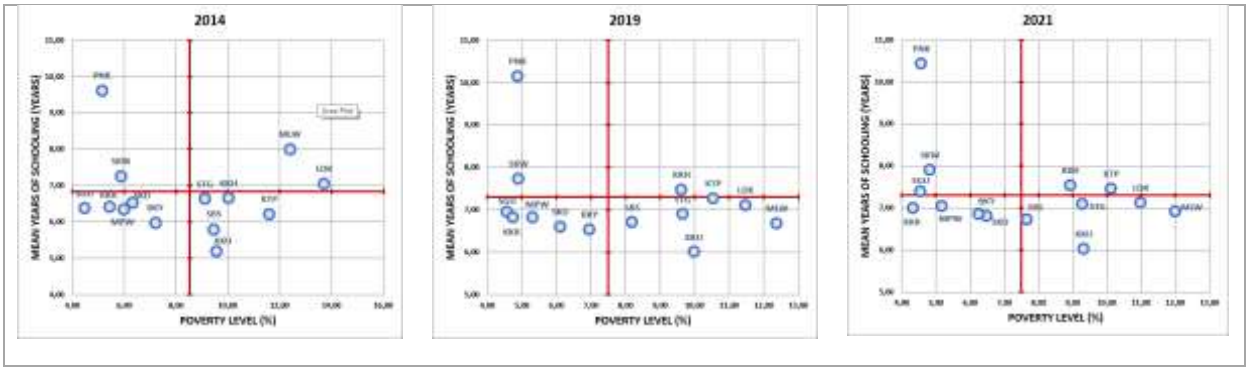

Graph 8. Scatter Diagram on Poverty Levels and MYS Year 2014, 2019 & 2021

If you look at the distribution of points in the two graphs (2014, 2019 & 2021), there is no clear correlation between the two variables. The data points are spread irregularly and do not form a linear pattern that tends to increase or decrease. It looks like it tends to be flat and cannot clearly describe the correlation of the two variables. Thus, it can be concluded that there is no correlation between the poverty level and the Mean Years of Schooling in 14 regencies/cities in West Kalimantan Province, both in 2014, 2019 and 2021.

c. Typology Shifting Based on Poverty and Health Levels

In a period of 5 years from 2014 to 2019 there has been a shift in the position of several regencies/cities, as well as for the next period of 3 years from 2019 to 2021 (Table 11).

Poverty Level & EYS:

1) Kabupaten Sambas shifted from Quadrant IV (high poverty & low EYS) to Quadrant I (high poverty & high EYS) between 2014 and 2019, and remain in the same quadrant in 2021.
2) Kabupaten Landak shifted from Quadrant I (high poverty & high EYS) to Quadrant IV (high poverty & low EYS) between 2014-2019, and shifted back to Quadrant I in 2021.
3) Kabupaten Mempawah shifted from Quadrant III (low poverty & low EYS) to Quadrant II (low poverty & high EYS) between 2019-2021.

Table 11. Typology Shifting of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Education Level in 2014, 2019 & 2021

Kabupaten/Kota	Poverty Level & EYS			Poverty Level & MYS		
	2014	2019	2021	2014	2019	2021
Kabupaten Sambas	*IV*	*I*	*I*	*I*	*IV*	*IV*
Kabupaten Landak	*I*	*IV*	*I*	*I*	*IV*	*IV*
Kabupaten Mempawah	*III*	*III*	*II*	-	-	-
Kabupaten Sanggau	-	-	-	*III*	*III*	*II*
Kabupaten Ketapang	-	-	-	*IV*	*IV*	*I*
Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	*IV*	*I*	*I*
Kabupaten Melawi	-	-	-	*I*	*IV*	*IV*

Poverty Level & MYS:

1) Kabupaten Sambas and Kabupaten Landak shifted from Quadrant I (high poverty & high MYS) to Quadrant IV (high poverty & low MYS) between 2014-2019, and remain in the same quadrant in 2021.
2) Kabupaten Sanggau shifted from Quadrant III (low poverty & low MYS) to Quadrant II (low poverty & high MYS) between 2019-2021.
3) Kabupaten Ketapang shifted from Quadrant IV (high poverty & low MYS) to Quadrant I (high poverty & high MYS) between 2019-2021.
4) Kabupaten Kapuas Hulu shifted from Quadrant IV (high poverty & low MYS) to Quadrant I (high poverty & high MYS) between 2014-2019.
5) Kabupaten Melawi shifted from Quadrant I (high poverty & high MYS) to Quadrant IV (high poverty & low MYS) between 2014-2019.

2. Typology of Regencies/Cities in West Kalimantan Province Based on Poverty and Health Levels

a. Typology of Poverty and Life Expectancy

The distribution of the 14 regencies/cities into four quadrants based on poverty levels and life expectancy is shown in Table 5. In 2014, the highest number of regencies/cities was in Quadrant II, which amounted to 6 regencies/cities (42.86%) with a low poverty and high Life Expectancy, this figure is quite good considering Quadrant II indicates the best achievement of the region in terms of poverty and health levels represented by the variable Life Expectancy (Table 12).

Table 12. Typology of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Life Expectancy in 2014, 2019 & 2021

QUADRANT I **High poverty rate & high life expectancy**			**QUADRANT IV** **High poverty rate & low life expectancy**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Sintang	◦ Sintang	◦ Sintang	◦ Kubu Raya	◦ Kubu Raya	◦ Sambas
◦ Kapuas Hulu	◦ Kapuas Hulu	◦ Kapuas Hulu			◦ Ketapang
◦ Melawi	◦ Melawi	◦ Melawi			◦ Kayong Utara
◦ Landak	◦ Landak	◦ Landak			
◦ Ketapang	◦ Ketapang				
QUADRANT II **Low poverty rate & high life expectancy**			**QUADRANT III** **Low poverty rate & low life expectancy**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Bengkayang	◦ Bengkayang	◦ Bengkayang	◦ Sambas	◦ Sambas	◦ Kubu Raya
◦ Pontianak	◦ Pontianak	◦ Pontianak	◦ Kayong Utara	◦ Kayong Utara	◦ Mempawah
◦ Singkawang	◦ Singkawang	◦ Sekadau			◦ Sanggau
◦ Sekadau	◦ Sekadau	◦ Singkawang			
◦ Mempawah	◦ Mempawah				
◦ Sanggau	◦ Sanggau				

A total of 5 other regencies/cities (35.71%) are in Quadrant I with high poverty rates and high Life Expectancy, only 2 regencies/cities (14.29%) are in Quadrant IV with high poverty rates and low Life Expectancy, and 1 regencies/cities (7.14%) are in Quadrant III with low poverty rates and low Life Expectancy.

In 2019 the number of regencies/cities distributed in the four quadrants remains the same. Likewise with the position of each regency/city in the four quadrants. This does not mean that all regions

do not experience changes in poverty levels and life expectancy (up or down), but that the increase or decrease still occurs in the same typology. In 2021, the number of regencies/cities in Quadrant I & II decrease to only 4 (28,57%), while in Quadrant III & IV increase to 3 (21.43%).

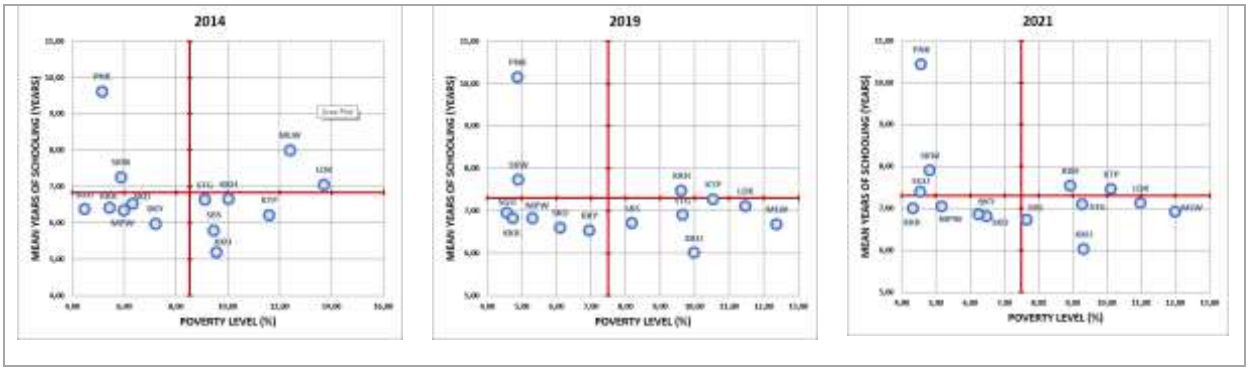

Graph 9. Scatter Diagram on Poverty Levels and Life Expectancy Year 2014, 2019 & 2021

If you look at the distribution of points in the three graphs (2014, 2019 & 2021) there is no clear correlation between the two variables, the data points are irregularly distributed and do not form a linear pattern that tends to increase or decrease, so it cannot describe the correlation of the two variables. Thus, it can be concluded that there is no correlation between poverty level and Life Expectancy in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat Province, in 2014, 2019 and 2021 (Graph 9).

b. Typology of Poverty and Percentage of BPJS Health Participants

In terms of percentage of BPJS Health participants, the distribution of regencies/cities in the four quadrants in 2014 was relatively even (Table 13). In 2014, there were only 3 regencies/cities (21.43%) which were in Quadrant II with a low poverty rate and a high percentage of BPJS Health participants. A total of 4 other regencies/cities (28.57%) are in Quadrant I with a high poverty rate and a high percentage of BPJS Health participants. A total of 3 regencies (21 ,43%) are in Quadrant IV with a high poverty rate and a low percentage of BPJS Health participants, the remaining 4 regencies/cities (28.57%) are in Quadrant III with a low poverty rate and a low percentage of BPJS Health participants.

In 2019 the distribution of regencies/cities in the four quadrants changed, except in Quadrant II with 3 regencies/cities (21.43%) remaining. In addition, 2 regencies/cities (14.29%) are in Quadrant I, 5 regencies/cities (35.71%) are in Quadrant IV, and 4 regencies/cities (28.57%) are in Quadrant III. In 2021, the number of regencies/cities in Quadrant IV decrease to only 4 (28,57%), while in Quadrant III it remains the sama with the number in 2019.

The number was increased to 3 regencies/cities (21.43%) in Quadrant I. If you look at the distribution of points in the three graphs (2014, 2019 & 2021), there is no clear correlation between the two variables. The data points are spread irregularly and do not form a linear pattern that tends to increase or decrease, so it cannot clearly describe the correlation of the two variables. Thus, it can be concluded that there is no correlation between poverty levels and Life Expectancy in 14 regencies/cities in Kalimantan Barat Province, both in 2014 and 2019 (Graph 10).

Table 13. Typology of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Percentage of BPJS Health Participants in 2014, 2019 & 2021

QUADRANT I High poverty rate & high BPJS Health participants			QUADRANT IV High poverty rate & low BPJS Health participants		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Kayong Utara ◦ Landak ◦ Sintang ◦ Kapuas Hulu	◦ Kayong Utara ◦ Landak	◦ Kayong Utara ◦ Landak ◦ Sintang	◦ Sambas ◦ Ketapang ◦ Melawi	◦ Sambas ◦ Ketapang ◦ Melawi ◦ Sintang ◦ Kapuas Hulu	◦ Sambas ◦ Ketapang ◦ Melawi ◦ Kapuas Hulu
QUADRANT II **Low poverty rate & high BPJS Health participants**			**QUADRANT III** **Low poverty rate & low BPJS Health participants**		
2014	**2019**	**2021**	**2014**	**2019**	**2021**
◦ Mempawah ◦ Singkawang ◦ Kubu Raya	◦ Pontianak ◦ Singkawang ◦ Bengkayang	◦ Mempawah ◦ Singkawang ◦ Bengkayang	◦ Pontianak ◦ Bengkayang ◦ Sekadau ◦ Sanggau	◦ Kubu Raya ◦ Mempawah ◦ Sekadau ◦ Sanggau	◦ Pontianak ◦ Kubu Raya ◦ Sekadau ◦ Sanggau

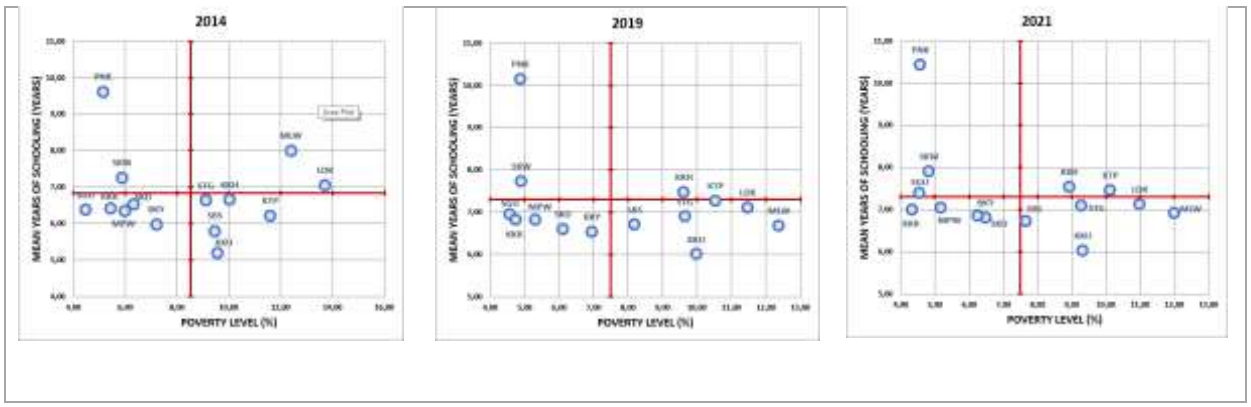

Graph 10. Scatter Diagram on Poverty Levels and Life Expectancy Year 2014, 2019 & 2021

c. Typology Shifting Based on Poverty and Health Levels

Poverty Level & Life Expextancy:

Between 2014 and 2019 there has not been any shift in the position of regencies/cities, while between 2019 and 2021 the shift are as follows (Table 14):

1) Kabupaten Sambas shifted from Quadrant III (low poverty & low Life Expectancy) to Quadrant IV (high poverty & low Life Expectancy).
2) Kabupaten Mempawah and Kabupaten Sanggau shifted from Quadrant II (low poverty & high Life Expectancy) to Quadrant III (low poverty & low Life Expectancy).
3) Kabupaten Ketapang shifted from Quadrant I (high poverty & high Life Expectancy) to Quadrant IV (high poverty & low Life Expectancy).
4) Kabupaten Kayong Utara shifted from Quadrant III (low poverty & low Life Expectancy) to Quadrant IV (high poverty & low Life Expectancy).

5) Kabupaten Kubu Raya shifted from Quadrant IV (high poverty & low Life Expectancy) to Quadrant III (low poverty & low Life Expectancy).

Table 14. Typology Shifting of Regencies/Cities in Kalimantan Barat Province by Poverty Level and Health Outcome in 2014, 2019 & 2021

Kabupaten/Kota	Poverty Level & Life Expextancy			Poverty Level & Percentage of BPJS Health Participants		
	2014	2019	2021	2014	2019	2021
Kabupaten Sambas	*III*	*III*	*IV*	-	-	-
Kabupaten Bengkayang	-	-	-	*III*	*II*	*II*
Kabupaten Mempawah	*II*	*II*	*III*	*II*	*III*	*II*
Kabupaten Sanggau	*II*	*II*	*III*	-	-	-
Kabupaten Ketapang	*I*	*I*	*IV*	-	-	-
Kabupaten Sintang	-	-	-	*I*	*IV*	*I*
Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	*I*	*IV*	*IV*
Kabupaten Kayong Utara	*III*	*III*	*IV*	-	-	-
Kabupaten Kubu Raya	*IV*	*IV*	*III*	*II*	*III*	*III*
Kota Pontianak	-	-	-	*III*	*II*	*III*

Poverty Level & BPJS Health Participants:

1) Kabupaten Bengkayang shifted from Quadrant III (low poverty & low BPJS Health) to Quadrant II (low poverty & high BPJS Health) between 2014-2019, and remain in the same quadrant in 2021.
2) Kabupaten Mempawah shifted from Quadrant II (low poverty & high BPJS health) to Quadrant III (low poverty & low BPJS Health).
3) Kabupaten Sintang shifted from Quadrant I (high poverty & high BPJS Health), to Quadrant IV (high poverty & low BPJS Health) between 2014-2019, and shifted back to Quadrant I in 2021.
4) Kabupaten Kapuas Hulu shifted from Quadrant I (high poverty & high BPJS Health) to Quadrant IV (high poverty & low BPJS Health) between 2014-2019, and remain in the same quadrant in 2021.
5) Kabupaten Kubu Raya shifted from Quadrant II (low poverty & high BPJS Health, to Quadrant III (low poverty & low BPJS Health) between 2014-2019, and remain in the same quadrant in 2021.
6) Kota Pontianak shifted from Quadrant III (low poverty & low BPJS Health), to Quadrant II (low poverty & high BPJS Health) between 2014-2019, and shifted back to Quadrant III in 2021.

4. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

The analysis in this study starts from the assumption that the most ideal (consistent) conditions that a regency/city may have is with a low poverty level, a high education level (EYS & MYS) and a high health level (life expectancy & percentage of BPJS Health participants). On the other hand, the least ideal (inconsistent) conditions are those that show a high level of poverty, a low level of education and a low level of health. Between these two poles there is an intermediate condition that shows various typological

combinations of the five research variables (poverty, EYS, MYS, life expectancy and percentage of BPJS Health participants),

The estimation results for 2014, 2019 and 2021 show inconsistencies in macro and development indicators in most regencies/cities in Kalimantan Barat Province. There is only one area that is consistently in the highest quadrant, namely the combination of "low poverty level-high education level-high health level", namely Singkawang City (in 2014 & 2021) and Kota Pontianak (2019). Meanwhile, the area that is consistently in the lowest quadrant, namely the combination of "high poverty level-low education level-low health level" only exists in 2014, namely Kabupaten Sambas. Other regencies/cities, in years of 2014, 2019 and 2021 were in between the two categories above.

The two areas that consistently show high performance are urban areas, namely Kota Pontianak as the capital of West Kalimantan Province, and Kota Singkawang as the administrative area of the city. This is easy to understand, considering that cities are centers of government and centers of economic activity which are generally equipped with good infrastructure to support these economic activities. Kota Pontianak and Kota Singkawang have the smallest area in West Kalimantan when compared to other regencies, therefore the economy does not rely on the agricultural sector, but on the service sector (non-tradable sector).

The low level of poverty in these two cities is also reflected in the quality of the welfare of the population as measured by a high level of education (EYS & MYS) and a high level of health (life expectancy & percentage of BPJS Health participants). On the other hand, high levels of education and health seem to be able to push poverty levels to lower levels,

The area with the lowest achievement in terms of high levels of poverty as well as low levels of education and health was Kabupaten Sambas in 2014. The geographical location of Kabupaten Sambas which has a beach length of 198.76 km with the characteristics of mostly sandy beaches stretching along a number of sub-regencies seems become a separate obstacle in the distribution of facilities and opportunities for regional services in terms of education and health. In 2019, Kabupaten Sambas is already in a better position, where although other components still have not shown improvement, there has been an increase in the Expected Years of Schooling (EYS) component,

In 2014 Kabupaten Landak showed an interesting pattern, namely "high poverty rate-high education level-high health level". This fact may be the result of a low level of education and/or health in the past which has now increased although it has not yet had a positive impact on reducing poverty levels. If the assumptions about the consistency of growth mentioned in the previous paragraph are correct, then the regency is expected to be able to reduce its poverty rate very soon.

REFERENCES

Arfiyani, I., Raharjo, T., & Yusuf, A. (2020). Family Development Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *9*(1), 57. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24517

Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Santosa, A. B. (2020). Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *27*(1), 55–64.

Kadri, I. A., Susilawati, M., & Sari, K. (2020). Faktor–Faktor yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *E-Jurnal Matematika*, *9*(1), 31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/MTK.2020.v09.i01.p275

Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(21), 6104. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/su11216104

Lestari, D. H., & Setyadharma, A. (2019). Determinant Mean Years of Schooling in Central Java. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *2*(3), 524–539. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v2i3.35905

Lubis, H. (2017). Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approach. *Indonesian Journal of Development Economics*, *3*(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901

Mahya, A. J., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Prismatika: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika*, *3*(2), 126–140. https://doi.org/https://doi.org/10.33503/prismatika.v3i2.1180

Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, *12*(2), 101–110.

Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province. *Society*, *8*(2), 581–595. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215

Seran, S. (2017). Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *10*(2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p07

Siregar, Z. (2019). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, *1*(2), 64–69. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jekkp.v1i2.2261

Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidkan, Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, *1*(2).

Taufiq, N., & Dartanto, T. (2020). Education, informal turnover and poverty dynamics in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, *14*(1), 157–172.

Thobibah, I., Ernawaty, E., & Damayanti, N. A. (2020). Analisis Faktor Penentu Kepesertaan BPJS. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *4*(1), 162–170. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1474

UNDP. (2019). Human Development Report 2019 : Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. In *United Nations Development Program*.

Wijaya, P. Y., & Suasih, N. R. (2021). One Decade, 20 Percent Education Budget: How About Causality Between Education Success and Poverty? *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *14*(1), 173–189. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p09

Yuliani, Y. (2016). Pendidikan di Indonesia dalam Human Development Index (HDI). *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn*, *2*(3), 48–56. https://doi.org/https://doi.org/10.29100/ppkn.v2i2.342

Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Metode RGEC dan SCnP Model Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2016-2020

Dini Lestari[1]
Firdaus Achmad [2]
Dinda Nursaini[3]
[1,2,3)]*IAIN Pontianak , Indonesia*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on all industrial sectors to the Indonesian economy. According to the Minister of Finance and several Islamic economists, Islamic banking shows positive growth against thethreat of Covid-19 and has strong resilience so that it can survive in the face of the crisis caused by the pandemic.The formulation of the problem in this study is how to assess the financial performance of Islamic banking using the RGEC method and the SCnP Model.The purpose of this study is to determine the financial performance of PT BankMuamalat Indonesia Tbk. assessed from the RGEC and SCnP factors for the 2016-2020 period. The method in this study is descriptive with a quantitative approach. Data collection techniques are carried out with documentation techniques and library research. The results of the study using the RGEC method showed that the financialperformance of Bank Muamalat Indonesia was assessed from the Risk Profile of Good Corporate Governance and Capital factors including the good category, while the earnings factor showed poor performance. Bank Muamalat Indonesia's financial performance using the SCnP method shows that during the 2016-2020 period it was spread across four quadrants, namely in 2016 it was in the URQ quadrant (Upper Right Quadrant), in 2017 and 2019 it was inthe LLQ (Lower Left Quadrant) quadrant, in 2018 it was in the ULQ (Upper Left Quadrant) and in 2020 it was in the quadrant in the LRQ (Lower Right Quadrant).

JEL: G21, G32

Keywords: *Financial Performance, Islamic Banking, RGEC, SCnP Model*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang muncul di penghujung 2019 menjadi fenomena baru yang mengguncang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap aktivitas di bidang ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Sektor ekonomi syariah juga terkena imbas dari wabah tersebut, termasuk perbankan syariah. MenurutLaporan Keadaan Ekonomi Islam Global (*State of Global Islamic Economy*/SGIE *Laporan*) 2020/2021, pengeluaran umat Islam global pada sektor ekonomi diperkirakan akan menurun sebesar 8% pada 2020.Selanjutnya, perekonomian Indonesia juga mengalami juga mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada 2020 (LPKSI, OJK 2020).

Meskipun ada kekhawatiran perlambatan pertumbuhan keuangan syariah pada 2020, Wabah *Covid* 19 juga berdampak baik bagi pertumbuhan keuangan syariah, salah satunya adalah mempercepat transformasi berbasis digital untuk menawarkan produk dan layanan berbasis digital yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang dibatasi mobilitas akibat Pandemi Covid 19, contohnya pendirian Bank Digital di Kazakhstan oleh *Al-Rayan Investment*, anak perusahaankeuangan Islam oleh

[1] Email: Lee.dinilestary10@gmail.com

MyEG dari Malaysia serta peluncuran aplikasi seluler QIB oleh *Qatar Islamic Bank.*

Dikutip dari kumparan.com semua sektor industri sampai perekonomian nasional menjadi lemah dan menghambat segala kegiatan masyarakat. Akan tetapi, sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif terhadap ancaman Pandemi Covid 19. Berdasarkanpenelitian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan beberapa ahli ekonomi syariah, Perbankan Syariah mempunyai kestabilan yang kuat sehingga sanggup bertahan dalam menghadapi krisis akibat pandemi tersebut. Keadaan ini dibuktikan dengan lajunya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah yang bergerak lebih aktif dibanding dengan bank konvensional.

Kinerja perbankan syariah 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset Perbankan Syariah dari tahun ke tahun, menunjukkan bank syariah dapat mengelola likuiditasnyadengan baik sehingga jumlah aset terus bertambah. Demikian pula dengan dana pihak ketiga yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Artinya, perbankan dapat memanfaatkan sepenuhnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan nasabah mulai menyadarimanfaat dari produk yang mereka tawarkan. Sementara itu, pembiayaan bank syariah pada 2020 turun 8,08%. Salah satu alasannya adalah pertumbuhan pembiayaan modal kerja melambat dari tahun ke tahun. Perbankan syariah masih mencatat pertumbuhan yang positif meskipertumbuhan melambat akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap penyaluran pembiayaan pada sektor industri.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum di Indonesia yang pertama kalinya mengaplikasikan prinsip Islam dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 01 November 1991 yang merupakan gagasan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), Pemerintah Republik Indonesia, Cendikiawan Islam dan masyarakat luas. Mulai beroperasi pada 1992, Bank Muamalat Indonesia mendapat persetujuan untuk membuka kantor cabang di Malaysia pada 2009, dan menjadikannya satu-satunya Bank pertama di Indonesia yang memperluas ekspansinya di Malaysia. Bank saat ini memiliki 249 kantor cabang tercatat cabang di Malaysia. Aktivitas bank terus didukung oleh jejaringan layanan yang besar dengan 619 ATM Muamalat, 120.000 ATM Prima dan ATM Bersama, serta 55 *Mobile Cash Car*.

Dilansir dari bisnisjadimudah.id, beberapa periode terakhir ini, BankMuamalat Indonesia dilanda isu yang menyatakan bahwa bank terancampailit. Peristiwa ini disebabkan semenjak 2015 keadaan keuangan Bank Muamalat Indonesia memperoleh kinerja yang tidak memuaskan. Pada September 2017, beredar rumor bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menemukan *buyer*, yaitu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. untukmengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Bahkan PT Mina Padi telah melakukan penandatanganan atas perjanjian untuk mengakuisisi saham bank dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) sebagai *Standby buyer*. Namun pada awal Februari 2018, PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk mengatakan tidak dapat mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia karena berakhirnya perjanjian pemesanan bersyarat atau *Conditional Share Subscription Agreement* (CSSA) sejak Desember2017. Beberapa pengamat mengatakan, bahwa Bank Muamalat Indonesia terancam bangkrut dikarenakan bank kekurangan modal, kredit bermasalah (NPF) dan biaya operasional yang besar (https://www.bisnisjadimudah.id/bank-muamalat/).

Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga keuangan syariah di Indonesia tentu wajib mengawasi perkembangan serta kemajuan dari kegiatan yang dilakukan dalam operasionalnya. Perkembangan ini terlihat dari pertumbuhan kondisi keuangan Bank daritahun ke tahun yang dituangkan dalam laporan tahunan yang disusun oleh Bank. Berdasarkan ikhtisar keuangan laporan tahunan yang telah dipublikasikan Bank Muamalat Indonesia, aset, DPK dan pembiayaan yang dimiliki diketahui berfluktuasi lima tahun terakhir.

Berdasarkan laporan grafik dari OJK, Pertumbuhan Aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia selama 2016 hingga 2020 berfluktuatif. Pada 2016, aset yang diperoleh oleh sebesar Rp 55,786 Miliar. Pada 2017, aset mengalami peningkatan, sebesar Rp 61,697 Miliar. Kemudian pada 2018 dan 2019, pertumbuhanaset mengalami penurunan yang signifikan. Dana pihak ketiga yang diberikan oleh pada 2016 sebesar Rp 41,920. Pada 2017, dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp 48,686. Kemudian dana pihak ketiga mengalami penurunan pada 2018-2019, masing-masing sebesar Rp 45,636 dan Rp40,357. Dana pihak ketiga yang diberikan sebesar Rp41,424 pada 2020. Pembiayaan yang dihasilkan oleh bank, sebesar RP40,050 pada 2016. Kemudian meningkat pada 2017 sebesar Rp41,332. Pada 2018 sampai 2020, pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar Rp33,566, Rp29,877 dan Rp29,084.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyedia jasa keuangan, bank syariah harus menilai kembali tujuannya sendiri sesuai dengan *Shari'ah maqashid*. Tujuannya agar bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain. Hal ini disebabkan bank syariah memiliki target pengukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bank tradisional (Arimiko, et al., 2020: 229).

Dari gambaran di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerjakeuangan Bank Muamalat Indonesia. Kinerja keuangan suatu bank dapatdilihat melalui analisis laporan keuangannya. Laporan keuangan ini menggambarkan tingkat kinerja (baik atau buruk) bank. Untuk melihat apakah kinerja suatu bank baik atau buruk dapat dianalisis secara khususberdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sumberliteratur lainnya.

Berdasarkan regulasi oleh Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank umum wajib melakukan evaluasi sendiri terhadap tingkat kesehatan banknya dengan pendekatan peringkat berbasis risiko *Risk-based Bank Rating* (RBRR) baik secara individu ataupun konsolidasi, dengan lingkup evaluasi pengukuran terhadap faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital* atau yang disingkat RGEC (Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011).

Bersumber dari regulasi tersebut, metode RGEC hanya dipakai untuk bank umum tradisional. Namun, sejak OJK menerbitkan peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah No. 8/POJK.03/2014, perbankan syariah memiliki pedoman dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC. Pasalnya, isi dalam ketentuan POJK No. 8/POJK.03/2014 hampirserupa dengan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank bisa dilakukan dengan pendekatanperingkat berbasis risiko (RBBR) dengan memperhatikan aspek-aspek RGEC.

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode modelRGEC dan SCnP. Peneliti memilih model RGEC karena didasarkan pada regulasi Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan BUSdan UUS. Selain itu, peneliti juga memilih metode kepatuhan syariah danprofitabilitas atau yang dikenal dengan model SCnP, karena metode SCnP ini merupakan metode sesuai dengan spesifikasi perbankan syariahatau disesuaikan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dankarakteristik perbankan syariah.

Penilaian kinerja dengan menggunakan metode SCnP ini lebih terhimpun, karena menggabungkan dua arah penilaian, yaitu orientasi penilaian dengan kepatuhan syariah dan orientasi dengan profitabilitas bank. Jadi dengan menggabungkan kedua orientasi penilaian SCnP Model, maka

perolehan dari penilaian dengan metode ini akan menjadi lebih efektif. Sebab itu penilaian kinerja keuangan dengan metode SCnPini dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah (Prasetyowati & Handoko, 2016). Dengan menggunakan kedua metode tersebut peneliti ingin mengetahui perbedaan dari metode model RGEC dan SCnP terhadap keadaan kesehatan Bank Muamalat Indonesia dan juga melihat metode yang mana lebih baik dalam mengevaluasi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Metode RGEC

Bank harus menilai secara *self assessment* mengenai tingkatan kesehatan bank dengan pendekatan Risiko, baik itu secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor- faktor: Profil Risiko (*risk profile*), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*earning*); dan Permodalan (*capital*) atau yang dikenal dengan RGEC untuk memperoleh rating komposit tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan dua *step* yaitu, individual atau konsolidasi, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah, penilaian tingkat kesehatan dilakukan secara individual saja. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan kesehatan bank umum No. 13/1 /PBI /2011 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah No. 8/POJK.03/2014. Berikut indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan perbankan (Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014):

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Risk profile adalah indikator penilaian terhadap faktor risiko inheren dan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dalam kegiatan usaha bank. Parameter/indikator dalam menilai profil risiko meliputi:

1. Risiko kredit merupakan risiko nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan akadyang disepakati (SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang digunakan untuk menilai risiko kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dengan ketentuan kurangan lancar, diragukan dan macet. Semakin rendah nilai NPF, maka akan semakin tinggi juga kualitas aset perusahaan (Istan et al., 2021: 100). NPF dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Jumlah\ Pembiayaan}$$

Tabel 1. Predikat Komposit *Non Performing Financing*

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<2%	Sangat Baik
2	PK-2	2% - <5%	Baik
3	PK-3	5% - <8%	Cukup Baik
4	PK-4	8% - <12%	Kurang Baik
5	PK-5	≥12%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011 (dalam Anik &Ningsih, 2020)

2. Risiko Likuiditas adalah ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari

sumber pendanaanarus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat simpan, tanpa mempengaruhi operasional dan keadaan keuangan Bank (SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas adalah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk rupiah dan valuta asing, bukan bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang meliputi giro, tabungan dan deposito. Semakin rendah nilai rasio FDR yang didapatkanmaka semakin liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siapuntuk dibebankan (Instan et al., 2021: 100). Rasio FDR dihitung dengan rumus:

$$FDR = \frac{Jumlah\ Pembiayaan}{Jumlah\ DPK}$$

Tabel 2. Predikat Komposit FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	50% - <75%	Sangat Baik
2	PK-2	75% - <85%	Baik
3	PK-3	85% - <100%	Cukup Baik
4	PK-4	100% - <120%	Kurang Baik
5	PK-5	≥120%	Tidak Baik

Sumber: Chofifah, 2021

2) Good Corporate Governance (GCG)

Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank umumsyariah secara berkala melakukan penilaian sendiri atas praktik tata kelola perusahan yang baik sesuai dengan ketentuan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah perbankan yangmenerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggung jawaban. Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan evaluasi bank dalam menerapkan lima prinsip tata kelola perusahan yang baik yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran (SEOJK No. 10/SE.OJK.03/2014).

Tabel 3. Predikat Komposit GCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<1,5	Sangat Baik
2	PK-2	<2,5	Baik
3	PK-3	<3,5	Cukup Baik
4	PK-4	<4,5	Kurang Baik
5	PK-5	<5	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR (dalamWahasusmiah & Watie, 2018)

3) *Earning* (Rentabilitas)

Earning adalah kesanggupan suatu bank dalam menghasilkan margin. Penilaian terhadap faktor *earning* meliputi pengukuran terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, pengelolaan rentabilitas serta penerapan fungsi sosial (SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang dipakai untuk

menilai rentabilitas adalah Tingkat Pengembalian Asets (ROA). ROA merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi aset terhadap perolehan total laba. NilaiROA yang tinggi menunjukkan jumlah laba yang diperoleh banyak.Sebaliknya, nilai rasio ROA yang rendah menunjukkan jumlah laba yang diperoleh sedikit (Istan et al., 2021: 100). Rasio ROA dihitungdengan rumus:

$$ROA - \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Rata - Rata\ Total\ Aset}$$

Tabel 4. Predikat Komposit ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<1,5%	Sangat Baik
2	PK-2	<1,25% - 1,5%	Baik
3	PK-3	<0,5% - 1,25%	Cukup Baik
4	PK-4	<0% - 0,5%	Kurang Baik
5	PK-5	<0%	Tidak Baik

Sumber: Lampiran 8 Kodifikasi PBI Kelembagaan PenilaianTingkat Kesehatan Bank

4) *Capital* (Permodalan)

Penilaian unsur *capital* meliputi penilaian kecukupan modal dan pengelolaan modal. Parameter/indikator yang dipakai untuk menilai*capital* adalah *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan indikator kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank yang mendukung aset menanggung risiko atau *risk*-produk*ion* (SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio kecukupan modal merupakan rasio total modal terhadap total aset tertimbang menurutrisiko (ATMR). Semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin tinggi kualitas permodalan suatu bank (Istan et al., 2021: 100). Rasio CAR dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR}$$

Tabel 5. Predikat Komposit CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	CAR >12%	Sangat Baik
2	PK-2	9%≤ CAR ≤12%	Baik
3	PK-3	8%≤ CAR <9%	Cukup Baik
4	PK-4	6%≤ CAR <8%	Kurang Baik
5	PK-5	CAR ≤6%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011 (dalam Anik &Ningsih, 2020)

2.2. Metode SCnP Model (*Shari'ah Conformity and Profitability*)

Metode SCnP merupakan model penelitian penilaian kinerja keuangan bank syariah yang dilakukan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudram pada 2010. Metode SCnP ini merupakan alat ukur kinerja bank syariah yang lahir dari pemikiran dasar bahwa kinerja keuangan perbankan syariah bisa

nilai baik apabila menggunakan parameter keuangan syariah dan konvensional. Untuk mengukur kinerja bank syariah perlu menggunakan ukuran yang mewakili sisi syariah bank, meskipun bank syariah bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagai salah satu entitas bisnis, profitabilitas juga perlu diperhatikan (Kuppusamy, et al., dalam Ubaidillah & Astuti, 2020: 137).

Dalam penelitian ini, metode SCnP model terdapat dua indikator yang digunakan, yakni *Shari'ah Conformity* dan *Profitability*. *Shari'ah Conformity* mengukur kemampuan bank dalam mematuhi atau memenuhi sistem syariah dan kepatuhannya dengan prinsip syariah. Sedangkan *Profitability* mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan margin dalam menjalankan usahanya pada waktu tertentu.

1) Indikator *Shari'ah Conformity*

a. *Islamic Investments* merupakan perbandingan jumlah penghasilan syariah dengan total penghasilan investasi yang telahdiperoleh. Indikator *Islamic Investments* menggambarkan investasi persentase dari investasi yang dilaksanakan bank pada produk-produk halal (Arimiko et al., 2020: 234). *Islamic Investments* dalam keuangan laporan perbankan syariah terdapat pada akun investasi pada surat berharga, sedangkan *non-Islamic Investments* dapat ditemukan pada akun penempatan pada pada bank lain atau rekening giro pada bank lain. Mengenai perhitungan *Islamic Investments* pada bank syariah, dilakukan dengan perbandingan antara *Islamic Investments* dengan *IslamicInvestments* ditambah *non-Islamic Investments* (Ubaidillah & Astuti, 2020: 138). Investasi syariah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Islamic\ Investments = \frac{Islamic\ Investments}{Islamic\ Investments + Non\ Islamic\ Investments}$$

b. *Islamic Income* yaitu pendapatan atas bagi hasil yang didapatkan dengan cara memberikan pembiayaan untuk memperoleh pendapatan, terdiri dari *Islamic Income* and *non-Islamic Income*. Keuangan laporan bank syariah memiliki akun pendapatan non halal yang bersumber dari sumber dan kebajikan. riba bank dari pihak lain tidak termasuk pendapatan syariah, tetapi dimasukan sebagai sumber dan kebajikan. Untuk mengetahui sebesar apa bank syariah mendapatkan penghasilan syariah bisa dilakukan dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* ditambah dengan *non-Islamic Income*. (Ubaidillah & Astuti, 2020: 139). Pendapatan syariah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Islamic\ Income = \frac{Islamic\ Income}{Islamic\ Income + Non\ Islamic\ Income}$$

c. *Profit Sharing Ratio*, merupakan perbandingan antara pendanaan musyarakah dan mudharabah dengan total pembiayaan (Arimikoet al., 2020: 234). Rasio bagi hasil dihitung menggunakan rumus:

$$Profit\ Sharing\ Ratio = \frac{Mudharabah\ musyarakah}{Jumlah\ pembiayaan}$$

2) Indikator *Profitability*

Profitabilitas merupakan pengukuran terhadap kinerja keuangan dalam SCnP model. Profitabilitas bank diukur menggunakan rasio- rasio berikut (Arimiko et al., 2020: 234):

a. Tingkat Pengembalian Aset (ROA), adalah perbandingan antaralaba bersih dengan total aset. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan semua asetnya dan dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

b. Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) merupakan perbandinganlaba bersih dengan total modal untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengalihan saham yang dimilikinya dan dihitung dengan rumus berikut.

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Ekuitas}$$

c. Marjin Laba Bersih (NPM), adalah perbandingan antara laba neto dengan jumlah pendapatan yang diterima untuk mengetahui berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dari kegiatan perbankan dan dihitung dengan rumus berikut.

$$NPM = \frac{laba\ bersih}{Total\ Operating\ Revenue}$$

Dalam model SCnP, variabel syariah dihitung dengan menghitung rata-rata tingkat kepatuhan syariah, sedangkan variabel konvensional diukur dengan menghitung tingkat pengembalian rata-rata. Variabel kepatuhan syariah diukur dengan indikator yaitu *islamic investment, islamic income,* dan *profit sharing ratio*. Disisi lain dari perspektifkonvensional juga diukur dengan tiga indikator: ROA, ROE dan NPM. Untuk masing-masing indikator ini, hasilnya akan membentuk 4 grafik kuadran dengan masing-masing kuadran dipisahkan oleh rasio rata-ratasemua bank. (Prasetyowati & Handoko, 2016: 113).

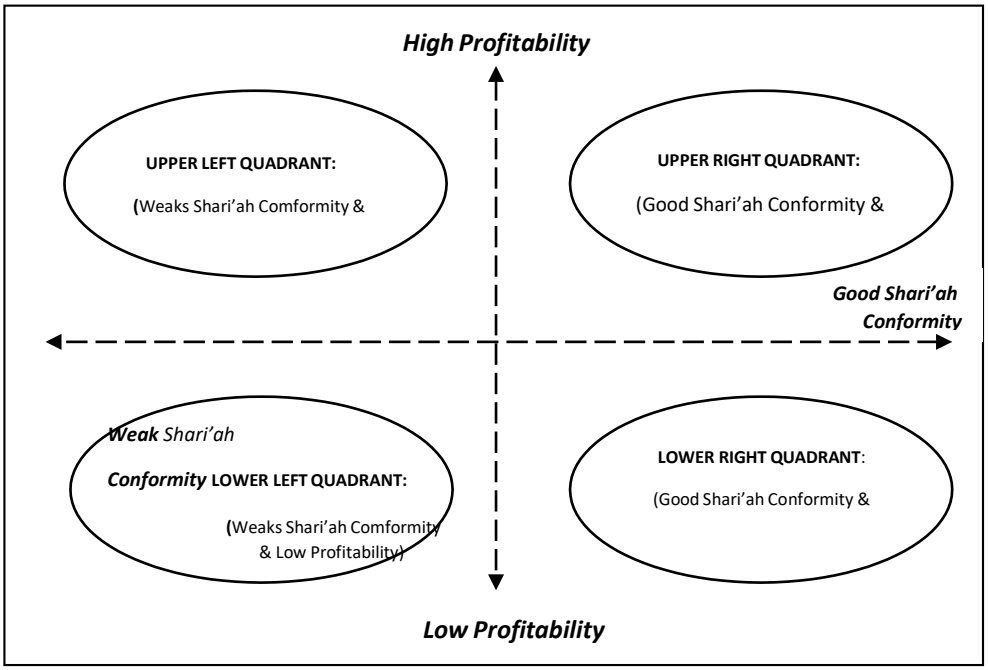

Gambar 1. Model *Shreya Conformity and Profitability* (SCnP)
Sumber: Kuppusamy, Saleh, Samudhram (dalam Ramdhoni & Fauzi,2020)

Pada gambar di atas, model SCnP membeli grafik menjadi empat kuadran, yakni: URQ, LRQ, ULQ dan LLQ. URQ/*Upper Right Quadrant* (kuadran kanan atas) menggambarkan bank syariah mempunyai tingkatan kepatuhan syariah yang tinggi serta memiliki tingkatan profitabilitas yang tinggi pula. LRQ/*Lower Right Quadrant* (kuadran kanan bawah) menunjukan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tapi profitabilitasnya rendah. ULQ/*UpperLeft Quadrant* (kuadran kiri atas) menunjukan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang relatif rendah tetapi tingkat profitabilitas yang tinggi. LLQ/*Lower Left Quadrant* (kuadran kiri bawah) menunjukan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang lebih rendah.

Bank Muamalah Indonesia adalah bank umum pertama yang mengenalkan sistem syariah dalam operasionalnya. Penilaian kinerja keuangan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kinerja keuangan bank dapat dapat dinilai melalui laporan keuangan perbankan. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia adalah RGEC dan SCnP Model. Kemudian hasil analisis akan menarik kesimpulan tentang kinerjakeuangan bank syariah. Kinerja keuangan suatu bank dinilai tidak baik, apabila bank bermasalah pada salah satu faktor atau lebih begitu juga sebaliknya. Kerangka pemikiran penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

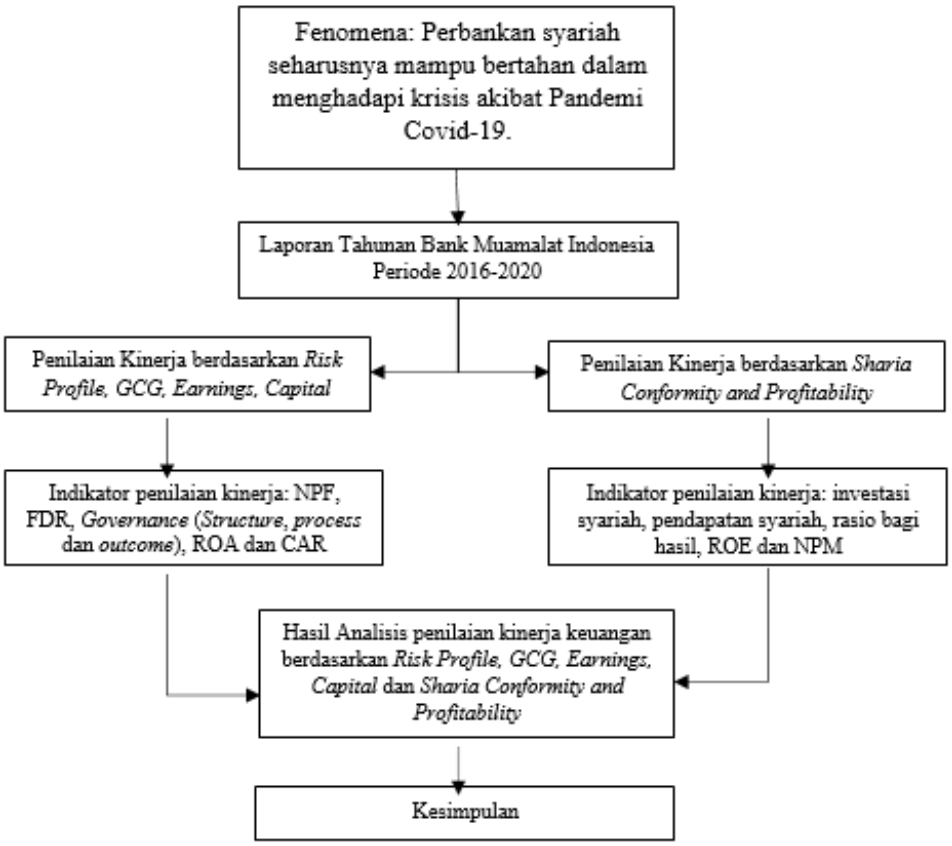

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fenomena atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat dalam kaitannya dengan subjek yang diteliti (Hardani, et al., 2020: 54). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 yang dapat diunduh dari website Bank Muamalat Indonesia. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang telah dipublikasi periode 2016-2020. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel laporan Bank Muamalat Indonesia berupa akun-akun dengan penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020.

Variabel dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan yang terdapat didalam metode RGEC dan SCnP model peneliti menggunakan dua enam indikator. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan	Risk Profile	NPF	Rasio
		FDR	Rasio
	GCG	Self Assessment	Rasio
	Earning	ROA	Rasio
	Capital	CAR	Rasio
	Sharia Conformity	Investasi Syariah	Rasio
		Pendapatan Syariah	Rasio
		Rasio Bagi Hasil	Rasio
	Profitability	ROA	Rasio
		ROE	Rasio
		NPM	Rasio

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Menggunakan Metode RGEC

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

a) Rasio NPF (*Net Performing Financing*)
Non Performing Financing merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet.. Semakin rendah rasio NPF, maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank. Untuk mendapatkan nilai rasio NPF adalah dengan membandingkan pembiayaan bermasalah (pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dengan jumlah pembiayaan. Berikut perhitungan rasio NPF.

Tabel 7. Perhitungan Rasio NPF

Tahun	Kurang Lancar(KL)	Diragukan(D)	Macet (M)	Jumlah Pembiayaan	NPF
2016	239.751.846	141.488.543	1.144.133.397	1.525.373.786	3,81%
2017	242.055.677	513.572.116	1.110.776.050	1.866.403.843	4,52%
2018	361.083.028	60.884.010	864.680.529	1.286.647.567	3,83%
2019	323.768.301	117.327.336	947.922.824	1.389.018.461	4,65%
2020	42.649.815	76.513.909	1.264.445.964	1.383.609.688	4,76%

Tabel 8. Peringkat Komposit NPF Bank Muamalat Indonesia

No.	Tahun	Rasio	Peringkat	Keterangan
1	2016	3,81%	2	Baik
2	2017	4,52%	2	Baik
3	2018	3,83%	2	Baik
4	2019	4,65%	2	Baik
5	2020	4,76%	2	Baik

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai NPF tahun 2016 sebesar 3,81%, pada 2017 selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 4,52%. Selanjutnya pada 2018, rasio NPF mengalami penurunanmenjadi 3,83%. Pada 2019-2020, rasio NPF kembali menunjukkan peningkatan, masing-masing sebesar 4,65% dan 4,76%. Rasio NPF Bank Muamalat Indonesia selama periode 2016-2020 berada pada kondisi baik, artinya Bank Muamalat Indonesia sanggup memecahkan permasalahan pembiayaan yangdihadapi.

b) Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio) merupakan rasio dana yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, bukan oleh bank lain, terhadap dana pihak ketiga yangmencangkup giro, tabungan dan deposito. Rasio FDR yang rendah menunjukan bank yang liquid dengan kelebihan cadangan dana yang siap untuk menghimpun dana. Sebaliknya nilai FDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan sumber dana pihak ketiga. Berikut perhitungan rasio FDR.

Tabel 9. Perhitungan Rasio FDR

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
2016	40.010.475.498	41.919.920.094	95,45%
2017	41.336.607.379	48.686.342.154	84,90%
2018	33.559.408.534	45.635.573.493	73,54%
2019	29.867.058.336	40.357.212.423	74,01%
2020	29.077.230.047	41.424.248.991	70,19%

Tabel 10. Predikat Komposit FDR Bank Muamalat Indonesia

No.	Tahun	Rasio FDR	Peringkat	Keterangan
1	2016	95,45%	3	Cukup Baik
2	2017	84,90%	2	Baik
3	2018	73,54%	1	Sangat Baik
4	2019	74,01%	1	Sangat Baik
5	2020	70,19%	1	Sangat Baik

Pada 2016 nilai rasio FDR Bank Muamalat Indonesia mencapai 95,45% dan dikategorikan cukup baik. Pada 2017 rasioFDR mengalami penurunan sebesar 84,90% yang mana termasukdalam kategori baik. Tahun selanjutnya, pada 2018 kembali menunjukkan penurunan, sebesar 73,54%, pada 2019 sedikit mengalami kenaikan sebesar 74,01% dan pada 2020 rasio FDR bank menurun sebesar 70,19%. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 rasio FDR bank mengalami penurunan, meskipun pada 2019 sedikit mengalami kenaikan. Namun dalam tiga tahun tersebut kondisi bank termasuk kategori sangat baik. Artinya, Bank Muamalat Indonesia mampu memenuhi permintaan nasabah dalam mengeluarkan dana melebihi batas dana pihak ketiga yang diperoleh.

Hasil penelitian pengukuran kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 menunjukkan bahwaprofil risiko menggunakan rasio NPF dan FDR berada dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio NPF Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian berada diantara 2% dan kurang dari 5%. Pada rasio FDR menunjukkan bahwa selama periode penelitian hasil persentase rasio FDR berada dibawah 100% sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya selama periode penelitian Bank Muamalat Indonesia mampu meminimalisir kerugian yang dihadapi akibat dari risiko inheren selama periode waktu tertentu dimasa yang akan datang serta penerapan kualitas manajemen risiko secara komposit memadai.

2) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahan)

Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara *self assessment* oleh pihak internal Bank MuamalatIndonesia. *Self assessment* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia periode 2016 hingga 2020 terdapat di dalam laporan GCG.Berikut hasil *self assessment* oleh Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 11. *Self Assessment* GCG Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020

Tahun	PredikatKomposit	keterangan
2016	2	Baik
2017	3	Cukup Baik
2018	3	Cukup Baik
2019	3	Cukup Baik
2020	3	Cukup Baik

Sumber: Laporan GCG BMI 2016-2021

Dari tabel 11 diketahui hasil *self assessment Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia Pada 2016, memperoleh skorkomposit 2, artinya manajemen bank telah menerapkan tata kelola yang baik. Dari 2017 hingga 2020 hasil *self assessment* GCG Bank Muamalat Indonesia adalah memperoleh nilai komposit 3, artinya Bank Muamalat Indonesia sudah melaksanakan penetapan tata kelola perusahan yang baik secara umum cukup baik.

Hasil *self assessment* selama periode penelitian menunjukkan bahwa kondisi bank dalam keadaan cukup baik. Artinya penerapan atas prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum cukup baik.

3) *Earning* (Rentabilitas)

Rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) merupakan rasio yangmengukur kontribusi aset dalam memperoleh laba kotor. Nilai rasio ROA yang tinggi menunjukkan jumlah marjin yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, nilai rasio ROA yang rendah menunjukkan jumlah marjin yang dihasilkan semakin kecil. Berikuthasil perhitungan rasio ROA.

Tabel 12. Perhitungan Rasio ROA

Tahun	Laba sebelum Pajak	Total Aset	ROA
2016	116.459.114	55.786.397.505	0,21%
2017	60.268.280	61.696.919.644	0,10%
2018	45.805.872	57.227.276.046	0,08%
2019	26.166.398	50.555.519.435	0,05%
2020	15.018.035	51.241.303.583	0,03%

Tabel 13. Predikat Komposit ROA Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Rasio ROA	Peringkat	Keterangan
2016	0,21%	5	Tidak Baik
2017	0,10%	5	Tidak Baik
2018	0,08%	5	Tidak Baik
2019	0,05%	5	Tidak Baik
2020	0,03%	5	Tidak Baik

Tabel 13 menggambarkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020,rasio ROA mengalami penurunan dan berada pada peringkat 5. Pada2016, diketahui rasio ROA sebesar 0,21%. Tahun 2017 rasio ROA menunjukan penurunan sebesar 0,10%. Di tahun-tahun selanjutnya pada 2018-2020, rasio ROA kembali menunjukkan penurunan kembali, masing-masing sebesar 0,08%, 0,05% dan 0,03%. Dari tabel diketahui bahwa rasio ROA dinilai tidak baik karena nilainya kurang dari 0,765%.

Hasil penelitian terhadap faktor *Earning* pada Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian menggambarkan bahwa bank dalam kategori tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) yang diperoleh selama periode 2016-2020 kurang dari 0,756% sesuai dengan kriteria standar penetapan oleh Bank Indonesia. Artinya kemampuan manajemen Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba semakin menurun. Penurunan tersebut terjadi karena tidak stabilnya laba pada pendapatan dan jumlah aset yang dihasilkan.

4) *Capital* (Permodalan)

Rasio Kecukupan Modela (CAR adalah membandingkan total modal terhadap total aktiva tertimbang menurut risiko/ATMR). Nilai rasio CAR yang semakin tinggi menunjukkan kualitas permodalan bank semakin baik. Sebaliknya nilai rasio CAR yang rendah menunjukkan kualitas *capital* bank semakin buruk. Berikuthasil perhitungan rasio CAR.

Tabel 14. Perhitungan Rasio CAR

Tahun	Modal	ATMR	CAR
2016	5.220.130.898	40.978.476.916	12,74%
2017	6.127.412.591	44.984.812.101	13,62%
2018	4.255.006.423	34.473.425.567	12,34%
2019	3.871.341.662	31.171.833.870	12,42%
2020	4.805.945.867	31.593.331.180	15,21%

Tabel 15. Predikat Komposit CAR Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Rasio CAR	Peringkat	Keterangan
2016	12,74%	1	Sangat Baik
2017	13,62%	1	Sangat Baik
2018	12,34%	1	Sangat Baik
2019	12,42%	1	Sangat Baik
2020	15,21%	1	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pada 2016 rasio CAR sebesar 12,74%dan mengalami sedikit kenaikan pada 2017, menjadi 13,62%. Pada 2018, rasio CAR mengalami penurunan sebesar 12,34% dan menunjukkan sedikit peningkatan di tahun 2019 menjadi 12,42%. Kemudian pada 2020, rasio CAR bank kembali menunjukkan peningkatan sebesar 15,21%.

Tabel 16. *Shari'ah Conformity* Pada Bank Muamalat Indonesia

Tahun	*Islamic Investment*	*Islamic Income*	*Profit Sharing*
2016	99,34%	99,97%	52,29%
2017	99,95%	99,98%	48,06%
2018	99,90%	99,98%	48,53%
2019	99,67%	99,98%	49,41%
2020	99,97%	99,99%	51,21%

Berdasarkan tabel di atas, Investasi syariah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 99,35%. Pada 2017investasi syariah Bank Muamalat Indonesia meningkat sedikit yaitu 99,95% dan mengalami penurunan pada 2018 dan 2019 masing-masing 99,90% dan 99,67%. Kemudian pada 2020 investasi syariah Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukan peningkatan menjadi 99,97%. Pendapatan syariah yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 99,97%. Pada 2017-2019 pendapatan syariah yang dihasilkan dalam keadaan stabil yaitu 99,98% dan meningkat pada 2020 yaitu 99,99%.

Pada rasio bagi hasil, Bank Muamalat Indonesia memiliki persentase sebesar 52,29% pada 2016. Pada 2017 dan 2018 Rasio bagi hasil menunjukkan penurunan menjadi 48,06% dan 48,53%. Rasio bagi hasil Bank Muamalat Indonesia pada 2019 menunjukkan peningkatan menjadi 49,41%. Kemudian pada Hasil penelitian terhadap faktor *capital* pada Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian menunjukkan bahwa bank berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio CAR lebih dari 12% sesuai dengan kriteria standar penetapan predikat komposit oleh Bank Indonesia yaitu >12% dengan kriteria sangat baik. Artinya Bank Muamalat Indonesia mampu menutupi atau mengatasi penurunan aktiva nya sebagai dampak dari kerugianyang dikarenakan oleh aktiva yang berisiko.

4.2. Analisis Menggunakan Metode SCnP Model

Dalam penelitian ini, penilaian dengan SCnP Model menggunakan dua indikator, yaitu:

1) *Shari'ah Conformity* (Kepatuhan Syariah)

Penilaian kinerja menggunakan *Shari'ah Conformity* bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mematikan kepatuhan syariah dalam hal investasi, pendapatan, dan bagi hasil, apakah sudah menerapkan sistem syariah atau belum. Variabel *Shari'ah Conformity* dalam penelitian ini diukur dengan tiga rasio, yakni tingkat *Islamic Investmentsratio*, tingkat *Islamic Income ratio*, dan tingkat *profit sharing ratio*. Berikut hasil perhitungan dari ketiga rasio tersebut. 2020 rasio bagi hasil Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan peningkatan yaitu 51,21%.

Hasil penelitian penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian yang dinilai darifaktor *Shari'ah Conformity* dengan menggunakan rasio *Islami Investment, Islamic Income* dan *Profit sharing* berada dalam kategori Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Islamic Investments*dan *Islamic Income* yang hampir mendekati 100% meskipun rasio profit sharing dalam keadaan tidak stabil.

2) *Profitability*

Penilaian kinerja berdasarkan *Profitability* bertujuan untukmenilai kemampuan bank syariah dalam memberikan margin dalam periode tertentu selama menjalankan operasionalnya.Profitabilitas bank diukur menggunakan rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset), ROE (*Return on Equity*) dan NPM (*Net Profit Margi*n). Berikut hasil dari perhitungan ketiga rasio tersebut.

Tabel 17. Rasio *Profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia

Tahun	ROA	ROE	*Profit Margin*
2016	0,14%	2,22%	2,42%
2017	0,04%	0,47%	0,93%
2018	0,08%	1,17%	1,87%
2019	0,03%	0,41%	1,16%
2020	0,02%	0,25%	0,45%

Tabel 17 menunjukkan bahwa rasio ROA yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 0,14% dan mengalami penurunan menjadi 0,04% pada 2017. Kemudian meningkat sedikit Pada 2018 sebesar 0,08%. Pada 2019 dan 2020 rasio ROA Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi 0,03% dan 0,02%. Hasil penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 memperoleh nilai rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) tertinggi pada 2016 dan terendah pada 2020. Artinya pada 2016 Bank Muamalat Indonesiamemperoleh kinerja yang baik dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

Pada 2016 Bank Muamalat Indonesia menghasilkan sebesar2,22% rasio ROE. Pada 2017 rasio ROE bank menunjukkan penurunan menjadi 0,47% dan pada 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,17%. Kemudian pada 2019 dan 2020 rasio ROE BankMuamalat Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi0,41% dan 0,25%. Hasil penilaian kinerja diketahui bahwa nilairasio tertinggi terjadi pada 2016 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Artinya, pada 2016 bank mampu dalam mengelola modal sendiri untuk mendapatkan laba atau keuntungan dibandingkan tahun lainnya dalam periode penelitian.

Rasio NPM Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 2,42% dan pada 2017 rasio *profit margin* menunjukkan penurunan menjadi 0,93%. Pada 2018 NPL Bank Muamalat Indonesia mengalami

sedikit kenaikan menjadi1,87% kemudianrasio NPM bank kembali menujukkan penurunan pada 2019 dan2020 menjadi 1,16% dan 0,45%. Hasil penilaian kinerja denganrasio profitabilitas memperoleh nilai tertinggi pada 2016 dan terendah pada 2020.

Tahap selanjutnya adalah menentukan posisi kuadran Bank Muamalat Indonesia, maka perlu dilakukan perhitungan rata rata dari variabel *Shari'ah Conformity* and *Profitability*. Berikut hasil perhitungan rata-rata *Shari'ah Conformity* and *Profitability*.

Tabel 18. Perhitungan Rata-Rata dan Posisi Kuadran SCnP Bank Muamalat Indonesia

Tahun	***Sharia Confortmity* (SC)**	***Profitability* (P)**	**Posisi *Quadrant* (Q)**
2016	83,87%	1,60%	URQ
2017	82,66%	0,48%	LLQ
2018	82,80%	1,04%	ULQ
2019	83,02%	0,53%	LLQ
2020	83,72%	0,24%	LRQ

Berdasarkan tabel di atas, diketahui rata-rata untuk variabel *Shari'ah Conformity* (SC) dan *Profitability* (P), maka Langkah selanjutnya adalah menentukan letak koordinat variabel *Shari'ah Conformity* (X) dan *Profitability* (Y) menggunakan *software* SPSS versi 26. Sehingga didapatkan perpotongan koordinat, yaitu 83,87% untuk variabel *Shari'ah Conformity* (X) dan 1,60% untuk variabel *Profitability* (Y). Tahap selanjutnya membuat grafik, seperti gambar berikut ini.

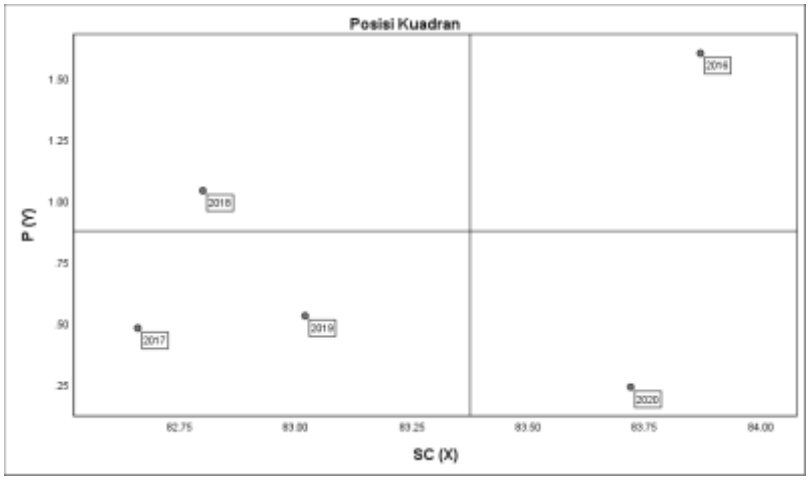

Gambar 3. Grafik Kuadran SCnP Model pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2017

Grafik di atas memberikan gambaran kinerja Bank MuamalatIndonesia periode 2016 hingga 2020 tersebar di empat kuadran. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada 2016 posisi Bank Muamalat Indonesia berada pada URQ (*Upper Right Quadrant*), yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperolehtingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang tinggi. Pada 2017dan 2019 Bank Muamalat Indonesia menempati kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*). Hal ini berarti Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kesesuaian yang rendah dan profitabilitas yang rendah pula. Pada 2018, berada pada kuadran ULQ (*Upper Left Quadrant*), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat kesesuaian syariah yang rendah, namun memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Pada 2020,menempatkan kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, namun memiliki

profitabilitas yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Hal inidisebabkan karena kondisi Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2016-2020.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 dinilai dari faktor Profil risiko(*Risk Profile*), berada pada kategori baik. Dinilai dari faktor *Good Corporate Governance* (GCG), menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia selama periode 2016-2020 berada dalam kategoricukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil *self assessment* Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh peringkat 3, yang artinya penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran oleh Bank Muamalat Indonesia cukup baik/memadai. Penilaian kinerja keuangan yang dinilai dari faktor Rentabilitas (*Earning*), menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 berada dalam kategori tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) yang diperoleh selama periode 2016-2020 yang semakin menurun. Dinilai dari faktor Permodalan (*Capital*), kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat baik.

Penilaian kinerja Bank Muamalat Indonesia dinilai dari faktor Shari'ah Conformity dan Profitability tersebar di empat kuadran. Pada 2016 kinerja Bank Muamalat Indonesia berada pada URQ (Upper Right Quadrant), yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang tinggi. Pada 2017 dan 2019 kinerja Bank Muamalat Indonesia berada pada kuadran LLQ (Lower Left Quadrant), artinya Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan dan profitabilitas yang rendah. Pada 2018, berada pada kuadran ULQ (Upper Left Quadrant), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah yang rendah dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Pada 2020 kinerja kuadran berada pada LRQ (Lower Right Quadrant), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, namun memiliki profitabilitas yang rendah. Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada objek yang masih minim, diharapkan penelitian selanjutnya dapat berfokus pada semua bank umum syariah di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, E. (2016). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT. Indofarma (PERSERO) Tbk. (Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor :KEP-100/MBU/2002). Ju*rnal Ilmu Administrasi Bisnis*, *4*(1), 103–115.

Andrianto, & Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. CV. Penerbit Qiara Media.

Anik, & Ningsih, S. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah Dengan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governace, Earnings and Capita. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 724-730.

Arimiko, H., Mukhzarudfa, & Ilham, W. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan *Sharia Conformity And Profitability* (SCNP) Model Dan Sharia Maqashid Index (SMI) Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Asia Tenggara Periode 2014-2018. *Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, *5*(4), 228–242.

Aroza Siregar, H., & Suryani, F. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Produktivitas Umkm Dan Dampaknya PadaPertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *10*(1), 105–117.

Dangnga, Muh. T., & Haeruddin, M. I. M. (2018). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan sistem Perbankan Yang Sehat* (A. Akbar, Ed.). CV. Nur Lina.

Harahap, S. S. (2017). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu

Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan Syariah*. Referensi (GP Press Group)

Istan, M., Permatalia, R., & Hardinata. (2021). *Analisis Tingkat Kesehatan PTBank Central Asia (BCA) Syariah Menggunakan Metode RGEC*. *17*(1), 94–107.

Khaafi, M., et al. (2017). *Akuntansi Syariah*. Penerbit Madenatera.

Limbong, C. H., et al. (2021). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. CV. Pena Persada

Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: GrahaIlmu

Olivia, M. (2019). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dengan Pendekatan CAMEL Pada Pt Bank BNI Syariah, Tbk Dan Pt Bank BNI, Tbk Periode 2014-2018. *Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, *8*(1),73–88.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020.

Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan *Maqasid Index* Dan *Sharia Conformity And Profitability* (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *4*(2), 107–130.

Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi*, *16*, 18–37.

Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). Islamic Banks Perfomance: An Assessment Using Sharia Maqasid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS. *International Jurnal Of Applied Business Research 2(1)*, 15-30.

Sabirin. (2020). Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri: Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance. *Akuntabilitas*, *13*(1), 51–62.

Sarasati, Y. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode CAMEL Dan RGEC Pada Bprs Harta Insan Karimah Periode 2013- 2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, *6*(1), 41–53.

Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013*.

FEBI UIN-SU Press.

Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suprotul, A., & Afriani, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. BankPembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. *Ekombies Review: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 156–168.

Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2020). *Instrumen Moneter Islam*. Rajawali Pers.

Taufiq, I., & Rofiqo, A. (2022). Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Komparatif Menggunakan Metode CAMEL. *Journal ofIslamic Banking and Finance*, *2*(1), 20–31.

Tyas, Y. I. W. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzata Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(1), 28–39.

Ubaidillah, & Astuti, T. P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity And Profitability (SCnP). *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 134–158.

Wahasusmiah, R., & Watie, K. R. (2018). Metode RGEC : Penilaian TingkatKesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *Jurnal I-Finance*,4(02), 170-184.

Yunita, N. A. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan MengunakanMetode CAMELS dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*. CV. SEFA Bumi Persada.

Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori kePraktik*.

Efektifitas Kebijakan Ekonomi di Kalimantan Barat

Ekawati*
Rahmatullah Rizieq[2]
[1,2)]*Universitas Panca Bhakti Pontianak, Indonesia*

ABSTRACT

This study aimed to present a general description of economic dynamics of West Kalimantan through the movement of its basic economic variables as well as a simple regional econometric model which can explain significant factors influencing inflation and the economic. The data were time series data over the 2000 - 2019 period. The estimation model was made using Two-Stage Least Squares (2SLS). The results showed: .1) in inflation model, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and bank credit influenced the inflation while the total government expenditure did not influence it significantly, and the GRDP positively influenced the inflation while the credit negatively influenced it; 2) in GRDP model, inflation and bank credit positively influenced the GRDP while the total government expenditure had insignificant effect on it. These indicated that the fiscal policy of both regional and provincial government of West Kalimantan has not significantly influenced the economy of the province.

JEL: H30, E31, E60,

Keywords: *inflation, growth, bank credit, government expenditure, policy*

1. PENDAHULUAN

Suatu perkonomian dikatakan mengalami resesi, jika tingkat pertumbuhannya adalah negative(Wuryandani, 2020). Oleh karenya diperlukan kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal stimulatif sangat dibutuhkan untuk mencegah resesi yang parah (Sikki, 2020). Selain Inflasi, pertumbuhan ekonomi juga merupakan variabel ekonomi makro penting yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah. Di tingkat daerah maupun nasional, variable-variabel yang mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah identik (Martin, 2012). Perbedaannya adalah pada instrument kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal nasional mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekonomi daerah. Tetapi selain itu kebijakan fiskal/anggaran di daerah dan kebijakan menyangkut dengan ekspansi kredit (sebagai ganti kebijakan menyangkut jumlah uang beredar) adalah juga variabel penting yang menentukan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

Dalam penelitian ini variabel-variabel "nasional" dan "regional" menjadi satu atau dalam hal tertentu variabel regional dipakai sebagai ganti variabel makro nasional (Ascani et al., 2012). Misalnya variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan jumlah uang beredar (*money supply*) diganti dengan masing-masing pengeluaran APBD dan jumlah kredit yang disalurkan. Di samping variabel kebijakan (*policy variable*) tersebut, inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga diasumsikan dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal yang di luar kontrol pengambil kebijakan.

* Email: ekawati@upb.ac.id

Kebijakan Fiskal di daerah digambarkan lewat Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD diharapkan berpengaruh postif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional (Frinces, 2013). Di sisi lain, total kredit bank umum yang merupakan aproksimasi dari permintaan uang di daerah adalah gambaran dari kebijakan moneter di daerah. Penawaran uang diasumsikan tetap.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir (Bariyah, 2015). Hal ini diperparah dengan inflasi Kalimantan Barat yang sangat fluaktuatif. Oleh karena itu analisis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan inflasi adalah sangat perlu. Sejauh ini penelitian dengan topik ini banyak dilakukan di tingkat nasional, penelitian di tingkat daerah khususnya di Kalimantan Barat juga perlu dilakukan, agar dapat diambil kebijakan yang spesifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan diskripsi umum tentang dinamika ekonomi Kalimantan Barat melalui pergerakan variabel-variabel ekonomi pokok seperti: PDRB dan Inflasi.
2. Menyajikan suatu model ekonometrik sederhana tentang ekonomi Kalimantan Barat yang dapat menjelaskan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat;

2. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Secara umum, ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Secara umum, kebijakan fiskal dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN setiap tahun anggaran .Kebijakan fiskal yang stimulatif harus meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, tujuan dari kebijakan fiskal kontraktif adalah untuk menurunkan inflasi dan mengurangi defisit eksternal (Mankiw, 2013). Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral lewat peredaran uang dan suku bunga dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Tujuan yang umumnya dapat dicapai adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara lain tercermin dari stabilitas harga (inflasi yang berkelanjutan), peningkatan pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja yang luas, Bank Indonesia selaku bank sentral telah menerapkan kebijakan moneter berupa meningkatkan suku bunga untuk menjaga daya tarik pasar domestik dan mengantisipasi keluarnya modal asing dari Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan kebijakan triple intervention untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terpengaruh oleh tensi perang dagang antar AS-China (Mishkin, 2010).

Di Indonesia, dijalankan kombinasi anatara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam rangka menstabilkan sistem perekonomian, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan OJK diperuntukan untuk mendukung kebijakan fiskal (Hertinawati, 2021). Bank Indonesia selaku bank sentral telah menerapkan kebijakan moneter berupa meningkatkan suku bunga untuk menjaga daya tarik pasar domestik dan mengantisipasi keluarnya modal asing dari Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif melalui kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap PDB dan memicu terjadinya kenaikan inflasi serta tingkat suku bunga. Shock pada penerimaan pajak (kebijakan fiskal kontraktif) berdampak negative terhadap output tetapi dampak tersebut berubah positif setelah satu tahun. Shock pada tingkat suku bunga diikuti dengan menurunnya tingkat inflasi sesuai dengan kaidah Taylor Rule. Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia belum mampu menstimulasi output dalam jangka pendek dengan cepat dan justru memberi tekanan pada kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga nominal (Setiawan, 2018). Terdapat

juga kointegrasi jangka panjang antara pengeluaran publik dan pajak produksi. Dalam jangka panjang, perpajakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa shock kenaikan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap output , sedangkan shock kenaikan pajak berpengaruh negatif. Pengaruh belanja publik yang lebih dominan terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan pajak menunjukkan bahwa kebijakan ini masih cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa resesi. Pada saat yang sama, kenaikan belanja publik memperlambat inflasi, sementara kenaikan pajak meningkatkan inflasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kebebasan pajak (Surjaningsih et al., 2012)

Dalam teori ekonomi makro dan keuangan publik, model ekonomi tidak dibangun di atas persamaan tunggal, melainkan pada sistem persamaan struktural. Oleh karena itu, perubahan satu variabel makroekonomi secara bersamaan mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya. Tujuan akhir dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk mencapai output yang tinggi, inflasi yang terkendali dan pengangguran yang rendah, sedangkan tujuan akhir dapat dikatakan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2013). Inti dari kebijakan ekonomi makro Keynesian adalah bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui mekanisme APBN, yaitu. mengubah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah (Setiawan, 2018) .

Hubungan dan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dapat berbeda untuk masing-masing negara. Untuk negara-negara OECD, kausalitas yang berjalan dari pertumbuhan ekonomi ke inflasi (Baklouti & Boujelbene, 2019). Sementara di Pakistan ada hubungan positif dan signifikan yang kuat antara pertumbuhan PDB dan inflasi. Kausalitasnya berjalan dari inflasi ke PDB (Uddin, 2021)

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian parsial tentang ekonomi makro Kalimantan Barat melalui model ekonometrik sederhana. Penelitian ini menggunakan data ekonomi makro runtun waktu (time series) untuk periode 2000 – 2020. Analisis dibatasi pada interpretasi hubungan antara dua variabel endogen tersebut dengan variabel eksogen yang mewakili kebijakan moneter dan fiskal di daerah. Model yang diterapkan adalah model makro yang disesuaikan dengan ruang lingkup daerah. Data diperoleh dari beragai terbitan Badan Pusat Statitik dan Kantor Bank Indonesia Kalimantan Barat, Data sesuai dengan kebutuhan estimasi model.

Output didefinisikan sebagai PDRB riil, yakni PDRB atas harga konstan 2000 (PDRB00) dan tingkat harga diaproksimasi dengan laju inflasi kumulatif (INFK) kota Pontianak. Total pengeluaran pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat (TPP) adalah variabel yang merepresentasikan kebijakan fiskal daerah. Kredit yang disalurkan oleh bank umum di Kalimantan Barat (KBU) adalah adalah pendekatan untuk variable jumlah uang beredar daeah. Variabel-variabel lain yang dapat merupakan variabel penjelas (*explanatory variabels*) tidak dimasukkan dalam persamaan PDRB dan INFK secara langsung, melainkan dianggap mempengaruhi secara tidak langsung. Model sederhana yang disajikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut (Abadie & Cattaneo, 2018) :

$$PDRB00_t = \alpha_0 + \alpha_1 INFK_t + \alpha_2 TPP_t + \alpha_3 KBU_t + \epsilon_{1t} \quad (1)$$

$$INFK_t = \beta_0 + \beta_1 PDRB00_t + \beta_2 TPP_t + \beta_3 KBU_t + \epsilon_{2t} \quad (2)$$

Indentifikasi persamaan (1) dan (2) menunjukkan kondisi memenuhi *order condition* dan *keduanya overidentified*. Oleh karena itu, estimasi dilakukan dengan menggunakan Metode *Two Stage Least Square*

(TSLS) dengan seluruh variabel (termasuk variabel bebas dalam masing-masing persamaan) dijadikan sebagai veriabel instrumental (Greene, 2012; King, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Variabel-Varibel Pokok Ekonomi Kalimantan Barat

Angka inflasi merupakan hal yang penting bagi kegiatan perekonomian. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dicapai melalui stabilitas harga barang dan jasa serta tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah. Dalam kaitan ini, upaya mengawal tingkat inflasi di daerah dalam level yang rendah dan stabil menjadi sangat penting. Namun, adanya kenyataan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorsi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga.

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi kota Pontianak. Data diambil dari berbagai sumber, baik dari Badan Pusat Statisitik maupun Bank Indonesia. Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2019 data inflasi di kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

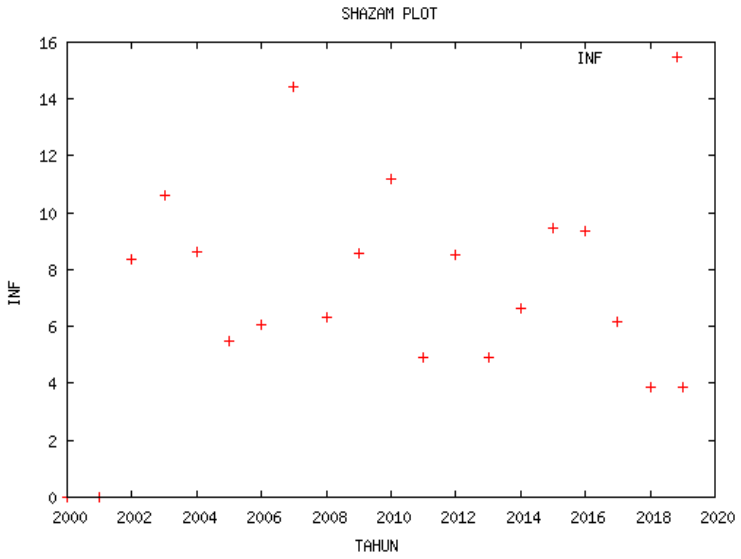

Gambar 1. Inflasi Kota Pontianak Periode Tahun 2000 – 2019

Dari Gambar 2 di atas, nampak inflasi di kota Pontianak dapat dikendalikan, bahkan dalam tahun-tahun terakhir inflas terus turun. Terkendalinya inflasi di Kota Potianak tidak lepas dari kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berbagai langkah telah ditempuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak. Sejalan dengan kebijakan yang ditempuh di tingkat pusat, pengendalian inflasi di Kota Pontianak pada intinya juga diarahkan untuk memperkuat forum koordinasi lintas sektoral, melakukan operasi pasar, melakukan pengawasan secara intensif terhadap ketersediaan bahan pangan pokok, terutama pada saat perayaan hari keagamaan, dan mengarahkan ekspektasi inflasi melalui berbagai program komunikasi secara intensif. Selain itu, beberapa program kegiatan yang diinisiasi TPID Kota Pontianak juga sudah diimplementasikan oleh TPID.

Di kota Pontianak, tekanan inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Tingkat tarif angkutan udara yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dapat mendorong terjadinya inflasi administered price; (2) Kenaikan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik, dapat mendorong kenaikkan tarif dasar listrik dan berdampak pada inflasi administered price; (3) Kebakaran lahan, bahan kabut asap dan anomali cuaca, dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya inflasi volatile foods; (4) Bencana alam pada daerah sentra produsen BAPOK, dapat berdampak pada ketersediaan pasokan komoditas dan mendorong terjadinya inflasi volatile foods; dan (5) Pemberian THR, dapat mendorong peningkatan ekspektasi harga barang dan jasa mendorong inflasi secara umum.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari berubahnya kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah atau negara secara berkelanjutan untuk menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu yang ditentukan. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab atau menentukan dari pertumbuhanan ekonomi dan juga interaksi dari faktor-faktor tersebut dikenal dengan istilan Teori pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah/negara dikatakan tumbuh jika: (1) pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal pada daerah/negara tersebut; (2) Pertumbuhan Ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga angka pengangguran dapat dikurangai; dan (3) Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, atau dapat juga dikatakan memberikan distribusi yang lebih merata.

Angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dapat dilihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Berikut ini adalah gambar PDRB Kalimantan Barat periode tahun 2000 – 2019 berdasarkan tahun dasar 2000.

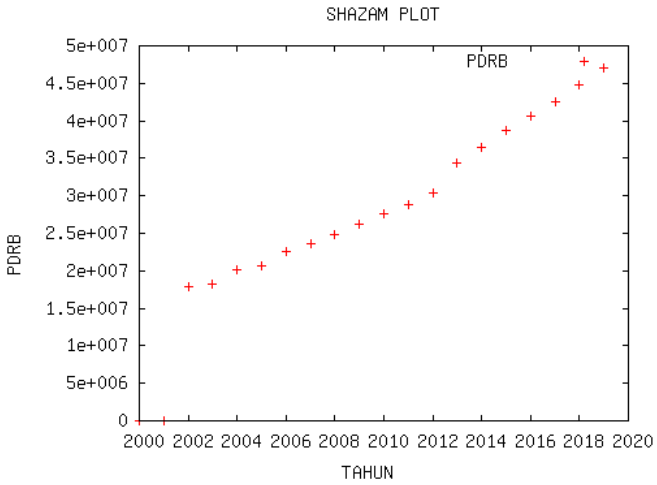

Gambar 2. PDRB Kalimantan Barat tahun 2000 - 2019 (HK 2000)

Total Pengeluaran Pemerintah yang dihitunga pada penelitian ini adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran pemerintah, baik pemerintah provinsi, maupun pengeluran pemerintah kabupaten. Data Total Pengeluaran Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah cenderung untuk tetap sama, kecuali pada tahun-tahun tertentu, seperti tahun 2013. Total pengeluaran pemerintah tetap menunjukkan juga bahwa pemerintah tidak dapat menambah pendapatannya sehingga cenderung sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran pemerintah ini lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, dibandingkan dengan untuk pengeluaran pembangunan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakmampuan pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang besar. Disamping itu pengeluaran yang tidak tepat akan menyebabkan efek "*crowding out*" bagi perekonomian.

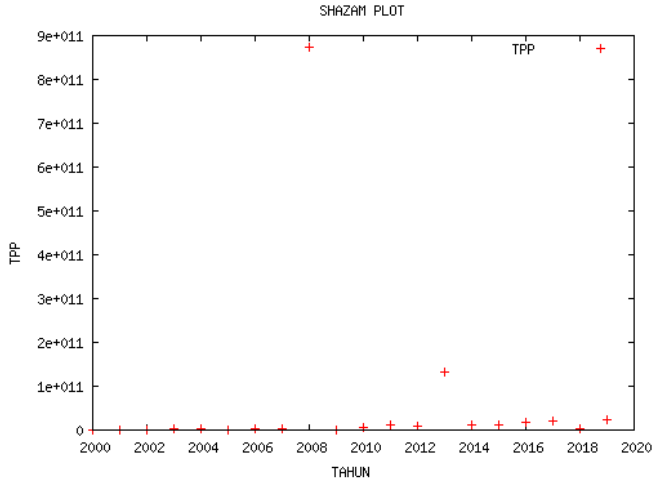

Gambar 3. Total Pengeluaran Pemerintah

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak pernah bisa luput. Bagaimana tidak, perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Singkatnya, kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. Pun, di Indonesia sendiri rasio aset perankan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih baru sebesar 55,01% per akhir 2019 lalu menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data Kredit Perbankan di Kalimantan Barat disajikan dalam Gambar 5. Intermediasi dan pasar keuangan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lewat dampaknya pada akumulasi modal dan inovasi teknologi. Pertama, semakin besar pengembangan sektor keuangan menyebabkan membesar juga mobilisasi tabungan dan alokasinya pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan yang tertinggi. Peningkatan akumulasi inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, dengan mengalokasikan modal pada proyek investasi yang tepat dan mempromosikan penguasaan perusahaan, pengembangan sektor keuangan meningkatkan inovasi teknologi dan produktivitas pertumbuhan, lebih jauh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Reuttner & Glass, 2012).

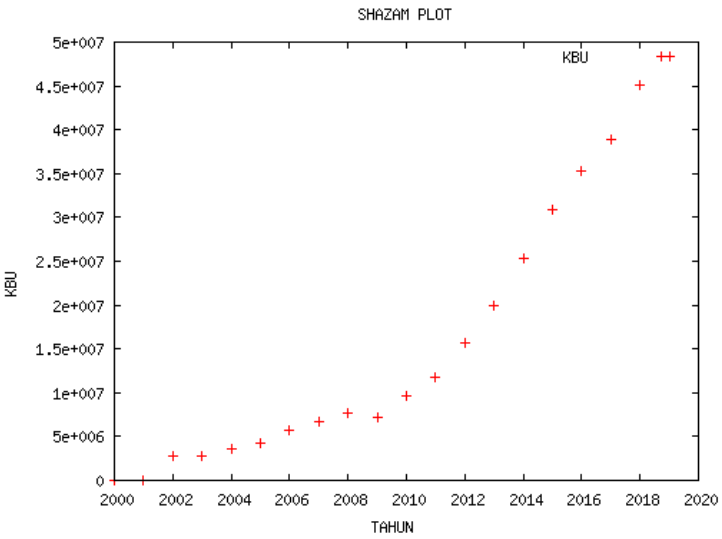

Gambar 4. Kredit Perbankan di Kalimantan Barat Periode 2000 - 2019

Kehadiran lembaga perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan pada pihak ketiga sangat dibutuhkan, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Barat. Dari sisi jumlah Kantor bank yang ada diKalimantan Barat pada tahun 2011 mengalami pertambahan dari 303 unit menjadi 346 unit atau naik sebesar 14,19 persen. Dana yang berhasil dihimpun baik dalam bentuk giro, deposito dan tabungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 dana yang dihimpun mencapai 23,618 trilyun rupiah naik menjadi 28,507 trilyun rupiah ditahun 2011 atau naik 20,70 persen. Untuk dana yang disalurkan ke berbagai sektor ekonomi melalui kredit perbankan, mengalami kenaikan sebesar 27,55 persen. Dilihat dari institusi yang menyalurkan, Untuk Bank Pemerintah naik 24,16persen, Bank Swasta naik 33,76 persen serta Bank Perkreditan Rakyat naik sebesar 47,18 persen dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2013).

Walaupun demikian, hasil analisis keterkaitan perekonomian Kalimantan Barat dengan menggunakan Tabel Input-Output Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 yang terdiri dari 50 sektor menunjukkan bahwa sektor Bank memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang rendah dengan sektor-sektor lainnya (Rizieq, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan bukanlah sektor unggulan di Kalimantan Barat.

Terdapat 4 (empat) kemungkinan hubungan antara pengembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) tidak terdapat hubungan kausalitas antara keduanya; (2) pengembangan keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi; (3) pengembangan keuangan adalah penentu pertumbuhan ekonomi dan (4) pengembangan keuangan adalah penghalang pertumbuhan ekonomi. (Graff, 1999). Perkembangan finansial dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif, dimana semakin meningkatnya perkembangan finansial akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dampak dari peningkatan resiko akibat adanya market imperfection/assymetric information cenderung tidak signifikan terhadap PDB. Interaksi antara shock di sektor riil dan moneter dengan perkembangan finansial menunjukkan bahwa perkembangan finansial mempunyai peranan positif dalam meredam dampak kejutan yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Sementara itu, dampak kejutan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin dikuatkan (Permata, Ibrahim, & Ari, 2011).

4.2. Model Struktural

Pada model inflasi, variabel-variabel PRDB dan Kredit Perbankan berpengaruh terhadap inflasi, sendangkan Total Pengeluaran Pemerintah, tidak berpengaruh signifikan. PDRB berbepangaruh positif, sedangkan Kredit Perbankan berpengaruh negatif. Hasil pengolahan data untuk model inflasi adalah seperti Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Analisis Varian Model Inflasi

Nama Variabel	Koefisien Estimasi	Standar Error	t-ration	P-Value
PDRB	0,82866E-05	0,6466E-06	12,81000	0,000
TPP	0,15598E-11	0,5927E-11	0,02632	0,796
KBU	-0,24854E-05	0,3964E-06	-6,26900	0,000
Konstan	-128,74000000	12,73000000	-10,11000	0,000

Tidak signifikasnnya pengeluaran pemerintah terhadap inflasi bertentangan dengan penelian Yulyanisa et al., (2019) yang menenjelaskan bahwa turunnya inflasi akibat adanya shock pengeluaran pemerintah. Hal ini terjadi karena dampak multiplier dari pengeluaran investasi pemerintah (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur

diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi (Yulyanisa et al., 2019).

Berpengaruhnya jumlah uang beredar dan PDRB terhadap inflasi didukung oleh hasil penelitan Faizin (2020) yang menyatakan bahwa variabel jumlah uang beredar dan PDB berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Marliah, 2018). Hasil ini berbeda dengan penelitian lainnya yang menyimpulkan sebaliknya (Izzah, 2012).

Pada model PDRB, variabel-variabel Inflasi dan Kredit Perbankan berpengaruh positif terhadap PDRB, sendangkan varibel Total Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil pengolahan data untuk model pertumbuhan ekonomi adalah seperti Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Analisis Varian Model Pertumbuhan Ekonomi

Nama Variabel	Koefisien Estimasi	Standar Error	t-ration	P-Value
INF	0,11120E+06	8677	12,81000	0,000
TPP	0,77330E-07	0,6880E-06	0,1124	0,912
KBU	-0,32359	0,2345E-01	13,80	0,000
Konstan	0,15845E+08	0,3573E+06	44,35	0,000

Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi output dalam jangka Panjang adalah pajak, inflasi dan suku bunga Variabel inflasi dan suku bunga mempunyai tanda sesuai yang diharapkan dimana dalam jangka panjang peningkatan inflasi serta suku bunga dapat memperlambat output. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki tanda sesuai yang diharapkan namun tidak signifikan (Yulyanisa et al., 2019).

Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif walaupun masih berada dibawah pertubuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan maksud untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berdasarkan studi empiris kebijakan fiskal yang dimaksudkan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa jadi dikarenakan proporsi dari belanja pemerintah tersebut masih didominasi oleh pengeluaran rutin, bukan pengeluaran pembangunan.

5. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Inflasi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh PDRB dan Jumlah Kredit Bank Umum (KBU). PDRB berpengaruh positif, sedangkan KBU berpengaruh negatif. PDRB Kalimantan Barat dipengaruhi oleh Inlasi dan KBU. Inflasi berpengaruh positif, sedangkan KBU berpengaruh negatif. Total Pengeluarn Pemerintah tidak berpengaruh baik terhadap PDRB maupun Inflasi. (2) Sisi produksi masih lamban mengikuti sisi permintaan dalam ekonomi Kalimantan Barat, hal ini terlihat dari naiknya inflasi yang disebabkan oleh naiknya PDRB masih lebih kecil dibanding pengaruh negative TPU terhadap inflasi. (3) Hal ini menunjukan, kebijakan fiskal pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat, belum mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Barat.

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan hasil pembahasan di atas, adalah sebagai berikut sebagai berikut: (1) Pemerintah mesti membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan di sisi produksi paling tindak sama dengan sisi permintaan, (2) Kebijakan fiskal pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat, hendaknya didorong pada belanja pembangunan bukan pada belanja rutin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada UPB yang telah memberikan bantuan, sehingga penelitian dapat terlaksana dan artikel ini bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadie, A., & Cattaneo, M. D. (2018). Econometric Methods for Program Evaluation. In *Annual Review of Economics*. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080217-053402

Ascani, A., Crescenzi, R., & Iammarino, S. (2012). Regional Economic Development : A Review. *SEARCH Working Paper*.

Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2019). The Economic Growth–Inflation–Shadow Economy Trilogy: Developed Versus Developing Countries. *International Economic Journal*, *33*(4). https://doi.org/10.1080/10168737.2019.1641540

Bariyah, N. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimatan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan HDI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *4*(1), 72–94. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11462

Frinces, Z. H. (2013). Membangun ekonomi daerah di indonesia. *Ekonomi*, *4*(2), 177–191. https://media.neliti.com/media/publications/17896-ID-membangun-ekonomi-daerah-di-indonesia.pdf

Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia. *JURNAL SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, *3*(1).

Izzah, N. (2012). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah (Periode 2001-2010). *Economics Development Analysis Journal*, *1*(1).

King, A. C., Rao, M. P., & Tregillis, C. D. (2017). Econometric Analysis. In *Litigation Services Handbook: The Role of the Financial Expert: Sixth Edition*. https://doi.org/10.1002/9781119363194.ch9

Mankiw, N. G. (2013). "Defending the one percent." In *The Political Economy Reader: Contending Perspectives and Contemporary Debates*. https://doi.org/10.4324/9781003047162-41

Marliah, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia. *JEBI | Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, *11*(02). https://doi.org/10.36310/jebi.v11i02.21

Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. *Journal of Economic Geography*. https://doi.org/10.1093/jeg/lbr019

Mishkin. (2010). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*.

Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, *3*(2). https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169

Sikki, K. L. (2020). Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Civilization*, *2*(1). https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1517

Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.

https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365

Uddin, I. (2021). Impact of inflation on economic growth in Pakistan. Economic consultant. *Economic Consultant*, *34*(2), 33–41. https://doi.org/10.46224/ ecoc.2021.2.4

Wuryandani, D. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.

Yulyanisa, L., Devianto, D., & Maiyastri, M. (2019). Model Inflasi di Indonesia dengan Menggunakan ARIMA. *Jurnal Matematika UNAND*, *4*(4). https://doi.org/10.25077/jmu.4.4.65-74.2015

Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Vol 5, 2022
ISSN 2986-9205

Analisis Kerja Sama Sapi Potong Dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap

Pratiwi Kurniati*
Abdul Hannan[2]
[1,2)] *IAIN Pontianak, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis kerjasama pengembangan sapi potong dalam tradisi masyarakat Madura di Desa Pal Sembilan Kec, Sungai Kakap, serta mendeskripsikan kerjasama pengembangan sapi potong dalam tradisi masyarakat Madura menurut konsep ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan persepsi dan pemikiran orang secara individual, yang melibatkan pemilik sapi dan peternak sapi sebagai subjek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang terkumpul berupa kata- kata dianalisa dengan tekhnik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa kerja sama yang di lakukan dengan sistem kepercayaan sudah sesuai dengan konsep yang telah diatur dalam Islam, dari pelaksanaan, tanggung jawab dan pembagian keuntungan dalam hasil peternakan. Tetapi pada tahapan penyerahan modal awal masih belum tepat. Walaupun begitu para peternak dan pemilik sapi sudah berusaha sebaik mngkin untuk menghindari akad gharar yang dilarang dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Kerja sama, Sapi, Tradisi.

1. PENDAHULUAN

Pertanian menjadi menjadi motor penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Penghasilan utama penduduk Indonesia di 73.000 desa sebesar 87% adalah pertanian. Kondisi ini mengartikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan. Padi dan palawija berkontribusi terhadap 60% penghasilan penduduk desa, yang diikuti oleh perkebunan karat dan kelapa sawit sebesar 16%, hortikultura 5%, kelapa 5%, kopi 3%, kakao 2% dan lainnya 9%. Namun Peternakan sebagai sumber protein nasional hanya berkembang di 1% wilayah pertanian perdesaan Dalam PDB nasional Tahun 2021 kontribusi subsektor peternakan sebesar 1,58 dan Tahun 2022 sebesar 1,66%.

Sedangkan Indonesia memiliki target peningkatan kelompok usaha ternak sapi skala menengah dan besar jika dimaknai dengan peningkatan skala kepemilikan rumah tangga dan target kontribusi usaha peternakan rakyat 20% Tahun 2045, maka ada beberapa simpulan yang bisa diambil a) harus adanya upaya mendorong perkembangan populasi ternak dalam rumah tangga meskipun tidak disebutkan secara rinci besaran skala menengah dan besar tersebut, b) Peningkatan skala usaha rakyat menjadi skala menengah dan besar secara tidak langsung akan menggeser. Peran usaha ternak sapi skala rumah tangga dan usaha sambilan atau sekedar tabungan menjadi industri atau usaha pokok (utama) atau minimal cabang usaha, dan

* Email: kurniatipratiwi2105@gmail.com

c). Tranformasi dari usaha peternakan rakyat (skala kecil) menjadi usaha peternakan menengah dan besar. (Renstra Kementan 2020-2024).

Dilihat dari paparan di atas, peluang usaha berternak sapi potong sangat menjanjikan karena dengan melihat peningkatannya permintaan bahan makanan yang berasal dari hewan sebagai sumber protein hewani khususnya daging. Ternak sapi biasanya menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, disamping hasil ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kompos, biogas, kulit, tulang dan lain sebagainnya. Usaha ternak sapi potong dapat dikatakan berhasil jika telah memberikan kontribusi pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari berkembangnya jumlah kepemilikan ternak, pertumbuhan berat badan ternak dan tambahan pendapatan rumah tangga. Pengelolaan dan pemeliharaan sapi potong adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Kecamatan Sungai Kakap adalah salah satu bagian dari Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat. Daerah contributor pada subsektor peternakan untuk usaha ternak sapi potong. Hal ini dibuktikan dengan potensi wilayah berupa pemelihara sapi yang cukup banyak di kalangan masyarakat khusus nya dikalangan warga madura dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pemelihara (penggarap) sapi. Berdasarkan survei di Jl. Amanah dan Jl. Bujama yang merupakan salah satu permukiman yang terdapat di Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya peneliti berkesempatan untuk mewawancarai dengan responden laki-laki di lapangan yakni, Bapak Justari. Bapak Justari yang berusia 40 tahun, beliau salah satu peternak sapi potong sejak tahun 2001 hingga sekarang. Berternak sapi potong menjadi pilihan bagi Bapak Justari dari tahun 2001 sebagai pekerjaan pokok untuk menghidupi keluaga disebabkan tidak ada pilihan lagi karena sejak awal pekerjaan beliau ialah merawat sapi dan beliau menganggap merawat sapi potong sudah bagian dari jalan takdir rezekinya. Pendapatan dari usaha itu beliau mampu membiayai pendidikan anak nya yang saat ini masih di bangku sekolah menengah pertama. Dalam sesi tanyajawab, ia sempat menyebutkan pendapatan yang ia peroleh. Pendapatan baru bisa ia rasakan ketika sapi yang ia rawat mencapai waktu 8 bulan sampai 12 bulan dalam masa pemeliharaan, dari umur 1 setengah tahun. Beliau menyampaikan dari 1 ekor sapi bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp 10.000.000 sampai Rp 13.000.000 dalam masa waktu 8 bulan sampai 12 bulan. Saat ini beliau memelihara 4 ekor sapi dengan sistem bagi hasil.

Selanjutnya, peneliti juga menjumpai dan mewawancarai peternak sapi potong di lapangan terkait. Dengan memelihara 6 ekor sapi potong dengan sistem bagi hasil. Beliau mengatakan selama ia merawat sapi potong alhamdulillah kebutuhan sehari hari beliau bisa tercukupi dan bahkan beliau basa menyekolah kan anak anak nya diantara 5 anaknya 3 anak nya sudah berkeluarga dan 2 anaknya lagi masih mengenyam di bangku pendidikan. Hebatnya lagi dari hasil ternak sapi potong beliau bisa menyekolahkan anak anak nya ke perguruan tinggi dan 1 diantaranya sudah menjadi aparatur negri sipil (polisi). Dan dalam sesi tanya jawab beliau juga mengatakan bahwa dengan berternak sapi potong baliau dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan bisa untuk membiayai pendidikan anak anaknya.

Kemudian dalam proses kerja sama pengembangan sapi potong yang dilakukan oleh pemilik dan peternak sapi, peneliti menemukan temuan dalam proses akad perjanjian tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut pemilik sapi dan peternak melakukan perjanjian secara tidak tertulis. Berdasarkan uraian itulah, penulis tertarik untuk menganalisis tentang Kerja Sama Sapi Potong dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap. Hal yang menarik dalam artikel ini penulis memaparkan pembahasan terkait pertama; Proses kerja sama sapi potong dalam tradisi masyarakat madura di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai kakap, kedua; Bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan peternak, ketiga; Upaya yang peternak lakukan dalam menghadapi kendala selama proses pemeliharaan sapi potong.

2. KAJIAN LITERATUR

Selain menggunakan dukungan landasan teori, agar pelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil – hasil penelitian sejenis, maka dalam penelitian ini juga di lengkapi dengan beberapa penelitia terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Beberapa referesi hasil penelitian yang memang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yang pernah penulis baca, diantaranya bagian yang menjelaskan satu per satu pengaruh variabel penelitian. Misalnya untuk contoh di atas yang menggunakan model regresi linier berganda, maka penulis perlu menjelaskan pengaruh dari setiap X terhadap Y, dan selanjutnya baru diikuti dengan penyampaian hipotesis penelitian.

Model penelitian (untuk riset kuantitatif) dapat dibuat dalam bentuk gambar yang menunjukkan pengaruh antar variabel yang diteliti, desain eksperimen yang berbentuk tabel, maupun dalam persamaan ekonometrika yang baku, yang selanjutnya diberi keterangan atas notasi atau singkatan tertentu yang dipakai dalam model atau desain Masdiyah (2019), pada skripsi yang berjudul *"Analisis Usaha Pengembangan Sapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam".* Usaha pengembangan sapi belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan pernak sapi potong karena strategi pengembangan usaha belum memenuhi tiga indikator kesejarteraan yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Dapat dilihat bahwa adanya sapi potong usaha ini hanya dijadikan sebagai tambahan untuk meringankan kebutuhan masyarakat dan usaha ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sapi potong di desa Marga Agung.

Syaputra (2021), pada skripsinya yang berjudul *"Analisis Pengembangan Ternak Sapi Potong Di Provinsi Sumatra Uatara*" Hasil dari penelitian ini adalah Sumber daya peternakan di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi dalam mengembangkan usaha peternakan sapi potong dilihat dari sumber daya genetik ternak yang unggul, sumber daya alam dan limbah hasil pertanian/perkebunan, sumber daya manusia, modal dan pemanfaatan teknologi. Rahmanto (2004). Penelitian ini mengenai "*analisis usaha peternakan sapi potong rakyat*" Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta dan temuan hasil survei. Analisis finansial digunakan untuk mengidentifikasi profitabilitas dan kelayakan usahatani sapi potong. Untuk melihat dampak impor digunakan analisis regresi linier sederhana dengan pendekatan persamaan Y = a + b X1 + c X2 + E. Hasil dari penelitian ini menujukkan Usaha sapi kereman yang sudah bersifat komersial mampu memberikan keuntungan bersih sebesar Rp 760.850/ekor (PO)/6 bulan dan Rp 1.003.080/ekor (Limousine)/12 bulan. Keuntungan atas biaya tunai yang diperol eh untuk masing-masing jenis sapi tersebut adalah sebesar Rp 1,54 juta dan Rp 3,43 juta. Keuntungan tersebut dapat diperoleh apabila kondisi harga sapi potong cukup tinggi.

Fikri (2021) pada skripsiya yang berjudul *"Analis Sistem Bagi Hasil Usaha Peterakan Sapi Potong Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*". Dari hasil dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi potong dengan sistem bagi hasil di desa Klambir V Kebun dilakukan dengan sistem bagi hasil penggemukan sapi jantan dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati bersama yaitu 50:50. Semakin besar skala usaha maka semakin besar pula keuntungan yang didapat, begitupun sebaliknya. Keuntungan yang didapat oleh pemilik modal dan peternak penggaduh setelah dianalisis ternyata berbeda, karena dalam usaha ini peternak penggaduhlah yang mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan ternak. Usaha peternakan sapi potong dengan sistem bagi hasil ini memberikan keuntungan dengan didapatnya nilai r/c ratio >1, yaitu pada skala 3-11 ekor r/c rationya 1,48, pada skala 12-20 ekor r/c rationya 1,58 dan pada skala >20 ekor r/c rationya 1,62. Dalam total pendapatan rumah tangga peternak penggaduh usaha peternakan memberikan kontribusi pendapatan pada setiap skala secara berurutan adalah 53,40%, 60,22% dan 67,79% yang artinya peternakan dapat dikategorikan sebagai cabang usaha karena memberikan kontribusi sebesar 30-70%. Berikut contoh penyajian model penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

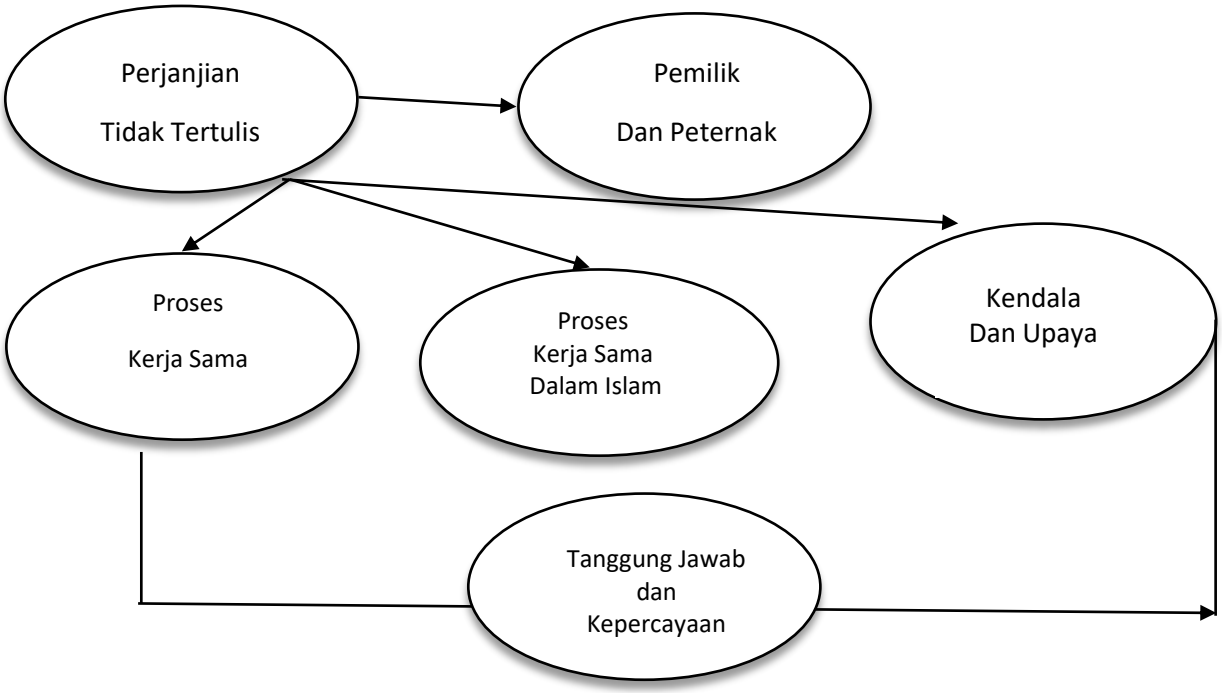

Gambar 1. Model Penelitian

2.1. Kerja Sama dalam Islam

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untukdiperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Mardani, 2016: 51). *Mudharabah* adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut sohibul *maal.* Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Muchtabis: 86). Pada dasarnya *mudharib* adalah orang yang dipercaya untuk melakukan usaha, dia diminta dengan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yangdiderita akibat kelalaian yang dilakukannya secara sengaja.

Saeed mendefinisikan *Mudharabah* adalah kontrak antaradua pihak di mana satu pihak yang di sebut *shahibul maal* mempercayai uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihakyang berakad yang berserikat dalam keuntungan laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah "Akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa"

Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah "penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menujalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjan (usaha) dari pihak yang lain.

Madzhab Maliki mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi`i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu

akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Sedangkan Ibnu Rusyid mendefinisikan *Mudharabah* sebagaipemberian harta seseorang kepada orang lain untuk di pakai berdagang berdasarkan sebagian tertentu dari keuntungan harta tersebut yang diambiloleh orang yang bekerja, yaitu sebagai yang telah disetujui sebelumnya oleh keduanya, misalnya sepertiga, seperempat atau separo. Jadi, definisi yang paling representatif bagi *mudharabah* sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab tersebut, *mudharabah* adalah : ”Suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orangyang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil, mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan”.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* (2011:34) mendefinisikan *mudharabah* ialah ”akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan uang untuk diperdagangkan bagi syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara’ tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau *Shohibul maal. Shohibul maal* akan mendapatkan *nisbah* atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara profesional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tetapi semua pihak berhak turut serta dalam mengambil keputusan manajerial perusahaan. Dalam *mudharabah*, pihak pemodal tidak diberi peran dalam mengambil keputusan manajerial perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian PLS *(profit and loss sharing)* dimana yang di peroleh para pemberi perjanjian adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai.

Demikianlah beberapa pengertian tentang *mudharabah* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka dan para praktisi yang bergelut di dunia perbankan syari'ah. Dari definisi diatas baik secara lughawi dan istilahi maupun dari segi makna yang khusus dan makna yang umum dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *Mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah *Mudharabah* sesunggungnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi

Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman *Jahiliyah* telah dikenal kemudian dilestarikan olehIslam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha *produktif* sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman *Jahiliyah*, umpamanya, hal ini juga telah menjadisuatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa *Mudharabah* itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan *mu'amalah* yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan antara si kaya dan si miskin atau untuk menghindari kecemburuan osial Dimensi *Filosofis* yang melandasi *Mudharabah* adalah adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill dan enterprenership*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahanya *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas modal. Karenadalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan.

Menurut Udovitch, bahwa istilah *Mudharabah* munculsebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan. Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. Masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan *mudharabah* atau kadang-kadang *muamalah*, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda*.

Pembicaraan Nabi Muhammad SAW terhadap *mudharabah* mengidentifikasi bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi Muhammad menjadi tanda bahwa kerjasama, ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa kemasa. Andaikata Nabi Muhammad menegaskan keharamannya atau keharusan *mudharabah* dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap atas *pluralitas* dan *fleksibilitas mudharabah* untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Maka dari itu memberlakukan sistem *mudharabah* harus tidak diikuti dengan pelaksanaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainya yang mungkin juga termasuk dalam model kerjasama juga.

Namun demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT. Ayat tersebut ialah "*Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah"* (Q.S. Al-Muzammil ayat: 20). Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan *bermuamalah*, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia. Artinya: *"Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* (Q.S. al-Jumu'ah ayat 10). Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup didunia, yaitu dengan melakukan *mu'amalah* terhadap sesama manusia, termasuk didalamnya adalah bentuk kerjasama *mudharabah*.

Selain perintah itu, mencari karunia Allah dimuka bumi ini, Allah juga memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong diantarasesama manusia, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah dengan merasakan kebahagiaan dan karunia yang telah mereka dapatkan dari Allah. Sebagaimana tergambar dalam ayat berikut ini: "*Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya"* (Q.S. Al-Maidah ayat 2). Ayat-ayat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa setelah mencari rizki (karunia) dari Allah SWT, maka harus di iringi dengansaling menolong dan memberikan rizki kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dapat dijadikan dasar berlakunya *mudharabah*, karena *mudharabah* juga bertujuan untuk menolong dan bekerjasama. Didalam Al-Quran, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang *mu`amalah*, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama *mudharabah* diperbolehkan.

2) As-Sunnah

Selain al-Quran, hadits sebagai salah satu sumber hukum Islamjuga memberikan landasan tentang *mudharabah,* atau *Qirodl.* Adapun hadits tentang *mudharabah* atau *Qirodl* sebagai berikut :Artinya: "*Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual. "* (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, hadits-hadits tentang tolong menolong dan berbuat baik kepada orang juga dapat menjadi dasar dari kebolehan *mudharabah (Qiradl).* Karena mudharabah *(Qiradl)* pada prinsipnya adalah menolong. Hadist tersebut adalah: Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a, Sesungguhnya Tuan Abbas bin Abdul Munthalib ketika menyerahkan harta untuk dimudharabahkan, maka ia memberikan syarat yaitu tidak dijalankan diatas air, tidak dititipkan dan tidak untuk membeli hewan yang mempunyaikabad. Dan ketika syarat tersebut dilanggar maka akan terkena denda. Kemudian syarat tersebut diajukan kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah memperbolehkannya.* (H.R. Thabrani).

Hadist tersebut merupakan landasan hukum kebolehannya melakukan *Mudharabah*, yaitu dengan adanya kata *muqaradah* yang artinya sama dengan *mudharabah*. Dikisahkan pula bahwa Rosulullah sebelum tugas kerasulannyatelah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah r.a. beliau mendapatkan modal dari Khadijah r.a. kemudian beliau berniaga ke negeri Syam. Al-Hafizd Ibnu Majah mengatakan bahwa *Mudharabah* telah terjadi pada Rasul, beliau mengetahui dan menetapkannya, kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu beliau tidak membiarkannya.

3) Ijma'

Berdasarkan Ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab. Diriwayatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah Purta-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia memerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari hartaAllah yang aku ingin kirimkan kepada *Amirulmu'minin.* Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada *Amirulmu'minin*, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya

berkata; kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya.

Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Adakah semua pasukan telahpinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak *Amirulmu'minin,* karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai *Amirulmu'minin,* kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja Dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadirdimajelis Umar tersebut berkata: Wahai *Amirulmu'minin,* bagaimana sekiranya harta itu anda anggap *Qiradl*? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berfikut setengah dari labanya.

4) Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagi bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha *produktif,* tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara *produktif,* tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun-rukun *qiradh* ada enam (Musofa Imam : 79), yaitu:

a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang)
b) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
c) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
d) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba Keuntungan

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari perdagangan) saja.Mengenai lafadh *ijab* adalah lafad *mudharabah /muqaradah / mu'amalah*atau lafadh-lafadh yang mengandung makna yang sama, sedangkan lafadz *qabul* adalah apabila orang seorang yang melakukan kerjasama berkata saya mengambil, saya ridho, saya menerima dan sesuatu lafadh yang menyerupainya.

d. Ensiklopedi Agama Dan Filsafat Juga Dijelaskan Rukun *Mudharabah*,Yaitu:

Harta pokok, barang/uang, hendaklah di ketahui kedua jumlahnya dan kualitasnya. Pekerjaan memperdagangkan itu, di serahkan kepercayaan kepada yang memperdagangkannya, asal ada harapan mendapatkan keuntungan (Mardani: 25). Baik yang memberi modal maupun yang memperdagangkannya, sudahbaligh dan bukan orang yang di bawah perwalian, beberapa cara bekerja, yang bekerja hendaklah ikhlas dan jujur, tidak membawa dagangan keluar negeri kecuali di ketahui pemberi modal. Tidak boleh membelanjakan uang *mudharabah* itu sekalipun untuk dirinya sendiri, karena itu harus dengan pembagian yang baik dan jujur.

e. Syarat Mudharabah

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan dalam kegiatan *mudharabah* oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaan atau ketidakjelasan yang bertambah- tambah (Mustofa Imam : 67). Syarat-syarat mudharabah tersebut adalah syarat yang melekat pada rukunnya. Adapun kejelasan semua itu adalah sebagai berikut:

1. Syarat pada pihak yang berakad.
   Keduannya harus mempunyai kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan. Hal ini dikarenakan sang *mudharib* mengelola modal orang lain, dan ini mengandung makna perwakilan. Orang yang diserahi harus orang yang jujur dan pandai berdagang, sebab ia memegang uang dengan izin pemiliknya. Dengankejujuran, semuanya menjadi baik.
2. Syarat pada obyek (modal, kerja, dan keuntungan)
3. Syarat pada modal
   Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal bentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan sesuai dalam uang yang beredar atau jenisnya.
4. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. Modal harus diserahkan pada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.
6. Syarat pada pekerjaan yaitu kerja yang diserahkan bisa dibentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill* dan lain- lain.
7. Syarat pada keuntungan (*nisbah*)
   Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase darikeuntungan yang mungkin dihasilkan. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah *mudharib*mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*. Untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama. Dalampenyerahan harta, harus telah dijelaskan tentang pembagian untung rugi. Dengan dijelaskannya ketentuan tersebut, agartidak terjadi perselisihan waktu penghitungannya.
8. Syarat pada *sighot*
   Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam modal, kerja,maupun menentukan *nisbah*. Tidak mengandung klausal yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. Sedangkan syarat-syarat *mudharabah* meurut sayid Sabiq adalah sebagai berikut: Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan , perhiasan, atau barang dagangan, maka akad *mudharabah* tidak sah. Ibnu mundzir berkata, "semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnyadi tangan orang lain sebagai modal *mudhdhabah*." Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dapat di pisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Pembagian keuntungan antara *mudharib* dan pemilik modal harus jelasprosentasinya , seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan imbalanseparuh dari apa yang di hasilkan. Ibnu mundzir berkata, "semua ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya qiradh jika salah satu dari keduanya atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya yang menjadi alasan batalnya akad bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya. Sehingga, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain tidak mendapat apa-apa. Dan, hal ini bertentangan dengan tujuan akad *mudharabah* yang di maksudkan untuk memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berakad.

Mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka *mudharabah* tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, sebagai mana *mudharabah* boleh diadakan tanpa ikatan, ia juga boleh dilakukandengan ikatan.

Ketika *mudharbah* di adakan dengan ikatan, mudharib tidak bolehmelanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jikadia melanggar, maka dia harus bertanggung jawab. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa dia pernah menetapkan syarat atas orang yang dia beri modal untuk diperdagangkan dengan berkata" kamu jangan menggunakan harta ini untuk berdagang binatang yang masih hidup. Kamu jangan membawanya menyeberangi lautan. Dan kamu jangan membawanya turun ke bagian bawah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut ini mak kamu menanggung hartaku."

f. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Mustofa Imam : 72).

1. *Mudharabah muthlaqah* Yang di maksud dengan transaksi *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqih* ulama *salfus* saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. *Mudharabah muqayyadah*
   Mudharabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

g. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagi berikut :

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya (Mustofa Imam : 87).
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudhharabah* bisa diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam AbuHanifah, akad *mudharabah* batal. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja. Kedudukan Mudharabah Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (*qiradh*) juga

tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah). Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju kalau dalam pembiayaan *mudharabah* ada syarat yang memuat tentang adanya jaminan/tanggungan, *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* seperti ini tidak boleh, dan *mudharabah*nya rusak, sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikunya membolehkan *mudharabah* seperti itu, hanya saja syaratnya batal. Imam Malik beralasan bahwa mempersyaratkan jaminan itu akan menambahkan kesamaran dalam *mudharabah*, hingga karenanya *mudharabah*nya menjadi rusak. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* tersebut dengan syarat yang rusak dalam jual beli, selaras dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, tetapi syaratnya batal. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang tidak ada jaminan yang diterima dalam akad yang sah. Didalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadilatuhu* juga menerangkan bahwa apabila pemilik modal itu, mansyarakatkan jaminan/tanggungan dalam pembiayaan *mudharabah* pada *amil* (pengelola) ketika mengalami kerugian maka syarat dan akadnya batal itu menurut pendapat mazhab Hanafi danHambali. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap *mudharabah*nya rusak karena syarat jaminan dalam *mudharabah* itu merupakan tambahan yangsamar. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan,sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa- menyewa).[47] *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah. Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antarakedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

a) Mengenai keuntungan disyaratkan:

Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperemapat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan darijumlah modal. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

b) Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut : Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.

Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhakmenerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika kerugian karena dialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana

atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorangpemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

2.2. Definisi Pengembangan Sapi Potong

a. Pengembangan

Menurut Sukristono (2005:30) pengembangan adalah merupakan gambaran kegiatan atau program kerja perusahaan maupun wirausaha kedepan, melalui program-program yang telah ditentukan sebagai upaya menggapai tujuan bersama dengan tujuan jangka panjang. Sedangakan menurut Mangkuprawira menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Dari pengertian di atas pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk datang memberikan informasi, pengarahan, pengaturan dan pedoman dalam usaha pengembangan.

b. Pengertian Sapi Potong

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Ternak ini juga menghasilkan limbah, seperti fases dan urena yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik, baik pupuk padat (kompos) maupun pupuk cair (biourin). Petani tradisional masih memanfaatkan tenaga sapi potong untuk mengelolah lahan/sawah dan mengangkut hasil hasil pertanian.

Sebagian masyarakat padabeberapa wilayah di Indonesia menganggap sapi potong sebagai ternak yang mempunyai nilai spiritual dan budaya yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial ditengah masyarakat setempat. Pengembangan sapi potong memiliki banyak manfaat,terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menstimulasi pengembangan sapi potong, yaitu:

1) Kondisi wilayah dengan iklim tropis cocok untuk budidaya sapi potong terutama sapi lokal, seperti sapi Bali.
2) Budidaya sapi potong merupakan kultur masyarakat yang sudah menjadi tradisi turun temurun.
3) Sumber daya pakan berupa hijauan pakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri tersedia sepanjang tahun.
4) Permintaan konsumen terhadap daging dan produk olahan pada daging sapi potong terus mengalami peningkatan.
5) Usaha sapi lokal yang dikembangkan oleh peternakan rakyat tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi.
6) Adanya kebijakan pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan pengembangan sapi potong.
7) Dukungan layanan lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembiayaan.

Pengembangan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan permintaan pasar dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan populasi ternak. Rumah tangga pelornak, kelompok peternak, dan usaha ternak merupakan pelaku yang menentukan upaya pengembangan ternak. Upaya ini dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan asal ternak. Sapi potong merupakan komoditas unggulan pelernakan sehingga pengembangan sapi potong menjadi sumber pendapatan masyarakat dan penggerak pertumbuhan subsektor peternakan. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, peternakan sapi potong dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah karena sentra produksinya terdapat di berbagai daerah.

Sapi potong merupakan salah satu sumberdaya hayati atau sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Usaha sapi potong dapat membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Usaha sapi potong yang pemeliharaannya dilakukan dengan berbagai pola pemeliharaan memiliki keunggulan, yaitu tidak terlalu tergantung pada tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, tetapi membutuhkan keterampilan budidaya ternak. Usaha sapi potong dapat dikembangkan dengan berbagai pola pengembangan. Secara umum, peternakan sapi potong di Indonesia memiliki tiga pola pengembangan, yaitu:

1) Usaha sampingan yang merupakan bagian dari usaha pertanian dan perkebunan, terutama sawah dan lading
2) Cabang usaha yang tidak terkait dengan usaha pertanian atau usaha lainnya, tetapi merupakan pengembangan usaha.
3) Usaha utama usaha yang padat modal dan berskala besar, seperti usaha penggemukan (fattening) sapi bakalan menjadi sapi siap potong.

Penggemukan sapi potong dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sistem kereman, dry lot, dan pastura. Sapi potong dengan kisaran umur 1 - 2,5 tahun dipelihara secara terus menerus di dalam kandang dalam waktu tertentu yang relatif singkat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas daging. Pakan yang digunakan dalam penggemukan berupa hijauan pakan dan konsentrat. Pemberian hijauan pakan sebesar 10 % dari bobot badan dan konsentrat 1 96 dari bobot badan ternak, sedangkan air minum diberikan setiap hari sebanyak 20 - 30 liter per ekor (Suryana, 2009). Lama penggemukan sapi potong bergantung pada usia sapi potong. Sugeng (2006) menjelaskan klasifikasi umur sapi bakalan yang akan digemukkan dan lama penggemukan, yaitu:

1) Sapi bakalan yang berumur kurang dari 1 tahun, dengan lama penggemukan berkisar antara 8 -9 bulan.
2) Sapi bakalan yang berumur 1 - 2 tahun, dengan lama penggemukan berkisar antara 6-7 bulan.
3) Sapi bakalan yang berumur 2 – 2 5 tahun, dengan lama penggemukan berkisar antara 4-6 bulan.

Pengembangan sapi potong yang dilakukan secara berkelanjutan akan lebih bermanfaat dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut Winarso, dkk. (2005), dukungan pemerintah yang dibutuhkan agar pengembangan sapi potong berkelanjutan, yaitu: 1) perlindungan terhadap wilayah lumbung ternak, 2) pengawasan terhadap alih fungsi lahan peternakan, dan 3) penerapan teknologi pengolahan pakan, baik hijauan pakan maupun konsentrat Pengembangan ternak yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah berdasarkan lumbung ternak dan lumbung pakan. Penetapan wilayah pengembangan ternak melalui tata ruang wilayah dapat melindungi dan meminimalisasi alih fungsi lahan peternakan akibat ekspansi sektor lain. Peternak di wilayah pengembangan dengan kepadatan populasi ternak yang tinggi dan memiliki dukungan limbah pertanian dan limbah agroindustrimembutuhkan introduksi teknologi pengolahan pakan. Upaya ini dapat mendorong peternak sehingga memanfaatkan potensi sumberdaya pakan yang ada.

2.3. Definisi Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai (1) “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” dan (2) “penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”. Karena kata “tradisi” diambil dari Bahasa Inggris tradition, maka ada baiknya saya sebutkan definisi kata ini di sejumlah kamus Bahasa Inggris. Menurut Cambridge Dictionary, kata tradisi didefinisikan sebagai “a way of behaving or a belief that has been established for a long time, or the practice of following behavior and beliefs that have been so established.” Sementara itu, menurut MerriamWebster Dictionary, kata “tradition” memiliki sejumlah arti atau makna sebagai berikut:

- An inherited, established, or customary pattern of thought, action or behavior
- A belief or story or a body of beliefs or stories relating to the past that are commonly accepted as historical though not verifiable
- The handing down of information, beliefs, and custom by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction
- Cultural continuity in social attitudes, customs, and institutions
- Characteristic manner, method or style

Kalau memperhatikan berbagai definisi diatas, maka istilah "tradisi" ini kurang lebih mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau praktik individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Penyampaian atau pewarisan tradisi dari generasi ke generasi ini biasanya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut atau dengan praktik dan contoh yang dilakukan oleh generasi tua (elders) pada generasi muda, bukan melalui instruksi tulisan. Meskipun disampaikan secara lisan dan sering kali tidak bisa diverifiasi secara ilmiah tetapi tradisi tersebut selalu dianggap sebagai "historis" oleh masyarakat setempat. Tradisi ini bisa bersifat atau berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan sakral (seperti ritual) maupun non-keagamaan yang bersifat profan (misalnya ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara memasak, dan seterusnya).

2.3. Pengertian Dari Suku Madura

Pengertian dari suku madura Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata madura adalah pulau di daerah jawa timur. Arti lainnya dari madura adalah suku bangsa yang berasal atau mendiami pulau madura. Suku Madura (Bahasa Madura: *Orèng Mâdhurâ*) merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa (sensus 2010). Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya (Pulau Puteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Giligenting, Pulau Raas, dan lain-lain). Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

3. METODA PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan oleh peneliti yakni menggunakam pendakatan yang bersifat kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor, Metodologi penelitian kualitatif Merupakan prosedur penelitian yang mengasilkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dan prilaku yang telah diamati (Prastowo, 2012).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunkan penelitian yang bersifat deskriptif, yang di maksud penelitian deskriptif yaitu menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain kemudian hasilnya akan di sajikan dalambentuk laporan (Arikunto, 2010)

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

d. Waktu Penelitian

Waktu yang di gunakan oleh peniliti untuk penilitian ini di laksanakan yaitu sejak tanggal di keluarkannya ijin penelitian dalamkurun waktu 2 bulan, 1 bulan adalah pelaksanaan penelitian dan 1 bulan untuk menyusun laporan yang di sajikan dalam bentuk skripsidan proses bimbingan.

e. Sumber Data

Data primer, data primer yang di dapat merupakan sumber utama yang di jadikan bahan penelitian. Data primer ini di dapatkan dari para wanita yang menjadi pedagang pasar tradisional Rasau Jaya kemudian pihak pengelola pasar. Data sekunder, data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini bertujuan dalam mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memenuhui standar data yang di tetapkan.

1) Wawancara

Teknik wawancara ini di gunakan untuk mengumpulkan datadengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang di ajukan ke pada masyarakat yang berternak sapi, sumber informan yaitu Bapak Marsidi sebagai pemodal (*Mudhorib*) dan Bapak Nasir sebagai peternak sapi (Pengelola) di Desa Pal Sembilan, pihak Triangulasi ada juga Pemuka Masyarakat setempat yaitu Bapak Nasuki sebagai ketua RT di Gg Amanah dan Bapak Aminuddin sebagai Kepala Dusun di lokasi pengembangan sapi potong.

2) Observasi

Metode ini di lakukan dengan cara mengumpulkan datadengan mengamati objek secara langsung. Pengambilan data dengancara metode ini di lakukan dengan mata tanpa bekomunikasi dengan siapapun serta tanpa adanya alat-alat komunikasi lainya.

3) Kajian pustaka

Yaitu dengan cara pengambilan referensi melalui data yang terdapat di sumber-sumber literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, seminar dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

g. Alat Pengumpul Data

1) Handphone Sebagai Alat Merekam

Handphone ini di gunakan sebagai alat merekam yang berfungsi sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang nantinyaterlewatkan selama berlangsungnya wawancara. Sehingga pada proses wawancara berlangsung peneliti dapat fokus tanpa harusmencatat. Maka dari itu handphone ini juga memudahkan peniliti dalam melaksanakan wawancara pada penelitian.

2) Kamera

Kamera ini di gunakan untuk mengambil dokumentasi padasaat penelitian berlangsung.

3) Buku Pedoman Wawancara

Buku pedoman ini di gunakan sebagai bentuk acuan atau pengingat peneliti tentang apa saja yang harus di gali dalam penelitian ini. Kemudian peniliti juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sudah atau belum di pertanyakan ke peneliti.

h. Teknik Analisa Data

Tehnik analisais data yang di ambil mengacu pada rangkaian tahapan yang di jelaskan oleh Miles dan Huberman (1984).

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini di lakukan dengan cara wawancara kemudian dengan cara observasi yang langsung terjun ke lapangan.Pada tahap ini yaitu untuk memperoleh data yang di harapkan. Kemudian data

ini bisa juga di dapatkan melalui sumber literatur seperti, buku, jurnal, artikel, seminar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses untuk pemilihian, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstarakan serta transformasi data kasar yang terdata dalam catatan yang berada di lapangan. Dalam proses ini di laksanakan secara selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul sebagaimana ini bisa di lihat pada kerangka HH konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan yang di pilih oleh peneliti.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kegiatan ketika sekumpulan informasi telah disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Bentuk informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang padu, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

4) Penarikan Data

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah di reduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus. Maka dalam hal ini peneliti lebih mengkaji hal yang lebih spesifik atau khusus pada penelitian.

5) Verifikasi

Verifikasi merupakan raingkaian yang bersifat mengecek data. Cara yang di gunakan adalah hasil dari wawancara, observasi dan data yang di gunakan dalam penelitian, agar setiap data bisa di anggap valid.

6) Pengujian Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong 2017:331), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kulaitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perpspekif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan pemerintahan desa.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Sistem Pengembangan Sapi Potong Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap

Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan kerukunan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, gotong-royong dan saling membantu yaitu ciri khas masyarakat desa. Di Desa pal sembailan ini penduduknya mayoritas petani dengan pendapatan sebahagian besar dari hasil bumi. Adapun pendapatan tambahan masyarakat Desa Pal Sembilan salah satunya adalah peternakan sapi dengan sistem bagi hasil dimana praktek inilah yang menjadi fokus penelitian penulis.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan dimasing-masing pihak, tanpa adaunsur pemaksaan. Didalam kerja sama ini salah satu pihak menyediakan modal untuk dikelolah oleh pengelolah danhasil keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.

Pemilik sapi adalah orang yang memiliki sapi untuk diternakkan, namun jika pemilik tidak dapat merawat ternaknya, ternak itu bisa diberikan kepada peternak untuk diternakkan dengan hubungan kerja sama. Peternak adalah seseorang yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak dengan tujuan mendapatkan hasilnya. Dengan demikian peternakan adalah usaha untuk mengembang biakkan hewan dengan cara dipelihara dan dirawat sebaik mungkin, seorang yang mengelolah peternakan sapi maka ia adalah seorang pemelihara sapi.

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Pal Semsebilan Kec. Sungai Kakap mengenai penerapan sistem Kerja Sama Pengembangan Ternak Sapi Potong Di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap. Penulis menuliskan bahwa sistem kerja sama pengembangan peternak sapi potong ini berdasarkan pada konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah,* yaitu pemilik modal memberikan dana 100% kepada pengelola dana yaitu berupa sapi. Adapun sebelum menjalin hubungan kerjasama bagi hasil peternak sapi di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap. para peternak dan pemilik sapi menjalin perjanjian hubungan kerja sama dalam proses peratan sapi potong tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sudi selaku pemilik sapi sebagaiberikut:*"Ada hubungan kesepakatan (cencian/rembuken) kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan pemilik sapi sebelum sapi diserahkan kepada peternak berupa perjanjian bagi hasil bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dikarenakan dalam kerjasama ini kami berlandaskan pada rasa saling percaya karna peternak yang merawat sapi saya adalah keluarga sendiri."* Hal serupa juga dibenarkan oleh bapak Jatim yang juga selaku pemilik sapi yang menyatakan bahwa:*"Kami membuat perjanjian hubungan kerja sama berupa perjanjian bagi hasil namun perjanjian itu hanya perjanjian secara lisan, kami hanya berdasar pada asas saling percaya saja, perjanjiannya dilakukan di tempat pemeliharaan sapi yang mana saya yang menawarka ke peternak untuk merawat ternak saya, perjanjian yang dilakukan bahwa semua kebutuhan ternak ditanggung oleh peternak*."

Begitu pula yang dikatakan dari hasil wawancara penulis dengan bapak H.Usu, selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa: *"ya kami menjalin hubungan kerja sama berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian dilakukan di rumah saya yang mana saya yang meninta untuk peterenak supaya merawat ternak saya, perjanjiannya secara lisanyang dilakukan diawal sebelum sapi saya serahkan kepada peternak yang akan merawat ternak saya, yang mana ia merupakan keluarga saya sendiri akan teteapi semua kebutuhan ternak ditanggung oleh peternak yang tidak di perhitungkan nantinya di pembagianhasil*."

Dari ketiga pernyataan para pemilik sapi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peternakan sapi yang dilakukan di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas memiliki hubungan keluarga dekat dengan peternak sapi perjanjian dilakukandirumah pemilik sapi yang mana pemilik sapi yang meminta untuk sapinya dirawat peternak, perjanjian yang mereka buat tidak secara tertulis melainkan hanya saling percaya antara kedua pihak, perjanjian yang mereka sepakati bahwa semua kebutuhanternak ditanggung oleh peternak.

Jangka waktu perjanjian kerja sama bagi hasil dan penetapan pembagian hasil harus jelas sebelum modal diserahkan kepada pengelolah. Peternak sapi di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap menentukan jangka waktu perjanjian dan penetapan pembagian hasil dimana jangka waktu sapi jantan sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Satiman selaku peternak sapi yang mengatakan bahwa:*"Biasanya perjajian kerja sama bagi hasil berakhir sekitar 1 tahun jika sapi nya sudah gemuk, jika pemilik sapi sudah ingin mengambilnya atau menjualnya maka perjanjian itu sudah berakhir, dan yang menentukan jangka waktu yaitu pemilik sapi dan pembagiannya pun demikian jika menggunakan uang atau sapi kurus."*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Marsidi selaku peternak sapi yang menyatakan bahwa: Marsidi, Peternak Sapi, Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap, "*Peternakan sapi jantan jangka waktunya sekitar 12 bulan bahkan lebih, yang menentukan pembagian hasil sapi jantan adalah pemilik sapi dengan kesapatan awal yang telah di sepakati."* Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu perjanjian kerja sama bagi hasil peternakan sapi jantan lebih jelas berkisaran 1 tahun bahkan lebih. Mengenai modal dalam kerja sama pengembangan ternak sapi potong di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap. jumlah dan harga sapi/ modal yang diberikan pemilik sapi rata-rata harga 15 -100 juta dan jumlahnya satu atau dua ekor dan bahkan lebih perpeternak, pendapatannyapun beragam dalam sistem bagi hasil menurut Bapak Tumar selaku peternak sapi sebagaimana yang ia ungkapkan sebagai berikut:*"jumlah sapi yang saya pelihara 5 ekor harga nya kira awal masuk kandang kemaren sekitar Rp25.000.000 dan ada yang harga Rp23.000.000. pendapatan tidak menentu, jika sapi yang dipelihara terjual mahal maka hasilnya juga banyak kadang kadang Rp setiap satu ekor itu mas dapat keuntungan Rp 6.000.000 kadang bisa lebih dan juga bisa di bawah itu".*

Serupa dengan pernyataan diatas Bapak Nasir selaku peternak sapi juga mengungkapkan bahwa:*"Jumlah sapi yang saya pelihara 2 ekor harganya kira-kira Rp. 15.000.000 dan Rp. 20.000.000. Pendapatannya tidak menentu, jika sapi yang dipelihara terjual mahal maka hasilnya juga banyak kadang-kadang Rp. 3.050.000 kadang bisa melebihi."* Bahkan hampir semua pernyataan mengatakan hal yang sama, maka penulis dapat menarik kesimpulan ,pernyataan tersebut bahwa rata-rata sapi yang diternakkan seharga Rp. 15.000.000 bahkan ada yang sampai Rp.100.000.000 dan jumlah sapi yang dipelihara peternak ada yang sampai dua ekor bahkan ada yang 5 ekor serta pendapatan yang didapatkan lebih banyak jika dibagi dua berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah bagian bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

Dasar perhitungan pembagian hasil berdasar pada adat sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mahad dari hasil wawancara penulis sebagai berikut: *"Jumlah bagian dibagi dua jumlah bagi hasil tergantung dari hasil penjualan sapi terkadang tidak ada hasil yang dibagikan, yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil yaitu keuntungan dari hasil penjualan sapi yang menurut kami sudah adil dan tidak ada pihak yang dirugikan karena pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik sapi dan Peternak sapi sebesar 50:50%, yang sudah disepakati diawal dimana 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk peternak sapi."*

Dari pernyataan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan peternak sapi di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap berdasar pada adat turun temurun yang ada di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap ini dimana jumlah bagian bagi hasilnya dibagi dua antara pemilik sapi dan peternak sapi yakni pembagian 50%;50% yang sudah disepakati diawal yang menurut mereka sudah tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem kerja sama pengembangan ternak sapi potong di Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap terbagi atas dua yakni berdasarkan pada sistem bagi hasil secara rupiah yaitu berdasarkan pada hasil penjualan ternak jika sapi yang dipelihara merupakan sapi jantan lalu keuntungannya dibagi dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arsan selaku peternak sapi mengenai pembagian hasil peternakan yaitu sebagai berikut:*"Jika sapi jantan maka bagi hasilnya menggunakan uanghasil keuntungan penjuala sapi tersebut dengan sepakatan yang telah di sepakati di awal ketidak sudah masuk atau sapi terjual."*

Bapak Amer selaku pemilik sapi juga mengungkapkan hal yang sama mengenai sistem bagi hasil yang digunakan bahwa:*"Bagi hasil sapi jantan menggunakan uang hasil keuntungan penjuala sapi tersebut."* Dari penjelasan pemilik dan peternak sapi diatas penulis dapat simpulkan bahwa sistem bagi hasil peternak sapi terbagi dua yakni jika sapi jantan menggunakan rupiah yakni uang hasil penjualan. Bapak Sholihin mengungkapkan *Proses bagihasil antara "peternak sapi dan pemilik sapi dilakukan apabila sapi jantan pembagiannya setelah sapi Adapun biaya yang dikeluarkan untuk obat-obatan, garam dan kebutuhan ternak sapi lainnya ditanggung sendiri tidak ada perhitungan biaya sebelum pembagian hasil dilakukan, mekanisme pembagiannya langsung dibagi dua, serta pemilik sapi tidakpernah memberikan upah sebelum pembagiah hasil dilakukan. Pembagian hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan porsi masing-masing, tidak ada pihak yang merasa dirugikan."*

Sama halnya yang diungkapkan dari wawancara penulis dengan Bapak Aslim yang juga sebagai peternak sapi bahwa: "*Pembagian hasil peternakan sapi jantan dilakukan setelah sapi dijual dan jika sapi betina pembagiannya setelah sapi tersebut melahirkan dan anak sapi itu tidakmenyusu lagi. Ada biaya yang dikeluarkan berupa obat-obatan, garam dan kebutuhan ternak sapi lainnya ditanggung sendiri tidak ada perhitungan biaya sebelum pembagian hasil dilakukan, mekanisme pembagiannya langsung dibagi dua, pemilik sapi tidak pernah memberikan upah sebelum pembagian hasil dilakukan. Pembagian hasil yang dilakukan menurut saya sudah sesuai dengan porsi masing-masing dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan."*

Kedua pernyataan diatas menunjukkan bahwa mekanisme sistem bagi hasil yang digunakan peternak sapi langsung dibagi. Tanpa ada perhitungan biaya-biaya serta pemilik sapi tidak pernah memberikan upah kepada peternak sapi sebelum dilakukan pembagian hasil peternakan dan menurut peternak sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa pembagian hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan porsi masing-masing dan tidak ada pihak yang dirugikan menurut kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan karena sapiyang dipelihara oleh peternak meninggal ataukah kecurian maka kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama seperti yang diungkapkan oleh bapak selamet selaku pemilik sapi bahwa: *"Jika terjadi kecurian atau sapi tersebut meninggal maka kedua pihak tidak mendapatkan apa-apa karna tidak ada hasil yang bisa dibagikan, dan jika terjadi kerugianitu menjadi tanggungan bersama."* Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila sapi yang dipelihara oleh peternak meninggal ataukan kecurian maka baik pemilk sapi dan peternak sapi tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada hasil bisa mereka bagikan mereka sama-sama rugi, kerugian yang dialami ditanggung bersama.

2) Bentuk Kesepakatan Kerjasama Sapi Potong Di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap.

Pada bagian ini, tujuan dari penelitian penulis tersebut yaitu untuk mendeskripsikan penerapan kesepatan kerja sama Sapi Potong Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap sebagaimana yang terdapat pada bab I. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pelaksanaan kerja sama pengembangan sapi potong di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap sudah sesuai dengan kerjasama pengembang biakan sapi potong dalam konsep ekonomi Islam hanya saja masi ada ketentuan dalam kerjasama ini masih ada yang belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil peternakan sapi di Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis melainkan secara lisan atau hanya berlandaskan saling percaya saja, meskipun akad yang dilakukan secara lisan dalam ekonomi Islam dapat dipandang sah meskipun lemah dari segi hukum.

Perjanjian secara lisan dibolehkan asalkan berdasar pada asas nilai ilahi yakni mengandung asas kejujuran antara kedua belah pihak dan usaha yang dilakukan atas dasar kerelaan tidak ada paksaan

dari pihak manapun. Oleh karena itu perjanjian lisan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid/57: 4 sebagai berikut:

وَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ

فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ´arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langitdan apa yang naik kepada-Nya, dan Dia bersama kamudi mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan dibolehkan selama terdapat kerelaan antara semua pihak dan tidak ada paksaan serta saling jujur karena Allah SWT maha melihat dan mengetahui apa yang dikerjakan dimanapun kita berada. *Modal yang digunakan dalam kerja sama ini berupa sapi yang langsung di berikan kepada peternak yang harganya diperkirakan sekitar Rp. 12.000.000 bahkan ada yang sampai Rp. 20.000.000*

Hal yang berkaitan dengan modal ini belum sesuai dengan syarat yang berkaitan dengan modal dalam sistem bagi hasil ekonomi Islam karena modal yang digunakan padakerja sama peternakan sapi di Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap ini berupa sapi, bukan berupa uang dan mereka menggunakan sistem kira-kira disini terdapat ketidak jelasan modal, sebagaimana yang disyaratkan dalam kerja sama pengembangan sapi poto dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) menurut pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya modal harus berupa uang. Syarat yang melekat pada rukun *mudharabah* salah satunya berkaitan dengan modal dalam adalah sebagai berikut:

Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dollar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah*[93] tumar, Peternak Sapi, desa pal Sembilan kec,sungai kakap,"*Wawancara",* tanggal 30 Mei 2022.*inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layir dan Auza'I membolehkan akad *mudharabah* dengan modal barang alasan jumhur ulama ialah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (gharar), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidakjelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelolah. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut imam abdul hanifah malik dan ahmad hukumnya di bolehkan, karena modal sudah bukan baranglagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut Mashab Syafi'I, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidak jelasan dalam modal (Muslim : 2010) :

a Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
b. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi bukan berarti harus ada di majelis akad.
c. Modal harus di serahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa meskipun modal yang berupa sapi ini, nilai dan satuan harganya sudah jelas diketahui taksirannya tetap tidak Sah menurut sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dalam bagi hasil karena bisa mengandung unsur ketidak jelasan atau samar-samar nantinya dalam pembagian hasil.

Pembagian hasil usaha yang sudah ditentukan diawal akad dimana hal ini sudah sesuai dengan sistem kerja sama pengembangan sapi potong dalam konsep ekoniomi Islam pembagiannya akan dilaksanakan setelah sapi terjual yang digunakan berdasarkan pada tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun temurun di Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap. Hasilnya berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnyayaitu 50%:50% dimana 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk peternak sapi.

Mekanisme sistem bagi hasil yang digunakan langsung dibagi dua tidak ada pengurangan biaya operasional selama perawatan ternak yang sepenuhnyaditanggung oleh peternak sebagaimana yang sudah disepakati diawal bahwa semua kebutuhan ternak menjadi tanggung jawab peternak, mayoritas peternak di Desa pal Sembilan kec. sungai kakap yang telah diwawancarai penulis tidak merasa dirugikan dan menurut mereka sistem bagi hasil yang sudah diterapkan sudah sesuai denga porsi masing-masing dimana tidak ada pihak yang dirugikan karena sudah disepakati diawal akad sebagaimana hasil wawancara dengan bapak nasir sebagai berikut: Ada biaya yang di keluarkan untuk kebutuhan ternak seperti obat-obatan, garam dan lainnya, biaya yang dikeluarkan ditanggung sendiri dan tidak ada perhitungan biaya sebelum pembagian hasil dilakukan sebagaimana sudah disepakati diawal bahwa kebutuhan ternak sepenuhnyaditanggung oleh peternak, mekanisme pembagiannya langsung dibagi dua menurut kami mekanisme sistem bagihasil sudah sesuai dengan porsi masing-masing, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena sistem yang kami pakai berdasarkan perjanjian yang telah kami sepakati di awalakad.

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwamekanisme bagi hasil yang dilakukan dalam usaha peternakan sapi ini adalah mekanisme perhitungan bagi hasil *revenue sharing* yang mana pendapatan yang didapatkan adalah pendapatan kotor yang didistribusikan tanpa harusdikurangi dengan biaya-biaya operasional usaha. Didalamhal ini sistem *revenue sharing* ini dilakukan berdasarkan pada kesepakatan diawal dimana pembagian hasil dilakukan tanpa perhitungan biaya-biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh peternak sapi sistem bagi hasil seperti ini tidak sesuai dengan bagi hasil dalam ekonimi Islam yang mana hal ini merugikan salah satu pihak yakni peternak yang telah mengeluarkan biaya untuk perawatan ternakakan akan tetapi pembagian hasil ini berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak diawal akad yang telah mereka sepakati yang mana jika bagi hasil yang dilakukan berdasarkan padakesepakatan diawal maka dibolehkan dalam ekonomi Islam.

Adapun sistem bagi hasil yang digunakan dalam bagi hasil ini terbagi atas dua yakni menggunakan rupiah jika sapijantan yang dipelihara namun jika sapi betina menggunakan bagi hasil anak sapi jika sapi melahirkan anak pertama dan hanya satu ekor itu bagian untuk pemilik sapi untuk perternak menunggu anak sapi berikutnya, jika melahirkan dua anak sapi maka kedua belah pihak mendapatkaan bagian,Jika bagi hasilnya menggunakaan uang maka yang menjual adalah peternak.

Mekanisme bagi hasil dengan menggunakan uang sudah sesuai dengan sistem bagi hasil *(mudharabah)* yang menggunakan perhitungan bagi hasil *revenue sharing* sudah sesuia dengan ekonomi Islam karena berdasarkan pada kesepakatan mereka diawal akad bahwa semua kebutuhan ternak ditanggung oleh peternak. Pada umumnya sistem bagi hasil peternakan sapi yang dilakukan di Desa pal sembailan kec. sungai kakap dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong sebagaimana yang dikatakan oleh bapak sahdi bahwa alasan melakukan kerjasama pengembangan sapi potong, dikarenakan saya tidak mampu untuk merawat ternak saya sendirian dan untuk saling tolong-menolong untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga setidaknya untuk menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit.

Dari pernyataan tersebut kerjasama pengembangan sapi potong yang diterapkan oleh peternak sapi di Desa pal Sembilan kec.sungai kakap dengan tujuan untuk saling tolong menolong guna untuk meningkatkan perekonomian para pemilik dan peternak sapi sedikit demi sedikit di Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya masih ada yangbelum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sistem bagi hasi ekonomi Islam (*Mudharabah*). Sebagai salah satu bentuk kerja sama bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Sebagai dasar hukum ‘ariyah adalah anjuran agama supaya

manusia hidup tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Terjemahnya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Berdasarkan keterangan-keterangan dan ayat di atas dapat penulis ketahui bahwa kerja sama berupa peternakan itu dibolehkan bahkan dianjurkan tanpa ada unsur komersial di dalamnya, dan jika unsur-unsur lain yang sifatnya Di dalam Islam setiap muamalah itu harus menguntungkan kedua belah pihak baru bisa dikategorikan boleh atau dianjurkan.

3) Upaya Yang Dilakukan Para Perternak Dalam Mengatasi Kendala Saat Berternak

Pada bagian ini, tujuan dari penelitian penulis tersebut yaitu untuk Mendeskripsikan dan menganalisa apa saja kendala hadapi dan upaya yang mereka lakukan dalam mengatasi kendala kendala dalam pengembangan sapi potong Di Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap sebagaimana yang terdapat pada bab I. Usaha beternak sapi potong seperti penggemukan dan pembibitan tidak terlepas dari beberapa kendala. kendala kendala ini ada agar kita terus belajar bagaimana beternak sapi secara baik. Salah satu kendala dalam penggemukan sapi potong adalah sulit nya mendapat kan bakalan calon sapi super. hal ini tentu sangat terkait dengan bisnis pembibitan sapi. banyak ternak yang enggan terjun ke bisnis pembibitan (menghasilkan bakalan), sehingga sering kali harga bakalan melambung tinggi. sebagai contoh tahun 2009, harga bakalan sapi ongole berumur 2,5 tahun bisa mencapai delapan juta rupiah.

Selain itu tentang segmen usaha menghasilkan bakalan terbilang cukup lama. sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hasan selaku pemilik sapi sebagai berikut: *"kesulitan yang kami alami dalam pengembangan sapi potong ini mas… di ataranya susah nya mencari bibit sapi yang bagus apalagi saat ini sapi yang biasa nya datang dari pulau Madura sekarang tidak datang lagi dari 2019 waktu covid itu.karna bibit dari sanalah yang harganya sangat terjangkau dan cocok bagi kita sebagai peternak. pun juga kendala yang lain sperti susahnya mencari rumput karna lahan banyak yang sudah jadi lahan perumahan".*

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Budi atau di panggil Bapak Rebut yang juga selaku pemilik sapi yang menyatakan bahwa: *"Iya mas, kendala yang kami alami memang dalam pencarian bibit bibit untuk penggemukan sapi, karana selain sedikit bibit yang datang terkadang hanya datang dua kali dalam setahun mas, selain itu juga disaat musim nanam padi lahan lahan yang awal nya untuk pencarian rumput untuk sapi disaat datang musim padi lahan itu di semprot semua mas".*

Begitu pula yang dikatakan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Usu, selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa: *"kendala yang kami alami saat sapi sakit dan tidak bisa diobatin kadang kadang sapi nya gak mau makan dan kami potong walaupun belum waktunya itu pasati kami rugi kebiasakan kami jika sapi sakit biasa nya kami obatin menggunakan obat tradisional jika".*

Dari ketiga pernyataan para pemilik sapi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam kerja sama pengembangan sapi potong di desa pal Sembilan kec. sungai kakap ada beberapa faktor pertama faktor pembibitan untuk di ternakan. susahnya untuk mencari bibit untuk di kembangkan menjadi hambatan pemilik ternak sapi potong di desa pal Sembilan kec. sungai kakap yang kedua adalah disaat musim padi kendala yang di hadapi susah mencari rumput disebabkan rumput yang

biasa mereka cari menjadi lahan untuk para petani bertani pagi karna mereka tidak memiliki lahan tersendiri untuk ketersediaan rumput mereka.

5. SIMPULAN

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasilpenelitian dari wawancara yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat pada penerapan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa pal sembilang kec. sungai kakap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Kerjasama pengembangan sapi potong yang diterapkan peternak sapi di Desa pal Sembilan kec. sungai kakap, yaitu pembagian keuntungan tanpa ada pengurangan biaya operasional yang ditanggung peternak, akad yang dilakukan secara tidak tertulis dan pembagian hasilnya dimana sapi jantan yang dipelihara dibagi dengan pembagian 50%:50% dengan menggunakan uang, yang menjadi dasar bagi hasil adalah hasil keuntungan penjualan sapi, pola bagi hasil yang digunakan berdasarkan pada adat tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun temurun di desa ini.
2) Kerjasama pengembangan sapi potong dengan sistem kepercayaan yang diterapkan peternak sapi di Desa pal sembila Kec. Sungai kakap menurut persepektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan sistem kerjasama dalam ekonomi Islam hanya saja masih ada ketentuan-ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam diantaranya akad yang dilakukan masih akad lisan yang masih lemah dimata hukum, prinsip tersebut sejalan dengan akad mudharobah.
3) Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh para peterak di antaranya para peternak sulit untuk mendapatkan bakalan (bibit) sapi untuk mereka pelihara disebabkan stok biasa yang didatangkan dari jawa terhenti semenjak Covid19 sehingga mengharus kan mereka membeli bibit lokal dengan harga yang lebih tinggi. Pada saat musim padi para petani di daerah tersebut menyemprot rumput, yang biasa jadi sumber makanan hijaun untuk ternak sapi potong sehingga para peternak kehilangan lahan untuk mencari rumput dan menggukan ampas tahu sebagai makanan tambahan dengan tambahan modal yang lumayan tinggi dan mengobati sapi yang tidak mau makan disebabkan karna sakit jika tidak sembuh mereka potong untuk menjual dagingnya agar mereka tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Beoedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitin Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. I ; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Adi, Afrian Pratama. 2015. *Pengertian profesi sebagai peternak*, artikel, http://afriansatu.blogspot.in/2015/11/pengertianprofesi sebagaipeternah.html?m=1, Diakses pada tanggal 15April 2022.

Ahmad Faris Yunianto, "*Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bendono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*", Skripsi. Strata, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.

Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Etika Bisnis*, Cet.1; Yogyakarta: CAPS, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Fauziah, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2014.

Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perspektid HadisNabi*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017.

Ismail, *Perbankan syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Cet. IV;Jakarta: Kencana, 2016.

Muchtasib, Bakhrul. 2009. *Konsep Bagi hasil dalam perbankan syariah.*

http//:www.ulohtengpay.blogspot.in/2009/08/konsep- bagi-hasil-dalam-perbankan.html?m=1, Diakses padatanggal 14 April 2018.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah di banksyariah*, Ed.I; Jakarta: Rajawali, 2008.

-------. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, Cet.-; Yogyakarta:UII Press, 2012.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrument, negara dan pasar*, Cet. III; PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2014.

------. *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrument, negara dan pasar*, Cet. II; PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalat Kontenporer*, Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Cet.II; Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.

Puspitasari, Ita. *"Motivasi Peternak Melakukan Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Sapi Potong di Desa Lempang Kec. Tanete Riaja Kab. Barru*", Skripsi. Strata, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Rahmawati, Yeni. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan*", Skripsi. Strata, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Riadi, Muchlising. Pengertian, Karakteristik, Jenis danSyarat Bagi Hasil, artikel, https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian- karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html?m=1, diaksespada tanggal 1 mei 2022.

Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet. -; Jakarta: Pustaka Indonesai,t.th.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugeng, Bambang dan Sudarmono. *Panduang Beternak Sapi Potong*, Cet. I; Jakarta: Penebar Sawadaya, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XX11; Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*, Cet.10; Jakarta: Rajawali Pers,2016.

Syafe'I Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Cet, VII; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wahid, Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan kambing Studi Kasus diDesa Argosari Kecamatan Ayah kabupaten Kebumen*",Skripsi. Strata, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Wardi, Ahmad Muschlis. *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.

Wicaksono. *Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Prinsip Ekonomi Islam.* Artikel,http://www.academia.edu/28202172/Pengertian Tujuan_Manfaat_Karakteristik_dan_Prinsip_Ekonomi_Islam, diakses pada tanggal 16 April 2022

Widarto, "*Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak menurut Hukum Adat Bersemah di Kecamaatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur"*, Skripsi. Strata,Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*, Cet. -: Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Potensi Pendapatan Syariah Kota Pontianak

Romi Suradi *
Universita Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Increasing Original Local Government Revenue (PAD) determines the region's capacity to carry out government functions. The higher and greater ratio of PAD to total regional income shows independence in financing all obligations towards regional development. This study aimed to determine the Potential of Sharia Income to increase Pontianak City Local Revenue and the performance of the Pontianak city local government. The analytical method used is descriptive. The results of this study show that the potential of sharia that can develop is fa'i wealth, natural resource management, industry, and tourism. Fa'i assets are assets that can be collected other than zakat, including managing natural resources, which the government must manage, helping the community develop local industries, and placing Pontianak City as a tourist city to grow the regional economy.

JEL: R19

***Keywords**: Original Local Government Revenue potential, Sharia Income.*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah (Efendi & Wuryanti, 2011)

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintah daerah, pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya dana dari pemerintah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak serta pengelolaan retribusi daerah. Selain itu daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan hasil dari sumber-sumber daya yang ada didaerah, dana perimbangan, pengelolaan kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya.(Khairul Umam, 2014)

Fakta menunjukkan bahwa jumlah anggaran baik penerimaan APBN Indonesia maupun pengeluarannya meningkat setiap tahunnya, namun demikian tidak tampak dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat secara signifikan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ekonomi yang diterapkan di

* Email: romi.suradi@ekonomi.untan.ac.id

Indonesia hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional, bukan dengan pandangan untuk memuaskan kebutuhan setiap individu. (Yulianto, "APBN Anti Rakyat", al-Wa'ie, No. 122 Th. Ke XI (Oktober 2010), hal. 9).

Menurut Syaikh 'Abdul Qadim Zallum (2002) menyatakan bahwa Islam mempunyai format yang khas dan berbeda dengan konsep lain terkait pengaturan berbagai urusan kehidupan termasuk berkaitan dengan pengaturan politik negara hingga pengelolaan pendapatan ekonomi dan pengaturan-pengaturan lainya. Bahkan menekankan konsep pengaturan tersebut harus dikelola oleh negara secara utuh baik secara pusat maupun daerah. Adapun pengelolaannya berdasarkan hukum-hukum syariah. Hal ini karena dalil-dalil syara' telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan harta negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta pos-pos pembelanjaannya. (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah), alih bahasa oleh Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 2.)

Pendapatan daerah akan menjadi penopang pendapatan nasional, karena konsep Islam di dalam mengelola keuangan baik pemasukan dan pengeluaran terpusat. Maka dari itu, Kota Pontianak merupakan bagian dari suatu wilayah memiliki potensi untuk menopang pemasukan negara yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai urusan baik di daerahnya sendiri atau menopang daerah lainnya.

Namun dengan adanya kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Desentralisasi juga memberikan kesempatan kepada suatu daerah untuk mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja pemerintahannya guna dapat melayani masyarakat secara luas. (Nyoman Triaryati, 2018)

Perkembangan realisasi lingkup APBD Kalbar triwulan II tahun 2020 telah mencapai 43,56 % dari target. Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2020 mencapai Rp11.219,19 miliar. Angka ini turun sebesar 2,77 persen dari periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp11.783,92 miliar.

Tabel 1. Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (milliar rupiah)

URAIAN	2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	25.434,50	11.783,92	25.755,30	11.219,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.762,76	1.778,90	4.526,11	1.789,66
Pajak Daerah	2.579,41	1.236,02	2.980,46	1.200,56
Retribusi Daerah	145,54	60,30	155,46	77,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	181,17	168,16	200,28	178,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	856,64	314,41	1.189,90	333,88
PENDAPATAN TRANSFER	20.721,81	9.831,39	18.164,75	9.115,24
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	781,28	209,71	599,97	240,29
Dana Alokasi Umum	12.122,39	6,718,63	12.087,91	6.623,17
Dana Alokasi Khusus	5.656,38	1.593,80	4.934,15	1.766,76
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	691,29	339,35	743,59	358,19
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.470,48	969,90	1562,23	126,84
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	4,10	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	949,92	173,63	3.064,44	314,28
Pendapatan Hibah	389,08	56,84	436,68	120,23
Pendapatan Lainnya	560,84	116,79	680,29	194,05

Sumber : Kementerian Keuangan (Data Diolah)

Pada kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi Kalimantan Barat disebutkan Target Pendapatan anggaran Kalbar Tahun 2021 sebesar Rp. 6,68 Triliun, PAD sebesar Rp. 2,861 Triliun yang bersumber dari Pajak Daerah Rp. 2,203 Triliun, Retribusi Daerah Rp. 41 Miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 92 Miliar, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3,8 Triliun, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 524 Miliar (https://kalbarprov.go.id/). Sedangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun. Total belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp1,84 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan juga ditargetkan sebesar Rp99,11 miliar. (Pontianakkota.go.id)

Untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan usaha lebih dari pemerintah daerah dalam menemukan potensi-potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan baru. Untuk itu yang menjadi fokus Penelitian ini adalah mencoba menganalisis dan mengidentifikasi potensi pendapatan syariah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dan kinerja pemerintah daerah kota Pontianak.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Potensi Ekonomi Kota Pontianak

Kota Pontianak adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena tepat berada di garis Khatulistiwa. Kota Pontianak memiliki 2 sungai besar yaitu Kapuas dan Landak, dengan jumlah penduduk 646.661 jiwa dan Luas Wilayah 107,82 Km, tentunya kota Pontianak memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

Tjokroamidjojo (dalam Widodo, 2019:24) menyatakan bahwa "sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat disebut sebagai sektor yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibanding sektor-sektor lain dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung".

Menurut (Helvira, 2020) Sektor ekonomi dapat dikatakan sebagai sektor potensial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis wilayah, sehingga semakin besar barang dan jasa yang dapat diekspor maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang diperoleh suatu wilayah.
b. Memiliki kemampuan daya saing yang relatif baik dibanding sektor sejenis dari wilayah lain. Perkembangan sektor ini akan mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah.
c. Memiliki sumberdaya yang dapat mendukung bagi pengembangannya, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat ketersediaan sumber daya yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan sektor ekonomi wilayah tersebut.Kota Pontianak

2.2. Pendapatan Syariah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)

Dalam literatur islam sering dikatakan bahwa sumber pendapatan dalam syariah (Islam) adalah zakat. Padahal tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Pada masa awal-awal Pemerintahan Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat dapat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan.

Sedangkan keuangan negara atau pendapatan negara dalam pandangan Islam yang dimaksud oleh Syaikh 'Abdul Qadim Zallum merupakan konsep keuangan negara Islam (Al-Khilafah). Prinsip-prinsip utama sistem keuangannya adalah sebagai berikut: (1) Baitul Mal merupakan APBN, (2) Pemasukan dan pengeluaran negara berdasar pada hukum syara' (dalam hal ini termasuk pendapatan daerah), (3) Pengelolaan keuangan negara merupakan wewenang kepala negara (Khalifah), dan (4) Struktur APBN Khilafah, terdiri atas dua pos yaitu pos pemasukan dan pos pengeluaran negara.

Untuk pos pemasukan negara atau pendapatan negara terdiri atas tiga pos, yaitu: (a) pos fa'i dan kharaj, (b) pos kepemilikan umum, dan (c) pos zakat. Setiap pos ditangani oleh badan (dewan) tersendiri, yaitu (1) Bagian Fa'i dan Kharaj, (2) Bagian kepemilikan Umum, dan (3) Bagian Shadaqah. Badan tersebut bertanggung jawab terkait dengan penyimpanan sekaligus catatan-catatan administratifnya. Bagian kepemilikan umum mempunyai tugas tambahan yaitu melakukan analisis, mencari, mengambil, dan memasarkan harta kepemilikan umum tersebut. Ketiga pos tersebut dibuat terpisah, tidak boleh tercampur satu dengan yang lainnya.

Bagian Fa'i dan Kharaj dalam pelaksanaannya terdiri atas enam urusan, yaitu (a) urusan Ganimah, yang mencakup ganimah, anfal, fa'i, dan khumus; (b) urusan kharaj; (c) urusan status tanah yang bertugas administratif terkait tanah-tanah di seluruh wilayah negara, baik tanah 'usyriyah, tanah yang ditaklukkan secara paksa, aṣ-Ṣawafi, tanah-tanah milik negara, tanah-tanah milik umum, dan tanah-tanah yang dikuasai negara; (d) urusan jizyah; (e) urusan fa'i yang mengelola harta dari 'usyur, aṣ-Ṣawafi, seperlima harta rikaz, seperlima dari tambang yang kecil, pemasukan dari penjualan dan penyewaan tanah negara, dan harta waris yang tidak ada pewarisnya; dan (f) urusan pajak (ḍaribah). (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah), alih bahasa oleh Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 2.)

Bagian pemilikan umum mengelola pemasukan negara dari kepemilikan umum. Bagian ini terdiri atas enam urusan, yaitu: (a) urusan minyak dan gas; (b) urusan listrik; (c) urusan pertambangan; (d) urusan laut, sungai, perairan, dan mata air; (e) urusan hutan dan padang rumput; (f) urusan tempat khusus yang dikuasai negara. (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah), alih bahasa oleh Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 2.)

Bagian Shadaqah mencakup pengelolaan pemasukan harta-harta zakat. Bagian ini terdiri atas tiga urusan, yaitu: (a) urusan zakat mal (harta) dan perdagangan; (b) urusan zakat pertanian dan buah-buahan; dan (c) urusan zakat ternak. (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah), alih bahasa oleh Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 2.)

Adapun pos pengeluaran negara, negara sebagai subjek ekonomi berbeda dengan subjek ekonomi lain, seperti perusahaan maupun rumah tangga, yaitu pengeluaran negara yang mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini karena negara atau pemerintah mengutamakan kesejahteraan warganya secara keseluruhan. Negara harus dapat menjamin kebutuhan minimum warganya secara keseluruhan. (Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, edisi V (Yogyakarta: BPFE,2003), hal. 2.)

Pos pengeluaran negara menurut pandangan Islam terdiri atas delapan pos, yaitu: (a) pos dar alkhilafah, (b) pos maṣālih ad-daulah, (c) pos santunan, (d) pos jihad, (e) pos penyimpanan harta zakat, (f) pos penyimpanan harta kepemilikan umum, (g) pos urusan darurat/bencana alam, dan (h) pos anggaran belanja negara. Bagian Dar al-Khilafah mengatur belanja negara yang terkait dengan pemerintah pusat

negara. Bagian ini terdiri atas empat urusan, yaitu: (a) urusan kantor negara; (b) urusan kantor penasehat (mutasyārin); (c) urusan kantor Mua'win at-Tafwiḍ; dan (d) urusan kantor Mu'awin at-Tanfiż.

Bagian kedua adalah Maṣālih ad-Daulah yang merupakan bagian paling kompleks, karena mencakup banyak urusan, yang dikelompokkan menjadi empat urusan, yaitu: (a) urusan Amir al-Jihad; (b) urusan penguasa wilayah (wali/ gubernur); (c) urusan peradilan; dan (d) urusan Maṣālih ad-Daulah. Bagian kedua ini mencakup pembiayaan untuk Departemen Perang dan pemerintah daerah, baik wali (gubernur) maupun 'amil (bupati). Urusan maṣālih ad-Daulah ini mencakup semua pengeluaran negara yang terkait dengan kemaslahatan umum, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Transportasi, dan lain-lain.

Bagian Jihad terdiri atas tiga urusan, yaitu: (a) urusan pasukan, yang mengelola pembentukan dan pelatihan pasukan; (b) urusan persenjataan dan amunisi; dan (c) urusan industri militer.(Abdul Qadim Zallum, al-Amwal., hal. 17.)

Perbedaan bagian jihad dengan urusan Amir al-Jihad adalah, pada bagian Jihad ini fokusnya adalah pembiayaan untuk operasi militer, sedangkan administrasi dan gaji tentara dianggarkan pada pos urusan Departemen Perang. Baitul Mal dalam pelaksanaannya membentuk cabang di setiap wilayah (propinsi). Hal ini untuk memudahkan pengelolaan baitul mal, baik terkait pendapatan maupun belanja negara, sekalipun pengelolaan keuangan bersifat sentralisasi, seperti halnya peradilan dan militer. Unit-unit yang dibentuk di setiap cabang, disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga struktur di setiap wilayah bisa berbeda-beda. Rahman (2015) mencoba memperbandingkan dengan sistem konvensional, tentang pendapatan negara, diantaranya adalah :

1. Zakat

Pemasukan zakat sangat tergolong kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah secara langsung dan signifikan telah mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat.

2. Ghanîmah.

Ghanîmah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil ghanîmah secara khusus diatur langsung dalam Alquran surah al-Anfâl ayat 41. empat perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanîmah.

3. Khumus.

Khumus atau seperlima bagian dari pendapatan ghanîmah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Dan khumus, juga bisa diperoleh dari barang temuan (harta karun) sebagaimana terjadi pada periode Rasul.

4. Fay'.

Fay' adalah sama dengan ghanîmah. Namun bedanya, ghanîmah diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, fay' tidak dengan pertumpahan darah. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay' adalah pendapatan negara selain dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya: kharâj, jizyah, ghanîmah,

'usyur, dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah.

2.3. Kajian empiris

Hasil Penelitian Nursafitra et.al (2019) menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan Program Intensifikasi yaitu Aspek Kelembagaan, Aspek ketatalaksanaan serta Aspek Personalianya dan Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dinyatakan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil Penelitian Umam (2014) menyatakan bahwa penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh unit kerja atau dinas-dinas terkait.

Hasil Penelitian (Nyoman Triaryati, 2018) menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki empat sektor unggulan, dua sektor potensial, sepuluh sektor berkembang dan satu sektor yang masih terbelakang. Kabupaten Kabupaten Jembrana memiliki empat sektor unggulan, dua sektor potensial, tujuh sektor berkembang dan empat sektor terbelakang. Kabupaten Klungkung memiliki enam sektor unggulan, satu sektor potensial, tujuh sektor berkembang dan tiga sektor terbelakang. Kabupaten Buleleng memiliki empat sektor unggulan, tiga sektor potensial, lima sektor berkembang dan lima sektor yang masih terbelakang. Kabupaten Karangasem memiliki dua sektor unggulan, tiga sektor potensial, sepuluh sektor berkembang dan dua sektor yang masih terbelakang.

3. METODA PENELITIAN

3.1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran potensi pendapatan Syariah kota Pontianak.

3.2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pendapatan daerah Kota Pontianak, dan potensi-potensi pendapatan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor (Iskandar, 2008: 221) analisis data adalah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide itu. Selain itu, menurut Hamidi (Susanto, 2006: 142) analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara "mengangsur atau menabung" informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. Sementara itu menurut Miles dan Huberman (Iskandar, 2008: 221) menyatakan bahwa analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripisikan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif (Iskandar, 2008: 223) dinyatakan sebagai berikut.

a. Reduksi data

Merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjadi temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.

b. Display/penyajian data

Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasannya digunakan berbentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data dan analisis data model interaktif. Dalam hal ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung (Sutopo, 2006: 95) dan dalam model analisis interaktif ketiga komponen analisis berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data. Begitu peneliti menyusun catatan lapangan lengkap, reduksi data segera dibuat, dan diteruskan dengan pengembangan bentuk susunan sajian data.

Membaca sajian data dengan kelengkapan ragam pendukungnya, peneliti mengusahakan pikiran yang mengarah pada simpulan yang bersifat sementara karena pengumpulan data masih berlangsung. Apabila peneliti menemukan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar simpulan sementara tadi perlu dirubah secara tepat. Apabila data baru lebih memperkuat simpulannya sementara yang telah dikembangkan akan menjadi semakin mantap. Demikian seterusnya hingga pengumpulan data dirasa telah lengkap. Secara sederhana model analisis interaktif ini, dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :

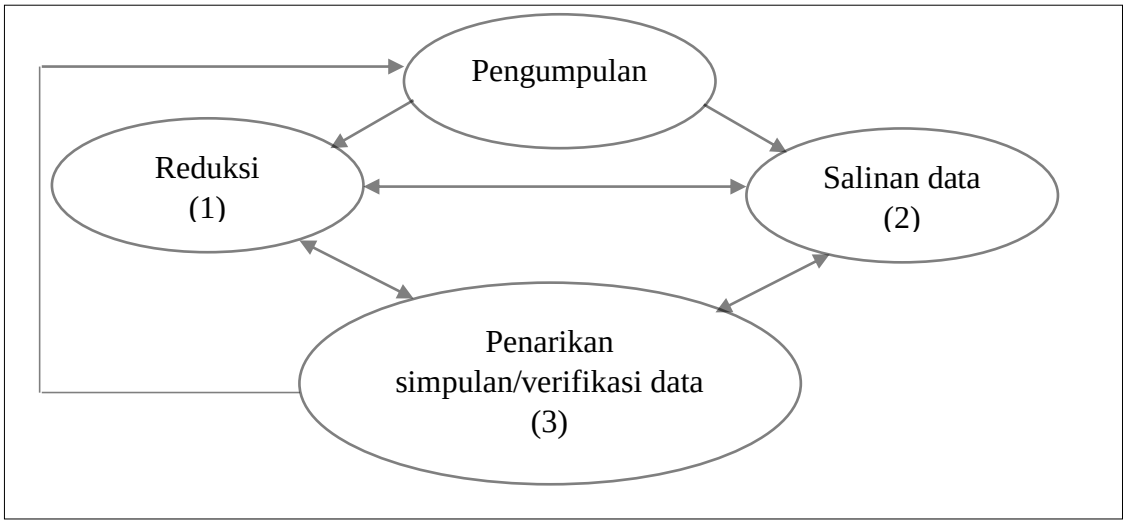

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Realisasi APBD

Berdasarkan tabel realisasi APBD lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2019 dan 2020, maka dapat kita bandingkan dengan pendapatan yang berdasarkan pendapatan potensi syariah.

Tabel 2. APBD Potensi Syariah Ruang Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (milliar rupiah)

URAIAN	2020		Telaah Potensi Syariah
	Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN	25.755,30	11.219,19	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.526,11	1.789,66	
Pajak Daerah	2.980,46	1.200,56	Berpotensi jika daerah mengalami kondisi kekosongan kas
Retribusi Daerah	155,46	77,18	Menyesuaikan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	200,28	178,04	Potensi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.189,90	333,88	Potensi
PENDAPATAN TRANSFER	18.164,75	9.115,24	
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	599,97	240,29	Tidak berpotensi harus dikaji secara mendalam bagi hasil yang dimaksud
Dana Alokasi Umum	12.087,91	6.623,17	Potensi
Dana Alokasi Khusus	4.934,15	1.766,76	Potensi
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	743,59	358,19	Tidak berpotensi harus dikaji secara mendalam bagi hasil yang dimaksud
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1562,23	126,84	Potensi
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,10	0,00	Potensi
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.064,44	314,28	
Pendapatan Hibah	436,68	120,23	Potensi
Pendapatan Lainnya	680,29	194,05	Potensi

Sumber : Kementerian Keuangan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak potensi lain yang perlu dikembangkan dan melakukan penyesuaian pengelolaan APBD daerah yang disesuaikan dengan syariah. Struktur pendapatan daerah yang hanya berpusat pada pajak masih harus dikaji ulang. Ada potensi lain yang dapat dikembangkan diantaranya pendapatan dari tanah-tanah dan lahan-lahan yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan perkebunan. Diantaranya adalah harta fa'i termasuk di dalamnya kharâj, jizyah, ghanîmah, 'usyur, dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Saat ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer.

4.1. Analisis Potensi Pendapatan Syariah Kota Pontianak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan daerah adalah Kota Pontianak, Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Walikota adalah Walikota Pontianak. Dan adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berarti penetapan APBD Kota Pontianak berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

APBD Kota Pontianak terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pembiyaan netto. Sedangkan pendapatan daerah bersumber dari a) pendapatan asli; b) pendapatan transfer; dan c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat; dan pendapatan transfer antar daerah. Adapun Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud terdiri atas pendapatan hibah; dana darurat; lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Anggaran belanja daerah terdiri atas : a) belanja operasional; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer. Anggaran belanja operasional terdiri atas belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Sedangkan anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset tidak berwujud. Dan untuk anggaran belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.

Dalam anggaran pembiayaan daerah terdiri atas : a)penerimaan pembiayaan; dan b) pengeluaran pembiayaan. Untuk anggaran penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan terdiri atas : a) pembentukan dana cadangan; b) penyertaan modal daerah; c) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; d) pemberian pinjaman daerah; dan e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2021, dengan tata cara tersebut pemerintah terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Adapun keadaan darurat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Apabila kita lihat dari penjelasan APBD Kota Pontianak, maka dapat dilakukan penyesuaian dan pencocokan dengan peluang serta potensi syariah yang dihasilkan. Selain itu ada beberapa potensi lain yang dapat dikembangkan. Berikut ini tabel APBD Kota Pontianak Tahun 2021 yang disesuaikan dengan potensi syariah.

Tabel 3. APBD Potensi Syariah Kota Pontianak Tahun 2021

APBD	Rincian/ Jenis	Jumlah	Potensi Syariah
I. Pendapatan Daerah		1.770.384.770.339,00	
a. Pendapatan asli;		538.009.872.339,00	
	Pajak daerah;	358.500.000.000,00	Menyesuaikan
	Retribusi daerah;	38.760.751.300,00	Menyesuaikan
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	35.240.482.702,00	Potensi syariah
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,	105.508.638.336,00	Potensi syariah
b. Pendapatan transfer		1.164.863.598.000,00	
	Pemerintah pusat;	920.836.598.000,00	Potensi syariah
	Antar daerah	244.027.000.000,00	Potensi syariah
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.		67.511.300.000,00	
	Pendapatan hibah;	67.511.300.000,00	Potensi syariah
	Dana darurat;	0	Menyesuaikan
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	0	Menyesuaikan
II. Belanja Daerah		1.869.498.506.700,00	
a. Operasional;		1.397.450.989.017,00	Menyesuaikan
	Pegawai	767.185.474.671,00	Menyesuaikan
	Barang dan jasa;	590.638.809.346,	Menyesuaikan
	Bunga;	0	Bukan potensi syariah
	Subsidi;	0	Potensi syariah
	Hibah;	29.789.861.000,00	Potensi syariah
	Bantuan sosial	9.718.844.000,00	Potensi syariah
b. Modal;		422.162.692.683,00	
	Tanah.	46.466.407.819,00	Menyesuaikan
	Peralatan dan mesin.	39.609.293.811,00	Menyesuaikan
	Bangunan dan gedung.	150.965.268.058,00	Menyesuaikan
	Jalan, jaringan, dan irigasi;	184.193.063.501,00	Menyesuaikan
	Aset tetap lainnya;	914.641.494,00	Menyesuaikan
	Aset tidak berwujud.	0	Menyesuaikan
c. Belanja tidak terduga;		50.002.825.000,00	Potensi syariah
d. Belanja transfer.		0	
	Belanja bagi hasil;	0	Menyesuaikan
	Belanja bantuan keuangan.	0	Menyesuaikan
II. Anggaran Pembiayaan Daerah		99.113.736.361,00	
a. Penerimaan pembiayaan;		144.113.736.361,00	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;	144.063.736.361,00	Potensi syariah
	Pencairan dana cadangan;	0	Menyesuaikan
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0	Menyesuaikan
	Penerimaan pinjaman daerah;	0	Menyesuaikan
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;	50.000.000,00	Menyesuaikan
	dan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	Menyesuaikan
b. Pengeluaran pembiayaan.		45.000.000.000,00	
	Pembentukan dana cadangan;	0	Menyesuaikan
	Penyertaan modal daerah;	45.000.000.000,00	Menyesuaikan
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;	0	Menyesuaikan
	Pemberian pinjaman daerah;	0	Menyesuaikan
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	Menyesuaikan
Defisit/Surplus		(99.113.736.361,00)	
Pembiayaan Netto		99.113.736.361,00	

Sebagian besar pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Potensi pajak dan retribusi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan	Jenis	Total (dalam milyar)
Potensi Pajak	Hotel	25
	Resto	72
	Hiburan	24
	Reklame	19
	Penerangan Jalan	75
	Parkir	6
	Sarang Burung Walet	0,5
	Bumi dan Bangunan	37
	BPHTB	100
Retribusi Jasa Umum	Pelayanan parkir di tepi jalan umum	1,2
	Pelayanan pasar	2,2
	Pengujian kendaraan bermotor	2,1
	Pelayanan tera-tera ulang	0,145
	Persampahan	18,4
	Rekreasi dan Olah raga	2,8
Retribusi Jasa Usaha	Terminal	0,03
	Kekayaan Daerah	1,33
	Tempat khusus parkir	1,75
	Rumah pemotongan hewan	0,463
	kepelabuhan	0,49
	Penyeberangan air	2,2
	Penjualan produksi usaha daerah	0,0286
Perizinan tertentu	Izin mendirikan bangunan	8

Pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. Pajak (dharibah) dalam Islam, tidak sama dengan pajak (tax) sebagaimana dipraktikan di Indonesia saat ini, yang belum bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pajak-pajak di Indonesia perlu direformasi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan. (Maman & Fadilah, 2017).

Oleh karena itu meletakkan pajak dan retribusi sebagai potensi pendapatan daerah kurang tepat. Masih ada potensi lain yang didapat dikembangkan. Selain itu peran pemerintah pusat dan daerah provinsi juga sangat besar. Karena hal ini merupakan satu kesatuan wilayah yang saling menopang antara satu dengan yang lain.

Potensi daerah yang dapat dikembangkan adalah dari sisi pertambangan, potensi pertambangan dan galian besar antara lain adalah emas yang terletak pada Sanggau dan Sintang. dan bahan galian bauksit yang merupakan cadangan terbesar di Indonesia. Selain itu juga ada Batubara yang terletak pada Sintang dan Kapuas hulu. Serta Mineral Logam dasar yang terletak pada Kabupaten Sambas dan Pontianak. Sedangkan

untuk Kota Pontianak memiliki kandungan minyak dan gas bumi sekitar cekungan Ketunggan dan Melawi. Cadangan Bahan galian yang cukup besar pula adalah Kaolin dan pasir Kuarsa. (prahu-hu.com, 14/10/2020)

Diantara pemasukan potensi provinsi adalah dari sumber daya alam yaitu kelapa sawit, bauksit, karet dan kelapa merupakan sumber daya alam yang telah memberikan nilai lebih bagi perekonomian nasional, khususnya untuk pendapatan daerah. Bahkan Kalimantan Barat itu penghasil CPO terbesar di Indonesia khusus di produksi bauksit, setidaknya Kalbar bisa mengekspor hingga 2 juta ton ke luar negeri. (Kalbarprov.go.id, 17/10/2019)

Oleh karena itu pendapatan daerah provinsi dan pusat berpotensi untuk membantu pemerintah Kota Pontianak dan ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab pemerintah yang bersifat kesatuan. Potensi yang dapat dilakukan diantaranya adalah harta fai. Harta fai adalah pemasukan selain zakat misalnya kharaj. Kalau kharaj tidak memungkinkan maka ada potensi harta fai lainnya.

Adapun harta fai lainnya adalah jizyah yaitu pungutan kepada non-muslim sebagai ganti atas perlindungan harta dan jiwa mereka serta pelayanan pemenuhan hak yang sama kepada mereka. Selain itu ada ‘usyur yang merupakan pungutan terhadap lahan pertanian yang dapat diatur berdasarkan ketentuan syari. Sehingga pengembangan lahan pertanian dan perkebunan menjadi potensi syariah. Termausk pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Saat ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer.

Sedangkan potensi lain yang dapat dikembangkan di Kota Pontianak diantaranya industri. Jumlah perusahaan industri besar dan menengah Kota Pontianak adalah 34 Perusahaan. Tenaga Kerja yang terserap oleh perusahaan mencapai 3.300 orang yang terdiri dari pekerja produksi 2.700 orang dan pekerja lainnya atau administrasi 600 orang. Perusahaan industri besar atau sedang terletak pada Kecamatan Pontianak Utara yang menyerap pekerja sebesar 2.952 Orang.

Nilai keluaran dari perusahaan Industri besar dan menengah adalah sebesar 1,51 Triliun Rupiah dan merupakan perusahaan industri besar & menengah terdominasi oleh industri karet. Untuk Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari seluruh perusahaan industri besar/menengah Kota Pontianak adalah sebesar 217, 57 Miliar Rupiah dan pajak tak langsung sebesar 462,78 Rupiah.

Jumlah Unit usaha Industri Tenaga Kerja, besarnya nilai Investasi dan nilai penjualan dari sentra industri kecil hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) terlihat bahwa sentra industri kecil jenis IHPK adalah usaha industri makanan ringan yang berpusat pada kelurahan Sungai Bangking dengan tenaga kerja 329 orang. Nilai investasinya mencapai 249,50 Juta rupiah dan nilai penjualannya sebesar 780, 50 Rupiah. Sedangkan industri anyaman memiliki 16 Unit Usaha dengan nilai investasi 17,5 juta Rupiah dan nilai penjualan 110 juta Rupiah yang terletak pada Tanjung Hulu, Pontianak Timur.

Industri Agroindustri cukup besar di Kota Pontianak antara lain adalah industri pengolahan hasil perkebunan terutama karet dan hasil pertanian lainnya. Demikian pula keberadaan Puri Gatro (Pusat Riset Gambut Tropis) juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan pengolahan gambut sebagai bahan bakar. (prahu-hu.com, 14/10/2020)

Bidang pertanian juga termasuk potensi syariah yang bisa dikembangkan. Jenis tanaman pangan yang hasilnya paling besar adalah ubi kayu, padi, ubi rambat. Termasuk bertani sayuran dan lidah buaya. Tanaman buah-buahan yang banyak ada pada kota adalah nangka, pisang serta nanas. Sedangkan Peternakan Kota Pontianak terdiri dari sapi (potong dan perah, kambing babi dan ayam ras. Pontianak mempunyai potensi yang cukup besar serta prospek yang baik untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan internasional dengan komoditi andalannya yaitu Lada, Karet, Kopi, Jeruk dan Kelapa Sawit.

Selain itu Pontianak juga memiliki potensi kehutanan yang cukup luas dengan komoditasnya antara lain rotan, Tengkawang, Kayu (meranti, besi, hitam) dan damar.

Pada bidang perdagangan, pusat perbelanjaan modern mulai terbangun sudah ada berbagai sudut kota seperti Mal Pontianak, Ayani Mega Mall Pontianak. Berpotensi untuk melakukan perdagangan secara langsung kepada masyarakat dan memfasilitasi berbagai produk luar negeri yang akan mendapatkan bea cukai dari masuknya produk luar negeri tersebut.

Potensi lainnya adalah wisata, perhotelan dan resto. Potensi pemasukan pemerintah Kota adalah dengan memberikan kesempatan dan peluang menjadikan Pontianak sebagai kota Wisata. Pemerintah dapat berinvestasi dalam bidang ini sekaligus mengelolanya lebih baik lagi.

Adapun peran pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan potensi-potensi syariah tersebut dapat dilakukan dengan membantu dan mengembangkan potensi tersebut. Diantaranya dengan memberikan penguatan modal, pelatihan dan kesempatan dalam mengembangkan produk-produk lokal, termasuk kemudah ekspor ke luar negeri. Sehingga Pemerintah Kota Pontianak lebih dapat mandiri dengan membangun potensi pendapatan keuangan.

Peran penting Pemerintah Kota Pontianak, termasuk daerah dan pusat adalah penetapan aturan dan perundangan-undangan. Masalahnya izin yang dikeluarkan pemerintah berakibat pada buruknya tata kelola pertambangan. Pelanggaran prosedur perizinan, tunggakan pajak landrent, tumpang tindih konsesi, beroperasi secara ilegal di kawasan hutan dan konservasi, serta kerusakan lingkungan adalah potret karut-marut pertambangan di Kalimantan Barat. Dan hal ini bertentangan dengan syariah ketika menyerahkan sumber daya alam kepada swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Justru sumber daya alam tersebut dapat dikelola oleh pemerintah daerah dan kota secara mandiri dengan berbagai tahapan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi syairah Kota Pontianak dapat disesuaikan dengan hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam harus menelaah dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Kedua hal ini tidak boleh bertentangan dengan syariah. Bahkan potensi pendapatan zakat harus disalurkan hanya ke 8 asnaf yang berhak.

Adapun potensi yang dapat dikembangkan adalah harta fa'i, pengelolaan sumber daya alam, industri, dan wisata. Harta fa'i adalah harta yang dapat dipungut selain zakat. Termasuk pengelolaan sumber daya alam yang waib dikelola oleh pemerintah. Selain itu membantu masyarakat dalama mengembangkan industri lokal, dan menempatkan Kota Pontianak sebagai kota wisata untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

Dari uraian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Pontianak bersama para ulama atau dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Kalimantan Barat untuk bersama-sama dalam menentukan dan mengkoreksi pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu dapat memfokuskan diri pada potensi-potensi syariah yang dapat dikembangkan diantanya industri, pertanian, peternakan, perdagangan dan sebagainya.

Pemerintah dapat mendukung dan menopang berbagai usaha dan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perekonomian tumbuh dan negara dapat meningkatkan aktivitas tersebut melalui perdagangan luar negeri.

Selain perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap pemasukan lainnya yang sesuai dengan syariah. Termasuk melakukan perhitungan yang mendetail terhadap potensi-potensi yang ada tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum. (2002). Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah). Alih bahasa oleh Ahmad S. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Efendi, D., & Wuryanti, S. (2011). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di Kabupaten Nganjuk. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 2011, 1–10.

Helvira, R. (2020). Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Kota Pontianak. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 8(2), 1–36. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v8i2.40668

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif). Jakarta : Gaung Persada Press.

Khairul Umam, I. (2014). Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1549

Maman Surahman, Fadilah Ilahi. 2017. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 166-177. Online ISSN: 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399. Universitas Islam Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538.

Nyoman Triaryati, N. P. A. K. (2018). Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten Di Bali Di Luar Wilayah Sarbagita. Manajemen Unud, 7(8), 4267–4296. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i08.p9

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko 2002. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi V.Yogyakarta: BPFE.

Susanto. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta : UNS Press.

Sutopo. H. B. 2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Yulianto. (2010). APBN Anti Rakyat. Majalah al-Wa'ie, No. 122 Th. Ke XI.

https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Targetkan-Pendapatan-Daerah-Tahun-2021-Rp1,77-triliun, diakses pada tanggal 23/10/2020

https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-miliki-potensi-alam-yang-bisa-dikembangkan-guna-menunjanh-perekonomian-daerah-dan-nasional.html, diakses pada tanggal 19 oktober 2021

https://www.prahu-hub.com/pontianak-kota-khatulistiwa-yang-kaya-sumber-daya/

Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Vol 5, 2022
ISSN 2986-9205

PENGARUH DANA DESA TERHADAP PENGANGGURAN PERDESAAN DAN KEMISKINAN PERDESAAN KALIMANTAN BARAT

Yarlina Yacoub[*]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dana desa terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data skunder dari Bappeda Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan data pooled pada 12 Kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2017 – 2021. Analisis data menggunakan metode OLS test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan kemiskinan di Kalimantan Barat.

***Keywords**: Dana Desa, Pengangguran, Kemiskinan.*

1. PENDAHULUAN

Indikator utama yang harus dicapai dari pelaksanaan pembangunan suatu negara atau suatu daerah adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat. Rakyat sejahtera ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan harkat hidup. Peningkatan kesejahteraan rakyat salah satunya ditandai penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Pengangguran ditandai dengan ketidakmampuan penduduk usia kerja dalam memperoleh pekerjaan dan kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar.

Jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai persoalan kecil. Menggunakan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa, September 2020 naik menjadi 27,55 juta jiwa dan September 2021 turun sedikit menjadi 26,50 juta jiwa. Pengangguran terbuka di Indonesia Agustus 2019 sebesar 8,13 juta jiwa, Agustus tahun 2020 naik menjadi 9,77 Juta jiwa, dan tahun 2021 turun menjadi 9,10 juta jiwa.

Pemerintah Indonesia masih mengganggap pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah mendasar, karena berhubungan dengan harkat dan martabat bangsa. Penduduk yang menganggur dan miskin akan melahirkan banyak sekali persoalan-persoalan, bukan hanya persoalan ekonomi tetapi juga persoalan sosial dan politik. Sehingga salah satu kebijakan pemerintah selalu ada kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dana Desa (DD) yang disalurkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 berdasarkan PP Nomor 60/2014 kepada desa-desa diseluruh Indonesia, merupakan belanja pemerintah atau transfer pemerintah pusat kepada daerah yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di perdesaan di Indonesia.

Buhaerah (2021) mengatakan dana desa sangat efektif mernurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa, terutama selama pandemi. Kenaikkan angka kemiskinan dan pengangguran di

[*] Email: yarlina.yacoub@ekonomi.untan.ac.id

desa lebih rendah dibanding di kota selama masa pandemi dan ini karena adanya dana desa. Sampai sekarang lebih dari Rp 400,1 triliun dana desa yang sudah disalurkan kedesa-desa seluruh Indonesia dengan jumlah desa sekitar 83.381 desa. Selanjutnya menurut Sabiq (2017), kontribusi dana desa tahun 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1,7 juta jiwa, tahun 2016 menyerap tenaaga kerja 3,9 juta jiwa dan tahun 2017 menyerap tenaga kerja 5 juta jiwa.

Kalimantan Barat dari 14 kabupaten/kota, hanya menerima penyaluran dana desa dari pemerintah pusat hanya 12 kabupaten yang mempunyai wilayah terkecil dengan status desa. Jumlah total pagu dana yang diterima Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk dialokasikan pada desa-desa di 12 Kabupaten seningkat setiap tahun. Dan sesuai dengan tujuan dana desa yang dialokasikan adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi persoalan pengangguran dan kemiskinan di desa.

Tabel 1. Pagu Dana Desa, Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan di Kalimantan Barat Tahun 2015-2021

Tahun	Total Dana Desa (Rp,Triliun)	Pengangguran Perdesaan (%)	Kemiskinan Perdesaan (%)
2015	0,53	3,85	9,51
2016	1,24	3,61	9,38
2017	1,60	2,84	9,09
2018	1,70	2,60	8,84
2019	1,99	2,99	8,73
2020	2,02	3,95	8,57
2021	2,06	3,71	8,05

Sumber : Kementerian Keuangan RI dan BPS Indonesia

Berdasarkan data Tabel 1, tahun 2015-2021, alokasi pagu dana desa untuk desa-desa di Kalimantan Barat meningkat setiap tahunnya dan jika dihubungkan dengan data tingkat pengangguran perdesaan dan kemiskinan perdesaan, terjadi perubahan yang cukup sejalan. Meningkatnya dana desa diiringi dengan turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan perdesaan, kecuali tahun 2020. Namun dibandingkan dengan pengamatan sementara dengan data yang sangat umum di Indonesia dan Kalimantan Barat sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Buhaerah (2021) dan Sabiq (2017). Tetapi pengamatan yang dilakukan oleh Tim Bappeda Aceh bekerja sama dengan FEB UIN Ar-Raniry (2019), hasilnya bertolak belakang, dimana dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan (dana desa meningkat, kemiskinan juga meningkat) di Kecamatan Ulee Kareng. Pengamatan Bappeda Aceh juga sejalan dengan hasil penelitian Kartika, dkk (2021) bahwa peningkatan nominal belanja pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Hasil penelitian Saraireh (2020) di negara Jordania, terdapat dua temuan bahwa dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah tidak signifikan dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi jangka panjang pengeluaran pemerintah yang meningkat mampu menurunkan angka pengangguran.

Adanya fenomena yang saling bertentangan dalam implementasi pengalokasian belanja pemerintah melalui penyaluran dana desa. Pertentangan itu bahwa belanja pemerintah baik itu dana desa ataupun belanja pemerintah lainnya ada yang memberi pengaruh langsung kepada penurunan angka pengangguran maupun kemiskinan, dan ada juga yang tidak memberi pengaruh. Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka muncul permasalahan dan pertanyaan mengenai dana desa pengaruhnya

terhadap pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap pengangguran di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat ?
3. Bagaimana hubungan Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan?

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Belanja Pemerintah dan Dana Desa

Menurut Keynes dalam Pressman (2000) dan Mangkoesoebroto (2000) "peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat diperlukan karena perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan kestabilan kegiatan ekonomi". Gejolak ekonomi yang terjadi dalam satu waktu ke waktu lain biasanya akan berakibat serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran bahkan pada tingkat harga, sehingga kemiskinan tidak bisa dihindari. Menurut Oates dalam Pertama (2009): "Pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan sumber investasi bagi pertumbuhan ekonomi selain investasi swasta. Pemerintah melakukan investasi sosial dalam penyediaan fasilitas publik, di samping investasi yang dilakukan oleh swasta. "Berbeda dengan investasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dinamakan juga investasi sosial", (Sukirno, 2003) dan Subiyanto (dalam Halim, 2008).

Pengeluaran pemerintah merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Alokasi belanja pemerintah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Keputusan untuk meningkatkan belanja belanja pemerintah merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja operasional.

Desentralisasi fiskal merupakan wujud dari otonomi daerah, Rasyid dkk (2002), "menjelaskan otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan daerah untuk mendayagunakan potensi ekonomi di daerahnya". Pendapat yang sama dengan itu, Martinez *and* McNab (2001): "Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah lokal lebih dekat untuk memberikan pelayanan publik dibanding dengan pemerintah nasional, karena pemerintah lokal lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakatnya sehingga akan lebih efisien".

Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengganti UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi pengelolaan transfer ke daerah dan pengelolaan belanja daerah satunya adalah dana desa.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Ayat 2 undang-undang ini, secara garis besar tujuan dana desa adalah : meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar desa. Dana desa sebagian mata rantai dari belanja pemerintah baik pusat maupun daerah adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harapan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2.2. Pengangguran

Menurut Sukirno (2003) dan Sumarsono (2009), pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaannya. Pengangguran merupakan bagian dari tenaga kerja. Menurut Subri (2003) tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) yaitu penduduk yang siap untuk bekerja dan dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerjanya. Menurut Simanjuntak (2015) tenaga kerja atau *man power* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu golongan yang bekerja dan yang menganggur dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau golongan penerima pendapatan.

Menurut Sumarsono (2009) bahwa "Pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme dan aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja." Pasar tenaga kerja akan terbentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah dipasar Santoso (2012). Pasar kerja yaitu keseluruhan aktivitas dari pelaku-pelaku yang akan mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha, pencari kerja, serta perantara atau pihak ketiga yang memberi akses bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.

2.3. Kemiskinan

Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS (dikutif dari bps.go.id) menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen dalam Nanga (2006) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*). Menurut Chambers dalam Nanga (2006), kemiskinan terutama di daerah pedesaan (*rural poverty*) adalah masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*), keterisolasian (*isolation*), kerentanan (*vulnarability*) dan kelemahan fisik (*physical weakness*), dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi.

Adanya perbedaan kepemilikan sumberdaya baik kualitas maupun kuantitas menjadi faktor penyebab kemiskinan. Menurut Sharp yang dikutip oleh Kuncoro (2004) ketidaksamaan pola

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kepemilikan sumberdaya dalam jumlah terbatas mengakibatkan penduduk menjadi miskin. Ginanjar (2006) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan salah satunya disebabkan oleh kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi.

Penyebab kemiskinan bermuara pada lingkaran setan kemiskinan *(Vicius circles of poverty).* Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan menyebabkan keterbelakangan (Sharp dalam Kuncoro (2004)). Menurut Annur (2013) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, artinya mereka tidak dapat pilihan, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, perkembangan ekonomi yang pesat, 3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan yang mereka dapatkan, mereka hanya bertahan untuk memenuhi kebutuhannya, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme yang mengakibatkan SDM yang buruk, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan, hal ini yang mendorong kemiskinan yang semakin terdalam.

2.4. Hasil Kajian Emperikal Belanja Pemerintah, Pengangguran dan Kemiskinan

Hasil kajian Gusmeri, dkk (2019), bahwa belanja pemerintah melalui Dana Desa bidang Pembangunan dan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat memberi berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap penurunan angka pengangguran. Selanjutnya hasil kajian di Kota Menado oleh Kaharudin, dkk (2019), bahwa pengeluaran pemerintah memberi pengaruh terhadap pengangguran dan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. Nepram.D, Salam.P.S, Samsur.J (2021), melakukan kajian di Indian, telah diamati bahwa pengeluaran pembangunan pada negara bagian diperintah oleh partai kiri memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, serta negara bagian yang berpenghasilan tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Pusat Kebijakan APBN (2014). Mengkaji Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia. Belanja Pemerintah baik pusat maupun daerah sama-sama berperan dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal pengangguran, peran pusat dan daerah kurang lebih terlihat seimbang. Sedangkan dalam hal kemiskinan, tampak bahwa peran pusat lebih besar dari daerah. Sigit,T.A dan Kosasih A (2020). Mengkaji pengaruh belanja pemerintah melalui Dana Desa Terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia., menemukan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini:

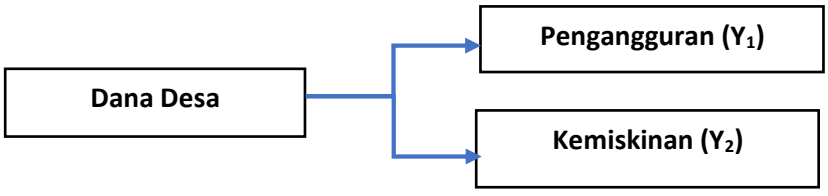

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasakan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. H0 : Diperkirakan Dana Desa (X_1) berpengaruh negatif terhadap Pengangguran (Y_1).
2. H0 : Diperkirakan Dana Desa (X_1) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan (Y_2).

3. METODA PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian assosiatif. Penelitian assosiatif menurut Sugiyono (2012) adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooled* data), yaitu kombinasi antara data *time series* 7 tahun (2015-2021) dan data *cross section* 12 Kabupaten di Kalimantan Barat, tidak termasuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang dikarenakan tidak memiliki desa. Sumber data berasal dari Kementrian Keuangan RI, Bappeda Provinsi Kalimantgan Barat dan Badan Pusat Statistik.

3.2. Variabel Penelitian Dan Defenisi Variabel

Variabel Penelitian Dana Desa merupakan variabel independen (variabel bebas), dan Pengangguran dan Kemiskinan merupakan variabel dependen (variabel terikat).

1. Variabel Terikat
   a. Kemiskinan adalah penduduk yang mempunyai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin pedesaan berasal dari BPS, satuannya persentase.
   b. Pengangguran adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang tidak sedang bekerja dan sedang mencari mencari pekerjaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk yang menganggur berasal dari BPS, satuannya persentase.
2. Variabel Bebas
   a. Dana Desa merupakan dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari APBN ke desa-desa seluruh Indonesia yang merupakan pendapatan APBDes. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Data Desa yang berasal dari Bappeda, satuannya rupiah.

3.3. Metode Analisis

Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengolahan data mengunakan program Eviews 9 dengan menggunakan tingkat kesalahan seebsar 5% atau 0,05. Adapun bentuk regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y1_{it}=\alpha + \beta_1 X_{1it} + e_{it} \quad (1)$$

$$Y2_{it}=\alpha + \beta_1 X_{1it} + e_{it} \quad (2)$$

Dimana :

Y_1 = Tingkat Pengangguran
Y_2 = Tingkat Kemiskinan
α = Konstanta
$\beta 1 \beta 2$ β_3= Koefisien Regresi

X_1 = Dana Desa
i = jumlah sampel
t = periode waktu
e = error

3.3.1 Analisis Regresi

Untuk menganalisis data panel, ada tiga model regresi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. *Model Common Effect*

Model ini merupakan model yang menggabungkan data time series dan data cross section. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga perilaku data antar perusahaan diasumsikan sama dalam berbagai kurun waktu.

2. *Model Fixed Effect*

Model ini merupakan model dengan asumsi adanya perbedaan konstanta antar objek tapi koefisien regresi sama, yang artinya satu objek memiliki konstanta yang sama besarnya dalam kurun waktu tertentu dan koefisien regresinya tetap sama besarnya dari waktu ke waktu.

3. *Model Random Effect*

Model ini merupakan model untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, model random effect mempunyai hubungan antar waktu dan antar objek.

Untuk pemilihan model data panel yang paling tepat maka diperlukan serangkaian pengujian secara ekonometrika dalam Eviews 9 antara lain:

a. Redundent Fixed Effects Texts atau Uji Chow

Pengujian ini untuk memilih model antara *Fixed Effect* dan *Common Effect*, Uji Chow mengikuti distribusi uji F, pemilihan model berdasarkan pada probabilitas uji F dengan melihat nilai probalitasnya jika lebih kecil dari taraf signifikan maka model *fixed effect* terpilih menjadi model yang tepat. Namun jika lebih besar dari taraf signifikan maka perlu diuji menggunakan model lain.

b. Uji Hausman

Pengujian ini untuk membandingkan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Uji Hausman mengikuti distribusi Chi Square. Jika probabilitas uji hausman lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan maka model yang terpilih adalah model *Fixed Effect*. Sebaliknya, apabila nilai probablitas uji hausman lebih besar dari taraf signifikan maka model yang digunakan adalah *Random Effect*.

3.3.2. Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis yang dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel pada signifikan 0,05 ($\alpha = 0,05$). Kriteria yang dipakai untuk menarik kesimpulan hipotesis diatas yaitu jika t hitung < α ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Serta Koefisien Determinasi dipergunakan untuk menguji tingkat keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan keterkaitan dengan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti menyatakan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.1.Dana Desa di Kabupaten-Kabupaten Kalimantan Barat

Besarnya Dana Desa yang dialokasikan pada desa-desa di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat jumlahnya bervariasi. Kabupaten Sintang rata-rata pertahun (2017-2021) memperoleh alokasi terbesar Rp 322.966.031.839,-, Kabupaten dengan Dana Desa terbesar kedua yaitu Kapuas Hulu sebesar Rp 251.053.884.864,-, kemudian Ketapang Rp 234.226.067.195,-.Kabupaten Kayong Utara dengan Dana Desa terkecil rata-rata pertahun (2017-2021) sebesar Rp 44.257.040.794,-,kemudian lebih besar sedikit Kabupaten Mempawah Rp 61.459.424.567,- dan seterusnya Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 95.495.129.657,-, diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya (Gambar 2) .

Sangat bervariasinya jumlah total Dana Desa disetiap kabupaten tergantung dari jumlah desa dari jumlah desa yang dimiliki. Kabupaten Sintang memiliki Dana Desa terbesar karena jumlah desanya juga paling banyak yaitu 390 desa. Sementara untuk Kabupaten Kayong Utara hanya terdapat 43 desa. Rata-rata besarnya Dana Desa di Kabupaten Sintang Rp 828.118.030,-perdesa pertahun, dan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 1.029.233.507,- perdesa pertahun.

.

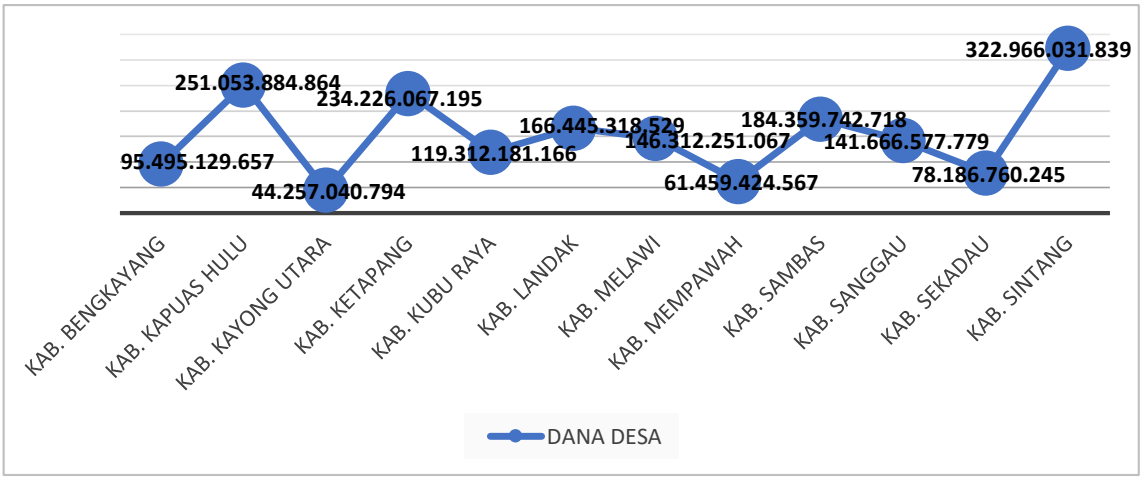

Sumber : Bappeda (data diolah)

Gambar 2. Rata-rata Dana Desa 12 Kabupaten di Kalimantan Barat (Tahun 2017-2021)

Dana Desa yang relatif besar jumlahnya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa secara maksimal dan efisien bagi pemberdayaan masyarakat desa, membangun infrastruktur desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian di desa. Dengan perekonomian yang meningkat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja diperdesaan dan menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

4.1.2. Pengangguran Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat

Pengangguran dinyatakan sebagi penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dan sering disebut pengangguran terbuka. Penyebab dari pengangguran ini adalah kesempatan kerja yang disediakan penyedia kerja lebih kecil dari pada pencari kerja. Banyak penduduk yang tidak bisa masuk lapangan kerja dengan alasan persyaratan tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian ketranmpilan yang dimiliki dengan keinginan dunia kerja. Selain itu pengangguran juga terjadi karena sebagian penduduk yang sedang ingin bekerja tetapi tidak mampu menciptakan pekerjaan.

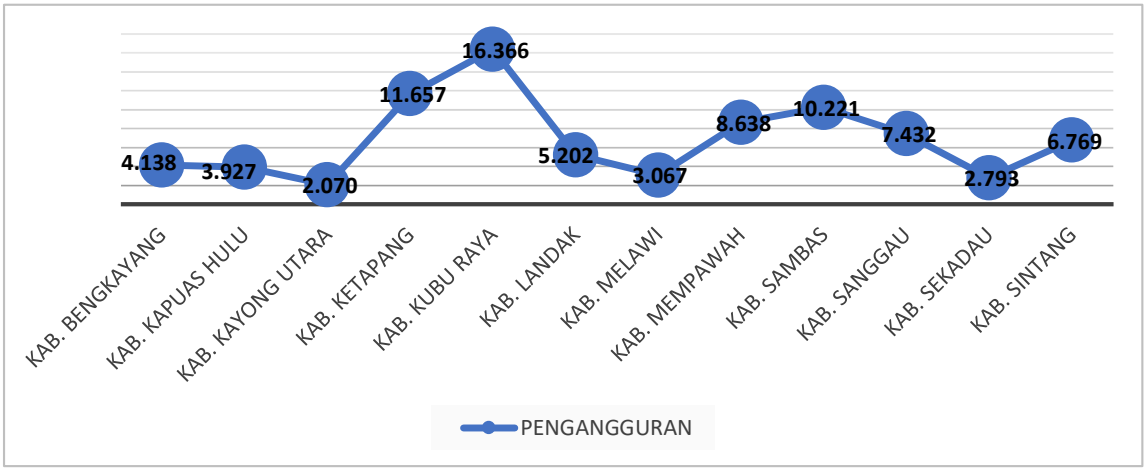

Sumber : BPS data diolah

Gambar 3. Rata-rata Jumlah Pengangguran 12 Kabupaten di Kalimantan Barat (2017-2021)

Keadaan pengangguran tiap kabuapeten di Kalimantan Barat sangat berbeda (Gambar 3), Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah pengangguran terbuka terbanyak Data rata-rata pertahun (dari tahun 2017-2021) menunjukkan jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 16.366 jiwa dan dengan rata-rata tingkat pengagguran terbuka (TPT) tertinggi juga yaitu 6,10%, diikuti Kabupaten Ketapang sejumlah 11.657 jiwa dengan rata-rata TPT sebesar 5,15%. Kabupaten Mempawah juga memiliki jumlah penduduk yang menganggur cukup besar yaitu sebayak 8.630 jiwa dengan TPT sebesar 6,78%. Sementara kabupaten dengan jumlah penduduk yang menganggur serta TPT yang paling rendah adalah Kabupaten Sekadau sebanyak 2.793 jiwa dengan TPT sebesar 2,53%, kemudian Kabupaten Melawi yang menganggur sebanyak 3.067 jiwa dengan TPT 2,58%, Kabupaten Kapuas Hulu yang menganggur sebanyak 3.927 jiwa dengan TPT 2,88%), dan Kabupaten Landak jumlah yang menganggur sebanyak 5.202 jiwa dengan TPT sebesar 2,71%. Selebihnya adalah kabuapten dengan TPT yang relatif lebih rendah.

Yang menarik untuk dicermati adalah secara umum TPT kabupaten di Kalimantan Barat berfluktuasi setiap tahun dengan trend yang meningkat, dan ini terjadi pada hampir semua kabupaten, terutama kenaikan terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, hal ini dikarenakan kasus pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kalimantan Barat. Hanya Kabupaten Mempawah saja yang TPT tahun 2019 turun walaupun masih tinggi (5,11%) yang sebelumnya tahun 2018 sebesar 6,79%, hal ini dikarenakan pembukaan/pengerjaan Pelabuhan Internasional Kijing yang memerlukan banyak tenaga kerja kasar/buruh. Pada tahun 2020 semua kabupaten mengalami kenaikkan jumlah penduduk yang menganggur dan TPKnya, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin parah (gambar 3).

4.1.3. Kemiskinan Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat

Kemiskinan digambarkan dari ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi minimal kebutuhan dasar. Kemiskinan juga digambarkan dari ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pembangunan.

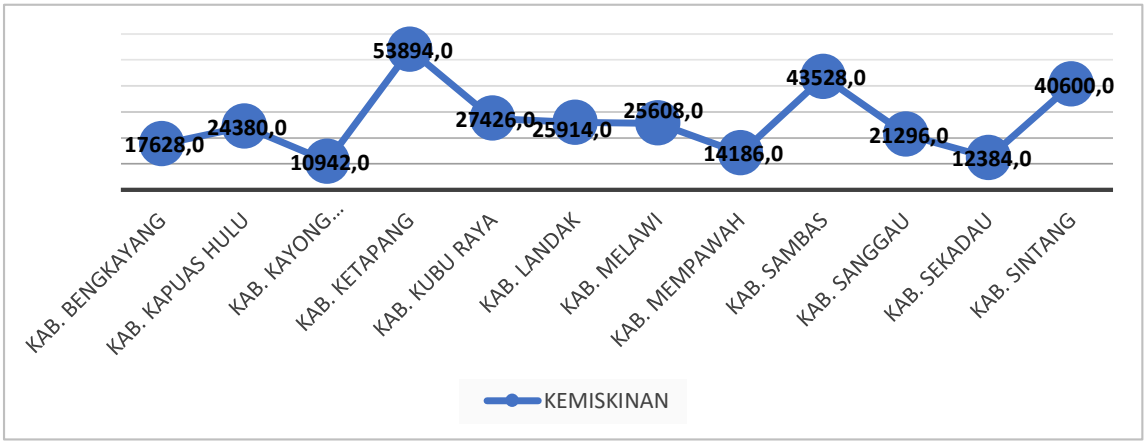

Sumber : BPS data diolah

Gambar 4. Rata-rata Kemiskinan 12 Kabupaten di Kalimantan Barat (Tahun 2017-2021)

Untuk kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat, kondisi kemiskinan sangat bervariasi. Menggunakan data rata-rata pertahun (2017-2021), beberapa kabupaten dengan jumlah jumlah penduduk miskin terbanyak dan dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Kabupaten Ketapang (53.894 jiwa) dengan tingkat kemiskinan 10,58%), Kabupaten Sambas dengan jumlah penduduk miskin 43.528 jiwa dan tingkat kemiskinan 8,14% serta Kabupaten Sintang dengan penduduk miskin sebanyak 40.600 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,75%. Beberapa kabupaten dengan rata-rata jumlah penduduk miskin rendah dan tingkat kemiskinan juga rendah, adalah Kabupaten Sekadau dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 12.384 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,17%, kemudian Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27.426 jiwa dan tingkat kemiskinan sebesar 4,71% serta Kabupaten Mempawah jumlah penduduk miskin sebanyak 14.186 jiwa dan tingkat kemiskinan 5,40% (Gambar 4)

Perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2017-2021, secara umum mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Yang menarik adalah Kabupaten Landak dengan penurunaan yang paling tinggi baik itu dari penurunan jumlah penduduk miskinnya maupun dari tingkat kemiskinannya. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di kabupaten Landak sebanyak 44.820 jiwa (12,54%) dan tahun 2021 menurun menjadi 13.820 jiwa (5,18%). Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya secara rata-rata juga turun kemiskinannya wakaupun tidak terlalu besar penurunannya. Hanya Kabupaten Sanggau saja yang sekitit mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yaitu tahun 2017 (4,52%) dan tahun 2021 (4,55%).

4.2. Uji Pemilihan Model

Uji ini dilakukan dengan dua penguji yaitu fixed effect model dan common effect model. Dengan menunjukkan nilai dari Cross Section Chi Square memiliki nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 artinya Ho diterima dan menggunakan uji *common effect model*. Lalu jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 artinya Ho ditolak dan menggunakan uji *fixed efect model*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Df	Prob
Cross Section F persamaan I	18.668914	(11,47)	0.0000
Cross Section F persamaan II	14.949993	(11,47)	0.0000

Berdasarkan tabel 2, nilai dari probabilitas *cross section chi square* dari persamaan I dan II adalah 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat dijelaskan bahwa uji *fixed effect model* lebih tepat digunakan dibandingkan uji *common effect model*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq Df	Prob
Cross Section Random persamaan I	1.703660	1	0.1918
Cross Section Random persamaan II	31.294378	1	0.1001

Sedangkan untuk Uji hausman digunakan untuk membandingkan antara uji *fixed effect model* dengan *random effect model*. Dengan menunjukkan nilai dari cross section chi square memiliki nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 artinya Ho diterima dan menggunakan uji random effect model. Lalu jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 artinya Ho ditolak dan menggunakan uji fixed efect model.

Berdasarkan hasil uji hausman diatas adalah sebesar 0.1918dan 0.1001yang artinya nilai ini lebih besar dari 0.05 dan diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dilihat pada kedua uji tersebut yaitu uji chow dan uji hausman dapat disimpulkan adalah keduanya menerima Ha yang diartikan uji ini menggunakan fixed effect model.

4.2.1. Hasil Uji Panel

Uji regresi panel dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y dengan melakukan metode panel. Dari hasil variabel tersebut dapat dilihat adakah yang signifikan atau tidak signifikan, dan melihat variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yang dilihat pada nilai probabilitas dari variabel berbas tersebut dengan taraf signifikan 5% atau 0,05.

Tabel 4
Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2971.020	1563.275	-1.900511	0.0635
X	6.49E-08	1.01E-08	6.442941	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.908048	Mean dependent var		7013.633
Adjusted R-squared	0.884571	S.D. dependent var		4686.010
S.E. of regression	1592.064	Akaike info criterion		17.77259
Sum squared resid	1.19E+08	Schwarz criterion		18.22636
Log likelihood	-520.1776	Hannan-Quinn criter.		17.95008
F-statistic	38.67810	Durbin-Watson stat		1.837056
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$\mathbf{Y_{it} = - 2.971 + 64{,}900\ X_{it} + e}$$

Berdasarkan pada kesimpiulan Uji Chow dan Uji Hausman, diketahui bawa hasil Regresi yang digunakan adalah *fixed effect model*. Tahapan pertama ialah melakukan estimasi regresi data panel pendekatan *fixed effect* pada persamaan I dengan variabel Pengangguran sebagai dependen. Hasil estimasi model *fixed effect* persamaan I. Adapun hasil estimasi untuk melihat pengaruh variabel penjelas

terhadap variabel terikat dengan menggunakan metode terbaik FEM (*fixed effect model*) adalah sebagai berikut (Tabel 4.4). Estimasi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel dana desa (X) adalah signifikan mempengaruhi pengangguran (Y_1) dengan taraf alpha 0,05. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa bila dana desa naik 1 milyar rupiah, maka rata-rata jumlah pengangguran juga naik sebesar 64 jiwa. Nilai koefisien yang positif ini tidak searah dengan hipotesis penelitian. Koefisen determinasi adalah 0,8846 menunjukkan bahwa 88 persen variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel penjelas, sisanya sebesar 12 persen dijelaskan oleh variabel error. Selanjutnya untuk melihat faktor dana desa mempengaruhi kemiskinan, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41075.78	4406.973	9.320634	0.0000
X	-9.49E-08	2.84E-08	-3.340480	0.0016
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.913093	Mean dependent var		26482.17
Adjusted R-squared	0.890903	S.D. dependent var		13588.15
S.E. of regression	4488.132	Akaike info criterion		19.84540
Sum squared resid	9.47E+08	Schwarz criterion		20.29917
Log likelihood	-582.3619	Hannan-Quinn criter.		20.02289
F-statistic	41.15046	Durbin-Watson stat		1.087739
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$\mathbf{Y_{it} = 41.075 + 94{,}900_{it} + e}$$

Estimasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel dana desa (X) adalah signifikan mempengaruhi kemiskinan (Y_2) dengan taraf alpha 0,05. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa bila dana desa naik 1 milyar rupiah, maka rata-rata jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 95 jiwa. Nilai koefisien yang negatif ini searah dengan hipotesis penelitian. Koefisen determinasi adalah 0,8909 menunjukkan bahwa 89 persen variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel penjelas, sisanya sebesar 11 persen dijelaskan oleh variabel error.

4.3. Pembahasan

Dana Desa yang secara teori merupakan bagian dari belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Kebijakan fiskal memang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai tanggungjawab pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar (*market failure*), dimana karena adanya kebebasan dari swasta, maka tidak semua masyarakat mampu beraktivitas dan memperoleh akses yang luas untuk mensejahterakan dirinya.

Bentuk hubungan negatif yang yang diharapkan dengan adanya Dana Desa, yaitu peningkatan Dana Desa diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran. Karena dengan Dana Desa sebagai bagian dari belanja pemerintah, sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemudian akan menciptakan *multiplier effect* pada hal sektor-sektor ekonomi lainnya. Pergerakan sektor-sektor ekonomi menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan sehingga pengeluaran pemerintah ini mengakibatkan turunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

4.3.1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat

Dari Estimasi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Dana Desa pengaruhnya signifikan terhadap pengangguran dengan hubungan positif menunjukkan bahwa bila dana desa naik maka rata-rata jumlah pengangguran juga naik. Hal ini bertentangan dengan teori John F. Due (dalam Prasetya. 2012). yang mana kebijaan fiskal pemerintah melalui pengeluaran pemerintah akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dan menurut Keynes (Pressman,2000), peranan pemerintah masih sangat diperlukan karena perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan kestabilan kegiatan ekonomi.

Terjadi ketidakselarasan antara Dana Desa dan pengangguran di Kalimantan Barat, dimana secara keseluruhan, Dana Desa pada kabupaten-kabupaten yang dialokasikan pada desa-desa di Kalimantan Barat tidak memberi dampak terhadap penurunan angka pengangguran maupun tingkat pengangguran. Dari data terlihat bahwa setiap tahunnya Dana Desa meningkat, tetapi jumlah penduduk yang menganggur juga meningkat.

Berdasarkan data dari Bappeda Kalimantan Barat dan BPS Kalimantan Barat (2022), jumlah total Dana Desa yang dialokasikan di kabupaten-kabupaten di Kaimantan Barat dan jumlah total penduduk yang menganggur sebagai berikut: Tahun 2017, total Dana Desa sebesar Rp 1.569.992.112.469,- dan jumlah pengangguran sebanyak 69.250 jiwa. Tahun 2018 total Dana Desa sebesar Rp 1.694.420.330.554,-,dan jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 66.716 jiwa. Tahun 2019 total Dana Desa Rp 1.987.452.464.800,- dan jumlah total penduduk yang menganggur sebanyak 68.728 jiwa. Tahun 2020 total Dana Desa Rp 2.019.514.625.760,- dan jumlah total penduduk yang menganggur sebanyak 104.745 jiwa serta tahun 2021 total Dana Desa Rp 2.057.322.518.519,- dan jumlah total penduduk yang menganggur sebanyak 103.974 jiwa. Dari paparan data tersebut, bahwa kenaikkan Dana Desa setiap tahunnya tidak diikuti oleh turunnya angka pengangguran.

Kondisi yang terjadi tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Kalimantan Barat meluluhlantakkan beberapa sektor ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar, Sejak tahun 2019 akhir terjadi pengangguran karena Covid-19. Tahun 2020 terjadi perumahan karyawan sebanyak 3,289 orang. Belum lagi yang kehilangan mata pencaharian dari usaha sendiri yang tidak mampu bekerja dan membuka usahanya karena pembatasan berskala makro pada aktifitas orang. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2021, walaupun ekonomi sudah membaik, pengangguran tetap berlanjut. Karena tidak mudah untuk cepat bangkit bagi tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian.

Dana Desa diperuntukkan untuk desa-desa di Indonesia, dan selama ini pengangguran yang besar terjadi diperkotaan di Indonesia. Meningkatnya Dana Desa yang dialokasikan setiap tahunnya tidak memberi dampak pada penurunan angka pengangguran, karena pengangguran di daerah perkotaan di kabupaten-kabupaten lebih besar dibandingkan dengan pengangguran di daerah perdesaan. Sementara untuk kabupaten-kabupaten, wilayah atau daerah perdesaan lebih banyak desa-desa yang bercirikan desa daripada kota. Berdasarkan data BPS, di Kalimantan Barat, Pengangguran perkotaan lebih tinggi dari pengangguran perdesaan. Tahun 2020 pengangguran perkotaan (9,56%) dan pengangguran perdesaan (3,95%), tahun 2021 pengangguran perkotaan (9,57%) dan pengangguran perdesaan (3,86%). Terjadi kenaikkan tingkat pengangguran perkotaan Kalimantan Barat, sementara pengagguran perdesaan tingkat pengangguran turun.

4.3.2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat

Dari Estimasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Dana Desa signifikan mempengaruhi kemiskinan dengan hubungan yang negatif menunjukkan bahwa bila dana desa naik, maka rata-rata jumlah penduduk miskin akan turun. Hal ini sejalan dengan teori Wagner (dalam Prasetya, 2012), bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan pelayanan publik. Pendapatan perkapita penduduk akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah termasuk Dana Desa memang diperuntukkan untuk menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan data dari Bappeda Kalimantan Barat dan BPS Kalimantan Barat (2022), jumlah total Dana Desa yang dialokasikan di kabupaten-kabupaten di Kaimantan Barat dan jumlah total penduduk yang menganggur sebagai berikut: Tahun 2017, total Dana Desa sebesar Rp 1.569.992.112.469,- dan jumlah penduduk miskin sebanyak 346.640 jiwa. Tahun 2018 total Dana Desa sebesar Rp 1.694.420.330.554,-,dan jumlah penduduk miskin sebanyak 344.140 jiwa. Tahun 2019 total Dana Desa Rp 1.987.452.464.800,- dan jumlah total penduduk miskin sebanyak 306.910 jiwa. Tahun 2020 total Dana Desa Rp 2.019.514.625.760,- dan jumlah total penduduk miskin sebanyak 296.670 jiwa serta tahun 2021 total Dana Desa Rp 2.057.322.518.519,- dan jumlah total penduduk miskin sebanyak 298.570 jiwa. Dari paparan data tersebut, bahwa kenaikkan Dana Desa setiap tahunnya diikuti oleh turunnya angka angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, jika dilihat pergerakan data maka terbukti bahwa hubungan yang signifikan dan negatif antara Dana Desa dan jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan hubungannya negatif. Dana Desa meningkat setiap tahunnya diikuti dengan turunnya angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan penduduk kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat. Dana Desa yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa mengakibatkan bergeraknya perekonomian masyarakat desa, sehingga menyumbang penurunjan angka kemiskinan. Apalagi selama ini tingkat kemiskinan penduduk yang berada di daerah perdesaan pada kabupaten lebih tinggi dari tingkat kemiskinan penduduk yang berada di daerah perkotaan pada kabupaten yang sama, tahun 2021 kemiskinan perkotaan Kalimantan Barat 4,72% dan kemiskinan perdesaan 8,05%.

4.3.3. Dana Desa, Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan di Kalimantan Barat

Pasal 19 PP 60/2014**,** Dana Desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dari penggunaan Dana Desa adalah: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2017) melalui surat edarannya memerintahkan pelibatan tenaga kerja masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Dana Desa, terdapat empat poin yang ditekankan yaitu: (1) pemanfaatan dana desa dilakukan dengan swakelola, (2) Pemanfaatan pembanguan dengan program swakelola dilakukan dengan memanfaatkan material lokal dan membeli dari masyarakat atau toko lokal, (3) harus dipastikan bahwa 30% dana desa digunakan untuk upah tenaga kerja lokal, dan (4) pekerjaan yang melibatkan masyarakat dibayarkan secara harian/mingguan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Berdasarkan hal ini, berarti jelas bahwa adanya Dana Desa yang dialokasikan pada desa-desa di Indonesia, khususnya pada desa-desa di Kalimantan Barat diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran perdesaan dan angka kemiskinan perdesaan.

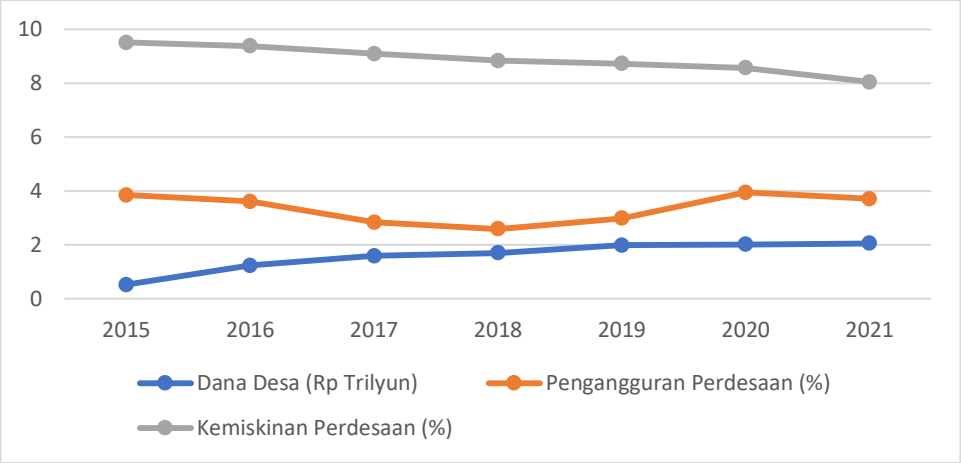

Sumber : Kementerian Keuangan RI dan BPS

Gambar 6. Perkembangan Dana Desa, Tingkat Pengangguran Perdesaan dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat

Dicermati dari gambar 6 dengan memperdalam pada data pengangguran perdesaan dan kemiskinan perdesaan, terlihat bahwa Dana Desa yang dialokasikan di perdesaan di Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan penurunan pengangguran perdesaan dan penurunan tingkat kemiskinan perdesaan (Tabel 1). Tetapi untuk pengangguran perdesaan tahun 2019 dan 2020 turun mengalami kenaikkan tingkat pengangguran perdesaan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 tingkat pengangguran perdesaan turun kembali, karena adanya pemulihan ekonomi. Yang menarik adalah bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 pada saat tingkat pengangguran perdesaan meningkat, namun tingkat kemiskinan perdesaan tetap turun. Ini dikarenakan adanya *refocusing* belanja pemerintah termasuk Dana Desa yang sebagian digunakan untuk belanja keperluan penanggulangan pandemi Covid-19. *Refocusing* belanja Dana Desa diperuntukkan bagi mempertahankan atau daya beli masyarakat, sehingga walaupun kehilangan pekerjaan tetapi pemerintah menjaga daya beli melalui bantuan sosial kepada masyarakat. Secara umum jika disimpulkan bahwa Dana Desa yang selama ini dialokasikan pemerintah yang bersumber dari APBN, yang diupayakan meningkat setiap tahunnya yang diterima desa-desa memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. SIMPULAN

Estimasi pada pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa variabel dana desa (X) adalah signifikan mempengaruhi kemiskinan (Y2) dengan taraf alpha 0,05. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa bila dana desa naik 1 milyar rupiah, maka rata-rata jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 95 jiwa. Nilai koefisien yang negatif ini searah dengan hipotesis penelitian. Koefisen determinasi adalah 0,8909 menunjukkan bahwa 89 persen variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel penjelas, sisanya sebesar 11 persen dijelaskan oleh variabel error.

Memperdalam pada data pengangguran perdesaan dan kemiskinan perdesaan, terlihat bahwa Dana Desa yang dialokasikan di perdesaan di Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021

meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan penurunan pengangguran perdesaan dan penurunan tingkat kemiskinan perdesaan. Tetapi untuk pengangguran perdesaan tahun 2019 dan 2020 turun mengalami kenaikkan tingkat pengangguran perdesaan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dan tahun 2021 tingkat pengangguran perdesaan turun kembali, karena adanya pemulihan ekonomi. Yang menarik adalah bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 pada saat tingkat pengangguran perdesaan meningkat, namun tingkat kemiskinan perdesaan tetap turun.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal, Vol. 2* (4).

Badan Pusat Statistik. (2015-2021). Retrieved from https://www.bps.go.id/.

Buhaerah, Pihri (2021), Dana Desa Turunkan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran (Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Media Briefing Outlook Perekonomian Indonesia 2022*, Antara-Jakarta. 23 Desember 2021. https://www.antaranews.com/berita/2602945/

Prasetya,Ferry (2012), Modul Ekonomi Publik: Bagian V, Teori Pengeluaran Pemerintah, Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Brawijaya, Malang.

Ginanjar, K. (2006). Pembangunan Untuk Rakyat. In *Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: CIDES.

Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Terjemahan Mangungsong Salemba Empat, buku 2. Edisi 5.

Gusmeri, dkk (2019), *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, Laporan Penelitian-FEB UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Bappeda Kota Banda Aceh. .

Kaharudin,R.,Anderson G. Kumenaung, Audie O. Niode (2019), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Menado Tashun 2001-2017), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 19 No. 04. Hal 13-23.

Kartika, D. A. F. C., S., Diartho, H. C. (2021). Impact of Government Expenditure on Poverty Rate Reduction in East Java Province. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 11(2), 120-127. https://doi.org/ 10.30741/wiga.v11i2.606

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluan,*: Jakarta : Erlangga

Mangkoesoebroto, Guritno, 2000. *Ekonomi Publik,* Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

Martinez-Varques,Jorge *and* Robert M McNab,2001, Fiscal Decentralization and Economic Grwoth, *International Studies Program, Working Paper*, Atlanta : Georgia State University

Nanga, M (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, Sekolah Pascasarjana. IPB..

Nepram.D,SalamP.S, Samsur.J (2021). The Effect of Government Expenditure on Unemployment in India:A State Level Analysis: *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 8 No 3 (2021) 0763–0769.

Pertama, Hamdi Aniza, 2009,Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik, HAMDI.ANIZAPERTAMA@pajak.go.id.

Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia,* Terjemahan Tri Wibowo Rudi Santosa,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014). Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan RI

Rasyid, M,Ryaas, Afan Gafar, Syaukani, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, M. (2017), Dana Desa, Lapangan Kerja, Dan Kemiskinan, *Biro Humas Kemendes RI*, Jakarta, 09 Nop 2017, https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2227/

Saraireh, Shadi (2020), The Impact Of Government Expenditures on Unemployment : A Case Study Of Jordan, *Asian Journal Of Economic Modeling*, Vol 8, No.3, 189-203,DOI: 10.18488/journal.8.2020.83.189.203.

Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.

Simanjuntak, Thamrin, 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga*

*Rampai Manajemen Keuangan daerah***.** Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono (2006). *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : LPFE-UI.

Todaro, M. P.& Smith,S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Jakarta: Erlangga.

UU RI Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No 6/2014 tentang Desa

PP RI Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa

Analisis Ketersediaan Beras Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Barat: Pendekatan Dinamika Sistem

Akhmad Yani[1]
Restiatun[*]
[1,2)] *Universitas Tanjungpura, Indonesia*

ABSTRACT

Realizing the rice availability in a sustainable manner is often faced with various problems, include in West Kalimantan. Failure to achieve this goal has economically, socially and even politically implications. Determinants the availability of rice are started from natural, technical, population, social and economic factors. The aims of this study were: (1) estimating the rice availability in West Kalimantan, (2) identifying sensitive variables to rice availability in West Kalimantan, (3) to see the impact of simultaneous changes in independent variables on rice availability in West Kalimantan. The analytical tool used in this study is dynamic system. This study found (1) results of the simulation without scenarios show that currently, for the next few decades, the supply of rice in West Kalimantan has experienced a surplus, (2) the population growth rate is the most sensitive variable compared to 3 other variables which include the rate of land use change, pests and diseases attacks, and impact of the floods and droughts. (3) increasing in population growth by 1 percent, causing a deficit in the availability of rice in West Kalimantan started in 2020. The variable rate of land use change is the second sensitive variable. An increase in this variable by 1 percent has resulted deficit in the availability of rice in West Kalimantan started in 2027 and for the next decades. Simultaneously, if all variables each increase by 1 percent, deficit in availability of the rice in West Kalimantan has occurred since 2009 and for the next decades.

JEL: Q01, Q11, Q18

Keywords*: Ketersediaan Beras, Kemandirian Pangan, Dinamika Sistem*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Ketergantungan penduduk Indonesia terhadap hasil-hasil pertanian terutama pertanian tanaman pangan khususnya beras sangat tinggi. Hal ini menjadikan komoditi beras merupakan komoditi sangat penting bagi Indonesia, mengingat 90 persen lebih penduduk Indonesia masih membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Oleh karena itu apabila terjadi gejolak pada ketersediaan pasokan dan harga beras, maka akan memberikan pengaruh pada perekonomian nasional dan ketahanan nasional. Ketersediaan beras pada tingkat nasional maupun regional menjadi prasyarat bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional (Sumodiningrat, 2001).

[*] Email: restiatun@untan.ac.id

Beras selalu menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan karena relevansinya dengan kepentingan rakyat Indonesia maupun dalam perspektif pasar dunia. Kekurangan produksi beras akan menjadi masalah sosial politik, ekonomi dan keamanan. Konsekuensinya pemerintah harus tanggap terhadap parameter yang berhubungan dengan penawaran, permintaan dan stok beras. Dengan mengetahui jumlah permintaan (konsumsi) dan jumlah penawaran serta stok yang tersedia, pemerintah dapat memantau, menjaga ketersediaan beras agar stabilitas harga terjamin. Dengan adanya perhatian terhadap ketiga parameter tersebut, diharapkan tidak terjadi gejolak harga beras di pasar yang meresahkan masyarakat, baik bagi petani produsen maupun masyarakat konsumen.

Berdasarkan tingkat konsumsi beras perkapita per tahun, Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi beras terbesar di dunia dengan tingkat konsumsi 154 Kg/orang/tahun. Tingkat tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di China yang hanya 90 kg, India 74 Kg, Thailand 100 Kg serta Philipina 100 Kg/orang/tahun. Kebutuhan beras Indonesia selalu meningkat dan tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri dan harus mengimpor dari negara lain (Febriari, 2016). Tetapi di sisi lain, terdapat hambatan dalam upaya meningkatkan produksi beras, yakni semakin sempitnya luas lahan pertanian yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ada indikasi telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang cukup massive. Alih fungsi lahan pertanian terutama lahan tanaman padi sawah di beberapa sentra produksi padi di pulau Jawa dan luar Jawa yang terus terjadi dan sulit dihindari, telah memberikan pengaruh pada penyediaan beras nasional.

Sebagian lahan pertanian di Pulau Jawa, terutama lahan tanaman padi sawah, telah mengalami perubahan fungsi menjadi lahan non pertanian seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, perumahan sarana publik. sementara di luar Pulau Jawa, terjadi alih fungsi untuk lahan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan pemukiman. Alih fungsi ini tentu menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, menimbulkan ancaman yang serius bagi upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional dan ketahanan nasional. Irawan (2003) mengemukakan bahwa selama 1978-1998 sekitar 1,07 juta ha lahan (30,8%) telah terkonversi menjadi lahan non pertanian. Selama periode yang sama, terdapat pembukaan sawah baru sekitar 0,91 juta ha. Produksi padi di Jawa mempunyai kontribusi sekitar 58 persen dari produksi padi nasional. Ini berarti bahwa konversi lahan di Jawa akan berpengaruh buruk terhadap produksi beras nasional dan akan memperlemah ketahanan pangan (Sudaryanto et al., 2006).

Kendala dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan beras terjadi juga di Kalimantan Barat. Dengan wilayah yang relatif luas dan merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia memberikan gambaran bahwa lahan yang tersedia di Kalimantan Barat untuk dapat digunakan sebagai lahan pertanian masih sangat luas. Kepentingan terwujudnya ketahanan pangan di Kalimantan Barat didukung oleh beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara lain sehingga ketahanan pangan akan menjadi syarat perlu bagi terwujudnya ketahanan nasional, khususnya di daerah perbatasan. Namun terdapat kendala yakni sebagian besar lahan yang ada relatif kurang sesuai untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang beririgasi teknis. Tambahan pula alih fungsi lahan untuk dijadikan sebagai lahan non pertanian relatif tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak pada turunnya produksi padi, yang menghambat tercapainya swasembada pangan di Kalimantan Barat. Luas sawah di Kalimantan Barat pada 2012 adalah 305.000 hektar, namun pada 2018 sebesar 66.000 hektar, artinya luasan lahan sawah turun sebesar 239.000 hektar (https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/).

Masalah lain yang muncul terkait dengan upaya mencapai swasembada pangan di Kalimantan Barat adalah telah terjadi penurunan produksi beras dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir, sementara terakhir laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat rata-rata per tahun sebesar 1,54 persen (BPS, 2020), Sebagaimana ditunjukkan oleh data produksi beras pada tahun 2019 yang mencapai angka sebesar 499.012 ton namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 457.987 ton atau turun sebesar 9 persen (BPS, 2020). Masalah lain yang seringkali menyebabkan terjadinya kegagalan panen yaitu terjadinya perubahan musim, di mana pada musim kemarau menimbulkan kekeringan dan kebakaran lahan dan musim hujan menimbulkan bencana banjir yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam produksi padi.

Ketahanan pangan merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food ultilization*). Oleh karena itu faktor yang memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga komponen ketahanan pangan tersebut. Lahan pertanian merupakan faktor utama produksi komoditas pertanian. Semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut (Rahim dan Dwi Hastuti, 2008). Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian akan semakin tidak efisien lahan tersebut. Sementara itu pada lahan yang sempit pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar, sehingga usaha pertanian seperti ini sering lebih efisien (Soekartawi, 2002).

Luas lahan sangat mempengaruhi produksi, apabila lahan semakin luas maka penawaran beras akan meningkat, sebaliknya apabila lahan semakin sempit maka produksi padi akan menurun. Lahan pertanian (sawah) mempunyai arti yang terpenting dalam menentukan ketahanan pangan nasional. Saat ini sumberdaya lahan pertanian menghadapi tantangan dan tekanan yang semakin berat. Tingkat persaingan dengan peruntukan non pertanian, berada pada titik yang mengkhawatirkan bagi eksistensi pertanian, khususnya sebagai sektor yang berkepentingan dalam pengadaan pangan nasional (Sumodiningrat, 2001)

2. KAJIAN LITERATUR

Sukirno (2010) mengemukakan juga ada beberapa factor penting mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang adalah : 1) Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. 2) Cita rasa masyarakat. Cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membelibarang-barang. 3) Jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak otomatis menyebabkan pertambahan permintaan. Pertambahan penduduk dalam perekobomian tersebut yang selanjutnya menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, maka hal ini akan mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada gilirannya akan mendorong naiknya daya beli masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan menambah permintaan. 4) Ekspektasi tentang masa depan. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan.

Menurut Mankiw (2007) jumlah penawaran dari suatu barang adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dijual oleh penjual. Banyak faktor yang menentukan jumlah penawaran barang, namun diantara berbagai faktor yang paling dominan adalah harga barang itu. Jika sudut pandang produsen, beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah yang diproduksi di antaranya adalah: a) Harga barang tersebut. Hubungan antara harga dan penawaran barang itu adalah searah. Semakin murah harga maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit dan sebaliknya semakin mahal harga, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. b) Harga barang lain. Semakin mahal harga barang substitusi maka semakin sedikit penawaran barang itu. c) Harga faktor produksi. Bila harga faktor produksi semakin meningkat maka menyebabkan biaya produksi menjadi mahal, maka produsen menjadi berkurang kemampuannya untuk berproduksi. d) Ekspektasi harga di masa yang akan datang. Bila ada anggapan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga pada suatu barang maka penawaran akan barang tersebut akan semakin menurun. e) Jumlah produsen. Apabila jumlah produsen bertambah maka semakin banyak penawaran. f) Teknologi. Dengan adanya teknologi yang semakin meningkat, berarti biaya untuk memproduksi menjadi lebih rendah, dengan demikian jumlah barang yang dapat diproduksi menjadi lebih banyak. g) Jumlah konsumen. Apabila jumlah konsumen bertambah maka biasanya akan semakin banyak penawaran yang akan dilakukan produsen.

Keadaan suatu pasar dikatakan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan ekuilibrium dalam suatu pasar. Namun seringkali kenyataannya terdapat harga pada tingkat Petani dan konsumen disamping harga pedagang. Pembentuk harga yang minimum terjadi pada tingkat harga pedagang besar karena hanya pada tingkat ini terdapat persaingan yang agak sempurna dan pada umumnya penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang baik tentang situasi pasar pada suatu waktu tertentu. Kebijakan stabilisasi harga ditempuh dengan menggunakan instrument stok cadangan (*buffer stock*) maupun pengaturan harga (*administered price*). Pemerintah setiap tahun menentukan harga dasar (floor price) bagi produsen dan harga tertinggi (ceiling price) bagi konsumen. Bulog bertanggung jawab untuk menjamin harga beras berada diantara harga tertinggi dan terendah tersebut dengan melakukan operasi pasar dan pendistribusian (Amirullah, 2005). Ada tiga aspek penting dalam membangun ketahanan pangan, yaitu: a) Ketersediaan Pangan (Availbility). Untuk mencapai ketahanan pangan suatu negara harus menjamin ketersediaan pangannya. Ketersediaan beras dari produksi dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan pangan (Sawit, 2003). b) Stabilitas Penawaran (Supply Stability). Pencapaian ketahanan pangan tidak terlepas dari sifat penawaran yang stabil. Peran pemerintah dibutuhkan dalam pencapaian kestabilan penawaran dengan merangsang petani baik dari peningkatan harga yang sesuai, pemberian subsidi maupun ketersediaan faktor lainnya uang mempermudah petani untuk meningkatkan penawarannya. c) Keterjangkauan (*Accesbility*). Pangan yang telah ditawarkan oleh produsen harus dapat dijangkau konsumen baik oleh masyarakat yang kurang mampu sampai yang sangat mampu. Penawaran beras akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukungnya. Dengan dukungan faktor-faktor tersebut maka akan meningkatkan penawaran beras.

Bagi sebagian besar masyarakat Indoensia, beras merupakan bahan pangan pokok yang belum bisa tergantikan dengan komoditi karbohidrat lainnya seperti jagung, ubi, sagu dan lainnya. Sehingga bagi masyarakat yang berpendapatan rendah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, terutama pangan beras. Oleh karena itu, konsumsi pangan sangat terkait erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat, sampai akhirnya melewati standar

kecukupan konsumsi per kapita sehari. Kecukupan gizi yang dianjurkan per kapita per hari adalah penyediaan energi 2.500 kalori dan protein 55 gram (Amang, 2005).

Dalam kaitannya dengan ketersediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat terdapat 2 (aspek) yang harus terpenuhi yaitu tersedianya dan tercukupinya jumlah serta harga beras yang tejangkau untuk dapat dibeli masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam konteks ini lah pemerintah berusaha mempertahankan ketersediaan pangan dalam jumlah cukup dan dengan harga yang murah (bukan sekedar terjangkau) (Sumodiningrat, 2001). Ketersediaan pangan yang cukup merupakan suatu sistem yang berjenjang (bierarchial systems) mulai dari nasional, provinsi (regional), lokal (kabupaten/kota), dan rumah tangga. Ketersediaan pangan dapat diukur pada tingkat makro (nasional, provinsi, kabupaten/kota) maupun mikro (rumah tangga). Ketersediaan beras akan mempengaruhi harga beras, selain itu harga beras juga dipengaruhi oleh harga barang lain serta kebijakan dari pemerintah.

3. METODA PENELITIAN

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan model *system dynamics*. System dynamics merupakam pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, yang mampu menyederhanakan masalah yang rumit tanpa kehilangan esensi atau unsur utama dari objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Kalimantan Barat**,** dengan periode waktu data yang dianalisis adalah tahun 2005 hingga tahun 2017, dengan simulasi skenario hingga tahun 2050. Objek penelitian ini adalah ketersediaan beras di Kalimantan Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan data – data dari sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam melakukan pengolahan data, dilakukan dengan pendekatan system dynamics. Data-data yang diperoleh terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data penduduk tahun 2005 = 4.052.345 jiwa (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010)
- Angka tingkat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk = 2,04 persen per tahun (Sensus Penduduk 2020)
- Angka tingkat rata-rata kematian kasar = 0,32 persen per tahun ((BPS, Kalbar Dalam Angka 2010)
- Angka rata-rata konsumsi beras/kapita penduduk Kalbar = 120 kg atau = 120 ton per tahun (https://kalbar.antaranews.com/berita/302229/konsumsi-beras-penduduk-kalbar-tinggi)
- Luas lahan tanaman padi sawah tahun 2005 = 292,220 hektar (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010)
- Tingkat rata-rata laju pencetakan sawah baru lahan padi sawah = 6,4 persen per tahun. (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, 2020)
- Tingkat rata-rata laju konversi lahan padi sawah = 3,63 persen per tahun (https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/16380551/cerita-warga-yang-tergerus-alih-fungsi-lahan-terpaksa-tanam-sayur-di-bot?page=all)
- Tingkat rata-rata laju perunanan luas lahan padi sawah yang ditanam = 2,34 persen per tahun ((BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, 2020)
- Tingkat rata-rata produksi lahan tanaman padi sawah = 3,327 ton per hektar. (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, 2020)
- Luas lahan tanaman padi ladang yang ditanam tahun 2005 = 118,102 hektar. (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010)
- Tingkat rata-rata laju penurunan lahan tanaman padi ladang yang ditanam = 1,4 persen per tahun (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, 2020)

- Tingkat rata-rata produksi lahan tanaman padi ladang = 1,905 ton per hektar (BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, 2020)
- Tingkat rata-rata dampak serangan hama dan penyakit terhadap luas lahan tanaman padi yang ditanam (lahan tanaman padi sawah dan ladang) = 2,3-4,3 persen per tahunn (Laporan Serangan OPT Dan DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Mei 2019)
- Tingkat rata-rata dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap luas lahan tanaman padi yang ditanam (lahan tanaman padi sawah dan ladang) = 2,5 persen per tahun ((Laporan Serangan OPT Dan DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Mei 2019).
- Angka Tingkat konversi, penyusutan dan tingkat penggunaan hasil produksi padi untuk bahan baku kegiatan produksi lainnya baik mulai dari Gabah Kering Padi sampai menjadi Stock Beras menggunakan Survey dari BPS: Hasil Survei Kerangka Sampel Area, 2019.

Dalam penelitian ini sesuai dengan objek penelitian yang memfokuskan pada ketersediaan beras dan faktor- faktor yang mempengaruhinya dan saling berinteraksi dalam kerangka sistem dinamik dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Subsistem Penduduk:
   - Jumlah angka pertumbuhan penduduk
   - Jumlah angka kematian kasar
   - Tingkat laju pertumbuhan penduduk
   - Tingkat laju kematian kasar
   - Angka konsumsi beras perkapita per tahun
   - Total konsumsi beras per tahun
2) Subsistem Luas Lahan Tanaman Padi Sawah:
   - Jumlah angka pencetakan sawah baru
   - Jumlah angka alih fungsi lahan tanaman padi sawah
   - Tingkat laju pencetakan sawah baru
   - Tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah
   - Luas lahan padi sawah ditanam
   - Laju penurunan luas lahan ditanam
   - Tingkat laju penurunan lahan padi sawah ditanam
   - Luas lahan tanaman padi sawah dipanen
   - Tingkat dampak serangan hama dan penyakit
   - Tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan
   - Produksi padi lahan tanaman padi sawah
   - Rata-rata produksi padi lahan tanaman padi sawah
3) Subsistem Luas lahan padi ladang yang ditanam:
   - Laju jumlah penurunan padi lading yang ditanam
   - Tingkat laju jumlah penurunan padi lading yang ditanam
   - Luas lahan tanaman padi dipanen dipanen
   - Tingkat dampak serangan hama dan penyakit
   - Tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan
   - Produksi padi lahan tanaman padi ladang
   - Rata-rata produksi padi lahan tanaman padi ladang

4) Hubungan Subsistem Luas Lahan Padi Sawah, Luas Lahan Padi Ladang dan Stock Beras Siap Untuk Kebutuhan Konsumsi Penduduk:
   - Total produksi gabah kering padi (produksi padi lahan padi sawah + lahan padi ladang)
   - Penyusutan
   - Gabah kering giling
   - Susut –tercecer
   - Untuk bibit-benih
   - Untuk bahan industri
   - Untuk pakan ternak
   - Gabah siap diolah menjadi berasi
   - Konversi gabah siap diolah menjadi beras
   - Produksi beras
   - Susut –tercecer
   - Untuk bahan industri
   - Untuk pakan ternak
   - Stock Beras untuk kebutuhan konsumsi
5) Hubungan antara subsistem luas lahan padi sawah dan lahan padi ladang dengan
   - Surplus-defisit stock beras
   - Total kebutuhan konsumsi beras (dari subsistem penduduk)
   - Total ketersediaan stock beras yang siap untuk kebutuhan konsumsi (dari subsistem lahan tanaman padi sawah+padi ladang)

Model diagram lingkar sebab-akibat (*causal loop diagram*) berbagai variabel dalam Analisis Pendekatan Sistem Dinamik Ketersediaan Beras Menuju Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 1.

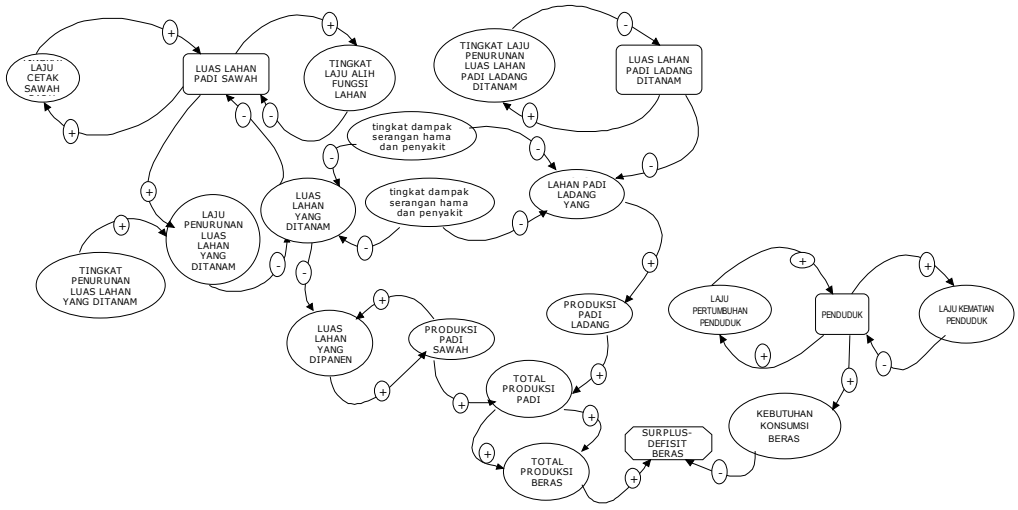

Gambar 1. Diagram Lingkar Sebab Akibat Ketersediaan Beras

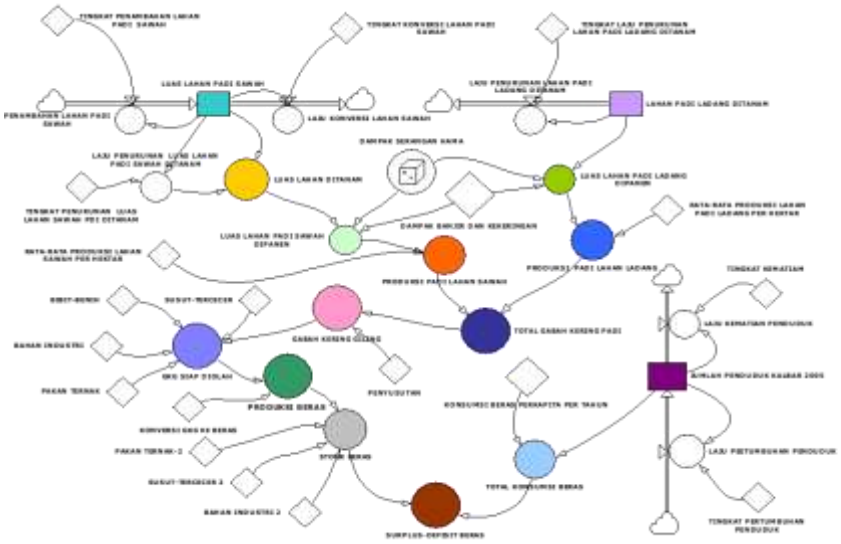

Gambar 2 Diagram Alir Fungsi Sistem Dinamik Ketersediaan Beras

Model diagram alir fungsi dinamik antara penduduk, ketersediaan beras, luas lahan dan pendapatan perkapita serta variabel-variabel lainnya yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi adalah sebagaimana Gambar 2.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor utama dan sangat penting untuk mewujudkan kemandirian pangan khususnya beras yang merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia termasuk penduduk Kalimantan Barat, adalah ketersediaan lahan pertanian untuk tanaman padi. Hal ini sangat penting untuk dicermati, karena dengan dinamika pembangunan yang terjadi, pemanfaat lahan terutama lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk lahan pertanian padi harus bersaing dengan penggunaan lahan non pertanian padi, dan tidak jarang lahan yang berstatus APL sebagian besar dimanfaat untuk kegiatan non pertanian padi khususnya untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Tentu saja dari aspek kepentingan yang berorientasi profit, perkebunan kelapa sawit memberikan prospek keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pertanian tanaman padi. Merujuk data selama tahun 2005 hingga 2017, selama periode tersebut luas lahan tanaman padi di Kalimantan Barat secara keseluruhan terjadi kenaikan, sekalipun ada beberapa tahun mengalami pengurangan. Rata-rata kenaikan luas lahan tanaman padi pertahun adalah sebesar 19,795 ha atau terjadi kenaikan rata-rata sebesar 6,43 persen.

Apabila dilihat dari fluktuasi turun naiknya luas lahan tanaman padi selama periode 2005-2017, berkurangnya luas lahan tanaman padi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yang mencapai angka seluas 31,446 ha atau sebesar 9,77 persen dibandingkan dengan luas tanaman padi tahun sebelumnya. Selanjutnya luas lahan tanaman padi dengan jumlah pengurangan relatif besar terjadi padi tahun 2014 yang mencapai angka sebesar 16,828 ha atau 3,09 persen dibandingkan dengan angka luas lahan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan luas tanaman padi di Kalimantan Barat terjadi selama periode 2005-2017 terjadi hampir setiap tahun. Kenaikan luas tanaman padi dengan angka yang paling ekstrim terjadi pada tahun 2013 yang mencapai angka sebesar 222.137 ha atau sebesar 68.87 persen dibandingkan dengan luas lahan tanaman pada tahun sebelumnya. Jika memperhatikan kenaikan yang terjadi pada luas lahan tanaman padi selama periode 2005-2017, dapat dikatakan bahwa upaya

Pemerintah Kalimantan Barat untuk meningkatkan produksi beras salah satunya dengan program ekstensifikasi, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pencetakan sawah baru yang tentu saja dibarengi dengan perbaikan dan pembangan prasasarana dan sarana irigasi.

Kenaikan luas lahan tanaman padi di Kalimantan Barat, diikuti dengan kenaikan luas lahan padi yang ditanam. Namun kenaikan luas lahan padi yang ditanam ini tidak secara proporsional dengan kenaikan luas lahan tanaman padi. Kenaikan luas lahan padi yang ditanam rata-rata pertahun mencapai angka 4,227 ha atau sebesar 1,37 persen rata-rata pertahun. Sebagai perbandingan kenaikan luas lahan tanaman padi rata-rata pertahun yang mencapai angka sebesar 19,795 ha, hal ini memberikan indikasi bahwa luas lahan tanaman padi yang tidak ditanam rata-rata pertahun mencapai 15,568 ha. Dengan kata lain, kenaikan pada luas lahan tanaman padi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Barat melalui program ekstensifikasinya tidak serta merta diikuti dengan kenaikan yang sama pada luas lahan padi yang ditanam.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi luas lahan padi yang ditanam petani. Diantaranya adalah ketersediaan bibit padi, yaitu kemampuan petani dalam membeli bibit padi. Hal ini amat terkait dengan harga bibit yang dibeli dipasar oleh petani. Jika harga bibit padi di pasaran tinggi, maka kemampuan petani untuk membeli bibit padi menjadi berkurang dan secara langsung memberikan pengaruh kepada luas lahan tanaman padi yang ditanam petani. Selain faktor harga bibit padi, masalah upah buruh juga menjadi hal yang cukup penting dalam menentukan luas lahan padi yang ditanam petani. Untuk menanam lahan yang dimiliki petani, seringkali petani meembutuhkan buruh tani membantu menanamkan bibit padi tersebut. Semakin banyak buruh tani yang dipekerjakan, maka memungkin semakin luas lahan tanaman padi yang ditanam. Namun seringkali petani tidak mampu memperkerjakan buruh tani, hal ini dikarenakan upah buruh tani relative mahal dan tidak terjangkau oleh petani untuk untuk membayarnya.

Prasarana dan peralatan pengolahan lahan tanaman padi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan petani untuk menggarap lahan sawah yang dimilikinya. Penggunaan peralatan pertanian yang sederhana dan tradisional membatasi kemampuan petani untuk menggarap sawah secara lebih luas. Terkait dengan hal ini, sebagian besar petani masih menggunakan peralatan tradisional dalam menggarap sawah. Oleh karena itu sebagian besar petani tidak bisa secara optimal untuk menggarap lahan tanaman padi, sehingga lahan tanaman padi yang ditanam petani menjadi lebih terbatas.

Sekalipun terjadi kenaikan luas lahan tanaman padi dan luas lahan padi yang ditanam, namun data yang diperoleh selama periode tahun 2000- 2020 memperlihatkan luas lahan tanaman padi yang dipanen mengalami penurunan. Berdasarkan data yang ada, penurunan luas tanaman padi yang dipanen rata-rata pertahun selama 21 tahun mencapai angka 5.229 ha atau menurun setiap tahunnya sebesar 0,87 persen pertahun. Idealnya luas lahan yang dipanen sama dengan luas lahan tanaman padi yang ditanam. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi menurun luas lahan tanaman padi yang dipanen baik faktor teknis dan non teknis serta faktor alam. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki petani dalam menggarap lahan sawah dapat mempengaruhi luas lahan tanaman padi yang dipanen. Pengolahan dan penanaman padi dengan pengetahuan teknis yang sederhana dapat menjadikan padi tidak tumbuh dengan baik. Tambahan pula masih banyak lahan tanaman padi yang ada di Kalimantan Barat ini masih mengunakan irigasi non teknis, dengan mengandalkan pengairan secara alami, sehingga kecukupan air untuk lahan tanaman padi tidak bisa secara kontinyu tersedia. Pada gilirannya kondisi ini memberikan pengaruh pada rendahnya tingkat kesuburan tanaman padi, bahkan diantaranya ada yang mati.

Menurunnya lahan padi yang dipanen dapat juga disebabkan serangan hama penyakit pada tanaman padi. Bahkan serangan hama penyakit ini untuk Sebagian besar petani dianggap sebagai musuh petani yang utama. Serangan dari binatang tikus sawah terhadap tanaman padi seringkaki memberikan dampak cukup serius, sehingga mampu mengurangi luas panen tanaman padi secara massive. Belum lagi adanya serangan berbagai macam hama dan binatang lainnya seperti belalang, burung akan semakin mempercepat berkurangnya luas lahan tnaman padi yang dipanen. Pada dasarnya pengendalian atas bebagai penyakit dan hama serta binatang pengganggu tanaman padi dapat dilakukan sepanjang petani melengkapi pemeliharaam tanaman padi dengan obat-obatan pemberantas hama dan penyakit tanaman padi yang bisa dibeli di pasar. Namun seringkali kendala yang dihadapi, para petani tidak mampu sepenuhnya untuk melengkapi peralatan dan obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit, disebabkan pendapatan yang diperoleh petani relative kecil. Sehingga jika terjadi serangan hama, penyakit dan binatang pada tanaman padi, para petani melakukan pencegahan atau pengendalian dengan cara-cara tradisional serta peralatan yang seadanya. Kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit ini, menyebabkan berkurangnya luasnya tanaman padi yang dipanen.

Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan panen pada tanaman padi dan tidak dapat dikendalikan adalah faktor alam, yaitu bencana alam baik musim kemarau dan musim hujan. Dengan adanya pemanasan global yang terjadi menyebabkan perubahan musim tidak dapat diprediksi secara baik dan hal ini mengganggu siklus musim tanaman padi. Pengaruh pemanasan global menimbulkan adanya musim kemarau yang berkepanjangan dan disertai dengan tingkat kekeringan yang tinggi, sehingga hal ini menyebabkan lahan tanaman padi kekeringan dan pada akhirnya tanaman padi banyak yang mati. Untuk mengurangi dan mitigasi dampak musim kemarau terhadap lahan tanaman padi, pemerintah telah melaksanakan program pompanisasi dan pembangunan embung dengan memberikan bantuan mesin-mesin pompa kepada kelompok tani serta bantuan pembangunan pembuatan embung. Namun program ini masih belum efektif untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap pada tanaman padi. Selain musim kemarau, datangnya musim hujan juga memberikan dampak pada tanaman padi. Pengaruh pemanasan global, menyebabkan terjadinya musim hujan dengan intensitas hujan tinggi. Tidak jarang ketika musim hujan tiba terjadi bencana banjir yang menggenangi pemukiman dan perumahan penduduk termasuk juga menggenangi lahan tanaman padi. Akibat dari genangan air dengan waktu yang relative lama, menyebabkaan tanaman padi. Dampak musim hujan ini juga memberikan kontribsi berkurangnya lahan tanaman padi yang dipanen.

Terkait dengan tingkat produksi padi yang dihasilkan lahan pertanian tanaman padi, selain tergantung luas tanaman padi yang dipanen, tingkat kesuburan tanah yang tercermin pada tingkat produktivitas lahan sangat menentukan jumlah prroduksi padi yang dihasilkan. Dibandingkan dengan di Jawa, pada umumnya lahan pertanian tanaman padi di Kalimantan termasuk di Kalimantan Barat relative kurang subur, hal ini terkait jenis tanah di Kalimantan termasuk di Kalimantan Barat sebagian besar merupakan tanah rawa yang memiliki tingkat keasaman relative tinggi. Sehingga tingkat produktivitas lahan pertaanian tanaman padi menjadi lebih rendah. Oleh karena itu untuk meningkat produktivitas lahan pertanian tanaman padi di Kalimantan Barat memerlukan usaha-usaha tambahan yang dilakukan saat tahap pengolahan lahan untuk meengurangi tingkat keasaman tanah agar cocok untuk ditanami padi. Hal ini tentu saja menambah biaya dalam penggarapan lahan pertanian untuk tanaman padi.

Berdasarkan data selama 21 tahun (2000 – 2021) memperlihatkan hasil produksi tanaman padi per hektar paling rendah sebesar 2,51-ton hingga yang tertinggi mencapai angka atau 3,14 ton. Bila memperhatikan angka produktifitas lahan tanaman padi yang ada di Kalimantan Barat, dapatlah

dikatakan bahwa selama 21 tahun program-program intensifikasi pertanian dengan memperkenalkan berbagai teknologi baru serta perbaikan dalam prasarana dan sarana pertanian belum dapat memberikan perubahan yang berarti untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian tanaman padi yang ada. Selama periode tahun 2000 hingga 2020, rata-rata produktifitas padi per hektar sebesar 29,27 kwintal atau hanya 2,93 ton/tahun. Diketahui bahwa peningkatan tingkat produktifitas lahan pertanian tanaman padi selama periode tahun 2000 hingga 2021 rata-rata peningkatan sebesar 0,27 kwintal atau 0,027 ton per tahun atau hanya meningkat sebesar 1,02 persen per tahun. Berbeda dengan produktivitas lahan tanaman padi di Pulau Jawa yang dapat mencapai angka kisaran antara 4-ton hingga 6 ton per hektar untuk satu kali musim panen.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, luas lahan yang dipanen dan tingkat produktifitas lahan tanaman padi akan menentukan total jumlah produksi padi yang dihasilkan. Jika memperhatikan data selama periode tahun 2000 hingga 2020, hasil produksi padi relative tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini dikarenakan pertambahan pada luas lahan tanaman padi yang dipanen relative rendah dan disertai dengan kenaikan produktifitas lahan yang relative kecil. Pada sisi lain, dengan kenaikan tingkat produktifitas lahan yang relative kecil serta dengan luas lahan yang dipanen relative semakin menurun, rata-rata produksi padi di Kalimantan Barat pertahun selama periode tahun 2000 hingga tahun 2021 mencapai angka sebesar 1.153.780 ton. Berikut ini grafik yang menampil luas lahan tanaman padi yang dipanen, produktifitas lahan dan produksi padi selama periode tahun 2000 hingga 2020.

Tabel 1. Proses GKP - GKG - GKGSO - Beras di Kalimantan Barat Periode 2000-2020 (Ton)

Tahun	Produksi Gabah Kering Panen (Ton)	GKG (Ton)	GKG Siap Diolah (Ton)	Produksi Beras (Ton)
2000	903,191	753,081	698,106	446,927
2001	941,630	785,131	727,817	465,948
2002	985,489	821,701	761,717	487,651
2003	1,027,122	856,414	793,896	508,252
2004	1,060,652	884,372	819,813	524,844
2005	1,060,652	884,372	819,813	524,844
2006	1,107,662	923,569	856,148	548,106
2007	1,225,259	1,021,621	947,043	606,297
2008	1,321,443	1,101,819	1,021,386	653,892
2009	1,300,798	1,084,605	1,005,429	643,676
2010	1,343,888	1,120,534	1,038,735	664,998
2011	1,372,989	1,144,798	1,061,228	679,398
2012	1,300,100	1,084,023	1,004,890	643,330
2013	1,441,876	1,202,236	1,114,473	713,486
2014	1,372,695	1,144,553	1,061,001	679,253
2015	1,275,707	1,063,684	986,036	631,260
2016	1,364,524	1,137,740	1,054,685	675,209
2017	1,397,953	1,165,613	1,080,523	691,751
2018	799,715	666,802	618,126	395,724
2019	847,875	706,958	655,350	419,555
2020	778,169	648,837	601,472	385,062

Produksi padi yang dihasilkan untuk dapat dijadikan sebagai beras harus melewati tahapan proses pengolahan yang tentu saja tergantung pada besarnya rendemen yang diperoleh dalam pengolahan padi menjadi beras. Tahapan pengolahan produksi padi menjadi beras diawali dengan hasil produksi padi yang disebut dengan gabah kering panen (GKP) selanjutnya diolah menjadi gabah kering giling (GKG). Pada proses pengolahan dan konversi dari gabah kering panen menjadi gabah kering giling, tingkat konversinya adalah sebesar 83,38 persen. Angka ini memberi arti bahwa apabila gabah kering panen diolah menghasilkan 83,38 persen menjadi gabah kering giling. Selanjutnya gabah kering giling diproses menjadi gabah kering giling untuk siap diolah menghasilkan angka konversi sebesar 92,70 persen.

Dengan kata lain, gabah kering giling akan menghasilkan 92,70 persen gabah kering giling untuk siap diolah. Pada tahap selanjutnya gabah kering giling yang telah siap diolah untuk diolah menjadi beras akan menghasilkan angka konversi 64,02 persen. Angka ini memberikan arti bahwa jika gabah kering giling yang siap diolah diproses hanya menghasilkan 64,02 persen menjadi beras. Pada table 1 disajikan data pemrroses mulai dari gabah kering panen hingga terakhir menjadi beras, perubahan ini menunjukan tingkat rendemen untuk produksi padi hingga menjadi beras. Hasil olahan data mendapatkan bahwa besarnya rendemen beras produksi padi di Kalimantan Barat adalah sebesar 49,48 persen. Tingkat rendemen produksi padi ini relative lebih rendah dibandingkan rendemen produksi padi di Pulau Jawa mencapai 65 persen.

Untuk menentukan arah kebijakan yang akan direkomendasikan, maka perlu dilakukan simulasi. Simulasi dilakukan dengan membuat beberapa skenario untuk menganalisis pengaruh perubahan satu atau beberapa variabel yang dimasukan dalam model system dinamik ini terhadap ketersediaan beras untuk kebutuhan konsumsi penduduk Kalimantan Barat. Analisis perilaku ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu analisis tanpa skenario atau dikenal dengan analisis business as usual (BAU) dan analisis dilakukan dengan skenario. Analisis dengan skenario dibagi ke dalam ekstrim, moderat dan lebi moderat. Seluruh variabel disimulasikan.

Terkait dengan multi variabel untuk dua variabel, hasil skenario yang dilakukan menemukan bahwa kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan bila angka konstantanya secara simultan dinaikkan sebesar 1 persen, memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dibandingkan dengan kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan. Secara simultan kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan sebesar 1 persen, menyebabkan defisit ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat terjadi mulai tahun 2011.

Sementara itu dengan kenaikan tingkat konstanta yang sama sebesar 1 persen, secara simultan kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan menyebabkan defisit ketersediaan stock beras terjadi mulai tahun 2017, serta untuk variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan variabel tingkat dampak serangan hama dan penyakit secara simultan menyebabkan defisit ketersediaan stock beras terjadi mulai tahun 2018. Dengan kata lain, rentang waktu munculnya defisit ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat lebih cepat terjadinya jika secara simultan terjadi kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan dibandingkan dengan jika terjadi kenaikan secara simultan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak banjir dan kekeringan, serta dibandingkan dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit.

Analisis sensitivitas multi variabel yang secara simultan memberikan dampak pada ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat. Terdapat 2 kombinasi variabel yang secara simultan memiliki tingkat sensitivitas relative sama yaitu pertama, kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan serta tingkat dampak serangan hama dan penyakit. Kedua adalah kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan serta tingkat dampak bencana baanjir dan kekeringan. Kedua kombinasi variabel tingkat sensitivitasnya relative tinggi dibandingkan dengan kombinasi 2 variabel lainnya. Kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan serta tingkat dampak serangan hama dan penyakit sebagai kombinasi variabel simultan pertama sebesar 1 persen telah menyebabkan defisit ketersediaan stock beras terjadi dimulai pada tahun 2010.

Hal yang sama terjadi pada kombinasi variabel simultan kedua, kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan juga menyebabkan defisit beras terjadi dimulai pada tahun 2010. Untuk kombinasi variabel tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan meemiliki tingkat sensitivitas yang sedang. Jika terjadi kenaikan angka konstanta secara simultan 1 persen, menyebabkan defisit ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat terjadi sejak tahun 2016.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil simulasi tanpa skenario mendapatkan fakta pada saat sekarang ini ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat mengalami surplus selama periode waktu analisis bahkan untuk beberapa dekace ke depan. Tetapi ketika terjadi perubahan pada variabel jumlah penduduk, tingkat alih fungsi lahan, serangan hama/penyakit dan bencana alam, maka akan terjadi perubahan tingkat kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Laju pertumbuhan penduduk merupakan variabel yang paling sensitive dibandingkan dengan 3 variabel lainnya.

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, maka arah formulasi kebijakan dalam mempertahankan surplus dan kemandirian beras berkelanjutan dan ketahanan nasional di Kalimantan Barat, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalikan tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi, tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan serta tingkat dampak serangan hama dan penyakit paling tidak untuk tetap terkendali seperti angka yang terjadi sekarang ini. Karena dengan tingkat angka yang terjadi sekarang ini, simulasi yang telah dilakukan menghasilkan Kalimantan Barat dapat mempertahankan surplus beras sekaligus mencapai kemandirian pangan dalam 5 dekade ke depan.

Secara spesifik, arah formulasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang sekarang ini pada angka 2,04 persen pertahun untuk mengurangi pada tingkat yang lebih rendah lagi. Pengendalian tingkat laju pertumbuhan penduduk ini harus menjadi kebijakan yang sangat prioritas dalam mempertahankan surplus dan kemandirian beras, karena kenaikan tingkat laju petumbuhan penduduk ini sebesar 1 persen, telah mengakibatkan defisit stock beras di Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2020. Untuk itu beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

- Terus melanjutkan program keluarga berencana sebagaimana yang sudah berjalan sekarang ini yang dipadukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin.
- Terus mengembangkan dan menambah program kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) disertai dengan peningkatan edukasi kelompok untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta ikatan solidaritas social yang tinggi.

2. Mengendalikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah paling tidak untuk tetap pada angka 3,63 persen pertahun seperti sekarang ini. Oleh karena itu beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam pengendalian dan penurunan tingkat laju alih fungsi lahan adalah:
   a) Membuat aturan yang ketat dan sanksi yang tegas baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terhadap upaya-upaya kegiatan untuk melakuan alih fungsi lahan tanaman padi sawah menjadi kegiatan non tanaman pangan.
   b) Melakukan program sertifikasi lahan tanaman padi sawah untuk menjamin legalitas kepastian kepemilikan bagi petani dan sekaligus menjadi sumber data akurat bagi pemerintah atas ketersediaan lahan tanaman padi sawah. Hal ini akan mempermudah dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya padi.

3. Meskipun dampak serangan hama dan penyakit serta bencana banjir dan kekeringan tidak mempengaruhi ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat, tetapi kedua variabel ini perlu untuk dikendalikan Beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian dampak serangan hama dan penyakir serta dampak bencana banjir dan kekeringan adalah sebagai berikut:
   - Untuk pengendalian dampak serangan hama dan penyakit:
     a) intensifikasi kegiatan penyemprotan tanaman padi dengan obat-obat pemberantasan hama dan penyakit pestisida dan insektisida. Namun mengingat tidak semua petani mampu membeli obat-obatan ini, diperlukan langkah memberikan subsidi untuk obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit ini agar harganya bisa dijangkau oleh petani.
     b) Mendorong petani menggunakan cara penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu dalam bentuk program pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dengan didampingi para penyuluh pertanian lapangan (PPL).
   - Untuk pengendalian dampak bencana banjir dan kekeringan:
     a) pemerintah harus membangun tanggul-tanggul penahan air dan pembuatan saluran untuk pembuangan air sekaligus bisa berfungsi sebagai saluran irigasi.
     b) pemerintah perlu untuk terus melanjutkan program pompanisasi, yaitu program bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan dalam bentuk natura (mesin pompa) untuk mengatasi kekurangan pasokan air pada tanman padi.
     c) pemerintah untuk terus melanjutkan program pembangun embung yang berfungsi sebagai penampung air untuk dijadikan sebagai cadangan air dalam mensupply air bagi tanaman padi jika terjadi kekeringan.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. (1993). Ekonomi Perberasan, Jagung, dan Minyak Sawit di Indonesia. PT. Dharma Karsa Utama. Jakarta

Amang, B. (1995). Kebijakan Pangan Nasional. PT. Dharma Karsa Utama. Jakarta

Agung, G.D,. (2020). Pemodelan Sistem Dinamis Produksi Tempe "Sumber Mas" Di Kabupaten Jember. Skripsi. Program Studi Manajemen Agroindustri Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember.

Buntuan, I.F. (2010). Simulasi Model Dinamik Pada Sistem Deteksi Dini Untuk Manajemen Krisis Pangan. Skripsi. Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Daniel, M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.

Farida, dkk. 2010 .Pengantar Pangan dan Gizi. Penebar Swadaya. Jakarta

Febriaty, H. 2016. Analisis Perkembangan Impor Beras Di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 16 No. 2 Tahun 2016. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Forrester, J.W. (1994), System dynamics, systems thinking, and soft OR. Syst. Dyn. Rev., 10: 245-256. https://doi.org/10.1002/sdr.4260100211

Godam. (2007). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi / Pengeluaran Rumah Tangga – Pendidikan Ekonomi Dasar, http://organisasi.org/faktor yang mempengaruhi-tingkat-konsumsi-pengeluaran-rumah-tangga pendidikan-ekonomi-dasar.

Hartisari. (2007). Sistem Dinamik: Konsep dan Pemodelan untuk Industri dan Lingkungan. SEAMEO BIOTROP. Bogor: Indonesia.

https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/. Di akses 16 Mei 2021.

https://kalbar.antaranews.com/berita/302229/konsumsi-beras-penduduk-kalbar. Di Akses 16 Mei 2020.

https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/16380551/ di akses 16 Mei 2021.

Irawan. B. (2003). Konversi lahan sawah di Jawa dan dampaknya terhadap produksi padi (Land conversion in Java and its impact on rice production). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, R.I., Bogor

Muhammadi, Amminullah, E., & Soesilo, B. (2001). Analisis sistem dinamis: lingkungan hidup, sosial, ekonomi, manajemen. Jakarta: UMJ

Pranolo, Tito, (2000). "Peran Bulog Sebagai Lembaga Distribusi Cadangan Pangan Nasional", Round Table, Harga Gabah, Deptan, Jakarta.

Purba, Kristina, M.P. (2019). Analisis Permintaan Dan Penawaran Beras Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.

Rahim, A., dan Dwi Hastuti, D. R., (2008). Pengantar, Teori dan Kasus Ekonomika Pertanian. Penebar Swadaya, Jakarta

Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika, B. Sayaka, and S. Bahri. (2006). Financial and economic profitability of rice farming across production environments in Indonesia. Proceeding of International Rice Congress on Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity, at National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, India, October 2006. International Rice Research Institute, Los Banos, the Philippine

Sany Lim. (2010). Analisis Produksi Beras Indonesia. Journal.binus.ac.id/index.php/article.

Soekartawi. (1995). Pembangunan Pertanian. Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekartawi. (2002). Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, B (2019). Kuliah Umum Systems Thinking dan System Dynamics. Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Suhardjo, dkk. (1986). Pangan Gizi dan Pertanian. Universitas Indonesian (UI – Press). Jakarta

Sumodiningrat G. (2001). Menuju Swasembada Pangan Revolusi Hijau. Jakarta: RBI.

Suwarto. (2007). Pengaruh kelembagaan lahan dan tenaga kerja pada usahatani terhadap konsumsi pangan dan non-pangan petani dikabupaten gunung Dikutip:http://agriculture.upnyk.ac.id/index.php?option=com_content&vw= article&id=106:

Sterman, John D. (2000). Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World. New York: Irwin McGraw-Hill

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PANJANG JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PERTAMBAHAN JUMLAH KENDARAAN

Windhu Putra[*]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze; The relationship between the significance of Population and the Number of Vehicles, the relationship between the significance of Road Length and the Number of Vehicles, the relationship between the Significance of Population and Economic Growth, the relationship between the Significance of Length of Road and Economic Growth, and the Significance of Relationship between Number of Population and Length of Road on Growth through the Increase in the Number of Vehicles, through the method of analysis data is done by using path analysis (path analysis). The results of this study indicate; (1) There is a significant and positive relationship between the number of residents and the number of vehicles, (2) There is a negative and insignificant relationship between the length of the road and the number of vehicles, (3) There is a significant and positive relationship between the number of residents and the real income of the community, (4) There is a significant relationship between the length of the road and the real income of the community. (5) There is a significant relationship between the increase in the number of vehicles and the real income of the community.

Keywords*: length of road, increase in vehicles, economic growth..*

1. PENDAHULUAN

Di era yang serba maju ini, keberadaan transportasi menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting dalam menjalani kehidupan. Mobilitas yang tinggi dan kemudahan dalam berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain atau dari wilayah satu ke wilayah yang lain tidak akan sepraktis dan semudah sekarang jika tidak didukung dengan adanya transportasi. Pada dasarnya, transportasi merupakan beberapa macam alat yang dipakai untuk mengangkut makhluk hidup atau benda benda tertentu dari satu tempat ke tempat tujuan yang lainnya. Pengertian transportasi lainnya adalah proses memindahkan makhluk hidup baik itu manusia, hewan, ataupun barang dari tempat asalnya ke tempat yang menjadi tujuannya menggunakan sebuah alat yang digerakkan dengan makhluk hidup lainnya atau dengan mesin (Ribeiro et al., 2007).

Sebagai suatu bentuk kemajuan di bidang teknologi, transportasi juga mempunyai manfaat. Manfaat transportasi ini pada dasarnya dapat dibagi, yaitu : (1) Manfaat di bidang ekonomi. Transportasi dalam bidang ekonomi menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan untuk memudahkan dalam memindahkan makhluk hidup baik itu manusia ataupun hewan dari suatu tempat ke tempat tujannya guna menjalankan sebuah transaksi yaitu penyedia jasa angkut (Bull, 2004) (2) Manfaat di

[*] Email: windhu.putra@ekonomi.untan.ac.id

bidang wilayah. Dalam bidang wilayah, transportasi memberikan kemudahan dalam pemenuhan berbagai macam kebutuhan, khususnya bagi daerah daerah yang tertinggal dan dalam tahap pembangunan (Protsiv & Sheard, 2020) (3) Manfaat transportasi di bidang sosial, adalah dapat dijadikan sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat, memperpendek jarak yang terlihat amat sangat jauh dari suatu daerah ke daerah lainnya, menyediakan dan membuka peluang bisnis jasa angkut dan perjalanan, serta menjadi sebuah media bertukar informasi (Fouracre, 2001).

Transportasi merupakan sektor yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya. Permasalahan transportasi di Kalimantan Barat adalah kurangnya jaringan jalan, kurangnya kapasitas ruas jalan serta ketiadaan angkutan umum yang memiliki pelayanan yang baik(PUPR, 2003). Jaringan prasarana transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan, dimana jaringan prasarana terdiri dari simpul dan ruang lalulintas. Penyediaan dan pengembangan transportasi pada hakekatnya harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan Trigatra,yaitu gatra geografi, sumber daya alam dan kependudukan (PUPR, 2003). Adanya pertambahan penduduk dan terjadinya pergerakan penduduk dalam satu wilayah akan menuntut suatu usaha peningkatan angkutan Kota. Pertambahan jumlah penduduk Kota berarti meningkatnya aktifitas penduduk. Hal ini dicerminkan oleh meningkatnya luas ruang kegiatan perkotaan dan juga meningkatnya interaksi antara penduduk diantara ruang-ruang tersebut (Christiawan, 2019).

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan suatu perencanaan yang mempertimbangkan antara lain; Aspek demografi Penduduk, Aspek jenis kendaraan yang beroperasi, dan Aspek kualitas dan panjang jalan yang dibangun. Untuk itu dibutuhkan kajian yang mengarah ke peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui keseimbangan rasio ketiga aspek diatas. Dalam latar belakang diatas kajian ini ingin melihat; (1) Apakah terdapat hubungan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kendaraan. (2) Apakah terdapat hubungan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan ekonomi, (3) Apakah terdapat hubungan Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan, (4) Apakah terdapat hubungan Panjang Jalan dengan Pertumbuhan ekonomi, (5) Apakah terdapat hubungan Jumlah Penduduk dan Panjang Jalan terhadap Pertumbuhan melalui Pertambahan Jumlah Kendaraan.

Dari beberapa hasil studi empiris menunjukkan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta semakin meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, menuntut diperlukannya sarana transportasi yang mampu mendukung mobilitas penduduk perkotaan dalam beraktifitas sehari-harinya (Amin et al., 2006). Pengaruh jumlah penduduk mempengaruhi permintaan kendaraan bermotor kota surabaya juga dilakukan oleh (Prayitno, n.d.) menunjukkan hubungan yang positf dan siginifikan. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalulintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu, dengan indikatornya yaitu panjang jalan, lebar jalan, kondisi permukaan jalan, kondisi sarana atau prasarana jalan (lampu lalu lintas dan rambulalu lintas). Berdasarkan hasil penelitian ini kapasitas jalan berpengaruh positif terhadap kemacetan karena akibat dari pertambahan jumlah kendaraan (Said et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Karimun tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dengan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 19.0. Hasil dari penelitian ini adalah Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Hasil Koefisien Determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0.985 (Waidah & Pernanda, 2020).

Penelitian ini bertujan untuk melihat pengaruh panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Variabel utama yang digunakan adalah PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tiap sector dan panjang jalan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panjang jalan di Kota Palopo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kota Palopo dengan nilai r-square sebesar 84,8%. Sedangkan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak begitu besar, yaitu hanya 33,7% (Marsus et al., 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepadatan atau jumlah kendaraan bermotor di kabupaten dan kota di Jawa Timur terhadap PDRB. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan jumlah kendaraan bermotor sedan, jeep, dan sepeda motor di kabupaten dan kota di Jawa Timur berpengaruh terhadap PDRB (Priyambodo, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas jenis-jenis kendaraan (sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Hasil uji statistik secara parsial, sepeda motor dan mobil penumpang berpengaruh positif dan signifikan, mobil barang positif namun tidak signifikan, mobil bis berpengaruh negatif dan signifikan (Natalia, 2015).

2. METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah masalah Transportasi, khususnya yang berkaitan Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pertambahan Jumlah Kendaraan. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur (path analysis) karena di antara variabel independent dengan variabel dependent terdapat mediasi yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini terdiri tiga variabel. Yakni variabel bebas (independent) jumlah penduduk; yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Panjang Jalan; yang diproksikan dalam jumah anggaran infrastruktur yang dialokasi untuk pembangunan jalan. jumlah kendaraan (mediasi) adalah Sejumlah Jenis angkutan untuk orang maupun barang yang digerakkan oleh mesin mekanik. Sedangkan variabel terikat (dependent) adalah Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) harga konstan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel yaitu dengan Populasi diwakili dengan data time series dari tahun 2019-2021, dengan Sampel data cross section pada seluruh Kabupaen/Kota yang ada di Kalimantan Barat, yaitu terdiri dari ; Kab. Sambas, Kab. Mempawah, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, Kab. Sisntang, kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkawayang, Kab. Landak, Kab. Sekadau, kab. Melawi, Kab. Kayong Utara, kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Path analysis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen). Koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu dengan bantuan software SPSS 16, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikansi Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig.T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat

signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahapan dalam melakukan analisis menggunakan analisis jalur (path analysis) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas setiap nilai P menggambarkan jalur dan koefisien jalur antar variabel. Dari diagram jalur di atas pula didapatkan persamaan strukturalnya yaitu terdapat dua kali pengujian regresi sebagai berikut:

Pengaruh langsung : Y = a + B1X1 + B2X2
Pengaruh tidak langsung : Z = a + B1X1 + B2X2 + B3Y
Keterangan:
Y : Variabel intervening yaitu Jumlah Kendaraan
Z : Variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi
B1,2,3 : Koefisien regresi
a : Koefisien konstanta
X1 : Variabel independen (variabel bebas) Jumlah Penduduk
X2 : Variabel independen (variabel bebas) Panjang Jalan

Pemeriksaan terhadap asumsi yang mendasari Asumsi yang mendasari path adalah sebagai berikut: (1) Hubungan antar variabel bersifat linier dan adaptif (mudah menyesuaikan diri) (2) Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan yaitu hanya system aliran kausal. Sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal tidak dapat dilakukan analisi jalur. (3) Variabel endogen setidaknya dalam ukuran interval. (4) Observed variabel diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan reliabel). (5) Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar berdasarkan teori-toeri dan konsep-konsep yang relevan.

Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis digunakan Uji T (Test T) melalui dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji statistik ini digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat secara individual dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Dalam hal ini adapun kriterianya yaitu apabila thitung > ttabel maka ada pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk signifikansi, jika t < 0,05 maka adanya pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian sebaliknya. Uji statistik F d pengaruh secara bersama- sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan Fhitung > Ftabel maka ada pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk signifikansi, jika F < 5% maka adanya pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian sebaliknya. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) digunakan untuk mengukur kekuatan dari persamaan regresi. Kisaran nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Bila model regresi diaplikasikan dan diestimasi dengan baik, makin tinggi nila R^2, makin besar kekuatan dari persamaan regresi, dengan demikian diprediksi dari variabel kriterion semakin baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Persamaan Pengaruh Langsung model pertama (MODEL I) sebagai berikut:

Model I $Y = -3.132 + 0{,}058X1 - 2{,}850E\text{-}8\ X2 + e1$

Maksud dari persamaan diatas :

(1) a= -3.132 mengandung pengertian bahwa perpotongan garis regresi pada sumbu vertikal variabel terikat jumlah kendaraan bermotor (Y) terletak pada -3.132 Nilai ini tidak tergantung pada nilai variabel bebas Jumlah Penduduk (X1), Anggaran Infrastruktur Jalan (X2). (2) b1=0,58 nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila jumlah penduduk (X1) naik sebesar 1 jiwa , maka akan diikuti kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 0,058 unit dengan asumsi bahwa variabel anggaran infrastruktur jalan dalam keadaan konstan. (3) b2= -2,850E-8 nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila anggaran infrastruktur jalan (X2) naik sebesar Rp.1, maka akan diikuti penurunan jumlah kendaraan bermotor sebesar -2,850E-8 unit dengan asumsi bahwa variabel jumlah penduduk dalam keadaan konstan.

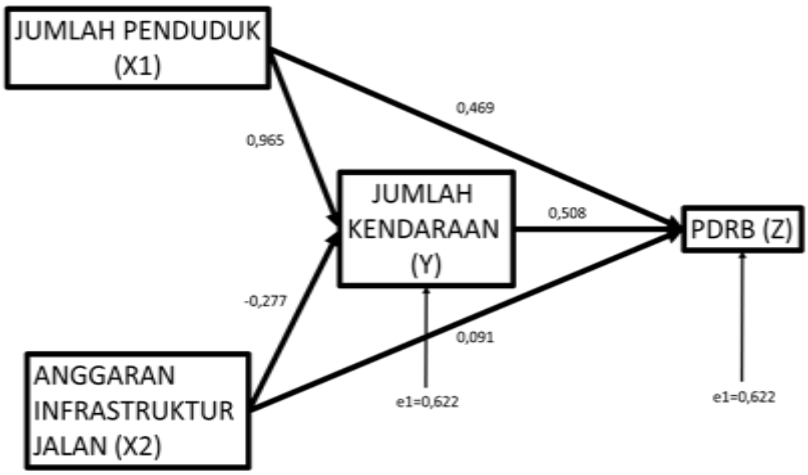

Dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari kedua variabel pada model pertama tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Pada variabel X1(Jumlah Penduduk) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil daripada α sebesar 0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y(Jumlah Kendaraan).

Nilai error:

Error I (e1) = $\sqrt{1 - R2}$
= $\sqrt{1 - 0{,}613}$
= $\sqrt{0{,}387}$
= 0,622

Keterangan:

e : Residual/error
R2 : Koefisien determinasi/R Square

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Anggaran Jalan berpengaruh sebesar 0,613 atau 61,3% terhadap Jumlah Kendaraan. Sedangkan sisanya sebesar 0,387 atau 38,7% sisanya, merupakan pengaruh variabel lain diluar variabel variabel Jumlah Penduduk dan Anggaran Jalan tidak termasuk dalam model ini. Persamaan Pengaruh Langsung model kedua (MODEL II) sebagai berikut:

Model 2 Z= -2082458,490 + 17982.159$X1$ + 0,06$X2$ + 325712.841Y + $e2$

Maksud dari persamaan diatas : (1) a= -2082458,50 mengandung pengertian bahwa perpotongan garis regresi pada sumbu vertikal variabel terikat jumlah kendaraan bermotor (Y) terletak pada -2082458,50. Nilai ini tidak tergantung pada nilai variabel bebas Jumlah Penduduk (X1),

Anggaran Infrastruktur Jalan (X2). (2) b1= 17982.159 nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila jumlah penduduk (X1) naik sebesar 1 jiwa , maka akan diikuti kenaikan jumlah Pendapatan Riil masyarakat sebesar Rp. 17.982.159,00 dengan asumsi bahwa variabel anggaran infrastruktur jalan dan Jumlah Kendaraan dalam keadaan konstan. (3) b2= 0,06 nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila anggaran infrastruktur jalan (X2) naik sebesar Rp. 1, maka akan diikuti kenaikan pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 60 dengan asumsi bahwa variabel jumlah penduduk dan jumlah kendaraan dalam keadaan konstan. (4) b3= 325712.841 nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila jumlah kendaraan (Y) naik sebesar 1 unit, maka akan diikuti kenaikan pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 325.712.841,00 dengan asumsi bahwa variabel jumlah penduduk dan Anggaran infrastruktur dalam keadaan konstan.

Dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari ketiga variabel pada model kedua tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Pada variabel X1 yaitu Jumlah Penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang mana lebih kecil daripada α sebesar 0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Z yaitu PDRB. Nilai signifikansi pada variabel Anggaran Jalan atau X2 sebesar 0,126 lebih besar daripada α sebesar 0,05 sehingga variabel Anggaran Jalan tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap Z yaitu PDRB. Terakhir, variabel Y yaitu Jumlah Kendaraan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil daripada α sebesar 0,05, sehingga variabel Jumlah Kendaraan berpengaruh signifikan terhadap Z yaitu PDRB.

Nilai error:

Error II (e2) $= \sqrt{1 - R2}$

$= \sqrt{1 - 0{,}951}$

$= \sqrt{0{,}049}$

$= 0{,}221$

Keterangan:

e : Residual/error

R2 : Koefisien determinasi/R Square

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Anggaran Jalan serta Jumlah Kendaraan berpengaruh sebesar 0,951 atau 95,1% terhadap PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 0,49 atau 4,9%, merupakan pengaruh variabel lain diluar variabel Jumlah Penduduk dan Anggaran Jalan serta Jumlah Kendaraan yang tidak termasuk dalam model ini.

Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Penduduk

$(X1 \rightarrow Y \rightarrow Z) = P1 \times P3$

$= 0{,}965 \times 0{,}508$

$= 0{,}49022$

Pengaruh Tidak Langsung Anggaran Infrastruktur Jalan

$(X2 \rightarrow Y \rightarrow Z) = P2 \times P3$

$= -0{,}277 \times 0{,}508$

$= -0{,}140716$

Total Pengaruh X1 = Pengaruh Langsung X2→Z + Pengaruh Tidak Langsung (X1→Y→Z)

$= 0{,}965 + 0{,}49022$

$= 1{,}4552$

Total Pengaruh X1 = Pengaruh Langsung X2→Z + Pengaruh Tidak Langsung (X2→Y→Z)

$= -0{,}277 + -0{,}140716$

$= -0{,}417716$

3.2. Pembahasan

3.2.1. Hubungan Signifikansi Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Kendaraan.

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap penambahan jumlah kendaraan. Apabila pertambahan penduduk naik 1 jiwa jumlah kendaraan akan meningkat sebesar 0,058 unit (apabila terjadi kenaikkan penduduk 100 jiwa akan meningkatkan jumlah kendaraan sebanyak 6 unit). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Amin et al., 2006) dan (Prayitno, n.d.). Data Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, penduduk Kalimantan Barat (Kalbar) berjumlah 5,46 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut ada 3,8 juta jiwa (69,56%) merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun) dari total penduduk. Besarnya kelompok usia produktif dibanding dengan usia tidak produktif menunjukkan Kalbar masih berada di era bonus demografi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut, jika dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kemampuannya dapat mempercepat membangunan di provinsi tersebut. Terdapat pula 1,6 juta jiwa (30,4%) penduduk Kalbar yang masuk kategori usia tidak produktif. Rinciannya, ada 1,4 juta jiwa (25,69%) penduduk di provinsi tersebut yang masuk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun). Ada pula 259,53 ribu jiwa (4,75%) penduduk Kalbar yang merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Penduduk kelompok usia 5-19 tahun mendominasi jumlah populasi di Kalbar, yakni mencapai 1,52 juta jiwa atau lebih dari seperempat dari penduduk di provinsi tersebut. Sementara penduduk usia lanjut kelompok usia 70 tahun ke atas ada 146,41 ribu jiwa.

3.2.2. Hubungan Signifikansi Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan.

Nilai signifikansi Panjang jalan yang di proxikan pada variabel Anggaran Jalan (X2) sebesar 0,081 lebih besar daripada α sebesar 0,05 sehingga variabel panjang jalan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kendaraan (Y). Hal ini beretolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Said et al., 2019). Bagi beberapa masyarakat membeli kendaraan adalah prioritas. Selain rumah, kendaraan menjadi salah satu kebutuhan prioritas dalam keluarga. Pasalnya, kendaraan akan memudahkan mobilitas sehari-hari. Mulai dari mengantar anak ke sekolah, berangkat ke kantor, hingga berlibur bersama keluarga ke luar kota. Itulah mengapa, banyak keluarga muda yang berencana membeli kendaraan baru untuk pertama kali.

3.2.3. Hubungan Signifikansi Jumlah Penduduk terhadap PDRB

Dalam persamaan menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk (XI) naik sebesar 1 jiwa, maka akan diikuti kenaikan jumlah Pendapatan Riil masyarakat sebesar Rp. 17.982.159,00 dengan asumsi bahwa variabel anggaran infrastruktur jalan dan Jumlah Kendaraan dalam keadaan konstan. Hal ini sejalan denga penelitian yang dilakukan oleh (Waidah & Pernanda, 2020). Keterlibatan penduduk dalam pembangunan perekonomian menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting lainnya dalam pembangunan, karena selain sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi namun berikutnya juga dapat digunakan sebagai ukuran dalam mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang pesat pula. Banyak teori dan kerangka empiris telah membuktikan bahwa tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output (produksi), namun juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya dilakukan upaya yang kuat untuk meningkatkan pemertaan pendapatan penduduk antara lain dengan penganeragaman peluang

kerja yang diciptakan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini dimaksudkan agar penduduk mempunyai pilihan dalam upaya untuk memperoleh pekerjaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

3.2.4. Hubungan Signifikansi Panjang Jalan terhadap PDRB

Pembangunan jalan telah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha usaha baru seperti usaha industri kecil, jasa angkutan, keramba ikan, minyak eceran dan material bahan bangunan. dampak yang terjadi ini sebagai akibat akses jalan yang mudah dan murah mendorong masyarakat melakukan usaha-usaha ekonomi dengan satu tujuan yaitu meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, akses jalan juga mendorong penyebaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga menyebabkan keterlibatan Masyarakat semakin meningkat. Dampak selanjutnya nya perluasan usaha sebagai akibat akses jalan adalah peningkatan pendapatan riil masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, selain menciptakan manfaat ekonomi juga dapat menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar area pembangunan jalan. seperti dampak pembangunan jalan terhadap efisiensi waktu dan biaya.

Dampak ini dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat akibat adanya akses jalan yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan dengan wilayah Pinggiran. melalui pembangunan jalan dan jembatan membebaskan masyarakat dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Melalui akses jalan yang mudah, murah dan lancar, maka pergi untuk untuk konsumsi maupun, bahkan juga. dampak sosial Ini akhirnya berdampak tidak langsung ke manfaat ekonomi. selain kemudahan akses juga terjadi substitusi atas alat transportasi yang tersedia melayani masyarakat di wilayah ini, dimana Dengan akses jalan mendorong masyarakat maupun para pendatang menyediakan jasa transportasi yang cukup sehingga masyarakat bebas memilih alat angkutan yang mereka mau dan ikut tumpangi.

Melalui akses jalan darat yang menghubungkan pusat pelayanan Dengan wilayah Pinggiran telah memberikan Efek berantai yang positif dan signifikan bagi masyarakat, dimana melalui pembangunan jalan telah mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi baik perluasan usaha di sektor pertanian maupun tumbuh dan berkembang usaha baru di luar sektor pertanian. Dampak ini ini memberi variasi pada sumber pendapatan bagi masyarakat. dan hal ini tercermin pada pemanfaatan lembaga keuangan oleh masyarakat untuk menabung. kemudahan dalam mengakses perbankan ini secara tidak langsung pula berefek positif terhadap ketersediaan tenaga kerja rumah tangga untuk memperoleh tambahan pendapatan dalam rumah tangga.

3.2.5. Hubungan Signifikansi Jumlah Penduduk Dan Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Melalui Pertambahan Jumlah Kendaraan.

Dilihat dari hasil uji signifikansi menunjukkan angka probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil (<) dari alpha 0,05, yang berati bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan significan terhadap pendapatan riil masyarakat. Dengan katalain parameter jumlah kendaraan menunjukkan angka 325712.841, nilai ini mengandung pengertian bahwa apabila jumlah kendaraan (Y) naik sebesar 1 unit, maka akan diikuti kenaikan pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 325.712.841,00 dengan asumsi bahwa variabel jumlah penduduk dan Anggaran infrastruktur dalam keadaan konstan. Hal ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh (Priyambodo, 2018) dan (Natalia, 2015). Dari data empiris dapat ditunjukkan Sepeda Motor sangat dominan dalam menunjang kegiatan masyarakat diikuti mobil penumpang dan mobil beban dan Bus. Sepeda motor saat ini tidak hanya sebagai alat transportasi semata namun juga sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi

mereka, hal ini pula yang membuat penjualan sepeda motor di Kalbar mendominasi total penjualan sepeda motor. Hal ini didukung model sepeda motor tipe skutik yang lebih praktis yang sesuai dengan selera masyarakat. Jika dilihat dari seberapa penting peran motor untuk melakukan kegiatan, maka diketahui bahwa masyarakat memberi penilaian tingkat kepentingan yang tinggi terhadap peran motor untuk kegiatan-kegiatan pokok seperti bekerja , bersekolah, pelayanan kesehatan, berbelanja, pembiayaan (bank/asuransi), dan kunjungan ke rumah teman atau saudara. Terdapat lebih dari 70% responden menganggap penting penggunaan sepeda motor untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk kegiatan seperti olahraga dan hobi, masyarakat menganggap peran sepeda motor tidak terlalu penting. Untuk kegiatan rekreasi, sebagian responden membutuhkan sepeda motor, sementara sebagiannya lagi mengaku tidak membutuhkan.

4. SIMPULAN

Terdapat hubungan yang signifikansi dan positif antara Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kendaraan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui; apabila jumlah penduduk (XI) naik sebesar 1 jiwa , maka akan diikuti kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 0,058 unit dengan asumsi bahwa variabel anggaran infrastruktur jalan dalam keadaan konstan. Terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikansi Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan.

Terdapat hubungan yang signifikansi dan positif antara Jumlah Penduduk terhadap pendapatan riil masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui; apabila jumlah penduduk (XI) naik sebesar 1 jiwa, maka akan diikuti kenaikan jumlah Pendapatan Riil masyarakat sebesar Rp. 17.982.159,00 dengan asumsi bahwa variabel anggaran infrastruktur jalan dan Jumlah Kendaraan dalam keadaan konstan. Terdapat hubungan yang tidak signifikansi Panjang Jalan terhadap pendapat riil masyarakat.

Terdapat hubungan yang signifikansi Pertambahan Jumlah Kendaraan terhadap pendapatan riil masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui; apabila jumlah kendaraan (Y) naik sebesar 1 unit, maka akan diikuti kenaikan pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 325.712.841,00 dengan asumsi bahwa variabel jumlah penduduk dan Anggaran infrastruktur dalam keadaan konstan. Berkaitan dengan hasil kesimpulan diatas direkomendasikan; Untuk terus menjaga kestabilan rasio pertambahan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan secara seimbang sehingga petumbuhan pendapatan riil masyarakat terus meningkat. Oleh karena pertambahan jumlah penduduk sangat berpengaruh positif terhadap pertambahan jumlah kendaraan dan pertambahan pendapatan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. C., Hamidi, W., & Ekwarso, H. (2006). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota PekanbarU. *Faculty of Economics, Riau University*, 1–13.

Bull, A. (2004). Traffic Congestion - The Problem and How to Deal with it? In *United nations: Economic Commission for latin America and the Caribbean, Deutsche gesellschaft für Technische Zusammenarbelt (GTZ) GmbH*. www.cepal.org/es/suscripciones

Christiawan, P. I. (2019). Orientasi Baru Revitalisasi Angkutan Umum Perkotaan. *Warta Penelitian Perhubungan*, *26*(10), 589. https://doi.org/10.25104/warlit.v26i10.940

Fouracre, P. (2001). *Social benefits of rural transport*. 1–10.

https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/rural_transport/knowledge_base/English/Module 5/5_1a Social Benefits.pdf

Marsus, B., Indriani, N. K., Darmawan, V., & Fisu, A. A. (2018). *Pengaruh panjang infrastruktur jalan terhadap pdrb dan pertumbuhan ekonomi kota palopo*. *2016*.

Natalia, R. (2015). Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Barat. *Ekp*, *13*(3), 1576–1580.

Prayitno, B. (n.d.). *Analisa Pengaruh Faktor Pendapatan Perkapita Harga Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Penduduk Mempengaruhi Permintaan Kendaraan Bermotor Kota Surabaya*.

Priyambodo, P. (2018). Analisis Korelasi Jumlah Kendaraan dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. *Warta Penelitian Perhubungan*, *30*(1), 59. https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.634

Protsiv, S., & Sheard, N. (2020). Transport Infrastructure and Regional Welfare: The Benefits of Trade and Passenger Travel. *Unpublished Manuscript*, *May*. https://www.researchgate.net/profile/Nicholas-Sheard/publication/335689819_Transport_Infrastructure_and_Regional_Welfare_The_Benefits_of_Trade_and_Passenger_Travel/links/5ed49d524585152945279a1a/Transport-Infrastructure-and-Regional-Welfare-The-Benefits-o

PUPR. (2003). *LAPORAN AKHIR (Studi Kebutuhan Jaringan Jalan di Indonesia Lima Tahun Kedepan Dikaitkan dengan Otonomi Daedah)* (Vol. 48, Issue 9).

Ribeiro, S., Kobayashi, S., Beuthe, M., Gasca, J., Greene, D., Lee, D., Muromachi, Y., Newton, P., Plotkin, S., Sperling, D., Wit, R., & Zhou. (2007). Transportation and its Infrastructure. *Institute of Transportation Studies, UC Davis, Institute of Transportation Studies, Working Paper Series*.

Said, L. B., H, S. M., & Sriwati. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. *Fly Over*, *3*(1), 79–86.

Waidah, D. F., & Pernanda, O. (2020). Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap PDRB Per Kapita di Kabupaten Karimun Tahun 2013-2017. *Pelita Kota*, *1*(1), 13–25.

BONUS DEMOGRAFI DAN CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN SANGGAU DAN KOTA PONTIANAK

Meiran Panggabean*
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the relationship between the demographic devident and the development of socio-economic development indicators, (such as economic growth, unemployment, LFPR, HDI, poverty and productivity). The research method and data analysis used to answer the research questions are descriptive methods and analysis accompanied by quantitative analysis. The data used is secondary data for the 2010-2020 period in Sanggau Regency and Pontianak City. The results showed (1) The development of socio-economic indicators in Pontianak City and Sanggau Regency during the demographic bonus period did not all have the expected impact. As Economic Growth tends to decrease, Unemployment Rate increases, LFPR decreases. Indicators that are in line with what is expected with a decrease in the Dependency Ratio are the Human Development, Poverty and Productivity Index. (2) Statistically, the correlation between Dependency Ratio and socioeconomic indicators is not entirely in accordance with the theory. Only HDI and Productivity Indicators are in accordance with the theory. (3) The Effect of Dependency Ratio on all Socio-Economic Indicators based on the Coefficient of Determination (R2) is classified as low and very low.

JEL: J11, J64, I32, O47

Keywords: *demographic devident, economic growth, unemployment, LFPR, HDI, poverty, productivity.*

1. PENDAHULUAN

Isu penting pembangunan yang berpusatkan penduduk pada saat ini dan yang akan datang adalah bonus demografi. Bonus demografi diawali dengan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, yang mengakibatkan perubahan struktur umur penduduk berupa peningkatan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jumlah anak yang lebih sedikit per rumah tangga secara umum menyebabkan investasi yang lebih besar per anak, kebebasan lebih besar bagi perempuan untuk memasuki lapangan pekerjaan formal, dan tabungan keluarga yang lebih besar untuk masa tua. Hal ini semua memberikan imbalan yang besar terhadap ekonomi nasional. Inilah yang disebut bonus demografi.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasinya melalui Berita Resmi Statistik pada tanggal 21 Januari 2021 tentang hasil Sensus Penduduk (SP) Propinsi Kalimantan Barat tahun 2020, menarik untuk dibahas. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan dari publikasi tersebut, yaitu

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang meningkat dari 1,66% periode 2000 2010 menjadi 2,04% periode 2010-2020;

*Email: meiran.panggabean@ekonomi.untan.ac.id

2. Proporsi perempuan 10 tahun ke atas yang usia umur kawin pertamanya kurang dari 16 tahun semakin meningkat dari 13,13% menjadi 14,25%; dan
3. Bertambahnya daerah yang mencapai bonus demografi dari 2 daerah pada tahun 2010 menjadi 14 daerah pada tahun 2020.

Bonus demografi terjadi pada tahapan dimana kondisi struktur umur penduduk menjadikan ketergantungan penduduk berada pada tingkat yang rendah. Angka RK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan non produktif (usia kurand dari 15 dan usia lebih dari 64 tahun). Angka RK menjelaskan seberapa banyak orang usia non produktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Negara/daerah dikatakan memasuki bonus demografi, jika mencapai RK < 50.

Di antara tiga hal tersebut, menarik untuk didalami lewat penelitian tentang perolehan "bonus demografi" di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil SP 2010, ada dua Kabupaten/Kota yang memasuki era bonus demografi, yaitu Kabupaten Sanggau (RK = 49,2) dan Kota Pontianak (RK = 45,2). Berdasarkan hasil proyeksi SP 2010, daerah yang memperoleh bonus demografi bertambah 4 (empat) daerah menjadi 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sanggau, Ketapang, Sintang, Sekadau, Melawi dan Kota Pontianak. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil SP 2020, seluruh Kabupaten/Kota telah masuk pada era bonus demografi ditandai dengan RK yang semakin rendah, lihat Tabel 1. Hasil ini sungguh diluar ekspektasi, apalagi dengan capaian RK yang relatif rendah dalam arti capaian RK jauh di bawah 50 seperti yang terjadi Kabupaten Melawi (28,44).

Tabel 1. Rasio Ketegantungan Penduduk Kalbar Hasil SP 2010, Proyeksi 2010 & Hasil SP 2020

No	Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan			Perbedaan RK
		2010	2020*	2020**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (5)
01.	Sambas	**60,1**	**56,51**	**35,05**	**25,05**
02.	Bengkayang	**57,0**	**53,82**	**32,35**	**24,65**
03.	Landak	**54,0**	**51,20**	**32,67**	**21,33**
04.	Mempawah	**55,9**	**52,94**	**33,18**	**22,72**
05.	Sanggau	**49,2**	**46,43**	**31,19**	**18,01**
06.	Ketapang	**51,4**	**48,70**	**28,56**	**22,84**
07.	Sintang	**53,2**	**50,36**	**32,74**	**20,46**
08.	Kapuas Hulu	**51,0**	**47,98**	**31,87**	**19,13**
09.	Sekadau	**51,8**	**49,13**	**32,17**	**19,63**
10.	Melawi	**50,0**	**47,17**	**28,44**	**21,56**
11.	Kayong Utara	**56,3**	**53,24**	**31,32**	**24,98**
12.	Kubu Raya	**53,4**	**50,77**	**32,36**	**21,04**
13.	Kota Pontianak	**45,2**	**43,30**	**33,26**	**11,94**
14.	Kota Singkawang	**55,9**	**53,47**	**36,10**	**19,80**
KALIMANTAN BARAT		**52,7**	**49,79**	**44,88**	**7,82**

Keterangan : * = Hasil proyeksi berdasarkan realisasi SP 2010
** = Hasil riil berdasarkan Hasil SP 2020

Sumber : BPS Kalbar.go,id.,

Meski sama-sama sudah memasuuki era bonus demografi di tahun 2010, ternyata penurunan RK Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 lebih besar dibanding Kota Pontianak. Penurunan RK Kabupaten Sanggau sebesar 18,01% dan Kota Pontianak sebesar 11,94%. Penurunan RK terbesar terjadi di Kabupaten Sambas (25,05%) padahal berdasarkan proyeksi, Kabupaten Sambas belum memperoleh bonus demografi (RK > 56,51%).

Capaian RK yang jauh di bawah 50 dapat memberikan keuntungan dalam proses pembangunan. Untuk meraih keuntungan bonus demografi, menurut Adioetomo (2010), ada empat prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung. *Kedua*, tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif. *Ketiga*, ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang yang akan datang. *Keempat*, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja.

Bonus demografi pada suatu sisi akan menjadi beban besar buat bangsa dan negara jika penduduk usia produktifnya tidak berkualitas. Kalau kualitas penduduk berusia produktif ini rendah, maka negara akan dihadapkan pada berbagai masalah sosial ekonomi yang semakin berat. Rendahnya produktivitas sebagai akibat rendahnya kualitas tenaga kerja akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di pasar global juga ikut rendah. Sebaliknya, bonus ini bisa menjadi keuntungan jika penduduk usia produktif berkualitas dan mendapat pendidikan dan kesehatan yang layak. Todaro dan Stephen (2011) mengungkapkan "Pendidikan dan kesehatan berperan ganda sebagai input dan output dalam pembangunan ekonomi".

Bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam siklus kependudukan merupakan kesempatan emas untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul, produktif dan kreatif. Menghasilkan SDM unggul, produktf dan kreatif dibutuhkan perencanaan SDM yang konprehensif, integratif dan holistic agar diperoleh hasil yang optimal dalam mewujudkan Negara/daerah yang maju disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan yang tinggi. Setelah sepuluh tahun berada dalam era bonus demografi perlu pertanyakan sejauh mana kedua daerah ini memanfaatkan peluang emas ini? Apakah ada perubahan positip pada indikator sosial ekonomi?.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Demografi

Shryock & Jacob (1976) membagi pengertian demografi dalam dua pengertian, yaitu (1) dalam arti sempit disebut *formal demography* yang penekanannya pada masalah jumlah, distribusi, struktur dan pertumbuhan penduduk, dan (2) dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk, termasuk budaya, sosial, politik dan ekonomi. Terkait dengan pengertian ini, analisis aspek kependudukan dalam pembangunan menyangkut tentang bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari dinamika penduduk. Pengertian dinamika penduduk sendiri mencakup perubahan jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mobilitas dan mortalitas. Perubahan dalam dinamika penduduk dapat dicermati berdasarkan transisi demografi yang dialami oleh berbagai negara.

Salah satu fenomena demografi yang tidak terelakkan adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menunjukkan penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun

migrasi. Penduduk yang semakin bertambah berpeluang menjadi sebuah potensi bagi suatu negara. Hal ini karena pertumbuhan penduduk ditinjau bukan hanya dari segi penambahan, tetapi dari perubahan struktur umur penduduk. Perubahan struktur umur penduduk merupakan hasil dari terjadinya transisi demografi, sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya transisi demografi. Hubungan ini diungkapkan oleh *International Conference on Population and Development's* (ICPD) 1994 di Kairo Mesir yang berpendapat bahwa penduduk memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan transisi demografi (Kuncoro & Sonny, 2016).

2.2. Bonus Demografi

Bonus demografi dapat terjadi ketika pertumbuhan penduduk usia kerja lebih tinggi dibandingkan penduduk usia muda. Adanya transisi demografi memungkinkan terjadinya penurunan proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja. Mason (2001) dan Ross (2004) berpendapat bahwa penurunan proporsi penduduk muda dapat memperkecil rasio ketergantungan dengan cara berkurangnya besaran investasi untuk pemenuhan kebutuhan sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Meskipun begitu, masih ada hal lain yang perlu dilakukan untuk dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut.

Bonus demografi memberikan suatu kesempatan (jendela peluang—*window of opportunity)* yang hanya terjadi satu kali berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal antara jumlah penduduk produktif dan non-produktif (Ananta dan Arifin, 2009). Rasio ketergantungan penduduk akan berada pada titik terendah, biasanya di bawah 50 persen. *Window of opportunity* ini, menurut Khalifa (2009) hanya akan berlangsung satu atau dua dekade saja karena adanya peningkatan harapan hidup menyebabkan meningkatnya proporsi penduduk usia lansia (64 tahun ke atas) sehingga harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Bongaarts (2001) dan Bloom *et al* (2003) mengungkapkan beberapa hal yang mampu menjelaskan hubungan antara bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut adalah penawaran tenaga kerja (*labor supply),* peranan perempuan, tabungan (*saving*), dan modal manusia (*human capital).* Dalam hal penawaran tenaga kerja, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu generasi *baby boom* dan penurunan fertilitas.

Melimpahnya jumlah tenaga kerja diyakini mampu meningkatkan tabungan *{saving).* Dalam struktur perekonomian, peningkatan tabungan akan meningkatkan *gross domestic product* (GDP—atau dikenal juga sebagai produk domestik bruto (PDB). Dalam *age-dependency model,* penurunan kelahiran, akan menurunkan konsumsi dan beralih pada peningkatan tabungan yang dapat digunakan untuk pembentukan modal (*capital*) (Jong-Il, K. dan L.J. Lau, 1996). Kalau tabungan ini diinvestasikan ke sektor produktif, menurut Bongaarts (2001), akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi idealnya diikuti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Apabila ditinjau keterkaitan transisi demografi dengan struktur usia penduduk, Adioetomo dan Omas (2011) menjelaskan bahwa penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi jumlah anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Selain itu, selama masa transisi, angka kematian bayi mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga meningkatkan jumlah bayi yang tetap hidup hingga ke usia dewasa. Akibatnya, terjadilah ledakan penduduk usia kerja. Jadi teori Bonus Demografi pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara dinamika kependudukan dengan ekonomi.

Semakin sedikit jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Hubungan bonus demografi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana pertumbuhan penduduk usia muda mengalami penurunan dan pada keadaan ini pertumbuhan penduduk usia kerja mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih dapat tercapai karena pada saat bonus demografi inilah tanggungan pada kebutuhan usia muda rendah. Adioetomo (2010); Mason dan Tomoko (2008) mengungkapkan bahwa penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bloom (2003), menjelaskan bahwa ketika jumlah penduduk usia kerja dalam populasi lebih besar daripada jumlah penduduk tua dan muda, maka akan ada jendela peluang di mana produktivitas penduduk usia kerja dan tingkat konsumsi dapat meningkat dan perekonomian bisa mendapat keuntungan. Periode yang dicirikan oleh rendahnya angka ketergantungan akan dicirikan pula oleh pertumbuhan yang lebih tinggi, jika tersedia pancingan untuk menginvestasikannya. Jika jendela peluang tersedia ketika tambahan penduduk memasuki kelompok usia kerja, akan tercipta akselerasi dalam pertumbuhan. Proses pembangunan harus menjamin bahwa kualitas penduduk yang memasuki usia kerja adalah pada tingkat yang diinginkan dan pekerja tersebut menemukan kesempatan kerja.(Chandrasekhar, *et al*, 2006).

Bloom & Canning (2004) dalam Chandrasekhar, *et al* (2006) mengungkapkan bahwa secara empiris dan teoritis, tidak ada hubungan yang otomatis antara perubahan demografi dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan distribusi umur hanya membentuk suatu potensi bagi pertumbuhan ekonomi. Bila potensi ini tidak dimanfaatkan maka sebaliknya yang akan terjadi adalah meningkatnya pengangguran yang akan berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, terdapat pula peneliti yang menunjukkan bahwa peran modal manusia tidak terlalu besar dalam penciptaan pertumbuhan. Nelson & Phelps (1966) dalam Diliberto, Pigliaru & Chelucci (2008) menghasilkan sebuah pendekatan yang menunjukkan peran langsung modal manusia dalam pertumbuhan hanya kecil. Modal manusia menentukan sejauh mana sebuah Negara yang tertinggal dapat mengekstrak kelebihan teknologi (mengadopsi) dari negara maju. Meskipun modal manusia memiliki peran langsung yang kecil, namun perannya sebagai penentu perkembangan teknologi sangat besar dan secara tidak langsung juga menunjukkan peran besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. METODA PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari publikasi/dokumen dari *website* BPS Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sanggau, BPS Kota Pontianak. Pengumpulan data diperoleh dari publikasi/dokumen (*desk study*) seperti: Sensus Penduduk 2010 dan 2020 Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak Dalam Angka, dan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2010-2020).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hubungan/korelasi angka Beban Ketergantungan (DR) dengan indikator pembangunan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas serta kualitas sumberdaya

manusia dinalisis dengan menggunakan Persamaan Regresi Y = a + bX dan korelasi *Pearson product moment.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rasio Ketergantungan dan Pertumbuhan Ekonomi

Selama era Bonus Demografi, pola pertumbuhan ekonomi di kedua daerah (Pontianak dan Sanggau) tidak sam, khususnya selama periode 2010 – 2019. Di Kota Pontianak pertumbuhan ekonomi cenderung menurun sedangkan di Kabupaten Sanggau cenderung meningkat. Pertumbuhan Ekonomi pada masa bonus demografi di Kota Pontianak menurun dari 5,39% tahun 2010 menjadi 4,91% tahun 2019 ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi (7,83%) pada tahun 2013. Sementara itu di Kabupaten Sanggau pertumbuhan ekonomi meningkat sedikit dari 4,15% (2010) menjadi 4,30% (2019). Khusus di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di kedua daerah sama-sama terpuruk sebagai akibat dampak kebijakan pandemic covid-19. Dampak pandemic covid-19 terhadap perekonomian Kota Pontianak (LPE terkontraksi hingga -3,94%), lebih buruk dibanding Kabupaten Sanggau yang meskipun menurun tapi masih tumbuh positip (0,7%), lihat Gambar 1.

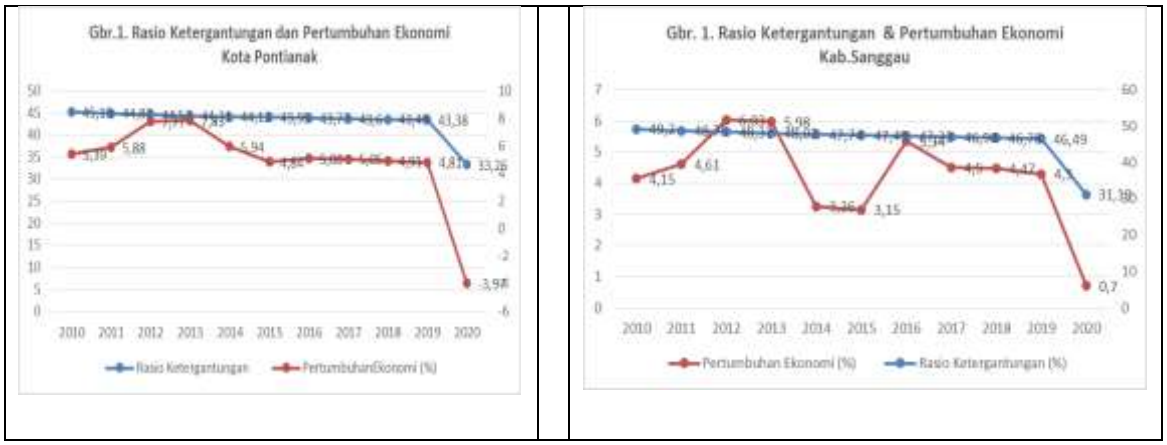

Secara statistik, korelasi antara Rasio Ketergantungan (RK) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) arahnya positip, dimana saat RK menurun, diikuti penurunan PE. Hasil ini tidak seperti yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan adalah saat RK semakin rendah (dalam arti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif) PE semakin meningkat. Mengapa kondisi yang diharapkan belum terjadi di kedua daerah ini? Diduga karena penduduk usia produktif terserap bekerja di sektor yang memberi nilai tambah rendah (sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan dengan status pekerjaan sektor informal. Hasil persamaan regresi kedua variabel adalah:

$$PE = 39{,}19 + 1{,}21RK \; ; \; R^2 = 0{,}43 \; ; \; Prob. = 0{,}000.$$

Gambar 1 memperlihatkan bahwa di saat RK mencapai angka terendah pada tahun 2020 di Kota Pontianak (33,26) dan Kabupaten Sanggau (31,19) justru PE di kedua daerah menurun tajam. Hal ini terjadi karena pada tahun yang sama kegiatan perekonomian global, domestik dan rumah tangga mengalami resesi ekonomi (penurunan permintaan dan penawaran terjadi secara bersamaan) sebagai akibat dunia dilanda pandemic Covid-19. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona (seperti *Lockdown*, PSBB) telah mengurangi aktivitas social ekonomi masyarakat.

4.2. Rasio Ketergantungan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tidak mudah mengatasi masalah pengangguran. Sejak awal pembangunan berlangsung, masalah pengangguran sudah menyertai. Akan tetapi melalui proses pembangunan pula diharapkan masalah pengangguran teratasi. Setidaknya semakin berkurang dari tahun ke tahun seiring kemajuan pembangunan. Manakala proses pembangunan nasional tengah berlangsung, sebagian besar daerah di Indonesia memasuki era bonus demografi sejak tahun 2010, termasuk Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak. Beban ketergantungan semakin mengecil. Penduduk usia produktif jumlahnya jauh melebihi penduduk usia non produktif. Dengan keadaan demikian ini, para penduduk usia produktif semakin berpeluang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan pekerjaan, apalagi penduduk usia produktif tersebut disertai tingkat pendidikan tinggi dan terampil.

Fakta menunjukkan dalam kurun waktu satu dasawarsa Kota Pontianak memperoleh bonus demografi, tingkat pengangguran terbuka bukan semakin menurun, tetapi malah semakin meningkat. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi di Kota Pontianak dari 7,79% tahun 2010 menjadi 12,36% tahun 2020 atau bertambah 4,57%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pontianak cenderung meningkat. Berbeda dengan Kabupaten Sanggau, dimana TPT-nya jauh lebih rendah dibanding Kota Pontianak dan cenderung turun dari tahun ke tahun. TPT tahun 2010 sebesar 3,62% dan turun terus mencapai 3,52% tahun 2020. TPT yang sangat rendah (0,87%) terjadi tahun 2013, lihat Gambar 2.

Korelasi antara RK dengan TPT yang diharapkan adalah positip (searah). Artinya, penurunan RK setiap tahunnya selama periode 2010 – 2020 diikuti dengan penurunan TPT. Namun, secara statistik kondisi yang diharapkan tidak terbukti, dimana korelasi antara RK dengan TPT adalah negatif (berlawanan arah) dan signifikan (prob < 0,05). Artinya, penurunan RK diikuti peningkatan TPT. Pengaruh RK terhadap TPT dalam satu dasawarsa masa bonus demografi adalah sebagai berikut:

$$TPT = 48{,}62 - 0{,}68RK \; ; \; R^2 = 0{,}24 \; ; \; Prob.= 0{,}02$$

Khusus pada tahun 2020, penurunan RK ke angka yang lebih rendah ternyata diikuti dengan peningkatan TPT, baik di Kota Pontianak maupun di Kabupaten Sanggau. Peningkatan TPT tahun 2020 terkait erat dampak pandemic covid-19 terhadap kegiatan perekonomian global dan domestik.

4.3. Rasio Ketergantungan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah Angkatan Kerja dengan Tenaga Kerja. AK meliputi penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (menganggur), sedangkan TPAK terbagi atas penduduk usia kerja yang bersekolah, merawat/mengurus rumah tangga maupun penerima pendapatan. TPAK berkurang jika jumlah penduduk usia kerja yang tergolong BAK semakin bertambah banyak dibanding AK. Sebaliknya, TPAK meningkat jika pertambahan jumlah AK lebih besar dari pertambahan BAK.

Selama periode awal bonus demografi (2010 – 2020) di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau, pola TPAK sama yakni cenderung menurun. TPAK di Kota Pontianak yang cenderung berada pada kisaran angka 59 – 65,61 persen, sedangkan TPAK di Kabupaten Sanggau, meskipun cenderung menurun tapi berada pada kisaran angka 68 – 77 persen, lihat Gambar 3.

TPAK Kota Pontianak lebih rendah dari TPAK Kabupaten Sanggau. Hal ini terjadi karena (1) proporsi AK yang bekerja di Kota Pontianak lebih rendah dari Kabupaten Sanggau, (2) TPT Kota Pontianak jauh lebih tinggi dibanding Kabupaten Sanggau sebagai gambaran sulitnya mendapatkan pekerjaan di Kota Pontianak yang basis perekonomiannya pada sector non pertanian, (3) Proporsi AK usia 15 – 24 tahun yang berstatus sekolah di Kota Pontianak jauh lebih tinggi dibanding Kabupaten Sanggau yang perekonomiannya berbasis sector pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Korelasi antara RK dengan TPAK diharapkan negatif, Artinya, penurunan RK disertai dengan peningkatan TPAK. Namun harapan tersebut tidak terbukti di kedua daerah. Faktanya, penurunan RK selama periode awal bonus demografi di kedua daerah tidak diikuti dengan peningkatan TPAK. Pengaruh positip dan signifikan RK terhadap TPAK secara statistik adalah sebagai berikut:

$$TPAK = 19{,}64 + 0{,}37RK \; ; \; R^2 = 0{,}22 \; ; \; Prob. = 0{,}03$$

4.4. Rasio Ketergantungan dan IPM

Pembangunan Manusia yang tengah berlangsung saat ini dengan intensitas tinggi merupakan pilihan tepat strategi pembangunan. Visi pembangunan Indonesia menjadi Negara 3 besar Dunia dalam perekonomian global tahun 2035 – 2045 harus disertai dengan SDM berkualitas tinggi. Peluang untuk peningkatan kualitas SDM terbuka lebar manakala Indonesia tengah berada di era bonus demografi sejak tahun 2010/2012. Keberhasilan Pembangunan Manusia yang ditandai dengan Peningkatan kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian IPM Nasional

tahun 2020 yang sudah masuk dalam IPM tinggi (71,94), sebagian besar provinsi (24 provinsi) yang mengalami peningkatan IPM, sedangkan 10 provinsi lainnya mengalami penurunan.

Selama satu dasawarsa bonus demografi di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau, pembangunan manusia yang diukur dengan IPM menunjukkan peningkatan. IPM Kota Pontianak meningkat dari angka 74,87 (2010) menjadi 79,44 (2020) dan IPM Kabupaten Sanggau meningkat dari 60,57 menjadi 65,77 pada periode yang sama. Pembangunan manusia di Kota Pontianak selama periode dasawarsa bonus demografi sudah masuk kategori IPM tinggi (70 lebih), sedangkan Kabupaten Sanggau masuk kategori IPM Sedang (60 – 69,99), lihat Gambar 4.

Korelasi antara RK dengan IPM diharapkan negatif, artinya penurunan RK diikuti dengan peningkatan IPM. Secara statistik harapan ini terbukti secara signifikan (prob.< 0,05). Penurunan RK di kedua daerah diikuti dengan peningkatan IPM. Pengaruh RK terhadap IPM secara statistik seperti pada persamaan berikut :

$$RK = 64{,}74 - 0{,}29\ IPM\ ;\ R^2 = 0{,}22\ ;\ Prob. = 0{,}03$$

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh sebesar 0,01 persen, jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,44 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota. Dari sisi posisi, perbandingan IPM antar kabupaten/kota tidak mengalami banyak perubahan. Capaian IPM tertinggi masih diraih oleh Kota Pontianak (79,44), sedangkan capaian terendah ditempati Kabupaten Kayong Utara (62,68). Jika dibandingkan dengan angka propinsi (67,66), hanya 4 dari 14 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian IPM di atas angka provinsi dan 2 kota yang termasuk kategori IPM tinggi

4.5. Rasio Ketergantungan dan Kemiskinan

Seperti halnya pengangguran, masalah kemiskinan dengan berbagai faktor penyebabnya, masih menjadi beban pembangunan hingga saat ini. Termasuk di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Selama satu dasawarsa bonus demografi di kedua daerah ini, proporsi penduduk miskin memiliki pola yang sama, yakni *trend* nya sama-sama menurun.

Penurunan kemiskinan di Kota Pontianak lebih besar dibanding Kabupaten Sanggau. Kemiskinan di Kota Pontianak menurun dari 6,62% tahun menjadi 4,70% tahun 2020 atau turun sebesar 1,92%. Sedangkan kemiskinan di Kabupaten Sanggau menurun dari 5,02% menjadi 4,46% pada periode yang sama atau turun sebesar 0,56%, lihat Gambar 5.

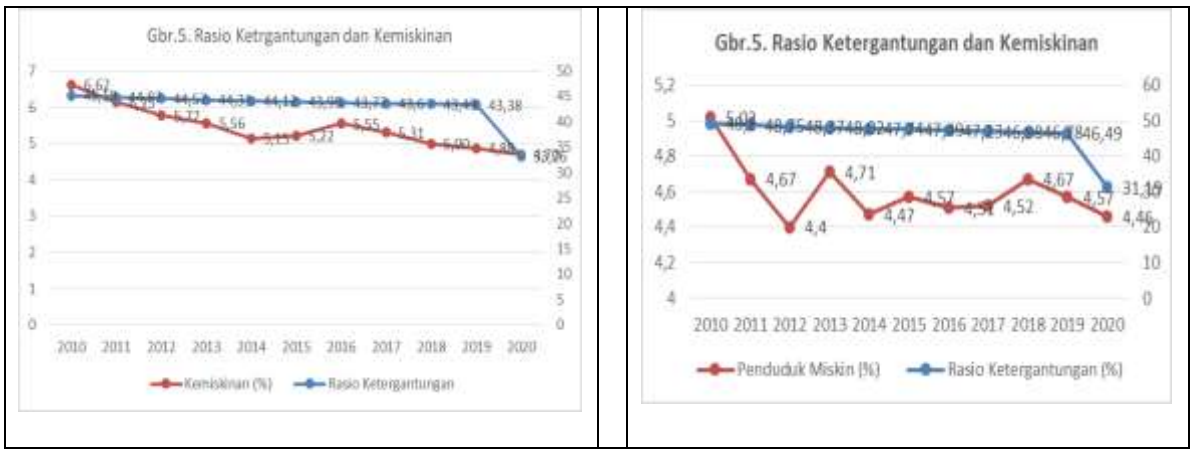

Penurunan kemiskinan selama era bonus demografi di kedua daerah sudah sesuai dengan yang diharapkan, dimana penurunan RK diikuti dengan penurunan kemiskinan atau berkorelasi positip. Namun secara statastik, keadaan demikian tidak terbukti. Korelasi antara RK dengan kemiskinan adalah negatif dan tidak signifikan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$RK = 45{,}04 - 0{,}07\ KMK\ ;\ R^2 = 0{,}00\ ;\ Prob. = 0{,}96$$

4.6. Rasio Ketergantungan dan Produktivitas Kerja

Pertambahan usia produktif yang bekerja membuahkan hasil positip. Hal ini tercermin dari Nilai PDRB di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau yang bertambah setiap tahunnya dan pertambahannya melebihi pertambahan angkatan kerja yang bekerja, kecuali di tahun 2020 menurun karena dampak kebijakan Pandemic Covid-19, (lihat Gambar 6).

Gambar 6 menunjukkan bahwa selama 10 tahun era bonus demografi di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau terdapat pola yang sama yaitu adanya peningkatan produktivitas pekerja dari tahun ke tahun. Produktivitas pekerja di Kota Pontianak lebih tinggi dibanding produktivita pekerja di Kabupaten Sanggau. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan pekerja di Kota Pontianak lebih tinggi dari dibanding pekerja Kabupaten Sanggau. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Pontianak lebih tinggi dari RLS dan HLS Kabupaten Sanggau. RLS dan HLS Kota Pontianak tahun 2020 masing-masing 10,17 tahun dan 15 tahun, sedangkan Kabupaten Sanggau pada tahun yang sama masing-masing 7,15 tahun dan 11,57 tahun.

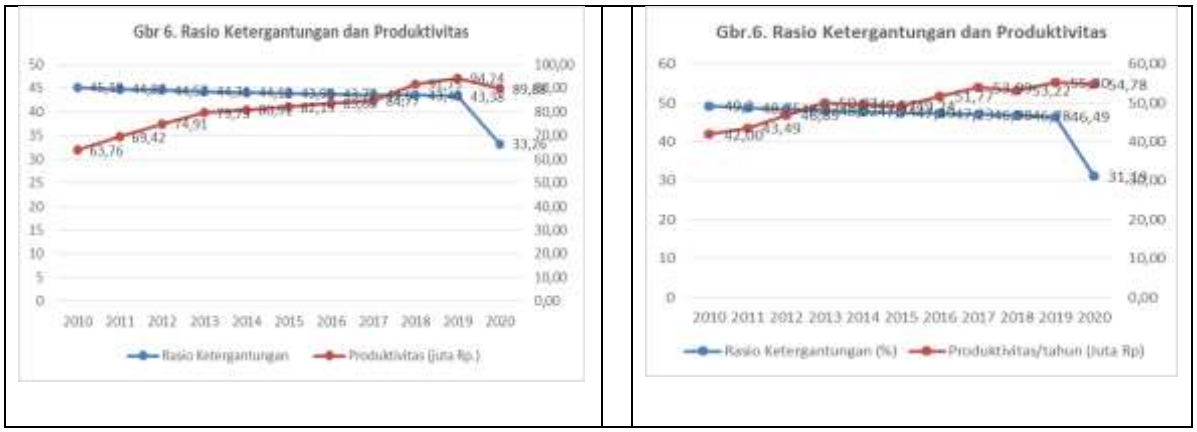

Produktivitas pekerja Kota Pontianak meningkat dari 63,76 juta (2010) hingga mencapai 89,90 juta (2020) atau rata-rata bertambah 5,5% per tahun. Capaian produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni 94,24 juta. Sementara itu, pada periode yang sama, produktivitas pekerja Kabupaten Sanggau meningkat secara fluktuatif dari 42,00 juta (2010) hingga menjadi 54,78 juta (2020). Keadaan ini mengindikasikan bahwa era bonus demografi di Kota Pontianak ditandai adanya peningkatan produktivitas kerja dengan laju pertambahan relatif tinggi

Bloom (2003), menjelaskan bahwa ketika jumlah penduduk usia kerja dalam populasi lebih besar daripada jumlah penduduk tua dan muda, maka akan ada jendela peluang di mana produktivitas penduduk usia kerja dan tingkat konsumsi dapat meningkat dan perekonomian bisa mendapat keuntungan. Secara statistik hasil studi ini sejalan dengan pendapat Bloom (2003) yang menyatakan adanya korelasi arah negatif antara Produktivitas dengan Rasio Ketergantungan, dimana semakin rendah Rasio Ketergantungan semakin tinggi produktivitas. Pengaruh RK terhadap produktivitas secara statistik adalah sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas} = 45{,}04 - 0{,}073\ \text{RK} \ ; \ R^2 = 0{,}00 \ ; \ \text{Prob.} = 0{,}97$$

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

1. Perkembangan indikator sosial ekonomi di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau di masa bonus demografi tidak semua memberi dampak seperti yang diharapkan. Seperti Pertumbuhan Ekonomi cenderung turun, Tingkat Pengangguran meningkat, TPAK menurun. Indikator yang sesuai dengan yang diharapkan dengan penurunan Rasio Ketergantungan adalah Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Produktivitas.
2. Secara statistik, korelasi antara Rasio Ketergantungan dengan indicator social ekonomi tidak seluruhnya sesuai dengan teori. Hanya Indikator IPM dan Produktivitas yang sesuai dengan teori.
3. Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap semua Indikator Sosial Ekonomi berdasarkan Koefisien Determinasi (R^2) tergolong rendah dan sangat rendah pada periode 2010-2020.

5.2. Rekomendasi

Masa bonus demografi masih panjang (hingga 2030-2035). Pemerintah Daerah, *stake holder* dan Rumah Tangga perlu kerjasama dan bekerja bersama untuk mengoptimalkan peluang emas (*golden*

opportunity) untuk meningkatkan kualitas SDM terlebih dalam menghadapi daya saing global di era digital dan industri 4.0 guna mewujudkan kesejahteran masyarakat yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, S. M. (2005). *Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara PertumbuhanPenduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi.* Pidato Pengukuhan Guru BesarFakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Adioetomo, S. M. *et al*. (2010). *100 Tahun Demografi Indonesia: Mengubah NasibMenjadi Harapan*. Laporan BKKBN dan Lembaga Demografi FEB, Jakarta.

Adioetomo, S. M. & Samosir, O. B. (Ed.). (2011). *Dasar-Dasar Demografi* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat Bekerja Sama dengan Lembaga Demografi FEB UI.

Ananta, A. & Arifin, E. N. (2009). *A Demographic Window of Opportunity*. Singapore: University of South East Asian Studies.

Badan Pusat Statistik (2010). *Sensus Penduduk Tahun 2010*. Jakarta: BPS.

------- (2011) Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2011 – 2030. Kalimantan Barat, BPS.

------- (2020). Sensus Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2020, Kalimantan Barat, BPS.

------- (2020a). *Survei Angkatan Kerja Nasional 2020: Propinsi Kalimantan Barat.* Jakarta: BPS.

Blacker, C. P. (1947). Stages in Population Growth. *The Eugenic Review, 39*(3), 88-102.

Bloom, D. E., *et al.* (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica: RAND.

Bongaarts, J. (2003). Dependency Burdens in the Developing World. in Birdsall, K., Kelley, A. C. & Sinding, S. (Eds.). *Population Matters: Demographic Change,Economic Growth, and Poverty in the Developing World* (pp.55-64). New York:Oxford University Press

Chandrsekhar, *et al*. (2006). The Demographic Dividend and Young India's Economic Future. *Economic and Political Weekly*, 5055-5064.

Diliberto, A, Pigliaru, F. & Chelucci, P. (2008). *International TFP Dynamics and HumanCapital Stocks: a panel data analysis, 1960-2003* [Working Paper]. Diakses dari http://crenos.unica.it/crenos/publications/international-tfp-dynamics-and-human-capital-stocks-panel-data-analysis-1960-2003.

Jong-ll, K. & L. J. Lau. (1996). The Sources of Asian Pacific Economic Growth. *The Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'Economique* (Special Issue:Part 2), 29(April), S448-S454.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2011. *Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035.* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesra.

Khalifa, A. M. (2009). *Youth Bulge and The Demographic Window Of Opportunity In TheArab World*. Economic and Social Commission for Western Asia.

Kuncoro, A. & Harmadi, S. H. B. (ed.). (2016). *Mozaik Demografi: Untaian Pemikirantentang Kependudukan dan Pembangunan.* Jakarta: Salemba Empat Bekerjasama dengan Lembaga Demografi FEB UI.

Lucas, D., *et al*. (1987). *Pengantar Kependudukan* (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mantra, I. B. (1994). *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: CV. Tiara.

Mason, Andrew. (ed.). (2001). *Population Change and Economic Development in East Asia. Challenge Met, Opportunities Seized*. Stanford: Stanford University Press.

Mason, Andrew and Tomoko Kinugasa, (2008). *"East Asia Economic Development : Two Demographic Dividends." Journal of Asian Economics 19:389-399.*

Panggabean, Meiran (2017). Studi Deskriptif Tidak Tercapainya Bonus Demografi di Kabupaten Landak, dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 6. No. 1, 43- 58.

Todaro, M. P. & Stephen C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (terjemahan), Edisi 11. Jakarta: PT.Erlangga.

PLATFORM SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK

Agusandi[1]
Meiran Panggabean[2*]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study describes the problems faced by MSMEs in developing business, finding the right platform in selling online, analyzing the constraints faced by MSME actors. The form of research is descriptive qualitative through the distribution of questionnaires using Google Form media to MSME actors both already using digital and those who have not used digital. Sampling technique using purposive sampling. The results found that the digital platform used by MSME actors was social media (Facebook, WhatsApp and Instagram), Marketplace (Pedia Stores, Shopee and open stalls) and platforms of food messages (Grab, Gojek and Maxim). MSME actors do not use digital, the reason is not to understand using digital applications and already has a temporary customer of MSMEs who use digital because of the wide range of online markets, supporting technology, small capital, unlimited operating time and promising large profits. The obstacles they face are the number of rivals, lack of knowledge and money has not been able to use the internet.

JEL : D4, D47, D490

***Keywords**: Platform, Social media, MSME Development.*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik, tercermin pada jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dikutip pada Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis UMKM memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen (https://money.kompas.com)

Katadata Insight Center (KIC) (2020) mengungkapkan Kondisi UMKM sebelum Covid-19 dialami cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun,saat terjadi Covid-19 keadaan berbalik. 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM yang masih berada kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku yang justru mengalami dampak positif. Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM

[*] Email: meiran.panggabean@ekonomi.untan.ac.id

yang mengalami peningkatan omzet. 62,6% UMKM yakin dapat bertahan lebih dari 1 tahun melewati krisis akibat pandemi ini.

Indeks Kesiapan Digital ini juga menunjukkan bahwa generasi yang semakin tua memiliki indeks kesiapan digital yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. UMKM seringkali mengalami kendala menjalankan usaha menggunakan teknologi digital. Salah satu masalah utama bagi UMKM adalah konsumen yang belum mampu menggunakan internet, serta kurangnya pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online. Kini, transaksi jual-beli produk dapat dilakukan dalam genggaman jari memanfaatkan jaringan elektronik, hal inilah yang disebut bagian dari platform digitalisasi. Kehadiran berbagai platform digital telah membawa dampak positif bagi pengembangan bisnis yaitu peningkatan transaksi melalui digital, lapangan kerja.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 202,6 juta pengguna internet di Tanah Air per 31 Januari 2021. Pemerintah diharapkan bisa terus mendukung perluasan jangkauan internet ke seluruh pelosok negeri. Sebab, di era digital ini internet bisa sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, bisnis, maupun hiburan termasuk peningkatan digitalisasi UMKM (https://databoks.katadata.co.id)

Di Kalimantan Barat, jumlah pengguna internet di Kalimantan Barat ada sebanyak 3.920.509 orang atau sebesar 78,38% dari jumlah penduduk 5.001.664 jiwa tahun 2020. Kemudian per 15 Mei 2021 pengguna Quick Response Indonesian Standard (QRSI) untuk percepatan digitalisasi UMKM di Kalimantan Barat sebanyak 70.533 merchant (pedagang) dari 14 Kabupate/Kota hampir separuhnya berasal dari Kota Pontianak yaitu sebanyak 31.964 merchant (pedagang). Jumlah Pelaku UMKM terbanyak berada di Kota Pontianak. Tahun 2020 sebesar 38.886 atau sebesar 21,43% dan tahun 2021 bertambah menjadi 41.573 UMKM atau sebesar 21,31%, dibandingkan dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Barat.

Kebijakan dan upaya terus diperkuat untuk pengembangan platform digital UMKM yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Upaya melakukan transformasi UMKM ditempuh melalui pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif. Kebijakan pengembangan UMKM juga didukung sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, lembaga keuangan, dan para penggiat usaha.

Hasil penelitian yang dikutip pada https://ekonomi.bisnis.com, menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi sektor UMKM masih rendah. Padahal, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci memasuki era industri 5.0. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, per Juni 2020 baru 13 persen UMKM yang menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.

Nurhadi (2019) menemukan bahwa UMKM mengadopsi e-commerce sebagai bagian dari sistem bisnis mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para UMKM yang tergabung dalam Rumah Kreatif Sleman adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mereka mencoba untuk tetap eksis dengan cara mengadopsi e-commerce sebagai sarana penunjang bisnis. Mereka mengungkapkan berbagai macam alasan yang melatarbelakangi dalam mengadopsi dan terbuka serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ada 6 alasan yang melatarbelakangi mereka mengadopsi *e-commerce*, alasan-

alasan tersebut antara lain karena perkembangan tren, harga murah, perluasan pasar, loyalitas konsumen, kemudahan pengoperasian, dan keterampilan berdagang.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juni 2020 sebanyak 56% pelaku UMKM mengalami peningkatan pengeluaran dan 31% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja online. Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus melakukan inovasi. Platform digital dianggap menguntungkan pelaku UMKM karena dapat menghemat biaya operasional. kemudian pelaku UMKM seharusnya fokus dan prioritas layanan pada pelanggan.

Digitalisasi UMKM belum bisa maksimal untuk dilakukan karena terdapat kendala yang harus dilewati. Menurut Suwarni et al (2019) terdapat tiga kendala dalam digitalisasi UMKM yaitu: (1) gagal memasuki pasar digital karena tidak memenuhi permintaan pasar, (2) K(ualitas daya tahan pelaku UMKM pada pasar digital yang belum merata dikarenakan harus bersaing dengan perusahaan besar yang selama pandemi juga beralih menggunakan platform digital, dan (3) Pnguatan edukasi literasi digital dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku usaha UMKM.

2. KAJIAN LITERATUR

Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industry tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital, sebenarnya, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan personal computer (PC) dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era new digital economy, ditandai dengan adanya mobile technology, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital (Van Ark, Erumban, Corrado, & Levanon, 2016).

Menurut McKinsey & Company,(2018) ekonomi digital di Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Juniwati (2021) mengemukakan fakta perkembangan pasar online menunjukkan perubahan perilaku konsumen, dalam berbelanja. Oleh karena itu memahami perilaku konsumen dalam konsep e-commerce, menjadi penting, karena jauh lebih rumit dibandingkan dengan memahami konsumen tradisional. Hasil penelitian menyatakan faktor yang paling dipertimbangkan saat belanja online adalah kepraktisan dan kemudahan, serta produk yang dibeli tidak dijual ditoko offline.

Astari, S (2019) menemukan bahwa untuk mengembangkan UMKM melalui program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Hasil penelitian Arfan, N.N. (2019) menemukan bahwa digital marketing secara signifikan mempengaruhi pedapatan atau income pelaku UMKM di Kota Makassar, melalui peningkatan penjualan.

Rahmadi, R., Astuti, R.P., & Kartono, K. (2020). Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon

dari tahun ke tahunnya menunjukan peningkatan yang signifikan salah satunya di desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih ditemukan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah dan minimnya pendampingan dilapangan. Hasil penelitian Fitra, Kusniawan Nur Muhammad (2019) menunjukkan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Enggal. Hal ini dibuktikan setelah para UMKM memutuskan menggunakan digital marketing dapat meningkatkan pendapatan UMKM dan efisiensi waktu yang tidak terbatas.

Orinaldi, Muhammad (2020) yang menganalisis peran E-commerce dalam mempertahankan bisnis selama resesi ekonomi mengemukakan bahwa sektor bisnis tidak akan mampu bertahan dalam masa resesi ekonomi jika tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi menuju pasar online. Pemana, Soni Hendra (2021) menemukan bahwa pemanfaatan ekosistem digital dapat mengatasi permasalahan baik pemasaran produk maupun mengakses sumber daya. UMKM dapat memanfaatkan jaringan pengguna e-commerce dan kemudahan lain yang diberikan e-commerce.

3. METODA PENELITIAN

Bentuk penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam riset ini adalah data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari pelaku UMKM yang ditelitip Jumlah Pelaku UMKM yang dijadikan sampel sebanyak 63 responden, terdiri dari pelaku UMKM yang menggunakan *platform digital (online)* dan *offline*. Pelaku UMKM yang jualan *online* sebanyak 35 responden dan jualan *offline* sebanyak 28 responden. Tehnik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan adalah menyebarkan kuesioner melalui *google form* dan wawancara langsung.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Usia pelaku UMKM Kota Pontianak yang berjualan online dan offline tertinggi pada usia 30-40 tahun yaitu sebesar 18 responden (51,43%) dan 16 responden (57,14%) usia 40 tahun keatas. Para pelaku UMKM ini seluruhnya tergolong usia produktif yang mampu menyesuaikan/merespon kemajuan tehnologi digital. Lama usaha beroperasi bagi pelaku usaha UMKM Kota Pontianak. Berjualan *online* paling banyak lama usaha beroperasi diatas 9 tahun atau 37,14 persen. Berjualan *offline* paling banyak lama usaha beroperasi kurang dari 3 tahun atau 35,71 persen. Hampir semua pelaku UMKM berjualan *online* sudah memiliki usaha sebelum pandemi berlangsung.

Pendidikan pelaku usaha UMKM Kota Pontianak yang berjualan online sebagian besar pendidikan S1 (40,00%) dan berjualan offline juga kebanyakan pendidikan S1 (57,14%). Responden yang tidak tamat SMA/SMK namun memiliki usaha secara online ada 6 responden (17,14%). Jenis usaha pelaku UMKM di Kota Pontianak yang berjualan online paling banyak adalah Kuliner (Rumah Makan, Kue dan Minuman/Warung Kopi) yaitu sebanyak 11 responden (20,75%) dan jenis usaha pelaku UMKM yang berjualan offline paling banyak adalah Kuliner (Rumah Makan, Kue dan Minuman/Warung Kopi) yaitu sebanyak 14 responden (26,92%), lihat Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Usaha UMKM Kota Pontianak

No.	Jenis Usaha	*Online*		*Offline*	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Kuliner (Rumah Makan, Kue dan Minuman/Warung Kopi)	11	20,75	14	26,92
2	Toko Elektronik	3	5,66	1	1,92
3	Toko Komputer dan Aksesoris	1	1,89	1	1,92
4	Toko Handphone dan Aksesoris		0,00	1	1,92
5	Toko Pakaian	8	15,09	7	13,46
6	Toko Sepatu	4	7,55	2	3,85
7	Toko Tas	4	7,55	3	5,77
8	Aksesoris Fashion	4	7,55	3	5,77
9	Toko Jam	2	3,77	2	3,85
10	Toko Alat/Obat Kesehatan	2	3,77	3	5,77
11	Toko Buku	3	5,66	1	1,92
12	Perawatan dan Kecantikan	2	3,77	2	3,85
13	Tour dan Travel	0	0,00	1	1,92
14	Toko Sembako	1	1,89	5	9,62
15	Percetakan	3	5,66	3	5,77
16	Bimbingan Belajar	0	0,00	2	3,85
17	Salon/Babershop	2	3,77	0	0,00
18	Rempah-rempah	1	1,89	1	1,92
19	Penjahit	2	3,77	0	0,00
Jumlah		53	100,00	52	100,00

Sumber: Data primer,2022

Keterangan : 1 responden memiliki lebih dari satu jenis usaha

4.2. Platform Digital yang Digunakan UMKM

Platform digital yang digunakan para pelaku UMKM di Kota Pontianak antara lain adalah media social, market place dan platform pesan antar makanan. Dari 35 responden yang berusaha melalui on line, sebagian besar menggunakan platform pesan-antar makanan (48,5%). Pelaku UMKM yang menggunakan platform media social dan market place masing-masing 42,6% dan 8,9%. Media sosial yang paling sering digunakan pelaku UMKM dalam berjualan diantaranya adalah whatSapp, Instagram dan facebook. Marketplace yang digunakan oleh pelaku UMKM berjualan secara online adalah tokopedia, shopee dan bukalapak. Marketplace ini luas jangkauannya karena bisa diakses oleh siapapun tanpa harus mengikuti atau mengetahui nomor kontaknya.

Alasan tingginya platform pesan-antar makanan paling banyak digunakan oleh masyarakat, dalam penggunaan platform digital karena usaha kuliner paling banyak dijumpai di Kota Pontianak yang rata-rata sistem digitalnya menggunakan jasa platform pesan-antar makanan. Penggunaan digital oleh pelaku UMKM Kota Pontianak jaungkauannya hanya untuk sekitar Kota Pontianak, ini artinya pasar online yang diakses belum mampu menjangkau pasar secara luas.

Pertimbangan atau alasan pelaku UMKM menggunakan digital (on line) antara lain adalah adanya dukungan tehnologi (24,6%); modal kecil (13,6%); durasi waktu beroperasi 24 jam (19,5%); jangkauan pasar luas (30,5%); keuntungan besar (11,9%). Dukungan teknologi yang dimaksud disini adalah akses teknologi jaringan dan internet yang baik.

Jangkauan pasar online yang luas dapat meningkatkan kesempatan masyarakat mengaksesnya didukung dengan inprastruktur teknologi yang semakin bagus. Pertimbangan ini menjadi hal utama pelaku UMKM go digital. Bagi pelaku usaha UMKM yang sudah paham dan melek teknologi berjualan online tidak memerlukan biasa yang besar dikarenakan pelaku usaha tidak wajib memiliki tempat usaha yang strategis untuk menarik kosumen dating (cukup dilakukan dirumah saja), kemudian dapat dibuka oleh kosumen dalam waktu 24 jam. Jumlah pengguna platform (media sosial, marketplace dan ojek online) di Indonesia yang semakin meningkat membuat pelaku usaha online dapat menjanjikan keuntungan yang besar.

Semakin meningkatnya jumlah pengguna seperti: media sosial (Facebook, Tik Tok, Telegram dan Instagram), marketplace, gojek online dan semakin baiknya infrastruktur pembangunan teknologi membuat pelaku usaha optimis bahwa transpormasi digital menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang dapat meningkatkan jumlah produksi dan penjualan.

Pelaku usaha yang memilih off line, saat ditanya mengapa ndak beralih ke system on line, mengemukakan alasan karena tidak paham menggunakan tehnologi digital (36,4% dari 33 responden). Selain alasan tidak paham, ada juga alasan lain yang dikemukan oleh pelaku usaha offline, yaitu penjualan *offline* masih memberikan keuntungan (18,2%); sudah memiliki pelanggan (30,3%) dan ribet /rumit (15,2%).

5. SIMPULAN

Platform digital yang paling banyak digunakan oleh pelaku UMKM di Kota Pontianak adalah platform pesan-antar makanan diantaranya menggunakan aplikasi Grab Merchant, Gojek Merchant dan Maxim Merchant, kemudian disusul oleh media sosial terdiri dari Facebook, Instagram dan WhatShap dan Marketplace diantaranya Toko Pedia, Shopee dan Buka Lapak.

Pertimbangan UMKM yang berjualan offline adalah tidak paham menggunakan digital, sudah memiliki pelanggan sehinggal keuntungan masih menjanjikan dan digital dianggap ribet. Pertimbangan UMKM yang berjualan online adalah jangkauan pasar luas, waktu buka tidak terbatas, infrastruktur teknologi yang mendukung, modal yang digunakan kecil dan menjanjikan keuntungan yang besar.

Kendala yang dihadapi masuk pasar online kurang pengetahuan dalam menjalankan udaha online, banyaknya saingan, dana yang tidak cukup, tenaga kerja tidak siap dan konsumen belum mampu menggunakan internet dalam mengakses platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

Accuate (2021). *Ekonomi Digital: Pengertian, dan Cara Memanfaatkan Peluang di Baliknya. https://accurate.id/ekonomi-keuangan/ekonomi-digital/.*

Antara (2022). *Dekranasda Pontianak Gandeng Swasta Digitalisasi UMKM di Daerahnya.* Diakses pada https://www.antaranews.com/berita/2696141/dekranasda-pontianak-gandeng-swasta-digitalisasi-umkm-di-daerahnya.

Antaranews (2022). *Sutarmidji dorong UMKM Jeli Tangkap Peluang di Tengah Pandemi.* Diakses dari https://kabar.sanggau.go.id/2022/02/09/sutarmidji-dorong-umkm-jeli-tangkap-peluang-di-tengah-pandemi/.

Arfan, N.N. (2019). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makasar. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, Indonesia.

Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Peneliti Research For Forensic Accounting, Journal Administrasi Bisnis, 6 (2:2020).*

Avriyanti, & Shinta (2021). Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Covid-19 dengan Memanfaatkan Bisnis Digital (Study pada UKM yang Terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong. Tabalong: Program Study Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (2021). *UMKM pada era Digitalisasi di Kalimantan Barat.* Diakses dari https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/umkm--pada-era-digitalisasi-di-kalimantan-barat.

Bappeda (2017). *Teori dan Indikator Pembangunan.* Diakses dari https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12.

Bayurini, D. (2020). *UMKM Harus Gunakan Digitalisasi Dalam Penjualan Produk.* Diakses dari https://kalbarprov.go.id/berita/wagub-kalbar-umkm-harus-gunakan-digitalisasi-dalam-penjualan-produk.html.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat (2020). *Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar sediakan "crisis center" damping pelaku usaha.* Diakses dari https://kalbar.antaranews.com/berita/430070/dinas-koperasi-dan-umkm-kalbar-sediakan-crisis-center-dampingi-pelaku-usaha.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat (2021). *Laporan Perkembangan Koperasi UMKM Per 31 Desember 2021*. Diakses dari http://data.kalbarprov.go.id/dataset/laporan-perkembangan-koperasi-umkm-per-desember-2021/resource/14c151d8-9d23-4dfd-970f-97a8be5aaa87.

Ekon.go.id (2021). *Presidensi Indonesia G20 – 2022, Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional.* Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3469/presidensi-indonesia-g20-2022-momentum-branding-indonesia-di-dunia-internasional.

Ferdiana, S. (2021). *Pentingnya Bangsa ini mulai Adaptif dengan Industri 5.0.* diakses dari https://www.republika.co.id/berita/qynv2n371/pentingnya-bangsa-ini-mulai-adaptif-dengan-industri-50#:~:text=Kehadiran%20Industri%205.0%20adalah%20untuk,jati%20diri%20manusia%20yang%20sesungguhnya.

Hidayati, Y. (2016). *10 Definisi Ekonomi Pembangunan Menurut para ahli.* Diakses dari https://brainly.co.id/tugas/6392130.

Jenamdi, L. & Prastya, D. (2020). *Ini Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2020 Per Provinsi.* Diakses dari https://www.suara.com/tekno/2020/11/13/191253/ini-jumlah-pengguna-internet-indonesia-2020-per-provinsi.

Juniwati (2021). Profil Pembelanjaan Online dan Bagaimana Perilaku Konsumsinya (Study pada Nitizen di Pontianak) : Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura.

Katadata.co.id (2020). *Digitalisasi, Strategi UMKM Selamat dari Krisis.* Diakses dari https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis.

Katadata Insight Center (2020). *Digitalisasi UMKM ditengah Pandemi Covid-19.* Diakses dari https://katadata.co.id/umkm,.

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia (2021). *Presidensi G20 Indonesia – 2022 Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional.* Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3469/presidensi-indonesia-g20-2022-momentum-branding-indonesia-di-dunia-internasional.

Khoirunnisa (2021). *Top 10 Marketplace di Indonesia Q3-2021*. Diakses dari https://selular.id/2021/11/top-10-marketplace-di-indonesia-q3-2021/.

Kompas.com (2022). *Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia.* Diakses dari https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all#:~:text=Data%20Kementerian%20Koperasi%20dan%20UKM,senilai%20Rp%208%2C6%20triliun.

Kompas.com (2022). Teori Pertumbuhan Ekonomi Walt W. Rostow. Diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/01/162722169/teori-pertumbuhan-ekonomi-walt-w-rostow?page=all.

Kurniawan, R. (2020). *Pengembangan UMKM dalam Tataran Global.* Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/9/1318732/pengembangan-umkm-dalam-tataran-global.

Lagili, I.L. (2013). *Lima Teori Tahapan Pembangunan Menurut W.W. Rostow.* Diakses pada https://mahasiswa.ung.ac.id/911413060/home/2013/11/18/teori-5-tahapan-pembangunan-menurut-w-w-rostow.html#:~:text=Menurut%20Rostow%20pembangunan%20ekonomi%20atau,pertanian%20dan%20peranan%20sector%20industry%20.

Laporan Perekonomian Indonesia (2020). *Transpormasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.* Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8_LPI2020_BAB6.pdf.

McKinsey &Company (2018). The Digital Archipelago: *How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development*.

Maskur, F. (2020). *Digitalisasi UMKM Masih Rendah, Revolusi Industri 4.0 Perlu Didorong.* Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20201004/257/1300483/digitalisasi-umkm-masih-rendah-revolusi-industri-40-perlu-didorong.

Nugroho, F.T. (2021). *Tujuan Pembangunan Ekonomi, Ciri-Ciri, Faktor, dan Dampaknya.* Diakses dari https://www.bola.com/ragam/read/4648455/tujuan-pembangunan-ekonomi-ciri-ciri-faktor-dan-dampaknya.

Nurhadi, K.K. (2019). Faktor-Faktor yang Mendorong Adopsi E-commerce: Study pada Pelaku UMKM Bintang 2 dan 3 Rumah Kreatif Sleman. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Indonesia.

Nurjaman, K. (2022). Pemberdayaan E-Commerce di Kalangan Pelaku UMKMdi Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nurmansyah, A.A.H. (2020). Pemanfaatan Digital Marketing Pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Industri Kuliner di Kota Cimahi. Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unjani. Diakses dari http://repository.unjani.ac.id/repository/b0f0c92d4520bf9f33bd5eb61d32dd9a.pdf.

Pattisahusiwa, H.M. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi Kota Makasar. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, Indonesia.

Pifa.co.id (2022). *Wagub Kalbar Harap Produk UMKM Kalbar Bisa di Pasarkan Melalui Marketplace.* Diakses dari https://pifa.co.id/berita/wagub-kalbar-harap-produk-umkm-kalbar-bisa-dipasarkan-melalui-marketplace.

Pinilih, M., & Indah, Y.M. (2019). Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal, 9 (1).*

Rahmad, K., Agung, L.M., & Aprilianisa, W. (2022). *Digitalisasi UMKM sebagai Solusi Menghadapi Pandemi Covid-19.* Diakses dari https://himakunpad.com/id/mabar-digitalisasi-umkm/.

Rahmadi, R., Astuti, R.P., & Kartono, K. (2020). Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal,8 (2).*

Riyanto, A.D. (2021). *Hootsuite (We Are Sicoal): Indonesia Digital Report 2021.* Diakses dari https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/.

Siaran Pers (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia.* Diakses dari https://memperoleh.com/peran-kewirausahaan-dalam-perekonomian-indonesia-adalah-brainly.

Smesco (2021). *Jelang Tahun 2022, Ini Strategi yang Harus UMKM Lakukan.* Diakses dari https://smesco.go.id/berita/jelang-2022-ini-strategi-yang-umkm-lakukan.

Sosiologi (2018). *Walt Whitman Rostow Lima Tahap Pembangunan.* Diakses dari https://www.sosiologi.info/2018/06/ada-lima-tahap-pembangunan-menurut-w-w-rostow.html.

Supriadi, D. (2019). *Definisi Society 5.0 dan Unsur apa saja yang diperlukan.* Diakses dari https://actconsulting.co/definisi-society-5-0-dan-unsur-apa-saja-yang-diperlukan/.

Totoh, A. (2021). *Digitalisasi UMKM Pasca-Pandemi Covid-19.* Diakses dari https://kumparan.com/asep-totoh/digitalisasi-umkm-pasca-pandemi-covid-19-1wKndoVL0Lz.

Van Ark, B., Erumban, A.,Corrado & Levanon,G.(2016). *Navigating the new Digital Economy: Driving Growth and Productivy from Installation to Deployment.*

We Are Social (2022). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022.

PEMETAAN DAYA SAING DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rosyadi[*]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Daya saing daerah (*local competitiveness*) menggambarkan kemampuan suatu sektor ekonomi daerah bersaing secara relatif dengan sektor ekonomi yang sama daerah lain dan hinggga saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam membangun ekonomi daerah.Perlunya dilakukan pemetaan daya saing daerah, karena akan menjadi informasi penting dan mendasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana capaian kebijakan pembangunan daerah. Empat alat ukur yang digunakan untuk mengetahui daya saing daerah dalam penelitian ini, meliputi : *Location Quotient (LQ), Shift-share, Tipologi Klasen* dan *Indeks Spesialisasi.* Hasil hitung menggunakan nilai skoring terhadap empat alat ukur yang digunakan terhadap masing-masing sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh kelompok sektor ekonomi berdaya saing tinggi (prioritas I) berdasarkan empat parameter pengukuran daya saing, yaitu : Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

JEL: R11, R58.

***Keywords** : Indeks Spesialisasi. Location Quotient, Shift-Share dan Tipologi Klassen.*

1. PENDAHULUAN

Daya saing daerah (*local competitiveness*) menggambarkan kemampuan suatu daerah bersaing secara relatif dengan daerah lain, yang saat ini menjadi salah satu isu penting dalam membangun ekonomi daerah. Tentunya tidak hanya lingkup daerah saja, competitiveness dipandang perlu terlebih di era globalisasi dan keterbukaan ekonomi seperti sekarang ini, yang menuntut kemampuan bersaing sebagai syarat penentu kemajuan maupun kemunduran suatu daerah. Namun demikian, daya saing dapat dilihat dari banyak aspek. Sebab batasan daya saing tersebut masih belum memiliki keseragaman baku baik dalam tahapan konsep maupun indikator-indikatornya.

Daya saing juga pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat serta kemampuannya untuk mempertahankan tingkat pendapatan masyarakatnya yang semakin tinggi secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan jika kemampuan bersaing suatu daerah yang memiliki perbedaan abundand factor serta karakteristik sumber-sumber daya ekonomi, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai sebuah modal dan kekuatan untuk membangun daerahnya dengan tujuan pembangunan dari masing-masing daerah otonom. Kemampuan daerah dalam memproduksi barang maupun jasa yang baik akan mendorong terciptanya iklim investasi yang bagus bagi pelaku usaha atau investor.

[*]Email: rosyadi@ekonomi.untan.ac.id

Perubahan paradigma pembangunan di era otonomi saat ini, telah memberikan ruang gerak dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk senantiasa memiliki semangat "berlomba" atau "berkompetisi secara sehat" dalam mengelola berbagai sumber daya ekonomi yang ada. Tujuannya ialah tidak lain untuk mengembangkan potensi daerah dan pewujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta berdasarkan karakteristik dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di masing-masing daerah. .

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 147.307,00 km2 dihuni rata-rata 37 jiwa/km2 (BPS, 202). Kabupaten Ketapang dengan luas wilayah 31.240,74 km2 atau 21,21% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah terluas namun kepadatan penduduknya hanya dihuni rata-rata 18 jiwa/km2, sementara Kota Pontianak dengan luas wilayah hanya sebesar 107,80 km2 atau 0,07% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang dihuni rata-rata 6.110 jiwa/km2. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang besar tersebut merupakan potential demand untuk mendukung pembangunan, dan akan lebih baik jika penduduk yang besar jumlahnya tersebut memiliki kualitas pendidikan dan pendapatan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi faktor pemicu daya saing ekonomi daerah.

Provinsi Kalimantan Barat dengan total 14 kabupaten/kota tentu memiliki potensi dan karakteritik yang berbeda, sehingga menggambarkarkan kemampuan daya saing yang berbeda-beda pula. Hal inilah sesungguhnya perlu diteliti, dipetakan dan dikaji secara mandalam tentang Daya Saing Daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka akan dilakukan kajian mengenai Pemetaan Daya Saing Daerah Kalimantan Barat, yang akan menghasilkan luaran pemetaan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan maupun kabupaten/kota menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift-share* (SS) serta Tipologi Klassen.

2. KAJIAN LITERATUR

Pembangunan ekonomi pada dasarnya meliputi usaha masyarakat secara keseluruhan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks pembangunan daerah, adanya desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap daerah otonom untuk melaksakan pembangunan dan mengelola daerahnya dengan potensi yang dimiliki, karena setiap daerah memiliki potensi, karakteristik dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya.

Dengan demikian, maka pembangunan daerah pada dasarnya adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Namun pada intinya juga bahwa pembangunan ekonomi memerlukan modal dan tenaga kerja dan teknologi yang bisa saja didatangkan dari luar, sehingga akses ke luar daerah sangat diperlukan. Perbedaan utama antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah dimana pembangunan ekonomi memiliki arti lebih luas, beberapa indikatornya tidak dapat dinyatakan dalam kuantitas semata, namun pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang melibatkan semua aspek multi dimensional.

Sebagai sebuah proses, pembangunan pada dasarnya bukanlah sekadar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekadar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi. Justru mendapat tempat strategis bagi

proses pembangunan. Proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik dalam segala hal.

Indikator utama daya saing ekonomi daerah dikemukakan oleh Abdullah (2002) adalah : (1) Stabililtas perekonomian daerah; (2) Keterbukaan; (3) Sistem Keuangan; (4) Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (6) Sumber Daya Manusia; (7) Kelembagaan; (8) Good Governance dan Kebijakan Pemerinah; dan (9) Manajemen dan Ekonomi Mikro.

Menurut Ambardi dan Socia (2002), kriteria komoditas unggulan suatu daerah, diantaranya: (1) Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (2) Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (3) Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek lainnya; (4) Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali); (5) Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; (6) Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya; (7) Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Di saat komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya; (8) Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal; (9) Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain; (10) Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

3. METODA PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif dimaksudkan bahwa penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan tentang daya saing ekonomi untuk mengetahui peluang dan potensi daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif maksudnya adalah obyek penelitian dijelaskan dengan perhitungan data yang berupa angka-angka dan dilakukan analisa secara matematik, kemudian dilakukan interpretasi terhadap data di lapangan dan hasil hitungan kuantitatif diikuti penjelasan asgumentasi yang bersifat penalaran secara logis dan menyeluruh. (Sugiono, 2006). Adapun metode penelitian menggunakan metode Location Quotient (LQ), Shift-share (SS), Tipologi Klassen dan Indeks Spesialisasi yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan pada uraian dibawah ini.

3.1. *Location Quotient* (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dan sering digunakan dalam model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Arsyad, 2010). Metode ini digunakan untuk menghitung kapasitas ekspor suatu perekonomian (wilayah) dan juga untuk mengetahui derajat kemandirian suatu sektor di perekonomian wilayah tersebut. Dalam proses penghitunganya analisis LQ menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan perekonomian acuan yang meliputi daerah yang lebih besar. Metode ini relatif tidak

terlalu sulit, karena prosesnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak data, sehingga mudah dilakukan dengan cepat.:

$$LQi = \frac{Kij/Kj}{Kin/Kn} \quad \text{.....(1)}$$

Dimana :
LQi : Location Quontient sektor i perekonomian lokal
Kij : Produksi sektor i dalam perekonomian lokal
Kj : Total produksi dalam perekonomian lokal
Kin : Produksi sektor i perekonomian provinsi
Kn : Total Produksi dalam perekonomian provinsi

3.2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah: Suatu teknik analisis kuantitatif untuk tujuan menganalisis apakah ada perubahan struktur ekonomi secara relatif terhadap struktur ekonomi administratif daerah referensinya, dalam hal ini pemerintahan adminsitratif satu tingkat di atasnya (contoh : kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat). Dalam menghitung Shift Share, akan ditemukan beberapa formulasi, yang memberikan makna sebagai berikut:
Dij = Nij + Mij + Cij ..Dampak Riil Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Nij = Eij + Rn…….. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Referensi di sektor i Daerah j + Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Mij = Eij (Rin-Rn)…Pergeseran Proporsional sektor r I Daerah j x (Laju Pertumbuhan Sektor i Nasional - Laju Pertumbuhan Nasional).
Cij = Eij (Rij-Rin)...Pengaruh Keunggulan Kompetitif/Daya Saing sektor i Daerah j x (Laju Pertumbuhan Sektor i Daerah j - Laju Pertumbuhan Nasional).

3.3. Tipologi Klassen

Analisis *Typologi Klassen* dan Matrik Typology Klassen, sesungguhnya menggunakan pendekatan perbandingan yang membandingkan data pertumbuhan dan kontribusi dari seluruh sektor ekonomi yang ada dalam PDRB baik di daerah kabupaten/kota maupun PDRB provinsi. Lebih lanjut dari penggunaan data perbandingan tersebut, ditempatkan dalam sebuah tabel perbandingan data pertumuhan dan kontribusi serta menghasilkan sebuah matrik Tipologi Klassen, seperti dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Klasifikasi Tipologi Klassen

3.4. Indeks Spesialisasi

Indeks Spesialisasi adalah untuk mengukur perilaku kegiatan ekonomi secara keseluruhan, untuk melihat bagaimana tenaga kerja atau pendapatan regional di suatu wilayah tersebar (Daryanto & Hafrizianda, 2010). Adapun formulasi metode analisis Indeks Spesialisasi adalah sebagai berikut :

$$IS = \frac{\sum Selisih\ (+)}{100} \quad \ldots\ldots\ldots\

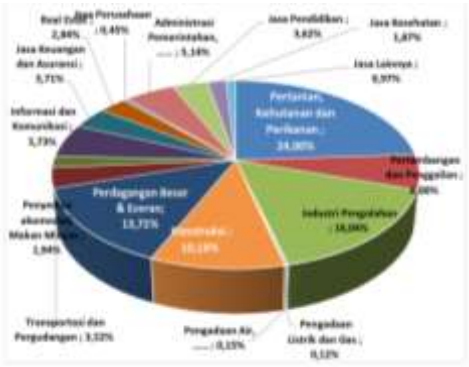

Sumber. BPS Prov. Kalbar (diolah)

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Kalimantan Barat

4.2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Terdapat 7 sektor ekonomi basis di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020, yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,659); (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,677); (3) Konstruksi (1,041); (4) Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,071); (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (1,426); (6) Jasa Pendidikan 1,203; dan (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,246). Sektor basis atau unggulan tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan Kalimantan Barat sendiri dan berpotensi untuk di pasarkan di daerah lain dalam lingkup nasional.

Terdapat 10 sektor ekonomi non basis di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Sektor non basis atau bukan unggulan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat sendiri dan tidak memiliki potensi untuk di pasarkan di daerah lain di luar Provinsi Kalbar. Sektor non basis ini hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk di daerah sendiri atau bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu masukan dari daerah lain. Terdapat beberapa sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan dan bergeser menjadi sektor basis/unggulan (nilai LQ mendekati 1), yakni Sektor Transportasi Pergudangan (0,981) dan Sektor Real Estate (0,927).

4.3. Analisis *Shift-Share* (SS)

Dengan menggunakan analisis shift-share diketahui bahwa untuk kurun waktu 2016-2020, sektor yang memiliki nilai National share (Nij) terbesar di Provinsi Kalimantan Barat adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 978,24 atau Rp. 978,24 miliar, sedangkan sektor dengan nilai National share (Nij) terkecil adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,46 atau Rp. 4,46 Miliar. PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertambahan nilai perekonomian daerah sebesar Rp 4.442,14 miliar. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang positif pada hampir semua sektor kegiatan ekonomi, dan hanya Sektor Transportasi & Pergudangan serta Sektor Akomodasi, Makan & minum yang mengalami penurunan (Nilai Dij Negatif, masing-masing sebesar -38,79 dan -4,00).

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 8 Sektor Ekonomi yang kompetitif/berdaya saing tinggi hal ini terlihat dari nilai Cij yang positif (kompetitif/daya saing) selama periode 2016-2020, yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Informasi dan Komunikasi; (7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. 8 sektor di Provinsi Kalimantan Barat tersebut, telah

menunjukkan daya saing yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat perekonomian nasional dalam periode yang sama.

Sementara itu output yang dihasilkan dari bauran industri (industri mix) (Mij) dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat sebagai hasil interaksi antar kegiatan industri dimana adanya aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain dan menyerupai aktivitas yang lain sehingga diketahui apakah perekonomian Provinsi Kalimantan Barat pada industri-industri/sektor yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian tingkat nasional (Nilai Mij yang positif) meliputi sektor : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Konstruksi 80,07; (4) Informasi dan Komunikasi 391,38; (5) Jasa Keuangan dan Asuransi; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (11) Jasa Lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan nilai positif (Nij) pada setiap sektor ekonomi dengan total nilai output Rp 4.220,53 miliar. Sedangkan jika dilihat dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional, menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional, dengan nilai pertumbuhan Rij sebesar 0,0338 atau 3,38% berbanding nilai Pertumbuhan Rin sebesar 0,0327 atau 3,27%. Beberapa sektor ekomi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional, kecuali Sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyedian akomodasi dan Makan Minum,Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya.

4.4. Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen, dapat diketahui bahwa terdapat 4 sektor yang berkualifikasi prima di Provinsi Kalimantan Barat, yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor diatas mempunyai pertumbuhan yang relatif cepat dan memiliki kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional. Dapat dikatakan sektor-sektor ekonomi diatas telah dinilai maju dilihat dari pertumbuhan dan kontribusinya yang tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, sektor yang berkualifikasi potensial di Provinsi Kalimantan Barat yakni: (1) Konstruksi; (2) Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Informasi dan Komunikasi; dan (4) Jasa Pendidikan. Sektor dan diatas mempunyai pertumbuhan yang relatif lambat namun memiliki kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional. Dapat dikatakan sektor-sektor ekonomi diatas memiliki potensi untuk menjadi sektor maju di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, sektor dan yang berkualifikasi berkembang di Provinsi Kalimantan Barat yakni: (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Industri Pengolahan; dan (3) Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor diatas adalah sektor dan dengan pertumbuhan yang relatif lebih cepat tetapi kontribusi sektor tersebut relatif lebih kecil daripada sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional. Dapat dikatakan sektor-sektor

ekonomi diatas telah maju namun dalam kondisi yang tertekan karena kontribusi sektror di Provinsi Kalimantan Barat lebih kecil dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional.

Dan terakhir, sektor yang berkualifikasi terbelakang di Provinsi Kalimantan Barat yakni: (1) Transportasi dan Pergudangan; (2) Penyedian akomodasi dan Makan Minum; (3) Jasa Keuangan dan Asuransi; (4) Real Estate; (5) Jasa Perusahaan; dan (6) Jasa Lainnya. Sektor diatas ada adalah sektor dengan pertumbuhan yang relatif lebih lamban serta kontribusi sektor tersebut relatif lebih kecil daripada sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional. Dapat dikatakan sektor-sektor ekonomi diatas merupakan sektor yang tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat

Selain dilakukan pemetaan terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan juga pemetaan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita masing-masing wilayah, dengan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut.

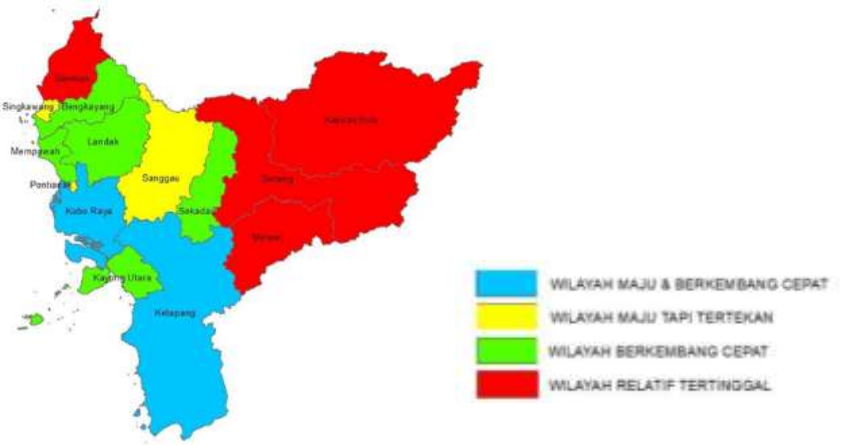

Sumber. Hasil Perhitungan Data (diolah)

Gambar 4. Pemetaan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Pendekatan Tipologi Klassen

4.4. Analisis Indeks Spesialisasi

Untuk mendapatkan hasil analisis dengan menggunakan teknis analisis Indeks Spesialisasi, maka digunakan data nilai tambah PDRB untuk wilayah Provinsi Kalimanya Barat dan data nilai tambah PDB Nasional, dengan menghitung persentase dari nilai tambah tersebut dimasing-masing wilayah kemudian di cari selisih persentase yang diperoleh untuk masing-masing wilayah. Besarnya Indeks Spesialisasi adalah :

$$IS = \frac{\sum Selisih\ (+)}{100} = 34,84 = 0,34$$

Nilai Indeks Spesialisasi (IS) sebesar 0,34 mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektoral di Provinsi Kalimantan Barat sangat rendah, hal ini berarti konsentrasi sektor ekonomi tersebar cukup merata dalam perekonomian wilayah, dimana ada dua puluh delapan (28) yang bertanda (+) sektor produksi yang menjadi konsentrasi pertumbuhan di Provinsi Kaliamantan Barat, di antaranya adalah sebagai berikut : (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Sektor Konstruksi, (4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Sektor Real Estate, (6) sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, (7) sektor Jasa Pendidikan, (8) sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), terdapat 7 sektor ekonomi (41%) yang potensial atau sektor unggulan, dan 10 sektor ekonomi (59%) yang tidak potensial atau bukan sektor unggulan. Ketujuh sektor ekonomi potensial/unggulan Provinsi Kalimantan Barat yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Konstruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (6) Jasa Pendidikan; dan (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
2. Berdasarkan analisis Shift-share, sektor ekonomi terbesar Provinsi Kalimantan Barat yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Informasi & Komunikasi; (4) Industri Pengolahan; dan (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Terdapat 11 sektor ekonomi (65%) yang memiliki bauran industri positif, dan 6 sektor ekonomi (35%) yang memiliki bauran industri negatif. Selanjutnya, jika dilihat dari daya saing sektor Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 8 sektor ekonomi (47%) yang berdaya saing tinggi, dan 9 sektor ekonomi (53%) yang berdaya saing rendah.
3. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, didapatkan hasil bahwa Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 sektor ekonomi (23%) berkategori prima, 4 sektor ekonomi berkategori potensial (24%), 3 sektor ekonomi (18%) berkategori berkembang, dan 6 sektor ekonomi (35%) kategori terbelakang. Kelima sektor ekonomi prima Provinsi Kalimantan Barat yakni (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Administrasi PemeRintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
4. Berdasarkan analisis hasil perhitungan Indeks Spesialisasi (IS), di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 9 sektor produksi yang menjadi konsentrasi pertumbuhan yaitu : (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Sektor Konstruksi, (4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (5) Sektor Real Estate, (6) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, (7) sektor Jasa Pendidikan, (8) sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seyogyanya menyusun rencana pembangunan dengan mempertimbangkan hasil-hasil analisis, seperti Location Quotient (LQ), Shift-share dan Tipologi Klassen sehingga menjadi lebih tepat sasaran, daya guna maksimal untuk mempercepat terwujudnya citacita pembangunan Provinsi Kalimantan Barat; (2) Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat seyogyanya fokus pada sektor-sektor yang tergolong prima, yakni : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan kontrol terhadap proses perencanaan yang akan ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berjenjang dan berkala untuk melihat hasil dan capaian; Dan (4) Strategi dan kebijakan yang perlu di lakukan pemerintah daerah

dalam upaya meningkatkan daya saing daerah adalah dengan penguatan pada sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dan perbaikan produktivitas di setiap sektor ekonomi, optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan kinerja lembaga melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dan secara keseluruhan, infrastruktur dan produktivitas adalah faktor kunci yang menentukan daya saing (atau kurangnya daya saing).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, P. et al. (2002). Daya Saing Daerah:Konsep dan Pengukurannya Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Ambardi, U.M dan Socia, P. (2002). Pengembangan Wilayah dan Otonomi. Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah. (P2KTPW-BPPT).

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2020). Kalimantan Barat Dalam Angka 2020. Pontianak : BPS.

_____. (2022). Kalimantan Barat Dalam Angka 2020. Pontinak : BPS.

_____. (2022). Produk Domestik Bruto Indonesia 2020. Jakarta : BPS.

_____. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat 2020. Pontianak : BPS.

Daryanto, A. & Hafizrianda. H. (2010). Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembuilding Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi. Bogor : IPB Press.

Sugiyono. S. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.

EKSTERNALITAS KEGIATAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

Sri Kurniawati[1]
Yeni[2]
Windhu Putra[3]
Nindya Lestari[4]
[1,2,3,4)] *Universitas Tanjungpura, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung perbedaan pendapatan, sosial, lingkungan sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit, Desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Limau. Perubahan yang terjadi karena berdirinya perusahaan kelapa sawit akan berdampak positif atau sebaliknya akanmenimbulkan hal negatif yang justru merugikan masyarakat sekitar. Bentuk penelitianmerupakan penelitian kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan data primer. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada aspek lingkungan, sosial juga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap masyarakat di kecamatan Sungai Kunyit.

JEL: Q10, Q5, Q52, Q53

Keywords*: kelapa sawit, pendapatan, sosial, lingkungan*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensi meliputi perubahan struktur sosial, perubahan sikap masyarakat terhadap kehidupan dan perubahan sistem. Selain itu, pembangunan mencakup perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan berkaitan dengan berbagai macam aspek baik aspek ekonomi maupunnon ekonomi. Menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah ke setiap daerah yang bergantung pada sumber daya alam daerah. Namun kadang, pengembangan sumber daya sering terjadi tanpa memperhatikan ketersediaan sumber daya masa depan dan kerusakan akibat eksploitasi (Muklis, 2016).

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berkembang menjadi kesempatan untuk memuaskan aspirasi manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang mendukung sifat berkelanjutan dapat digambarkan menjadi tiga pilar, yaitu aspek sosial dikenal sebagai kebutuhan standar manusia, aspek lingkungan dikenal sebagai ekologi atau bumi, dan

[1]Email: sri.kurniawati@ekonomi.untan.ac.id

aspek ekonomi dikenal sebagai uang atau keuntungan (Greece 2013).

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia menjadi aset penting terutama dalam upaya meningkatkan perkembangan perekonomian negara. Dalam meningkatkan perkembangan perekonomian tersebut sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah (Fahrizal,2016). Suatu kegiatan perekonomian hendaknya memberikan pengaruh positif dan menguntungkan bagi masyarakat. Peningkatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah yang dibangun.

Kegiatan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah memiliki perusahaan asing yang berasal dari Singapura yang terletak di antara desa Sungai Limau dan desa Sungai Kunyit Laut dengan nama PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) merupakan sebuah perusahaan yang kegiatannya fokus di bidang operasional pengolahan minyak kelapa sawit beserta turunannya yaitu *olein* / minyak goreng, PFAD, *Fatty acid*, *stearin*, dan *biodiesel*. Kegiatan perusahaan kelapa sawit di Desa Sungai Limau dan Sungai Kunyit Laut memberikan pengaruh terhadap sosial pendapatan dan lingkungan masyarakat.

Dampak positif berarti adanya dampak yang menguntungkan bagi masyarakat dari adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah adanya kesempatan untuk membuka usaha seperti warung kopi dan rumah makan di sekitar kegiatan perusahaan kelapa sawit. Dampak negatif yang dianggap merugikan masyarakat maupun pihak yang tidak terlibat langsung dari adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit antara lain adalah pencemaran lingkungan, rusaknya akses jalan raya hingga terjadinya kecelakaan dan kebisingan yang ditimbulkan.

Sebelum perusahaan kelapa sawit beroperasi (sebelum tahun 2017), sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan (209 orang), petani (102 orang), dan wiraswasta (284 orang).

Setelah adanya kegiatan perusahaan tersebut, masyarakat bekerja sebagai nelayan turun menjadi 180 orang, petani menjadi 312 orang, sedangkan wiraswasta meningkat hingga mencapai 434 orang (Kantor Desa Sungai Kunyit Laut, 2020). Perubahan ini terjadi karena kegiatan perusahaan kelapa sawit menyebabkan sebagian masyarakat beralih pekerjaan.

Dari pemaparan terdahulu, tidak selamanya perusahaan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar yang mencakup pendapatan, sosial dan lingkungan Kecamatan Sungai Kunyit Laut dan Sungai Limau. Oleh sebab itu, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: menganalisis perubahan jumlah pendapatan masyarakat; menganalisis eksternalitas sosial dari adanya perusahaan kelapa sawit; dan menganalisis eksternalitas lingkungan masyarakat dengan adanya perusahaan kelapa sawit.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Eksternalitas

Ronald Coase menjelaskan bahwa jalan keluar penyelesaian konflik berkenaan dengan eksternalitas negatif dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangannya. Jika syarat itu terpenuhi maka pihak swasta mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya Walaupun secara teoritis Teorema Coase dianggap baik sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari yangsulit untuk dilakukan, namun kadangkala masih diperlukan tawar-menawar dengan biaya yang tinggi. Eksternalitas muncul ketika

seseorang terlibat dalam kegiatan yangmemengaruhi kesejahteraan orang lain tetapi tidak membayar dan menerima kompensasi atas dampak tersebut. Jika dampak karena aktivitasnya buruk, maka disebut eksternalitas negatif. Jika dampak dari kegiatan tersebut baik, maka disebut eksternalitas positif (Coase, 2013).

2.2. Konsep Eksternalitas

Konsep eksternalitas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi saat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan manfaat pada individu atau kelompok (Sankar, 2008). Jika suatu kegiatan memberikan manfaat bagi orang lain dan orang tersebut tidak membayar atas manfaat yang diterima, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam pasar (Selvia, 2016). Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas individu atau kelompok berdampak buruk pada orang lain. Contoh eksternalitas negatif adalah akibat pencemaran yang terjadi selama kegiatan pabrik. Ketika sebuah perusahaan membuang limbah ke laut atau ke sungai-sungai di sekitar perusahaan, proses ini menciptakan eksternalitas negatif. Penduduk yang tinggal di tepi laut akan menanggung biaya eksternal dari kegiatan ekonomi tersebut berupa gangguan kesehatan dan berkurangnya pasokan air bersih (Sankar, 2008).

2.3. Bentuk Eksternalitas

a. Ekonomi dan Sosial

Dampak eksternalitas sosial ekonomi terhadap kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat ditentukan oleh macam-macam aktivitasekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah tinggal, dan jabatan dalam suatu organisasi. Karakteristik sosial tersebut dapat meliputi status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter ekonomi meliputiantara lain aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan juga pendapatan. Setelah berdirinya perusahaan tentunya dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Contoh yang dapat diambil ialah masyarakat yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani kini beralih profesi sebagai karyawan swasta atau wiraswasta. Dengan melakukan alih profesi tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan sekarang. Norma-norma yang ada dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Keinginan terhadap sesuatu yang baru mendorong munculnya perubahan sosial (Faritz, 2017).

b. Lingkungan

Kegiatan produksi pada perusahaan industri kelapa sawit dapat berdampak pada lingkungan sekitar tempat tinggal penduduk. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dari Mei 2019 hingga Juli 2019, menemukan bahwa industri kelapa sawit memiliki dampak positif pada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Pendirian perusahaan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang bisnis. Industri ini menawarkan banyak manfaat bagi orang-orang yang tinggal di dekat perusahaan, termasuk dukungan keuangan untuk anak yatim, dukungan untuk pemeliharaansekolah, dan dukungan untuk perbaikan jalan (Hidayah, 2021).

Penelitian tentang eksternalitas perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memberikan dampak negatif yang sangat fatal terhadap sosial dan lingkungan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan pertambangan (Suciadi, 2021). Namun penelitian pada kegiatan pembangunan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Pasir

Mandoge justru menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini tampak dari hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara peran masyarakat sebagai pekerja, petani dan pengusaha (Syahputra, 2021).

3. METODA PENELITIAN

Bentuk penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitati yang bertujuan untuk menggambarkan maupun memaparkan suatu hal, seperti kondisi, keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan berdasarkan fakta yang ada. Dengan metode ini penulis berharap dapat memahami serta menganalisis bagaimana realitas di lapangan tentang dampak kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap masyarakat Sungai Kunyit Laut dan Sungai Limau. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2021. Tempat penelitian dilakukan diProvinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah , Kecamatan Sungai Kunyit Desa Sungai Limau dan Sungai Kunyit Laut (Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Limau).

Populasi penelitian ini merupakan masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit. Desa yang saya ambil sebagai sampel yaitu Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Limau. Keputusan ini diambil berdasarkan Perusahaan Kelapa sawit terletak di antara Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Limau dengan jumlah penduduk 3.020 jiwa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dikumpulkan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Peneliti bermaksud untuk menentukan responden yang memenuhi kriteria inklusi. Inklusi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat sungai kunyit laut dan sungai limau yang berada di dekat perusahankelapa sawit dengan jarak 5-10 km
2. Masyarakat sungai kunyit laut dan sungai limau yang berusia ≥ 25 tahun.
3. Masyarakat sungai kunyit laut dan sungai limau yang sudah tinggal selama 10 tahun Metode

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama mengenai pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit digunakan uji beda t-test dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2011), dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n_A} + \frac{S_B^2}{n_B}}}$$ ..... Rumus 1

Kriteria uji :

- Nilai signifikansi ≥ 0,05 maka H_0 ditolak.
- Nilai signifikansi < 0,05 maka H_1 diterima.

Hipotesis :

- H_0 : Tidak ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dansesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit
- H_1 : Adanya perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dansesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit.

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua tentang eksternalitas sosial digunakan analisis deskriptif berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya yang berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara terhadap masyarakat setempat. Dalam metode analisis deskriptif dijelaskan pandangan masyarakat tentang lingkungan setelah adanya perusahaan kelapa sawit. Teknis analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga tentang eksternalitas lingkungan menggunakan analisis deskriptif. Melalui teknis analisis ini, akan diperoleh pandangan masyarakat dampak kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap lingkungan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbedaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Adanya Kegiatan Perusahaan Kelapa Sawit.

Uji beda t dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji paired t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan masyarakat dengan terjadinya kegiatan perusahaan kelapa sawit di Desa Sungai Kunyit dan Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Laut menggunakan SPSS. Berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan perhitungan hasil uji berpasangan mengenai pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit.

Tabel 4.1. Uji t-Test Berpasangan

	Panel Difference			T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	95% Confidence Interval of The Difference				
		Lower	Upper			
Sesudah – Sebelum	153.030	101.984,8	204.075,23	5,95	99	0,0005

Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji beda berpasangan dengan nilai t hitung 5,95 lebih besar dibandingkan t tabel (1,984). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit. Hasil ini didukung oleh jawaban responden (85%) yang menyatakan telah terjadi kenaikan pendapatan sejak adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit. Pendapatan yang mereka peroleh sekarang cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan keluarga yang tentunya dapat membuat kondisi masyarakat semakin sejahtera. Bahkan masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil dan BUMN menyambut baik peluang usaha dengan mendirikan sebuah toko/usaha di sekitar perusahaan seperti warung untuk menambah pendapatan mereka.

Keberadaan perusahaan kelapa sawit juga membuka industri baru yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, di antaranya adalah semakin bertumbuhnya industri makanan yang diproduksi oleh beberapa rumah tangga yang berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Hal ini mampu meningkatkan penghasilan rumah tangga dan beberapa penduduk yang menjadi tenaga kerja bagi tetangganya sendiri.

4.2. Ekternalitas Sosial Dari Adanya Perusahaan Kelapa Sawit

Eksternalitas sosial yang dialami masyarakat sekitar perusahaan kelapa sawit meliputi kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Kegiatan perusahaan kelapa sawit yang mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat telah mengubah pola berobat masyarakat setempat. Tabel 4.2 menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat sebelum adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit, masyarakat lebih banyak berobat di puskesmas (47%) dikarenakan jarak yang cukup dekat sehingga masyarakat tidak memerlukan besar. Adanya perusahaan kelapa sawit menyebabkan masyarakat yang semula berobat ke puskesmas, beralih ke rumah sakit. Meskipun jauh dan membutuhkan biaya lebih besar, namun dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik, masyarakat lebih memilih beralih ke rumah sakit (50%) untuk memeriksakan kesehatannya.

Tabel 4.2. Kunjungan Kesehatan

Jenis Kunjungan Kesehatan	Sebelum %	Sesudah %
Puskesmas	47%	35%
Rumah sakit	25%	50%
Klinik	18%	7%
Dokter praktek	10%	8%
Jumlah	**100%**	**100%**

Kesehatan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur kesejahteraan. Kesejahteraan dari sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup sebagai dampak kehidupan sosial masyarakat sebelum dan sesudah berdirinya perusahaan kelapa sawit. Sebelum adanya perusahaan kelapa sawit kesejahteraan masayarakat dapat dilihat seperti pendapatan, lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Setelah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit, terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat, terutama pada pendapatan masyarakat. Masyarakat yang awalnya tidak berkeja, berhasil mendapatkan perkejaan tetap sejak beroperasinya perusahaan kelapa sawit, sehingga kesejahteraan mereka mengalami peningkatan.

Eksternalitas terjadi ketika suatu kesejahteraan pelaku ekonomi baik perusahaan maupun rumah tangga tidak hanya tergantung pada aktivitas yang mereka lakukan, namun juga tergantung pada aktivitas pelaku ekonomi lainnya. Tipe eksternalitas yang ditimbulkan terdiri dari eksternalitas ekonomi dan eksternalitas non-ekonomi. Misalnya, pencemaran air merupakan salah satu contoh eksternalitas yang merepresentasikan jenis eksternalitas non-ekonomi, sedangkan secara umum apabila eksternalitas ekonomi (Lewis dkk, 2010). Pada umumnya kesejahteraan berhubungan dengan kebutuhan dasar kebutuhan dasar mencakup kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan Jika kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan manusia sudah terpenuhi, dan sebaliknya jika kebutuhan belum tercukupi maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraannya masih berada di garis kemiskinan (Todaro, 2012).

4.2. Ekternalitas Lingkungan Dari Adanya Perusahaan Kelapa Sawit

Berdasarkan jawaban pertanyaan kepada responden terhadap lingkungan yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit, diketahui bahwa dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas jalan dan kualitas air, serta penumpukan sampah di mana-mana. Dengan adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Jika kondisi lingkungan berubah maka pola kehidupan dari ekosistem itu juga berubah, sehingga ekosistem terganggu yang akibatnya akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Terganggunya ekosistem terutama sekali disebabkan karena adanya gangguan terhadap kondisi lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal seperti pencemaran, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan dan sebagainya. Sebelum

adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit lingkungan masyarakat cukup baik, tidak banyak penumpukan sampah dan jarangnya terjadi banjir. Namun sesudah adanya kegiatan perusahaan kelapa sawit banyak terjadi perubahan ke arah yang lebih buruk terhadap lingkungan.

Aktivitas perusahan kelapa sawit tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dari luar. Pada dasarnya, lingkungan tersebut tercemar akibat masyarakat luar desa melalui kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Sampah yang menyumbat saluran drainase selalu muncul ketika musim hujan. Banyaknya tumpukan sampah yang terbawa hujan mengakibatkan meluapnya air yang akhirnya menyumbat saluran drainase di lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat luar dan masyarakat setempat terhadap lingkungan. Semakin banyaknya jumlah limbah tanpa pengolahan, menyebabkan semakin beratnya beban lingkungan untuk menampung dan melakukan degradasi. Penumpukan sampah yang tak terkendali akan menimbulkan berbagai dampak seperti bau menyengat, pemandangan yang kotor dan menimbulkan masalah estetika lain yang tidak diharapkan. Kondisi air permukaan dan air tanah terlihat kotor, hitam, dan banyak endapan hasil pembusukan bahan organik buangan dari lingkungan sekitar. Bahkan ketika banjir, air yang tergenang akan surut dalam 5-14 hari kemudian. Salah satu akibat buruk yang muncul dari keberadaan kegiatan perusahaan kelapa sawit adalah pencemaran air. Berdasarkan wawancara kepada warga, pencemaran yang dilakukan perusahaan kelapa sawit terhadap pemukiman masyarakat yaitu air sumur menjadi hitam karena limbah cair yang dapat merusak air tanah dan badan air.

Akibat lain yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan kelapa sawit adalah kerusakan jalan karena sering dilalui oleh kendaraan bermuatan besar seperti truk dan mobil pengangkut *Crude Palm Oil* (CPO) yang dapat menyebabkan jalan menjadi cepat rusak dan berlobang. Padahal, jalan raya merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang diperlukan masyarakat untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainya. Selain itu, banyaknya mobil bermuatan besar yang lalu lalang juga menyebabkan polusi udara berupa karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

5. SIMPULAN

Aktivitas perusahaan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Limau dengan cukup baik. Hal ini karena kehadiran perusahaan kelapa sawit menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan usaha baru. Kegiatan perusahaan kelapa sawit terhadap lingkungan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat seperti penumpukan sampah, pencemaran air dan udara, serta seringnya terjadi banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Coase. (2013) The problem of social cost. The journal of Law and Economics, Vol 56, No 4, 837-877.

Fahrizal. (2016). Analisis Eksternalitas Pabrik Kerupuk Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Faritz. (2017). Pengaruh Keberapadaan Perusahaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakar Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun. Jurusan Sosiologi, Vol 4, No 2, 219-230.

Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Bidang Penerbit Universitas Diponegoro

Greece. (2013). Prinsip-Perinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. Jurnal Transportasi, Vol 13, No 2, 40-50.

Hidayah. (2021). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat . Jurnal Agribirsnis, Vol 3, No 2, 1-14.

Muklis. (2012). Eksternalitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspekti fTeoritis. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol 3, NO 4 , 87-97.

Selvia. (2016). Analisis Eksternalitas PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Vol 3, No 3, 24-32.

Todaro. (2012). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jakarta Erlangga. Dampak Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi

Suciadi. (2021). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 4, No 2, 89-90.

Syahputra. (2021). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Surolus Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Kec. Bandara Pasir Manoge, Kab. Asahan). Journal of Information Technology and Accounting, Vol. IV, No 2,, 1260-1270.

DETERMINAN EKSPOR BATUBARA INDONESIA

Yanto[1]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia's export activities consist two main sectors, namely the oil and gas and non-oil and gas sectors. Non-oil and gas exports include production in the agricultural sector, industrial sector, mining sector, and others. Nowdays, Indonesia's exports have been dominated by the non-oil and gas commodities. One of the products of non-oil and gas commodity production which has a highly export demand is coal commodity. The use of coal in the energy sector is an alternative to fuel oil. General economic theory says that the demand for goods and sevices determined by the price. When prices fall, the demand increases. An increase in a country's income also causes an increase in demand for imports. The factor of taste or similarity of income also has a positive impact on export-import activities of goods. This study uses data on Indonesian coal exports to five main destination countries (China, India, Japan, South Korea, Malaysia). The regression model used is the estimation of the SAR (Spatial Autoregressive Model), SEM (Spatial Error Model), and GSM (Generalized Spatial Model). The three spatial estimation models show that two of the three export determinants, namely price and income, show a significant influence, while taste or similarity of income shows no significant effect.

Keywords*: export, price, spatial*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan upaya mobilisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir di seluruh dunia saat ini, peran perdagangan internasionalnya semakin penting dimana keterbukaan menjadi semakin luas, investasi semakin meningkat, serta banyaknya bentuk kerjasama di berbagai bidang atau sektor. Perdagangan internasional dilaksanakan melalui kegiatan ekspor dan impor.

Perdagangan internasional timbul karena keinginan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan, misalnya untuk mendapatkan devisa dari kegiatan ekspor atau memperluas pasar untuk produk-produk yang tak terserap di pasar dalam negeri. Manfaat lain misalnya untuk memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, serta transfer teknologi negara lain, dengan mengimpor mesin-mesin industri yang lebih modern.

Kegiatan ekspor Indonesia meliputi dua sektor utama yaitu sektor migas (minyak dan gas) dan non migas. Ekspor non migas meliputi hasil produksi di sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan, dan lain-lain. Hingga kini, ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas di sektor non migas. Salah satu hasil produksi komoditas non migas yang memiliki permintaan ekspor yang cukup tinggi adalah komoditas batubara. Penggunaan batubara di sektor energi menjadi alternatif pengganti

[1] Email: yanto@ekonomi.untan.ac.id

bahan bakar minyak. Sebagaimana minyak bumi, keberadaan sumber energi batubara ini juga semakin terbatas dan tidak dapat diperbaharui.

Indonesia mulai mengekspor batubara sejak tahun 90an, hingga kini Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar dunia. Kekayaan batubara Indonsia yang melimpah saat ini mencapai 38,84 miliar ton (Kementrian ESDM, 2021), dengan rata-rata produksi per tahunnya sebesar 600 juta ton. Menurut IEA (International Energy Agency), tahun 2020 Indonesia menjadi pengekspor batubara tertinggi dunia yaitu sebesar 405 juta ton, kemudian dikuti oleh Australia sebesar 390 juta ton, Rusia (212 juta ton), Amerika Serikat (63 juta ton), Afrika Selatan (63 juta ton), Kanada (32 juta ton), Kolombia (30 juta ton), Mongolia (29 juta ton), dan Uni Eropa (9 juta ton). Hal ini menunjukkan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sumber daya batubara dunia.

Batubara telah menjadi produk sektor pertambangan yang menjadi primadona ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Berikut volume ekspor batubara ke lima negara utama tujuan ekspor.

Tabel 1. Ekspor Batubara Indonesia ke Negara Tujuan Utama (Juta Ton)

Tahun	Tiongkok	India	Jepang	Korea Selatan	Malaysia
2011	76.916	73.598	35.421	38.895	17.267
2012	81.600	94.681	35.068	37.899	16.034
2013	89.777	116.823	37.846	36.149	17.120
2014	49.781	134.451	35.579	35.574	14.452
2015	36.684	123.364	32.406	32.703	16.504
2016	50.843	94.629	33.037	34.929	17.272
2017	48.167	98.553	31.421	38.075	21.189
2018	48.135	110.377	28.722	37.150	22.045
2019	65.670	121.692	28.436	29.550	25.323
2020	62.492	98.243	26.965	24.831	26.706

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Tabel 1 menunjukkan perekembangan ekspor batubara Indonesia kelima negara tujuan ekspor, dimana India menjadi tujuan ekspr terbesar, kemudian diikuti oleh Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Hampir semua tujuan ekspor mengalami penurunan kecuali India, sementara ke Malaysia cenderung meningkat. Menurunnya ekspor batubara disebabkan kondisi ekonomi negara tujuan seperti China, dimana tahun 2014 dan 2015 menunjukkan kondisi perekonomian yang melambat, serta adanya dampak krisis global.

Penelitian terhadap ekspor batubara Indonesia perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi penting yang menjadi penentu dalam permintaan batubara dunia. Oleh karena itu penelitian ingin menganalisis faktor-faktor atau determinan dari ekspor batubara Indonesia, terutama pada kelima tujuan utama ekspor. Kajian ekspor dari sisi permintaan dapat menjadi hal yang menarik dalam memahami mobilitas barang ke negara lain, karena ekspor tidak semata terjadi hanya karena perbedaan harga, tetapi juga dapat terjadi karena hal yang lain seperti selera.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori umum mengatakan bahwa permintaan barang adalah dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Ketika harga turun yang menyebabkan adanya perbedaan harga jual di suatu wilayah dengan wilayah lain, maka akan terjadi mobilitas barang sehingga permintaan barang tersebut meningkat.

Permintaan terhadap barang dan jasa adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga. Teori permintaan menerangkan hubungan antara jumlah permintaan dan harga; dimana hubungan tersebut adalah berslope negatif, yang berarti bila harga meningkat maka pemintaan turun, dan sebaliknya bila harga turun maka pemintaan akan meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga, pendapatan, harga barang lain, selera, serta ekspektasi atau perkiraan mengenai masa mendatang yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa saat (Mankiw, 2003: 85).

Dengan asumsi barang normal dan variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*), bila harga barang X mengalami kenaikan maka jumlah barang X yang diminta oleh suatu negara makin menurun. Sesuai dengan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berubah secara berlawanan arah dengan dengan perubahan harga atau berhubungan negatif (Nicholson, 1997).

Pengaruh pendapatan atau kekuatan ekonomi terhadap permintaan ekspor pada dasarnya pendapatan memiliki hubungan positif dengan tingkat permintaan, semakin tinggi pendapatan suatu negara maka semakin tinggi pula kemampuan impor negara tersebut atau apabila pendapatan suatu negara meningkat, maka pembelian atau permintaan barang luar negeri dapat juga mengalami kenaikan (Nopirin, 1999).

Selain harga dan pendapatan, Hipotesis Linder's yang menyatakan bahwa suatu negara akan semakin sering melakukan perdagangan bila kedua negara tersebut memiliki kesamaan struktur selera permintaannya. Sebagai contohnya sebuah negara masih mengimpor suatu barang yang pada dasarnya sudah bisa diproduksi sendiri dengan harga yang sama (Feenstra, 2002)

Beberapa penelitian terkait, seperti penelitian oleh Ariesta (2021) dengan menggunakan model regresi Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menunjukkan bahwa PDB per kapita, inflasi dan kurs memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ekspor batubara Indonesia ke Hongkong. Selanjutnya penelitian oleh Aristiyanti (2020) menemukan bahwa volume produksi dan harga batubara berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor batubara Indonesia; sementara harga batubara Australia dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap ekspor batubara Indonesia. Penelitian oleh Carolina dan Aminata (2019) mengungkapkan bahwa PDB per kapita dan jarak memiliki dampak positif signifikan terhadap ekspor batubara Indonesia, sementara nilai tukar dan harga memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap ekspor batubara Indonesia.

3. METODA PENELITIAN

Bentuk Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian dari data yang diolah dengan mengggunakan pendekatan regresi (hubungan sebab-akibat).

Penelitian ini merujuk pada model ekspor Wijayanto (2006), yang selanjutnya dimodifikasi dengan menggunakan ekonometrika spasial (Aselin, 2011) dengan menggunakan model regresi SAR (*Spatial Autoregressive Model*) SEM (*Spatial Error Model*) dan GSM (*Generalized Spatial Model*). Adapun spesifikasi modelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\log VE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PRx_{it} + \beta_2 \log GDP_{it} + \beta_3 \log IKE_{it} + \gamma\, ES + \omega_{it}$$

dimana: VE_{ij} = volume ekspor batubara
PRx_{ij} = harga relatif batubara

GDP_j = GDP negara tujuan ekspor
$IKE = 1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2$ = Indeks kesamaan Helpman, dimana:
$s_i = GNI_i/(GNI_i + GNI_j)$
$s_j = GNI_j/(GNI_i + GNI_j)$
ES = efek spasial
t = periode tahunan

Penelitian ini menggunakan data tahunan (2003 – 2021) negara yang menjadi tujuan ekspor batubara Indonesia meliputi: Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Data volume dan nilai ekspor batubara Indonesia bersumber dari https://www.trademap.org/, sementara data GDP (*Gross National Product*) atau GNI per kapita bersumber situs UN (*United Nations*) ataupun https://data.worldbank.org/. Data jarak ibukota negara diperoleh dari situs *distance* ataupun https://www.distancecalculator.net/, sementara data letak geografis berdasarkan garis lintang dan bujur diperoleh dari situs https://www.latlong.net/.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi dengan menggunakan model SAR, SEM, dan GSM dalam melihat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Pembandingan Model Spasial SAR, SEM, GSM Dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Batubara Indonesia

Variable	SARpnel	SEMpnel	GSMpnel
Main			
log_pr	.39352529	.39672838	.36618613
log_gdp	1.3847535	1.4978121	1.5946508
log_ike	-1.5678484	-.78980336	-.31934969
_cons	-27.031092	-27.247704	
Spatial			
rho	.13140174		-.06816585
lambda		.20104894	.26259039
Variance			
lgt_theta	-2.7594651		
sigma2_e	.14529976	.14165034	.1395614
ln_phi		2.8619233	

Estimasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa besaran koefisien dari masing-masing model adalah menunjukkan nilai konsistensi, seperi variabel harga (log_pr) dengan besaran 0,3935 untuk model SAR, 0,3967 untuk model SEM, dan 0,3662 untuk model GSM. Pada variabel harga (log_pr), ketiga model estimasi (SAR, SEM, GSM) adalah menunjukkan hasil yang signifikan pada taraf alpha 5%, kecuali model GSM signfifikan pada taraf alpha 10%. Selanjutnya pada variabel pendapatan (log_gdp), ketiga estimasi juga menunjukkan konsistensi besaran parameter dan pengaruh yang signifikan pada taraf alpha 5%. Namun untuk variabel selera (log_ike) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan masing-masing di tiga model estimasi tersebut.

Dari tiga model estimasi, hanya pada model SEM yang menunjukkan adanya pengaruh efek spasial. Oleh karenanya, model estimasi yang digunakan dalam analisis adalah model SEM. Selanjutnya hasil estimasi model SEM dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Batubara Indonesia

log_ve	Coef.	Std. Err.	z	P>|z|	[95% Conf.	Interval]
Main						
log_pr	.3967284	.1933777	2.05	0.040	.017715	.7757418
log_gdp	1.497812	.1169194	12.81	0.000	1.268654	1.72697
log_ike	-.7898034	.8952337	-0.88	0.378	-2.544429	.9648224
_cons	-27.2477	3.109227	-8.76	0.000	-33.34168	-21.15373
Spatial						
lambda	.2010489	.1187342	1.69	0.090	-.0316659	.4337637

Estimasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel harga (log_pr) adalah signifikan pada taraf alpha 5%, kemudian variabel pendapatan (log_gdp) adalah signifikan pada taraf alpha 1%, variabel selera (log_ike) adalah tidak signifikan, dan variabel efek spasial (spatial lamda) adalah signifikan pada taraf alpha 10%. Lebih lanjut, nilai koefisen determinasi (*between*) adalah sebesar 0,2753, yang berarti 28% variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel penjelas, sementara sisanya 72% dijelaskan oleh variabel error. Untuk pengujian secara keseluruhan (*overall*), yaitu pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon secara bersama-sama menunjukkan nilai statistik chi-square sebesar 5.120,24 atau probabilitasnya yang kurang dari alpha 5%, yang berarti bahwa bahwa secara keseluruhan atau simultan variabel prediktornya adalah signifikan mempengaruhi variabel responnya.

Nilai koefisien faktor harga (log_pr) yang sebesar 0,3967 dapat diinterpretasikan bahwa bila harga naik 1 persen, maka volume ekspor juga naik sebesar 0,4 persen. Ini berarti bahwa hubungan antara harga dan volume ekspor adalah bersifat inelastis. Selanjutnya nilai koefisien faktor GDP (log_gdp) yang sebesar 1.4978 dapat diinterpretasikan bahwa bila pendapatan naik 1% maka volume ekspor batubara juga akan naik sebesar 1,5 persen atau menunjukkan hubungan yang elastis. Sementara koefisien kesamaan pendapatan atau selera (log_ike) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga dapat diiterpretasikan bahwa naik turunnya kesamaan selera adalah tidak menyebabkan perubahan terhadap volume ekspor batubara Indonesia.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adanya kenaikan harga batubara menyebabkan ekspor batubaru Indonesia meningkat. Begitu juga kenaikan pendapatan dari negara mitra dagang menyebabkan kenaikan ekspor batubara Indonesia. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia ini, dapat dinyatakan bahwa faktor harga adalah didominasi dari sisi penawaran; sementara faktor pendapatan adalah didominasi dari sisi permintaan.

Karena faktor harga adalah dominan dipengaruhi dari sisi produsen maka Indonesia sebagai negara pengekspor batubara memiliki posisi tawar dalam menentukan harga batubara dunia. Sementara faktor pendapatan yang menceminkan sisi konsumen dapat dijadikan acuan dalam mengatur atau mengenakan pajak ekspor dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anselin, L. (2011). Spatial econometrics. Economics Letters, 4(2), 223–251.

Ariesta, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ekspor Batu Bara Indonesia-Hongkong. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Aristiyanti, D. P. (2020). Pengaruh Produksi, Harga Batu Bara Acuan, Harga Batu Bara Australia, Dan Kurs Terhadap Ekspor Batu Bara Di Indonesia. Skripsi. Jakarta: UIN.

Carolina, L. T., & Aminata, J. (2019). Analisis Daya Saing dan Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Batu Bara. Ejournal UNDIP, 1, 9-21.

Feenstra, Robert C. 2002. Advanced International Trade: Theory and Evidence. University of California.

Mankiw, N. Gregory (2003). *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Nicholson, Walter (1997). *Intermediate Microeconomics*, 7th ed. Texas: Dryden Press.

Nopirin (1999). *Ekonomi Internasional*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Wijayanto, Edi, (2006). "Analisis Perbandingan Ekspor dan Produk tekstil Indonesia dan Cina: Pendekatan Model Gravitasi Data Panel 2000-2004", *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Perkembangan Credit Union di Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia Tahun 2015-2019

Sabinus Beni[11]
Yeremia Niaga Atlantika[2]
Blasius Manggu[3]
Usman[4]
[1]Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Indonesia
[2,4]Program Studi Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana, Indonesia
[3]Program Studi Manajemen, Institut Shanti Bhuana, Indonesia

ABSTRAK

Credit Union merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan keuangan sekaligus pemberdayaan kepada anggota sampai ke pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Credit Union merupakan lembaga pemberdayaan yang termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Perkembangan Credit Union dilihat dari perkembangan jumlah anggota (dalam istilah perbankan disebut nasabah). Penelitian dilakukan pada Credit Union yang bernaung dibawah Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa 40 Credit Union yang bergabung dalam naungan PUSKOPCUINA mengalami peningkatan jumlah anggota selama periode tahun 2015-2019 dengan rata-rata pertumbuhan anggota 97,57%. Indikator anggota yang menjadi perhatian penelitian, karena dalam gerakan credit union, anggota merupakan hal terpenting yang menjadi target pemberdayaan sehingga kehadiran credit union benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan.

Keywords*: credit union, pemberdayaan, pertumbuhan.*

1. PENDAHULUAN

Credit Union atau yang biasa dikenal dengan CU berkembang pesat di Kalimantan Barat. Fakta tersebut menjadikan Kalimantan Barat sebagai pusat atau rujukan CU di Indonesia dalam mengembangkan unit usahanya. Berbagai CU ikut bergabung menjadi anggota gerakan CU di Kalimantan Barat baik melalui federasi nasional maupun federasi regional. Saat ini ada 2 (dua) Federasi Nasional Koperasi Kredit yaitu: Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) berpusat di Jakarta yang menaungi Koperasi dan CU di Indonesia dan Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) berpusat di Pontianak, gerakan ini keseluruhan anggotanya merupakan CU Primer di 34 Provinsi di Indonesia.

Perkembangan CU dilihat dari sejuh mana kemampuan CU mengajak masyarakat menjadi anggotanya, karena dalam gerakan CU: uang/aset bukanlah segala-galanya, melainkan manusia (anggota) yang menjadi inti gerakan CU. Melalui pertumbuhan anggota yang berkualitas melalui pendidikan dan pemberdayaan, maka secara simultan akan berdampak pada peningkatan aset dan unit

[1]Email: sabinusbeni@gmail.com

usaha CU lainnya, sehingga dalam menukur besar kecilnya CU tersebut bukan dilihat dari jumlah kekayaan/aset CU tersebut, melainkan dilihat dari jumlah anggotanya. Semakin banyaknya anggota CU, maka aset dan unit usaha CU akan semakin meningkat, tentunya harus diimbangi dengan kegiatan pemberdayaan yang menjadi Roh utama menuju kemandirian. Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan gerakan CU di PUSKOPCUINA tahun 2015-2019 dengan menganalisis perkembangan jumlah anggota.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Koperasi

Koperasi lahir di Indonesia pada abad ke-20 dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Koperasi berkembang menjadi organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Munaldus, Karlena, RJ, & Candra, 2013).

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps. 1 Ayat 1). Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan (Indonesia, 1992).

2.2 Credit Union

Credit Union merupakan suatu lembaga keuangan yang berbentuk kerjasama salah satunya dibidang ekonomi dan terus berkembang diberbagai bidang, dengan adanya kesaamaan visi dan misi yaitu mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai itu semua maka dibentuklah suatu kerjasama yang dikenal masyarakat sebagai credit union (Vuspitasari, Hapsari, & Ewid, 2019).

Credit Union merupakan satu lembaga keuangan di badang simpan pinjam atau biasanya di kenal sebagai koperasi simpan pinjam, dalam kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari anggota koperasi dengan menciptakan sumber kredit dari dan untuk anggota dengan bunga yang relatif rendah. Tujuannya adalah membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kemajuan terutama para anggotanya dan mengembangkan sikap hidup hemat dan penggunaan uang secara bijaksana danterencana oleh para anggotanya (Susianto, 2016).

2.3 Pemberdayaan

Teori *actors* dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam Perfect Empowerment (1996). Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kuku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opprtunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). (Maarif, 2021).

Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut: Mendorong ketabahan Mendelegasikan wewenang sosial Mengatur kinerja Mengembangkan organisasi Menawarkan kerja sama Berkomunikasi secara efisien Mendorong inovasi Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal (Prasetyo, 2015).

2.4 Penelitian Terdahulu

Strategi pengembangan KSP Mentari Dana Mandiri Salatiga: meningkatkan promosi untuk menjaring anggota sehingga perkembangan, meningkatkan usaha simpan pinjam untuk menghadapi persaingan antar koperasi, peningkatan pengawasan dari badan pengawas koperasi, serta peningkatan pelayanan, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya berkoperasi. (Wulandari & Sulistari, 2018).

Alternatif strategi yang tepat untuk Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tomohon yaitu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, meningkatan kualitas tenaga kerja, melakukan pengembangan produk, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran, melakukan promosi secara berkala dengan cara bekerjasama dengan pemerintah, pemberian pengertian kepada anggota untuk mengikuti pertemuan atau RAT, terus menggali kerjasama yang baik antara karyawan, pengurus dan anggota, membuat program-program untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas anggota, gencarkan sosialisasi kepada masyarakat, penerapan teknologi informasi. Adapun strategi prioritas yang disarankan adalah melakukan promosi secara berkala dengan cara bekerjasama dengan pemerintah. (Saraswati Muaya, Memah, & Mawuntu, 2020).

Pengembangan usaha KPRI IAIN Mataram di Kampus 2 IAIN Mataram berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha anggota yaitu sebesar 60,2%. (Isrososiawan, 2014). Strategi pengembangan koperasi dalam meningkatkan sisa hasil usaha dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi anggota dan menambah jumlah anggota, *rebranding* koperasi, mengembangkan dan mencari peluang usaha lain, memberikan *reward* bagi anggota yang aktif, menggunakan *software* dalam transaksi, menambah modal koperasi, dan memberikan target minimun belanja bagi anggota . (Watini, 2021).

Strategi yang ditempuh untuk mengembangkan koperasi dalam meningkatkan laba yaitu mengembangkan dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menambah jumlah simpanan, melakukan efisiensi pengeluaran koperasi, menangani masalah yang ada di dalam koperasi dengan sigap, menambah modal koperasi, memberikan target minimum bagi setiap unit usaha, memberikan motivasi kepada anggota. Dan dalam menjalankan strategi tersebut, ada faktor-faktor penghambat dan pendukungbagi koperasi. (Pratiwi, 2019).

3. METODA PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif (Beni, 2020), yakni menggunakan data laporan tahunan 40 CU dalam gerakan Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) yang tersebar pada 34 Provinsi di Seluruh Indonesia tahun 2015-2019. Data dianalisis dan diseskripsikan berdasarkan wawancara dengan aktivis CU yang berkaitan dengan perkembangan jumlah anggota serta implikasinya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) yang merupakan Federasi Nasional Credit Union yang berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat dengan 40 (empat puluh) CU Primer yang tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data laporan tahunan PUSKOPCUINA dapat diketahui bahwa pertumbuhan anggota ke-40 CU Primer pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang sangat baik yakni rata-rata 97,66% per tahun dari 424.503 (2015) menjadi 466.812 (2019).

Indikator perkembangan CU dilihat dari Jumlah anggota, karena dalam gerakan CU, anggota merupakan hal terpenting dan akan berdampak pada semua unit usaha CU. Lalu, muncul pertanyaan "mengapa demikian". Hal inilah yang membedakan CU dengan Koperasi secara umum. Karena, pemberdayaan anggota yang baik dan berkualitas akan meningkatkan aset serta volume usaha CU semakin membaik dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Indikator ini dapat dilihat pada tabel.1

Tabel 1. Data Perkembangan CU di PUSKOPCUINA Tahun 2015-2019

Tahun	Jlh CU di PUSKOPCUINA	Jlh. Anggota	Aset	Kredit Beredar
2015	40	424.503	5.815.675.999.880	4.257.011.987.915
2016	40	435.833	6.099.901.369.977	4.320.765.709.489
2017	40	441.485	6.202.010.582.337	4.142.603.299.693
2018	40	448.408	6.393.050.834.517	4.365.288.005.957
2019	40	466.812	6.649.261.637.199	4.581.898.557.893

Sumber: Laporan PUSKOPCUINA Tahun 2015-2019

Berdasarkan data pada tabel.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah anggota berdampak pada peningkatan jumlah aset yang berhasil dihimpun oleh CU, yakni pertumbuhan keduanya rata-rata diatas 85% dari tahun 2015-2019. Artinya, perkembangan CU di Indonesia melalui gerakan PUSKOPCUINA sangat baik. Data tabel.1 di atas juga dapat diperjelas lagi pada gambar 1. tentang grafik perkembangan jumlah anggota CU tahun 2015-2019 dibawah naungan PUSKOPCUINA.

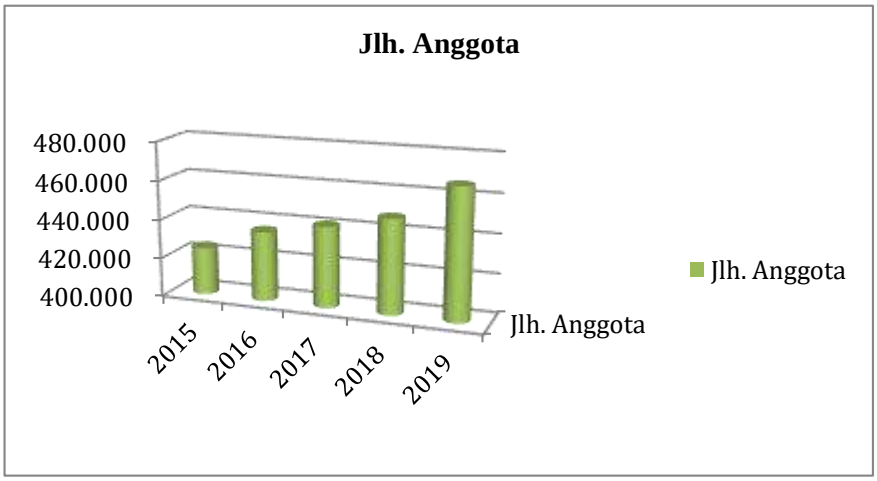

Sumber: Laporan PUSKOPCUINA Tahun 2015-2019

Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Anggota CU Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar.1, secara gambling dapat dilihat terjadi perkembangan jumlah anggota yang terus meningkat dari tahun 2015-2019 yang menandakan bahwa perkembangan CU semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan peningkatan kualitas anggota sehingga berdampak pada peningkatan aset maupun unit usaha lainnya yang dijalankan oleh CU tersebut. Anggota yang terus meningkat akan berdampak pada peningkatan aset, karena ada kebijakan yang mengatur bahwa setiap anggota wajib menabung setiap bulan melalui simpanan wajib serta penguatan rasa memiliki terhadap CU oleh setiap anggota. Hal ini terjadi karena CU berkembang oleh anggota dan untuk anggota serta dimiliki oleh anggota.

5. SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Credit Union (CU) di Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) dengan pertumbuhan anggota rata-rata 97,57% dari tahun 2015-2019 pada 40 CU gerakan. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan CU sangat baik dan berdampak pada berbagai sektor usaha CU yakni pertumbuhan Aset, Jumlah Tabungan Anggota, Kredit Beredar, Kredit Lalai dan SHU.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tim penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, terutama pihak Pusat Koperasi Kredit Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA) atas kontribusinya sebagai penyedia data yang diperlukan oleh tim yang berkaitan dengan topic penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Beni, S. (2020). Siklus Tahunan Budaya Dayak Djongkakng Di Dusun Jambu Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *6*(2), 221–247.

Indonesia, P. R. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, (25), 1–57. Retrieved from https://www.peraturan.bpk.go.id

Isrososiawan, S. (2014). Pengaruh Pengembangan Usaha Koperasi Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Iain Mataram. *Society*, *5*(1), 25–38. https://doi.org/10.20414/society.v5i1.1449

Maarif, S. D. (2021). Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli. Retrieved from https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu

Munaldus, Karlena, Y., RJ, Y., & Candra, B. H. (2013). *Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union*. (A. M. L. Agung, Ed.), *Elex Media Komputindo*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Retrieved from https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/

Pratiwi, D. (2019). Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan banjarmagu, kabupaten banjar negara. *Skripsi Fakultas Ekonomi*. Retrieved from http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5174/

Saraswati Muaya, Memah, H. F. ., & Mawuntu, P. S. . (2020). Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tomohon. *Buletin Sariputra*, *10*(1), 47–54.

Susianto. (2016). Pengaruh Receivable Turnover Terhadap Cash Turnover Pada CU Semandang Jaya di Ketapang. *Bisma*, *1*(8), 1783–1801.

Vuspitasari, B. K., Hapsari, V. R., & Ewid, A. (2019). Partisipasi Anggota Dalam Mengembangkan Credit Union. *Business, Economics and Entrepreneurship*, *1*(1), 8–15. https://doi.org/10.46229/b.e.e..v1i1.88

Watini, S. (2021). *Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mempeng Kaligondang Purbalingga)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. https://doi.org/10.1145/3459637.3481949

Wulandari, M., & Sulistari, E. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Mentari Dana Mandiri Salatiga). *UKSW Salatiga*, (1), 1–6.

Perilaku Kreatif Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Barat

Sulistiowati[1]
Nurul Komari[2]
[1,2)] *Universitas Tanjungpura, Indonesia*

ABSTRACT

The Micro, Small and Medium Enterprises Sector is an important sector in the economy, MSMEs in Indonesia have contributed significantly to GDP and play a role in employment. However, during the Covid-19 pandemic, MSMEs are also the most affected sector in Indonesia, so MSME owners' creativity is needed to survive during these difficult times. The purpose of this study is to identify the creative behavior of MSME owners in West Kalimantan Province, especially in facing the decline due to the pandemic. Data were collected through questionnaires distributed to 100 MSME owners spread across 14 districts in West Kalimantan. The data analysis technique used descriptive statistics. The results of the study concluded that the creative behavior of MSME actors in West Kalimantan was in the very good category.

JEL: M12

Keywords*: Creative Behavior; MSMEs; the Covid-19 pandemic*

1. PENDAHULUAN

Sektor bisnis merupakan faktor penting untuk mendukung perekonomian suatu negara. Tidak hanya berperan dalam berkontribusi dalam meningkatkan pedapatan per kapita dan pendapatan negara, tapi juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia merupkan salah satu negara berkembang yang mendukung berkembangnya sektor bisnis terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan tingkat usaha yang banyak berkembang di Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri di perekonomian Indonesia cukup besar hingga mencapai 99,9% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Sektor UMKM sendiri telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,7% pada tahun 2020 (Subagyo, 2020). Namun produk UMKM Indonesia memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan produk UMKM impor. Rendahnya kualitas barang akibat dari minimnya pemanfaatan teknologi yang digunakan, tingkat efisiensi produksi yang kurang maksimal, dan kebijakan sektor ekonomi makro Indonesia yang memberikan dampak dalam peningkatan kualitas produknya (Beselly & Mawardi, 2017). Arus globalisasi yang didukung dengan tingginya tingkat persaingan membuat pelaku UMKM harus mampu menghadapi tantangan global melalui meningkatkan inovasi produk dan perluasan area pasar, bahkan dengan mengembangakan sumber daya manusia dan tekonologi.

Pandemi Covid 19 telah membatasi banyak aktivitas manusia. Kebijakan *lockdown* dan

[1]Email: sulistiowati@ekonomi.untan.ac.id

pembatasan kegiatan masyarakat merupakan antisipasi yang dilakukan peemrintah untuk membatasi penyebaran virus Covid 19. Berbagai bidang kehidupan telah terdampak dengan adanya pandemi ini, tak terkecuali UMKM. Banyak UMKM yang sedang berkembang terpaksa berhenti di tengah jalan karena tak kuasa melawan kondisi yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Berikut ini adalah data skala usaha pelaku UMKM di Kalimantan Barat per 31 Agustus 2022.

Tabel 1. Data Skala Pelaku UMKM di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM
1	Sambas	18.262
2	Bengkayang	5.730
3	Landak	34.525
4	Mempawah	17.185
5	Sanggau	3.945
6	Ketapang	9.072
7	Sintang	17.067
8	Kapuas Hulu	9.919
9	Sekadau	6.377
10	Melawi	4.323
11	Kayong Utara	7.695
12	Kubu Raya	9.903
13	Kota Pontianak	41.694
14	Kota Singkawang	9.761
	Jumlah	195.458

Sumber: https://data.kalbarprov.go.id (2022)

Kreativitas atau *creativity* penting untuk setiap usaha dalam keadaan ekonomi saat ini, karena dengan adanya perilaku yang kreatif dan inovatif, bisa mendapatkan dan bahkan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kreativitas begitu penting dalam sektor wirausaha karena akan berdampak terhadap produktivitas suatu usaha dengan hasil yang optimal. Dengan demikian memahami dinamika kreativitas dalam suatu organisasi merupakan prioritas yang tinggi untuk penelitian perilaku organisasi (Zhou & Shalley, 2008). Banyak organisasi bergantung pada kreativitas karyawan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, beradaptasi, dan untuk keberlangsungan hidupnya (Nonaka, 1991; Zhou, 2003). Inovasi dan kreativitas menjadi keterampilan yang penting dalam mencapai kesuksesan karena merupakan kemampuan yang dapat menghasilkan ide-ide baru dan unik (Abimiku, 2011).

Kreativitas dan kewirausahaan didefiniskan sebagai dampak sifat kepribadian dalam kreativitas wirausaha, dalam pengaturan organisasi dan bagaimana hubungan antar keduanya dalam mengatur organisasi (Dimitriadis, Karagiannidou, Anastasiades, & Lagaki, 2017). Bisnis yang paling produktif yaitu mereka yang dapat merangkul kreativitas dan dapat menginspirasi inovasi. Insentifisasi pengembangan produk dan strategi kreatif dapat membantu mendorong bisnis, dengan semua karyawan secara aktif mencari peluang untuk pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut. Seorang pengusaha harus menamamkan prinsip bahwa pentingnya kreativitas dan imajinasi dalam bisnis.

2. KAJIAN LITERATUR

Perilaku kreatif merupakan aspek yang paling utama dan paling penting dalam membangun dan mempertahankan sebuah usaha atau bisnis yang sudah dibangun serta sebuah komponen yang wajib di realisasikan terutama dalam masa depan sebuah bisnis. Jadi secara singkat dapat diartikan perilaku kreatif adalah faktor penting yang dapat di realisasikan yang nantinya akan sangat berarti terutama pada kondisi dimana organisasi menghadapi lingkungan yang kompetitif.

Inisiatif dan implementasi dari ide kreatif meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespon peluang yang ada. Menurut (Lee, 2018) peningkatan kinerja kreatif dari pekerja merupakan suatu keharusan jika organisasi ingin mencapai keunggulan kompetitifnya. Konsep sederhana tentang kreativitas didefinisikan menurut Meyer, *et al*., (2000) sebagai tindakan mengkombinasikan elemen-elemen yang belum terkontribusi sebelumnya. Menurut Zhou & Shalley (2008) kreativitas telah sering disebut sebagai komponen *ideation* dari inovasi, sedangkan inovasi meliputi *ideation* dan penerapan ide-ide baru di dalam suatu organisasi.

Menurut (Knezović & Drkić, 2021)Amabile, Barsade, & Mueller (2005) pentingnya kreatifitas, didefinisikan sebagai proses menghasilkan ide-ide baru dan berguna atau solusi untuk permasalah. Menurut Lee, Florida, & Asc (2004) bahwa aktivitas kewirausahaan tidak hanya memerlukan iklim bisnis yang mendukung dan produktif namun juga membutuhkan lingkungan dimana kreativitas dan inovasi dapat berkembang. Sedangkan menurut Amabile, *et al*., (2005) dan Endres, *et al*., (2007) telah mengakui bahwa kreativitas dan kewirausahaan adalah dua fenomena yang saling berhubungan. Secara keseluruhan ada saran yang disajikan oleh Shane & Nicolaou (2015) yang mendorong penelitian tentang antarmuka antara kreativitas dan kewirausahaan.

Evans dalam Taggar (2002) menyatakan bahwa kreativitas mencakup: Menemukan hubungan baru; menunjukkan hubungan objek dengan prespektif baru; serta membentuk kombinasi baru dari konsep lama. Menurut Amabile, *et al*., (2005) ada tiga komponen dasar dari kreativitas, yaitu: expertise yang merupakan pengetahuan tentang teknik, prosedur, dan intelektual; *Creative-thinking skill*, yaitu menentukan bagaimana secara fleksibel dan imajinatif individu mendekati problem; Motivation (*intrinsic motivation*), adalah dorongan dari dalam untuk memenuhi tantangan.

Menurut Wallas (1926) Smith 2015 model klasik dari proses pemikiran kreatif mengidentifikasi empat tahap berpikir kreatif, antara lain: persiapan, misalnya, seperti pengujian masalah, dan tujuan untuk mengatasi itu; inkubasi, misalnya tidak lagi sacara sadar bekerja pada masalah tapi pekerjaan tidak sadar mungkin sedang berlangsung; iluminasi, misalnya, seperti solusi menampilkan dirinya; verifikasi, yaitu penggunaan logika dan pengetahuan untuk membuat ide menjadi solusi yang tepat.

Amabile (1983) mengusulkan model terkait proses kreatif yang termasuk lima tahap pemikiran kreatif, yaitu tugas presentasi, seperti masalah yang diajukan melalu stimulus eksternal atau internal; persiapan, seperti mengumpulkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; generasi ide, seperti produksi kemungkinan respon; validasi ide, seperti memeriksa setiap ide dihasilkan untuk kesesuaian; penilaian hasil, misalnya seperti memilih solusi.

Perilaku kreatif adalah faktor yang sangat di perlukan dalam mengatasi berbagai tantangan berwirausaha, bukan hanya itu saja kreativitas juga adalah asset yang sangat penting dalam mengembangkan suatu usaha atau bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu kreativitas ini

dipengaruhi oleh interaksi faktor pribadi dan organisasi, dan ditinjau dari individu, kelompok, dan faktor organisasi yang bisa berinteraksi untuk mempengaruhi kreativitas seseorang.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan rumus slovin, dari populasi 195.458 pelaku UMKM diambil 100 orang responden sebagai sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan *stratified random sampling*. Kriteria sampel adalah telah menjadi pelaku UMKM selama minimal 3 tahun dan melewati masa pandemi covid 19.

Tabel 2. Jumlah Sampel Per Kabupaten

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM	Jumlah Sampel
1	Sambas	18.262	9
2	Bengkayang	5.730	3
3	Landak	34.525	18
4	Mempawah	17.185	9
5	Sanggau	3.945	2
6	Ketapang	9.072	5
7	Sintang	17.067	9
8	Kapuas Hulu	9.919	5
9	Sekadau	6.377	3
10	Melawi	4.323	2
11	Kayong Utara	7.695	4
12	Kubu Raya	9.903	5
13	Kota Pontianak	41.694	21
14	Kota Singkawang	9.761	5
	Jumlah	195.458	100

Sumber: Data yang diolah, 2022

Kuesioner dikembangkan dari indikator Perilaku Kreatif oleh Amabile (1988), yaitu *expertize*, *creative thinking*, dan *motivation*. Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, dengan hasil seluruh item pertanyaan valid dan seluruh variabel reliable. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah kriteria skor tanggapan responden.

Tabel 3. Kriteria Skor Tanggapan Responden

Interval	Kriteria
1.00 – 1.79	Sangat Tidak Baik
1.80 – 2.59	Tidak Baik
2.60 – 3.39	Kurang Baik
3.40 – 4.19	Baik
4.20 – 5.00	Sangat Baik

Sumber: Siregar (2016)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Desktiptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung jumlah frekuensi dan rata-rata jawaban responden. Dengan skala *Likert* variabel akan diukur dan kemudian dijabarkan sebagai indikator variabel. Skala *Likert* akan menghasilkan pengukuran variabel menggunakan skala interval 1-5. Jawaban responden dikelompokkan menurut kriteria yang ada, hasil dari masing-masing jawaban kemudian dijumlahkan dan dikumpulkan dalam suatu tabel untuk dianalisa secara kuantitatif dan dideskripsikan.

Tabel 4. Perilaku Kreatif Pelaku UMKM di Kalimantan Barat

No	Pernyataan	Skor					Jumlah	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
		5	4	3	2	1				
1	Saya bersemangat dalam belajar dan mengasah Kreativitas	59	35	5	1	0	100	425	4,25	Sangat Baik
2	Saya mengolah pengetahuan untuk dikembangkan	60	35	4	1	0	100	454	4,54	Sangat Baik
3	Saya meningkatkan level pengetahuan dari sekedar tahu menjadi peduli	63	32	5	0	0	100	458	4,58	Sangat Baik
4	Saya sengaja menggali dan menerapkan ide baru dalam mengelola usaha	57	38	5	0	0	100	452	4,52	Sangat Baik
5	Saya memikirkan ide-ide yang menguntungkan dalam usaha	62	34	3	1	0	100	457	4,57	Sangat Baik
6	Saya berusaha menggali ide kreatif dari tim Kerja	52	47	0	1	0	100	450	4,50	Sangat Baik
7	Saya selalu bersemangat dalam bekerja.	68	29	3	0	0	100	465	4,65	Sangat Baik
8	Saya selalu terdorong untuk mengembangkan Usaha.	68	29	3	0	0	100	465	4,65	Sangat Baik
9	Saya selalu optimis dalam mengelola usaha	71	27	2	0	0	100	469	4,69	Sangat Baik
	Rata-rata Skor								4,55	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan (2020)

Tabel 4 menjelaskan tanggapan responden tentang perilaku kreatif pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4 diketahui bahwa rata-rata skor untuk perilaku kreatif adalah sebesar 4,55 yang berada dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perilaku kreatif pada pelaku UMKM di Kalimantan Barat sangat baik, karena tiap dimensi Sebagian besar berada pada kriteria sangat baik.

Pelaku UMKM di Kalimantan Barat selalu bersemangat dalam mempelajari pengetahuan baru dan selalu berupaya mengasah kreativitas agar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan dengan produk lain dari usaha sejenis. Pengetahuan yang diterima oleh pelaku UMKM tidak disimpan begitu

saja, namun mereka berupaya untuk mengembangkan sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam menjalankan usaha. Selain dari pengetahuan pelaku UMKM, ide kreatif juga dikumpulkan dari tim kerja, dimana biasanya individu anggota tim kerja memiliki pengetahuan masing-masing yang berkembang menjadi ide-ide baru. Motivasi kerja sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkelanjutan. Semangat pelaku UMKM dan rasa optimis sangat mendukung berlanjutnya bisnis ke arah yang lebih baik.

5. SIMPULAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor yang penting dalam perekonomian, UMKM di Indonesia telah berkontribusi cukup besar terhadap PDB dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun di saat pandemi Covid 19, UMKM pula yang menjadi sektor paling terdampak di Indonesia. Untuk memulihkan situasi usaha akibat pandemi, pelaku UMKM harus berperilaku kreatif dalam menjalankan usahanya. Dari hasil statistik deskriptif riset ini menyimpulkan bahwa perilaku kreatif pelaku UMKM di Kalimantan Barat dalam kategori sangat baik. Seluruh indikator yang terdiri dari *expertize*, *creative thinking*, dan *motivation* dalam kategori sangat baik. Artinya pelaku UMKM di Kalimantan Barat memiliki keahlian dalam bidang usaha, pengetahuan yang merekamiliki sesuai dengan usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat selalu berpikir kreatif dalam mengembangkan produknya, serta selalu termotivasi untuk selalu kreatif dalam mengembangkan usaha.

Penelitian selanjutnya mengenai perilaku kreatif pelaku UMKM dapat dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perilaku kreatif pelaku UMKM. Selain itu penelitian dapat dispesifikasi dengan memilih pelaku UMKM pada bisnis kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, K. (2005). *The Source of Innovation and Creativity*, *Paper Commissioned*. American: The National Center of Education and Economy.

Beselly, X., & Mawardi, M. (2017). Kebijakan Pengembangan Daya Saing Global Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Batu Menggunakan Sme Development Index. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, *47*(1), 25–31.

Amabile, T, M. (1988). *How To Skill Creativity*. Australia: Harvard Business Review.

Amabile, T.M. (1983). The social psychological of creativity: A compenential conceptualization. *Journal of Personality and Social Psychological*. 45 (1), 357-376.

Amabile, T,M., Barsade, S.G., Mueller, J.S., & Staw, B.M. (2005). Affect and creativity at work. *Administrative Science Quarterly*, 50 (3), 367-403.

Dimitriadis, E., Karagiannidou, D., Anastasiades, T., & Lagaki, M. (2017). International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research*, *1*(11), 7–12. https://doi.org/10.25103/ijbesar.111.01

Endress, A,M., & Woods, C.R. (2007). The case for more 'subjecttivist' research on how entrepreneurs create opportunities. *International Journal of Entreprenurial Behavior & Research*, 13 (4), 222-234.

Knezović, E., & Drkić, A. (2021). Innovative work behavior in SMEs: the role of transformational leadership. *Employee Relations*, *43*(2), 398–415. https://doi.org/10.1108/ER-03-2020-0124

Lee, J. (2018). The effects of knowledge sharing on individual creativity in higher education institutions: Socio-technical view. *Administrative Sciences*, *8*(2). https://doi.org/10.3390/admsci8020021

Lee, S.Y., Florida, R., & Asc, Z, J. (2004). Creativity and entrepreneurship: A regional analysis of new firm formation. *Regional Studies.* 38(8): 879-891.

Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. *Harvard Business Review*, 69 (2), 96-104.

Shane, S. & Nicolaou, N. (2015). Creativity personality, opportunity recognition and the tendency to start businesses: a study of their genetic predispositions. *Journal of Business Venturing*, 30 (3), 407-419.

Siregar, S. (2016) *Statistika Deskriptif untuk Penelitian di Lengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Subagyo. (2020). *BKPM sebut UMKM sumbang PDB sebesar 61,7 persen*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/1794321/bkpm-sebut-umkm-sumbang-pdb-sebesar-617-persen

Sokolova, S. (2015). The importance of creativity and innovation in business, Linked-In related at 14/2/2017.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taggar, S. (2002). Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: Amultilevel model. *Academy of Management Journal*. 45, 315-330.

Wallas, G. (1926). *The Art of Thought*. London: Cape.

Zhou, J. (2003). When the presence of creative coworkers is related to creativity: Role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative

Zhou, J., Christina, E., Shally. (2008). *Organizational Creativity*. Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group. Madison Avenue: New York.

Zhou, J. & Shalley, C.E. (2003) Research on Employee Creativity: A Critical Review and Directions for Future Research. In J.J. Martocchio & G.R. Ferris (Eds.), *Research in Personnel and Human Resources Management* (Vol. 22, pp. 165–217). Oxford: Elsevier Ltd.

Keunggulan Dinamis Dalam Perspektif *Resource Based View* Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan

Giriati[1]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun keunggulan dinamis dengan perspektif *resource based view* seperti modal intelektual, efisiensi operasional dan resiko kredit terhadap kinerja keuangan sektor perbankan. Studi ini untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh modal intelektual (IC), efisiensi operasional, resiko kredit terhadap kinerja keuangan emiten sektor perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten di sektor perbankan dan diperoleh 24 sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan hasil penelitian menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara resiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.

***Kata Kunci**: modal intelektual (IC), efisiensi operasional, resiko kredit, , kinerja keuangan (financial performance)*

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam membantu menjaga kestabilan perekonomian negara dan memiliki peran sebagai intermediasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (*lender*) dan pihak yang kekurangan dana *(borrower*). Industri perbankan merupakan industri yang sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi baik dari segi regulasi pemerintah, inflasi, maupun fundamental ekonomi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus pada industri ini, dan tentu saja memerlukan sumberdaya yang memiliki kapabilitas sebagai *core competences*, agar kinerja keuangan yang dihasilkan juga maksimal.

Kesuksesan perbankan umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yang pertama menyoroti peran faktor eksternal dalam menentukan keberhasilan, sedangkan yang kedua menekankan pada aspek internal, khususnya variabel organisasi dan sumberdaya yang dimiliki. Studi-studi yang fokus pada faktor eksternal biasanya berkaitan peran pemerintah yang tidak terlalu kondusif dalam menciptakan kesuksesan bisnis, karena kurang tersedianya berbagai bentuk dukungan, seperti kebijakan pemerintah dalam pendanaan dan penyediaan infrastruktur terhadap persaingan dari usaha besar, program pendidikan dan pelatihan (Robertson et al,2003), pemberian pinjaman lunak dan bantuan ekspor. Dalam konteks bisnis, pemerintah dapat menjadi penentu utama keberhasilan perusahaan dan meniadakan pemilik bisnis sebagai pengambil keputusan utama yang mempengaruhi hasil-hasil bisnis (Baum dan Locke,2004). Oleh karena itu faktor internal yang berkaitan dengan aspek

[1] Email: giri_fe@yahoo.com

sumberdaya yang berbasis pengetahuan dan perencanaan lebih sering mempengaruhi kesuksesan bisnis perusahaan (Gaskill et al ,1993). Penilaian non keuangan dapat dilakukan dengan kinerja sumber daya manusia yang dilibatkan dalam operasional perbankan. Karena faktor manusia ini sering menyebabkan terjadinya *fraud* di sektor ini. Kegagalan dalam mengantisipasi persaingan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dapat menghambat sektor perbankan sulit untuk *survive* dan gagal dalam mempertahankan *market share* nya.. Menurut Barker III dan Duhaime (1997), ketika level pertumbuhan industri ada pada titik kritis, atau ketika terjadi penurunan kinerja perusahaan, saat itulah diperlukan perubahan.

Dalam kajian strategi dan organisasi, strategi perusahaan yang efektif tidak tercipta secara tiba-tiba. Strategi yang tepat merupakan strategi yang sesuai (*fit*) dengan konteksnya. Andrews (1971) serta Hofer dan Schendel (1978) mengidentifikasi konteks yang dimaksud adalah kondisi lingkungan dan organisasional. Demikian juga Miles dan Snow (1994) menyatakan bahwa efektifitas strategi didasarkan pada proses *alignment* antara perusahaan dengan pasar (Miles dan Snow 1994). Semakin sesuai (*fit*) antara strategi dengan konteksnya, maka akan semakin baik kinerjanya dan sebaliknya semakin tidak sesuai suatu strategi dengan konteksnya, maka akan semakin berdampak negatif terhadap kinerja (Ginsberg dan Venkatraman 1985; Miles dan Snow 1994). Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia sebagai strategi non keuangan (*Resource based view)* sebagai penentu kinerja keuangan, selain variabel keuangan seperti resiko kredit dan efisiensi, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan variabel variabel yang menentukan kinerja keuangan sektor perbankan di bursa efek Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kemampuan Intelektual Dalam Konsep *Resource Based View* dan Kinerja Keuangan

RBV merupakan suatu pendekatan klasik dalam manajemen strategis yang berkaitan dengan masalah kompetensi dan sumber daya perusahaan. Dalam konsep RBV, yang menjadi fokus perhatian adalah masalah sumber daya internal. Menurut Barney (2001), keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya internal, salah satunya adalah sumberdaya manusia yang terlatih, berpengalaman, memiliki pengetahuan dan ketrampilan. Menurut Rumelt (1984), sumber daya yang dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan adalah yang memiliki ciri *imperfect substitutability* dan *imperfectly imitable*, sedangkan menurut Barney (1991), sumber daya yang ada harus memiliki karakteristik *valuabl*e, *rare, immitable,* dan *non subsituable* (VRIN). Bagi perusahaan yang ingin mempertahankan persaingan secara berkelanjutan diperlukan berbagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya internal yang potensial. Salah satunya adalah mengidentifikasi kompetensi inti sebagaimana yang dikemukakan oleh Prahalad dan Hamel (1994). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi inti, yaitu: (1) apakah kompetensi inti memberikan akses potensial pada beragam pasar; (2) apakah kompetensi inti dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pelanggan; dan (3) apakah kompetensi inti yang dimiliki perusahaan membuat pesaing mengalami kesulitan untuk meniru.

Modal intelektual merupakan elemen dari RBV, adalah nilai total dari suatu perusahaan yang menggambarkan aktiva tidak berwujud perusahaan yang bersumber dari tiga pilar yaitu modal manusia, struktural dan pelanggan (Arfan Ikhsan, 2008). Menurut Pangestika (2010) modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi serta kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual bersifat *elusive,* tetapi sekali

ditemukan dan dieksploitasi akan memberikan organisasi basis sumber baru untuk berkompetisi. Modal intelektual adalah istilah yang diberikan untuk mengkombinasikan *intangible asset* dari pasar, *intellectual property,* infrastruktur dan pusat manusia yang menjadikan suatu perusahaan dapat berfungsi. Modal intelektual adalah materi intelektual (pengetahuan, informasi, intellectual property, pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat pengetahuan yang berdaya guna. Kemampuan intelektual dari organisasi dapat dihitung dengan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual dari sebuah organisasi yang bisa dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indicator*). VAIC™ merupakan penjumlahan dari VACA, VAHU dan STVA. VAIC™ dihitung dengan rumus sebagai berikut :

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA

Dimana :

VACA = VA / CE

Keterangan :
VACA = *Value Added Capital Employed* / rasio VA terhadap CE
VA = *Value Added*
Capital Employed (CE) = Dana yang tersedia bisa berupa ekuitas dan laba bersih

VAHU = VA / HC

Keterangan :
VAHU = *Value Added Human Capital* / rasio VA terhadap HC
VA = *Value Added*
Human Capital (HC) = Beban tenaga kerja (total gaji, upah dan pendapatan karyawan).

Structural Capital Value Added merupakan indikator efisiensi nilai tambah (*Value add*ed/VA) modal Struktural. Rumus STVA yaitu :

STVA = SC/ VA

Keterangan:
STVA = Structural Capital Value Added :
rasio dari SC terhadap VA
VA = *Value Added*
Structural Capital (SC) = VA – HC

Kinerja keuangan merupakan gambaran atas kondisi keuangan sebuah perusahaan (Sawir,2005). Jika *intellectual capital* merupakan sumberdaya yang terukur untuk peningkatan keunggulan bersaing, maka *intellectual capital* akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (Chen *et al.*, 2005). *Intellectual capital* diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan Williams (2003), Chen *et al.* (2005) dan Tan *et al.* (2007) telah membuktikan bahwa *intellectual capital* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Intellectual capital* diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan Williams (2003), Chen *et al.* (2005), dan Tan *et al,* (2007), telah membuktikan bahwa *intellectual capital* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Intellectual capital* diuji terhadap kinerja keuangan perusahaan pada tahun yang sama dengan menggunakan VAIC™ yang diformulasikan oleh Pulic (2000) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan.Dari pernyataan diatas maka dapat dinyatakan :

H1: *Intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2. Efisiensi Operasional Dan Kinerja Keuangan

Efisiensi menurut Mulyamah (1987) merupakan suatu ukuran untuk membandingkan rencana dengan realisasi penggunaan yang sesungguhnya. Sementara Hasibuan (1984) efisiensi ialah perbandingan terbaik dari masukan dan hasil dari keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan, juga hasil maksimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan efisiensi operasi adalah bagaimana asset dan modal dalam perusahaan dapat digunakan secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja maksimal. Semakin efisien operasi perusahaan dan semakin tinggi efisiensi pemanfaatan aset perusahaan, maka kemampuan perusahan untuk memberikan imbal hasil kepada semua penyandang dana akan semakin tinggi juga (Subramanyam & Wild 2009; White *et al*., 2003; Robinson *et al*., 2004; Fraser & Ormiston 2007). Ukuran efisien merupakan ukuran keuangan yang mencakup laporan biaya aktifitas, anggaran, fleksibel, laporan realisasi. Ukuran keuangan ini dirancang untuk menilai seberapa baik penggunaan sumber daya. Pengukuran efisiensi operasi adalah menggunakan BOPO (Dietrich, Andreas, & Gabrielle, 2009) dengan rumus sebagai berikut :

BOPO = Biaya Operasional / Pendapatan Operasional

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dinyatakan:

H2 : Efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3. Resiko Kredit dan Kinerja Keuangan

Hardanto (2006) mendefinisikan risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal dalam memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Risiko kredit adalah salah satu risiko yang umum dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit pada masyarakat. Risiko kredit mengambil bagian terbesar dalam kegiatan perbankan karena pemberian pinjaman dan investasi merupakan bagian terbesar dalam aktiva bank. Risiko kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh debitur atau kegagalan memenuhi perjanjian pelunasan sebagian atau seluruhnya. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau bisa dikatakan risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. (Sastradipoera, 2001). Risiko kredit yang dihadapi oleh bank ialah risiko modal serta risiko pembiayaan (Muhammad, 2011). Pengukuran risiko kredit mengunakan rasio *Net Performing Loan* (Herman Darmawi, 2012) dengan rumus sebagai berikut :

Rasio NPL = *Total Non Performing Loan* / Total Kredit

Hal ini terutama bagi bank yang tidak mengelola risiko dan kredit bermasalah dengan baik. Kenaikan risiko tersebut akan menambah beban dan biaya manajemen terutama aktivitas *monitoring* bagi bank. Berdasarkan pernyataan ini Fiordelisi *et al*., (2010) memberikan kesimpulan bahwa kenaikan risiko bank akan menurunkan *cost efficiency* dan *revenue efficiency* bank tersebut. Artinya kenaikan risiko perbankan akan menurunkan tingkat efisiensi bank yang menyebabkan kenaikan beban bank dan menurunkan pendapatan bank. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Resiko kredit berpengaruh berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan penilaian kondisi keuangan yang menjadi prestasi bagi perusahan yang memerlukan analisis dengan beberapa tolak ukur seperti rasio serta indeks sehingga dua data keuangan bisa terhubung antara satu dengan yang lain (Agnes Sawir, 2005). Menurut Barlian (2003), kinerja keuangan ialah prospek masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Kinerja keuangan dibutuhkan informasinya untuk perusahaan agar bisa menilai perubahan potensial yang terjadi pada sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang tersedia. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Return on Asset* (Agnes Sawir, 2005) adalah dengan rumus sebagai berikut :

ROA = EAT / Total Asset (Rata-rata Total Asset)

2.5. Kerangka Penelitian

Dari uraian teori dan indikator variabel, maka dapat ditentukan kerangka penelitian seperti gambar 1 dibawah ini :

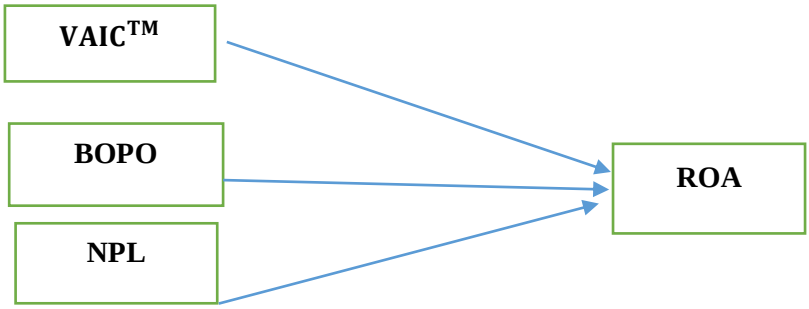

Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2017) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari dua variabel atau lebih, dimana dari penelitian ini, bisa dibangun sebuah teori yang bisa berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Penelitian asosiatif dalam penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel efisiensi operasi, risiko kredit, dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan, waktu observasi dari tahun 2016 -2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, berjumlah 40 perusahaan, dengan sampel penelitian yang diambil berdasarkan *purposive sampling* berjumlah 24 emiten., dengan variabel penelitian adalah kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan modal intelektual, efisiensi operasional dan resiko bisnis sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ...\varepsilon$$

Keterangan :
Y : Variabel kinerja keuangan
α : Konstanta
X_1 : Variabel efisiensi operasi
X_2 : Variabel risiko kredit

X_3 : Variabel modal intelektual
ε : *Error term*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata – rata *(mean)* serta standar deviasi dari masing – masing variabel. Penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan – temuan empiris mengenai rasio keuangan yang di proksi kedalam rasio BOPO, NPL, dan VAIC™ sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel dependen. Adapun olahan statistik deskriptif data yang menjadi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Data

	ROA	NPL	BOPO	VAIC™
Mean	0.009796	0.019471	0.900502	13233.85
Median	0.013600	0.017100	0.879000	13382.52
Maximum	0.040000	0.063700	1.869000	14226.50
Minimum	-0.111500	0.000000	0.506100	11866.25
Std. Dev.	0.021044	0.012487	0.190367	765.1033
Observations	120	120	120	120

Dari tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah data (N) dari penelitian ini sebanyak 120 data yang valid. Dari 120 observasi terhadap sampel yang diteliti, pada variabel BOPO nilai minimumnya sebesar 0.506100, nilai maksimumnya sebesar 1.869000, dan nilai rata – rata *(mean)* sebesar 0.900502 dengan standar deviasi sebesar 0.190367, ini dapat diartikan bahwa nilai standar deviasi pada variabel BOPO lebih kecil dari nilai *mean* maka penyebaran data BOPO merata dan penyimpangan yang terjadi kecil, dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang besar antara data satu dengan data lainnya.

Nilai minimum NPL sebesar 0.000000 nilai maksimumnya sebesar 0.063700 dengan nilai rata – rata *(mean)* sebesar 0.019471. Dari nilai rata – rata *(mean)* maka dapat disimpulkan bahwa statistik rasio NPL perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat NPL. Selain itu untuk melihat seberapa besar simpangan data pada NPL dilihat dari nilai mean sebesar 0.019471 dengan standar deviasi sebesar 0.012487 dimana nilai standar deviasi dapat dikategorikan baik, karena lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean.

Hasil statistik deskriptif VAIC™ menunjukkan nilai minimum sebesar 11866.25 dan nilai maksimum sebesar 14226.50 dengan nilai rata – rata 13233.85 dan memiliki standar deviasi sebesar 765.1033. Dengan melihat nilai rata – rata maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat VAIC™ sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan Bank Indonesia**.**

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Dependent Variabel: ROA Method: Panel Least Squares
Total panel (unbalanced) observations: 134

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000459	0.004161	0.110334	0.9124
NPL	-0.279708	0.050427	-5.546739	0.0000
BOPO	0.020482	0.004270	4.797010	0.0000
VAIC™	0.029257	0.029400	0.984769	0.0004

Berdasarkan Tabel 2 pada pengujian regresi sederhana dapat dibuat persamaan sebagai berikut: $Y = 0.000459 – 0.279708X1 + 0.020482X2 + 0.029257X_3$ Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0.000459, besaran konstanta menunjukan bahwa variabel variabel independen dapat dikatakan konstan. Artinya jika *Non Performing Loan* (NPL), BOPO, dan VAIC™ nilainya adalah nol maka nilai *Return on Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0.000459.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Loan* (NPL) bernilai negatif yaitu -0.279708, artinya bahwa setiap peningkatan NPL sebesar 1% maka nilai *Return on Assets* (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.279708 kali dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel BOPO bernilai positif yaitu 0.020482, artinya bahwa setiap peningkatan BOPO sebesar 1% maka nilai *Return on Assets* (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0.020482 kali Nilai koefisien regresi variabel BOPO bernilai positif yaitu 0.020482, artinya bahwa setiap peningkatan BOPO sebesar 1% maka nilai *Return on Assets* (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0.020482 kali dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel VAIC™ adalah bernilai positif, yaitu 0.029257, artinya bahwa setiap peningkatan VAIC™ sebesar 1% maka nilai *Return on Assets* (ROA) akan peningkatan sebesar 0.029257 kali dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel yang diteliti dan dilakukan uji asumsi klasik, uji regresi, serta uji hipotesis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

4.2.1. Efisiensi Operasional Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Efisiensi operasional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hasil pengujian secara bertahap pada persamaan satu menunjukkan nilai signifikansi pada pengujian sebesar 0,0000 dengan signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien 0.020482, maka dapat disimpulkan bahwa variabel BOPO / Efisiensi Operasional memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap ROA / Kinerja Keuangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima karena BOPO memiliki arah positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fred O. Sporta, *et al* (2017) yang menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan bank, karena efisiensi dalam operasional perbankan sangat diperlukan, mengingat biaya akan menentukan laba keuangan.

4.2.2. Risiko Kredit Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hasil pengujian secara bertahap menunjukkan nilai signifikansi pada pengujian sebesar 0,0000 dengan signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien -0.279708, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPL / Risiko Kredit memiliki arah negatif dan berpengaruh signifikan terhadap ROA/ Kinerja Keuangan. Berpengaruh negatif menunjukkan bahwa Risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena bank mendapatkan pendapatan yang sumber utamanya berasal dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Jika bank menyalurkan kredit yang kualitasnya buruk maka akan berdampak pada meningkatnya kredit macet yang dapat dilihat dari besarnya nilai NPL sehingga kinerja keuangan akan semakin menurun begitu juga sebaliknya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima karena risiko kredit memiliki arah negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukkan , dengan penelitian yang dilakukan oleh Didik Purwoko, *et al* (2013) yang menyebutkan bahwa risiko kredit yang indikatornya adalah NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank yakni ROA.

4.2.3. Modal Intelektual Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah untuk menguji apakah Modal Intelektual berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hasil pengujian secara bertahap menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel VAIC™ yaitu 0.05 dengan nilai koefisien 0.029257. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modal intelektual memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap ROA / Kinerja Keuangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima karena modal intelektual memiliki arah positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diva Cicilya Nunki dkk,(2014) yang menyebutkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Pangestika (2010), menyatakan modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi serta kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual bersifat *elusive,* tetapi sekali ditemukan dan dieksploitasi akan menjadikan organisasi berbasis sumberdaya yang dapat memiliki keunggulan dinamis.

Kompetensi sumberdaya manusia dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan hanya ketika kompetensi tersebut bernilai. Kompetensi dikatakan bernilai ketika kompetensi tersebut menyebabkan perusahaan mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan khususnya. Kompetensi yang dimiliki harus tepat, memiliki fondasi yang kuat serta tercermin dari seluruh proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki kompetensi inti (core *competency*) yang selaras dengan bisnis intinya (*core business*).Kompetensi inti merupakan komponen pembentuk misi dan budaya organisasi, yang mampu menciptakan inovasi dan kreasi yang berbeda dengan bank lainnya

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Modal Intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi VAIC™ maka akan

semakin baik dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Efisiensi Operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi BOPO maka akan semakin baik dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, Risiko Kredit menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa dimana tinggi rendahnya risiko kredit dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Berpengaruh negatif menunjukkan bahwa kenaikan risiko kredit dalam perusahaan perbankan akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan perbankan tersebut dan begitu juga sebaliknya.

Mengingat pentingnya modal intelektual sebagai kompetensi utama dalam menentukan keuggulan dinamis perusahaan, maka berdasarkan hasil kajian, suatu perusahaan pada umumnya akan memiliki kemampuan di atas kinerja para pesaingnya bila mampu menerapkan konsep RBV. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki baik yang *tangible,* maupun yang *intangible* sebagai model keunggulan dinamis , berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan Ikhsan, (2008). Akuntansi Sumber Daya Manusia Edisi Pertama. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Andrews,(1971), *'The* Concept of Corporate Strategy',*Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, pp. 18-46.*

Barney, J. B. 1991. Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage., *Journal of Management, 17(1), 99-120.*

Barney, J.B. (2001) *"*Resource-Based Theories of Competitive Advantage: A Ten Year Retrospective on the Resource-Based View*", Journal of Management, 27, 643-650.* https://doi.org/10.1177/014920630102700602

Barker, III, V. and Duhaime, I.M. (1997), "Strategic Change in the Turnaround Process: Theory and Empirical Evidence", *Strategic Management Journal, Vol.18 No.1, pp.13-38.*

Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). The Relationship of Entrepreneurial Traits, Skill, and Motivation to Subsequent Venture Growth. *Journal of Applied Psychology, 89*(4), 587–598. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.4.587

Chen et al. 2005. An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms market value and financial performance. *Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, Issue 2*

Dietrich, Andreas, & Wanzenried, G. (2009*)*. What Determines the Profitability of Commercial Banks? New Evidence from switzerland. *Diakses dari www.ssrn.com*

Gaskill et.al (1993). A Factor Analytic of The Perceived Causes of Small Business Failure. *Journal of Small Business Management, cemi.com.au*

Steven Firer, S. Mitchell Williams, Intellectual capital and traditional measures of corporate performance, *Journal of Intellectual Capital, ISSN :1469-1930*

Prahalad.C.K.& Hamel,G.(1990,May-June) The core Competence of the corporation, *Harvard Business Review Product 6528*

Hofer, C. W., & Schendel, D. (*1978*). Strategy Formulation: Analytical Concepts. *Minesota, USA: West Publishing*.

Mulyamah, (1987). Definisi/ Pengertian Efisiensi. *Diakses dari https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi/.*

Ikhsan, A. (2008). Pengertian, Komponen Dan Pengukuran Intellectual Capital.*Diakses dari https://www.kajianpustaka.com/2017/09/intellectual-capital.html*

Ginsberg and Venkatraman (1985). Contingency Perspectives of Organizational Strategy A Critical review of Empirical research. *Academy of management review, **1985** - **journals**.aom.or*

Hardanto. (2006). Makalah Manajemen Risiko "Risiko Kredit*". Diakses dari http://arinidwi99.blogspot.com/2017/07/makalah-manajemen-risiko-risiko- kredit.html.*

Nunki, D. C., Sudibya, A., & Restuti, MI. M. D., (2014). Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Juni 2014, Hal. 14 – 29, Vol. 18 Nomor 1. Diakses dari http://journals.ums.ac. id/index.php/ benefit/article/view/1390.

Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2016). Intellectual Capital and Financial Performance: A Study Of The Turkish Banking Sector. *Borsa Istanbul Review*, March 2016, 17-3 (2017) 190 – 198. doi: 10.1016/j.bir.2016.03.001.

Pangestika. (2010*).* Pengertian, Komponen Dan Pengukuran Intellectual Capital, *Diakses dari https://www.kajianpustaka.com/2017/09/intellectual-capital.html*

Prasanjaya, Y. A. A., & Ramantha, I. W. (2013). Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1*, July 2013, Hal. 230 – 245, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2302-8556. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5912.

Pulic, A. (1998). Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy, paper presented at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual *Capital. Canada: Hamilton.*

Prahalad, Hamel (1994). Strategy as a Field of study, Why Search for a new paradigm. Strategic management journal, 1994 - *Wiley Online Library*

Robertson et.al (2003).Developing a Knowledge Management Strategy, Literaure Review. *European Scientific Journal July edition vol. 8, No.15 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431*

Subramanyam, K.R., dan John J. Wild. 2009. Financial statement analysis. *Tenth edit. Singapore: McGraw-Hill.*

White, Gerald I., Ashwinpaul C. Sondhi, dan Dov Fried. 2003. The analysis and uses of financial statement. *Third edition, United Statesof America: Jhon Willey. Third esit. United States of America: Jhon Willey*

Robinson, Thomas R., Mary M. Munter, dan Julia Grant. 2004. Financial statement analysis: a global perspective. *International. New Jersey: Pearson Education International.*

Fraser, Lyn M., dan Aileen Ormiston. 2007. Understanding financial statament. *Eight edit. New Jersey: Prentice Hall.*

Fiordelisi , Franco,, David Marques-Ibanez and Phil Molyneux, 2010, "Efficiency and risk in European Banking", *Working Paper Series No. 1211 / JUNE 2010. European Central Bank.*

Sporta, F. O., Ngugi, P. K., Ngumi, P. M., & Nanjala, C. S. (2017). The Effect of Operational Efficiency as a Financial Distress Factor on Financial Performance on Commercial Banks in Kenya. *The International Journal Of Business & Management, July 2017, Hal 1-15, Vol 5, Issue 7, ISSN 2321– 8916*.

Sugiyono. (2017*)*. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

Tarigan, E. S., & Septiani, A. (2017). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Diponegoro Journal Of Accounting, 2017, Volume 6 Nomor 3, Halaman 1-15, ISSN: 2337-3806. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19288.*

Yimka, A. S., Taofeek, A., Abimbola, C., & Olusegun, A. (2014). Credit risk management and financial performance of selected commercial banks in Nigeria. *Journal of Economic & Financial Studies, December 2014, Vol. 03 No. 01, 01 – 09. doi: 10.18533/jefs.v3i01.73.*

The Influence of Financial and Non-Financial Company Factors on the Stock Prices of Indonesian Banking Sector Firms

Helma Malini[1]
Elga Yulindisti[2]
[1.2)] *Universitas Tanjungpura, Indonesia*

ABSTRACT

Financial and non-financial factors affected the stock prices of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2020, with firm size as a moderator. Purposive sampling was used on 45 IDX banks. Panel data was collected. Regression model selection suggested the random effects model is best for this study. KPMM, LDR, ROE, DER, and firm age affect stock prices, according to simultaneous hypothesis testing. In partial hypothesis testing, only ROE from financial factors and firm age from non-financial factors had a positive and statistically significant effect on stock prices. Other independent variables did not. Company size only moderates CAR and firm age effects on stock prices. LDR and DER affect stock prices, while firm size acts as a pseudo-moderator. Firm size boosts ROE's effect on stock prices, acting as a pseudo-moderator. Financial, non-financial, and audit opinions influence stock prices by 10.2%, according to the coefficient of determination test.

Keywords*: ROE, DER, age of the company, size of the company, banking.*

1. INTRODUCTION

The banking industry helps develop nations by connecting individuals with money to others who need it. This makes banks development agents. As a financial middleman that shapes business development, banks must change their operations. Thus, banking collects public savings and lends it back (agent of change). Banking will grow when a country develops faster. Banks now support worldwide payment mechanisms, securities safekeeping, credit card services, and other services in addition to receiving and returning monies. External supervision is needed to assess bank management's prudence due to the industry's growing complexity. Bank Indonesia (BI) annually supervises banking systems, operations, and compliance. Banking is strictly regulated (Malini & Jais, 2014; Martin, 2015).

Investors might invest in banking organizations due to their distinctiveness. In addition, globalization has made investment and capital markets fascinating topics. Investment and financial markets are now economic cornerstones in developed and emerging nations. Digital banks are among the emerging Indonesian banking capabilities. Every bank must innovate to survive. The company's financial and non-financial strengths are used to boost performance in the face of tough banking industry rivalry and keep the company's prospects in financial information users' minds. The high degree of competition, rigorous rules, and complexity of the banking role in the country's development have prompted scholars to study the elements that affect banking stock prices (Shiller, 1980).

[1] Email: helma.malini@ekonomi.untan.ac.id

Share price movements will represent corporate management success. Investors will know the company is doing well by its stock price. External and internal variables effect stock movements. External or technical market behavior is converted into price history charts to predict future prices. Internal or fundamental factors are studies of the economy, industry, and firm to determine share value. Fundamental considerations use financial report keywords to assess stock values. Current ratios, leverage ratios, profitability ratios, dividend policy, and asset management can be used to assess these fundamental elements (Ali et al., 2015; Canarella et al., 2014; Li & Zhao, 2008). Before investing, investors examine non-financial factors. Customers trust banking sector organizations as financial middlemen. Bank age substantially influences customer trust. The bank's age indicates its survival and competitiveness. Investors expect older companies to make more money and offer higher returns. Long-standing companies can manage their money to grow and increase their share price.

Companies with substantial assets are deemed mature and have more business certainty, making it easier to anticipate their future profitability. This certainty can be used to invest in decision-making, which boosts equities. Investors will gain more from their investment if the company has more assets, so academics add company size as a variable that might increase or decrease the relationship between financial and non-financial aspects on stock prices (Shiller, 1980).

Previous studies have revealed varying results for the moderating role of firm size in the relationship between financial factors and stock prices. Among them (Malini et al., 2021) found that company size did not play a significant role in moderating the effect of CAR, BOPO, LDR, DER and NPL on company stock prices. company size moderates (strengthens) the effect of DER on-stock prices, but on the contrary (Buchory, 2014) reveals that company size does not moderate the effect of DER on-stock prices of property and real estate sector companies listed on the IDX. The result is that company size moderates the LDR of Islamic banking in Indonesia which is observed on stock prices. Company size moderates the effect of ROE on stock prices of food and beverage sector companies listed on the IDX.

Based on the backdrop, banking firm stock prices are affected by financial and non-financial elements and reinforced by company size. KPMM, LDR, ROE, and DER were the financial factors that most affected banking firm stock prices, whereas company age was the non-financial factor.

2. LITERATURE REVIEW

Signaling Theory or signaling theory developed by (Jensen & Meckling, 1976), states that company executives who have better information about their company will be encouraged to convey this information to potential investors so that the company's stock price increases. The positive thing in signaling theory is that companies that provide good information will differentiate them from companies that do not have good news. By informing the market about their situation, signals about good future performance given by companies with poor past financial performance will not be trusted by the market (Eisenhardt, 1989).

According to (Jogiyanto, 2010), signaling theory emphasizes the importance of information released by companies on investment decisions of parties outside the company. Information is an important element for investors and business people because information essentially provides information, notes or descriptions for past, present and future conditions for the survival of a company and how the market for securities is. Complete, relevant, accurate and timely information is needed by investors in the capital market as an analytical tool to make investment decisions.

Information published as an announcement will provide a signal for investors in making investment decisions. If the announcement contains a positive value, it is hoped that the market will react when the announcement is received by the market. When the information is announced and all market participants have received the information, market participants first interpret and analyze the information as a good signal (good news) or a bad signal (bad news). If the announcement of this information is a good signal for investors, then there will be a change in the volume of stock trading (Dialysa, 2015; Malini, 2020; Malini & Putri, 2020; Sari et al., 2022).

Research by (Kinanti, 2019) tested the effect of Current Ratio, Return on Equity, Earning per Share and company size on the stock prices of manufacturing companies listed on the IDX between 2014 – 2018, both partially and simultaneously. The results of this study indicate that partially Current Ratio and Return on Equity have no significant effect on manufacturing company stock prices. Partially, Firm Size and Earning Per Share have a positive and significant effect on manufacturing company stock prices. While the independent variables Current Ratio, Company Size, Return on Equity, and Earning Per Share simultaneously have a significant effect on the variable stock price of manufacturing companies. (Buchory, 2014) in their research on real estate sector companies in Indonesia between 2010 - 2014 tried to find empirical facts about the effect of the debt-to-equity ratio, current ratio and inflation on company stock prices. Based on the data it was found that the debt-to-equity ratio and the current ratio have an effect on stock prices. The inflation variable has no effect on stock prices.

Conceptual framework

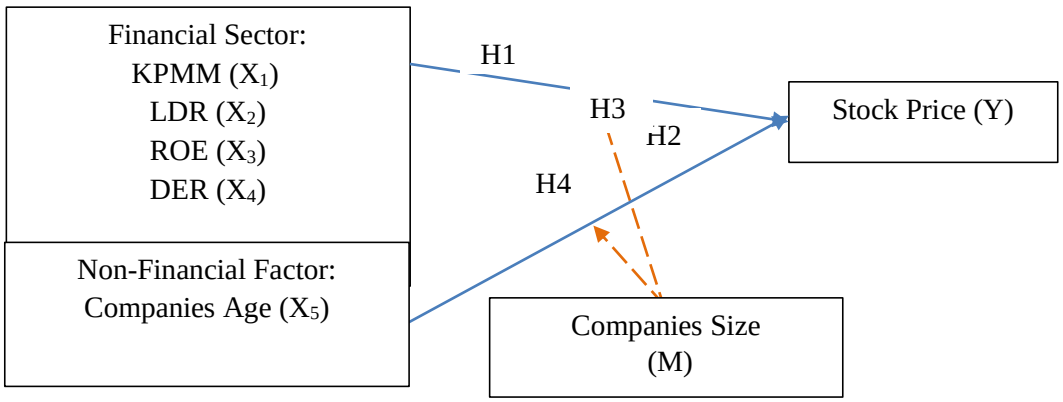

Figure 1. Research Conceptual Framework

The independent variables in this study include financial factors, namely KPMM (X1), LDR (X2) ROE (X3), DER (X4), and non-financial factors of firm age (X5) which affect the dependent variable of stock price (Y) with the moderating variable size company (M). The conceptual framework model in this study can be described as Figure 2.1.

3. RESEARCH METHOD

This research examined each bank's financial statements and share price data from the Indonesia Stock Exchange, Financial Services Authority, and IDX websites. This research focused on banking sector companies on the Indonesia Stock Exchange, a key economic pillar in Indonesia. The research spans 2016–2020. This study employed secondary data from document study. Panel data from the banking sector on the Indonesia Stock Exchange for 2016–2020 and stock prices a month after the

yearly financial statements were announced were used. Researchers download financial reports, annual reports, and business stock prices from the Indonesia Stock Exchange, the company's website, the Financial Services Authority's website, and www.idx.co.id. The researcher then recapitulated stock price data for each issuer using the research sample from the financial reports and annual reports and the data needed as research variables. This study's sample criteria: Before 2016, Indonesia Stock Exchange banking industry IPOs Companies with complete data for this study's variables trade actively during the study.

3.1. Panel Data Regression

This study analyzes panel data. Sugiyono (2014) define panel data as time series and cross section data. Time series data is one or more variables observed in one unit of observation throughout time. Cross-section data is observation data from multiple observation units at one time.

3.1.1. Panel Data Model Estimation Method

1. Common Effect Model (Model Pooled)
   The panel data model with the common effect model is simple because it simply uses time series and cross section data. Since this model ignores time and dimensions, it assumes corporate data behaves the same throughout time. Model estimate employs OLS (Ordinary Least Square).
2. Fixed Effect Model
   The panel data model with the fixed effects model assumes that the fundamental differences between individuals can be accommodated through differences in intercepts, but the intercepts between times are the same (time invariant). Fixed effect means that the regression coefficient (slope) remains between individuals and over time. The intercept of each individual is an unknown parameter and will be estimated. In general, by including dummy variables, this estimation model is often referred to as LSDV (Least Square Dummy Variable).
3. Random Effect Model
   The panel data model using the random effect model estimates panel data with highly connected disturbance factors over time and between people. The random effect model accounts for intercept differences using business error terms. Residuals with a time-person relationship are used in this model. The random effect model believes each person has a random intercept. The error component model (ECM) or Generalized Least Square (GLS) approach is the random effect model.

3.2. Moderation Regression

The moderating variable strengthens the association between the independent variable and the dependent variable, making it an addition to the model rather than a separate variable. The moderating variable must be related to the independent variables to reinforce them. If it becomes an enhancer, the multiplication variable between the independent and moderating variables appears, and this coefficient affects the dependent variable.

4. RESULTS AND DISCUSSION

This study examines Indonesia Stock Exchange-listed banking company stock price determinants. This study uses 2016–2020 panel data. 39 companies met preset sample conditions, yielding 195 data points. The CAR, LDR, ROE, and DER ratios and the company age ratio determine stock prices in this study. This study additionally evaluates size's moderating effect on the independent factors' stock price effects.

Descriptive statistical tests are used to examine yearly financial report recapitulation and OJK website report data. Descriptive statistics can summarize sample data without addressing research issues. To offer data overview and information. Table 1 shows descriptive analysis results.

Table 1. Research Variable Descriptive Analysis

Variable	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
Price	2203.251	710.000	33550.000	50.000	4564.286
KPMM	0.226	0.212	0.664	0.100	0.084
LDR	0.863	0.864	1.713	0.393	0.183
ROE	0.032	0.059	0.231	-0.940	0.173
DER	5.814	5.376	16.078	0.193	2.666
Ukuran	31.321	30.964	34.952	28.353	1.744
Umur	14.473	14.000	38.000	1.000	8.886

This study's dependent variable is the company's stock price at the conclusion of the month following the audit report. According to descriptive statistics, the stock price averages 2,203.251. Bank Central Asia Tbk owns 33,550,000 shares. The minimum share price is 50,000 owned by Bank MNC Internasional Tbk in 2018 and 2019, Bank J Trust Indonesia Tbk in 2016 and 2017, Regional Development Bank Banten Tbk in 2017, 2018, and 2019, Bank Artha Graha in 2019, and Bank Panin Syariah in 2019. The stock price's standard deviation is 4564.286 larger than the average share price, indicating a high level of distribution.

Panel data research uses three regression models: CEM, FEM, and REM. Three data tests—Chow, Hausman, and Langrange Multiplier (LM)—determined the best regression model. This study employed 5% ($\alpha = 0.05$) and 10% ($\alpha = 0.1$) error rates for the model selection test. The chow test determines this study's regression model. This test determines the best fixed effect or common effect model for panel data estimation. Table 4.2 shows the Chow test's crosssection F probability of 0.000. H0 is rejected and H1 approved because this value is less than α (0.000 <0.05). The Chow test suggests the fixed effect model for panel regression.

Table 2. Model Selection Test

Regression Model Testing	Cross section
Chow Test	38.947 (0.000)
Hausman Test	5.456 (0.362)
Langrange Multiplier Test	278.910 (0.000)

The Hausman test follows the Chow test, which suggests a fixed effect hypothesis. This test determines the best fixed or random effect model for panel data estimation. Table 2 shows the Hausman test findings for a random cross-section: 0.546. H0 is accepted and H1 rejected because 0.546 > 0.05. Thus, the Hausman test suggests a random effect panel regression. A lagrange multiplier (LM) test is done because the Hausman test suggests a random effect model. This test determines the best random effect or common effect model for panel data estimation. Table 2's LM test results demonstrate 0.000 Breusch-Pagan probability. H0 is rejected and H1 approved because this value is less than α (0.000 <0.05). Thus, the LM test suggests a random effect panel regression.

The coefficient of determination (R2) measures the model's ability to explain dependent variable fluctuation. The increasing coefficient of determination (R2) indicates that all independent factors can explain the growing dependent variable. However, when R2 approaches 0, all independent factors become less competent to explain the dependent variable. Adjusted R Square shows the coefficient of determination (R2). Table 3 shows R2 coefficient of determination test results.

Table 3 shows that the adjusted R Square value of the coefficient of determination (R2) is 0.082, or 8.2%. This reveals that financial variable like KPMM, LDR, ROE, and DAR and non-financial variables like business age may explain 8.2% of stock price fluctuations, while the rest 91.8 percent is explained by factors outside the regression model. The model's coefficient of determination shows that KPMM, LDR, ROE, DER, and business age are among the many elements that might affect a firm's stock price.

Table 3. Research Model Regression Results

Variable	Coefficient
C	4819.905 (0.078)
KPMM	-2384.153 (0.610)
LDR	-2353,783 (0.193)
ROE	6866.508 (0.000)
DER	-217.080 (0.145)
Size	67.327 (0.066)
R^2 *Adjusted* R^2	0.106 0.082
F-statistic *Prob. F-statistic*	4.459 (0.001)
Standar *error* model	4373.501

MRA tested the moderating variable. Testing the moderating variable business size's effect on the independent variables KPMM, LDR, ROE, DER, and company age on the dependent variable stock price was done. Company size must predict and moderate in the research model. Table 4 shows the regression test predictor for business size as regression equation 2.

Table 4. Moderation Predictor Regression Results

Variable	Coefficient
C	41783.460 (0.000)
Size	1404.404 (0.000)

Based on the data in Table 4, it can be seen that the significance value of firm size is 0.000, which is smaller than the predetermined significance level (0.000 <0.05), and the regression coefficient

is 1404.404. Based on the description above, it can be said that there is a company size that acts as a significant predictor of stock prices. Thus, the larger the size of the company, the higher the company's stock price. After testing the moderating variable as a predictor, the MRA test is continued by testing the interaction regression between the moderating variable on the independent variable on the dependent variable. The results of the regression test for the interaction of the moderating variable as well as the regression equation 3 in this study can be seen in Table 5.

Table 5. Moderation Variable Interaction Regression Results

Variable	Coefficient	Variable	Coefficient
KPMM	49784.370 (0.557)	KPMM*Size	-1438.521 (0.613)
LDR	109522.700 (0.001)	LDR*Size	-3627.377 (0.000)
ROE	-164467.300 (0.000)	ROE*Size	5453.187 (0.000)
DER	8015.967 (0.002)	DER*Size	-264.284 (0.001)
Age	-132.883 (0.829)	Age*Sige	0.894 (0.963)
Size	6272.554 (0.000)		

Testing the regression equation 3 in this study involved a moderating variable of company size and its interaction with KPMM, LDR, ROE, DER, and company age on stock prices. The third hypothesis (H3) in this study states that company size acts as a moderator in strengthening the influence of financial factors as measured using KPMM, LDR, ROE and DER on-stock prices. While the fourth hypothesis (H4) states that company size acts as a moderator in strengthening the influence of non-financial factors as measured by company age on stock prices. Based on the results of the MRA analysis from Table 5, the following explains the moderating role of the firm size variable in the effect of each independent variable on the dependent variable:

The third hypothesis (H3a) in this study states that company size acts as a moderator in strengthening the relationship between KPMM and stock prices. Based on the data in Table 3, it can be seen that before interacting with the moderating variable company size, the significance value of KPMM was 0.610, greater than the specified significance level (0.610 > 0.05). However, after interacting with the moderating variable company size, the KPMM significance value became 0.613, greater than the specified significance level (0.613 > 0.05). The value of the regression coefficient before interacting with the moderating variable firm size was 49784.370, but changed to -1438.521 after interacting with the moderating variable firm size. These results indicate that company size does not moderate the effect of KPMM on stock prices.

The significance value of firm size as a predictor in the regression equation as shown in table 4.4 is 0.000 (significant because 0.000 <0.05), and the significant value of the interaction moderating firm size with CAR in the regression equation 3 is shown in Table 4.5 of 0.613 (not significant because 0.613 > 0.05) indicates that the firm size variable is a moderator predictor variable on the effect of KPMM on stock prices.

The third hypothesis (H3b) in this study states that firm size acts as a moderator in strengthening the relationship between LDR and stock prices. Based on the data in Table 4.5, it can be seen that before interacting with moderating variable firm size, the LDR significance value was 0.001, smaller than the specified significance level (0.001 < 0.05). However, after interacting with the moderating variable company size, the LDR significance value becomes 0.000, which is smaller than the specified significance level (0.000 <0.05). The value of the regression coefficient before interacting with the moderating variable firm size was 109522.700, but changed to -3627.377 after interacting with the moderating variable firm size. The results indicates that firm size moderates in the form of weakening the effect of LDR on stock prices.

The significance value of firm size as a predictor in the regression equation as shown in Table 4.4 is 0.000 (significant because 0.000 <0.05), and the significant value of the interaction moderating firm size with LDR in the regression equation 3 is shown in Table 4.5 of 0.000 (significant because 0.000 < 0.05) indicates that the variable firm size is a quasi-moderator variable on the effect of LDR on stock prices.

The third hypothesis (H3c) in this study states that company size acts as a moderator in strengthening the relationship between ROE and stock prices. Based on the data in Table 4.5, it can be seen that before interacting with the moderating variable firm size, the significance value of ROE is 0.000, which is smaller than the specified significance level (0.000 <0.05). However, after interacting with the moderating variable company size, the significance value of ROE becomes 0.000, which is smaller than the specified significance level (0.000 <0.05). The value of the regression coefficient before being interacted with the moderating variable of firm size was -164467.300, but changed to 5453.187 after being interacted with the moderating variable of firm size. These results indicate that firm size moderates in the form of strengthening the effect of ROE on stock prices.

The results of the hypothesis measurement show that firm age has no effect on stock prices. This explains that changes in the age of the company will not affect changes in stock prices. This shows that the age of the company is not an important concern for investors so it does not affect changes in the company's stock price. Even investors in the Indonesian capital market tend to ignore the IPO date of company shares that have been listed on the IDX. This also shows that the tendency of investors in the stock market in Indonesia to only pay attention to technical factors in making investment decisions.

Firm size also act as a pseudo moderator and moderates in the form of strengthening the influence of ROE on stock prices. This explains that the larger the company, the more capable it will be to provide returns on investment in shares owned by investors. Thus, company size can strengthen the effect of ROE on changes in stock prices. This result is in line with the results of the research of Langitwati, Munawar, & Rahmani (2019) which revealed that company size moderates the effect of ROE on the stock prices of food and beverage sector companies listed on the IDX.

Firm size also acts as a pseudo moderator and moderates in the form of weakening the influence of DER on-stock prices. This is because the banking company is a company that manages and distributes third party funds. Thus, the banking capital structure becomes information that is not too relevant because banking company operations do indeed collect funds from customers and then channel them back in the form of credit. This causes the size of the company to weaken the effect of DER on changes in stock prices of companies in the banking sector. The results of this study are in contrast to all previous research, including research by Nasution & Liniarti (2022) and Pratiwi (2019) which reveal that company size does not moderate the effect of DER on-company stock prices. The results of this study

are also different from the results of research by Santoso & Susilowati (2019) who found that company size moderates (strengthens) the effect of DER on-stock prices, while the moderating role of company size in this study is to weaken the effect of DER on-stock prices.

5. CONCLUSION

KPMM, LDR, ROE, and DER were the financial characteristics most frequently found to have a significant impact on the stock prices of banking firms, while company age was the non-financial factor most frequently found to have a significant impact on the stock prices of banking companies. Similarly, numerous earlier researches have argued that non-financial issues should be included as variables that affect stock prices. Therefore, this study was conducted to examine the impact of financial and non-financial factors on the stock prices of Indonesian banking businesses listed on the Indonesia Stock Exchange, with company size serving as a moderator.

This is a causal associative study (causal relationship) that analyzes and analyses the influence of financial elements in the form of KPMM, LDR, ROE, and DER, as well as non-financial factors in the form of business age on stock prices, with company size serving as a moderator. This study was conducted by observing the company's financial reports, banking quarterly reports to the Financial Services Authority, and share price data for each issuer obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange, the official website of the Financial Services Authority, and www.idx.co.id for five years, from 2016 to 2020, on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The acquired data are in the form of panel data, which are summarized as necessary using the research variables derived from the regression equation and the research model. For the purpose of determining the most appropriate regression model for the research model, preliminary testing of panel data was undertaken. Using EViews 12 software, data processing was proceeded with panel data regression analysis and moderation regression analysis.

According to the findings of selecting the regression model, the random effect model is the optimal model for this investigation. Simultaneous hypothesis testing reveals that KPMM, LDR, ROE, DER, and company age have a substantial impact on stock prices. Partial hypothesis testing revealed that only ROE from financial factors and company age from non-financial factors had a positive and statistically significant effect on stock prices, whilst other independent variables had no meaningful effect on stock prices.

Testing for moderation revealed that company size only functions as a moderating predictor of the impact of KPMM on stock prices and the impact of firm age. Nevertheless, firm size works as a quasi-moderator and diminishes the impact of LDR and DER on-stock prices. In addition to acting as a quasi-moderator, the firm's scale bolsters the impact of ROE on stock prices. The findings of the coefficient of determination test indicate that financial factors, non-financial factors, and audit opinions account for 8.2% of the variance in stock price variations.

This research was only conducted in banking sector companies, so its findings cannot be generalized to other financial sub-sector companies, such as the financial institutions sub-sector, the corporate sub-sector securities, and the insurance sub-sector, or to other sectors on the Indonesia Stock Exchange that also support the stock market in Indonesia, such as the manufacturing sector. Thus, the obtained research results might be generalized to the financial sector or even all sectors of the Indonesia Stock Exchange. In addition, the research period is confined to 2016 to 2020, therefore it is not optimal

and cannot capture the causes of stock price changes due to external company circumstances, such as recessions and the development of specific pandemics.

This study advises that future research utilize additional independent variables that have also been empirically demonstrated to influence stock prices. In addition, additional study can extend the research period to get consistency of influence over a longer period of time and to account for the external factors that affect the company's stock values. Future research might also apply the same methodology to other businesses or sub-sectors, or compare the banking industry in developing nations and other Southeast Asian nations.

REFERENCES

Ali, M. S., Javid, A. Y., & Subhan, S. (2015). Impact of Macroeconomic Variables on External Debt in Pakistan. *Journal of Research in Social Sciences*, *3*(1), 35.

Buchory, H. A. (2014). Analysis of the Effect of Capital, Operational Efficiency, Credit Risk and Profitability to the Implementation of Banking Intermediation Functions (Study on Regional Development Bank All Over Indonesia in 2012). *Academic Research International*, *1*(5), 440–457.

Canarella, G., Nourayi, M. M., & Sullivan, M. J. (2014). An alternative test of the trade-off theory of capital structure. *Contemporary Economics*, *8*(4), 365–386.

Dialysa, F. (2015). Green banking: One effort to achieve the principle of good corporate governance (GCG). *First International Conference on Economics and Banking (ICEB-15)*, 128–132.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, *14*(1), 57–74.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jogiyanto, H. (2010). Teori portofolio dan analisis investasi (edisi ketujuh). *Yogyakarta: BPFE*.

Kinanti, D. A. (2019). *Analisis Pengaruh Ecconomic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Return On Investment Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*. STIE Indonesia Banking School.

Li, K., & Zhao, X. (2008). Asymmetric information and dividend policy. *Financial Management*, *37*(4), 673–694.

Malini, H. (2020). Determinants of Shariah Banking Performances in Indonesia Through the Perspective of Economic and Social Level. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, *9*(1), 47–57.

Malini, H., & Jais, M. (2014). The Volatility of Indonesia Shari'ah Capital Market Stock Price Toward Macro Economics Variable. *Indonesian Capital Market Review*.

Malini, H., Natalia, D., & Giriati, G. (2021). Corporate Governance and Company Value: A Manufacturing Industry Case Study. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*,

4(4), 450–461.

Malini, H., & Putri, A. N. (2020). Competitiveness and Market Concentration of Islamic Banking Industry: A Comparison Study between Indonesia and Malaysia. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, *4*(3), 175–190.

Martin, F. M. (2015). Debt, inflation and central bank independence. *European Economic Review*, *79*, 129–150.

Sari, S., Ajija, S. R., Wasiaturrahma, W., & Ahmad, R. A. R. (2022). The Efficiency of Indonesian Commercial Banks: Does the Banking Industry Competition Matter? *Sustainability*, *14*(17), 10995.

Shiller, R. J. (1980). *Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?* National Bureau of Economic Research.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta.

Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Vol 5, 2022
ISSN 2986-9205

PEMAHAMAN PEGAWAI BANK SYARIAH TERHADAP PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Rio Laksamana*

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Dalam pemulihan ekonomi nasional ditengah badai pandemi Covid-19bank syariah di tahun 2021 mampu bertahan dan bertumbuh dengan memanfaatkan momentum, terlihat dari aset industri keuangan syariah yang tumbuh positif 13,82%(*yoy*) mencapai Rp2.050,44 triliun. Tentunya hal tersebut didukung dengan strategi yang terbilang efektif bagi industri keuangan syariah dalam beradaptasi di tengah pandemik Covid-19 (OJK, 2022). Dalam mengimplementasikan strateginya, perbankan syariah harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Ini dikarenakan SDM merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional. Produk-produk yang dimiliki perbankan syariah sangat berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Dari pemaparan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pemahaman pegawai bank syariah terhadap produk-produk perbankan syariah". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlokasi Bank Muamalat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak masih rendah, baik itu pengetahuan secara umum tetang produk BMI ataupun pada penguasaan tentang akad-akad yang ada pada produk-produk perbankan syariah (khususnya BMI).

***Keywords**: Pemahaman, SDM, BMI.*

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah), dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2008).

Bank syariah di Indonesia sendiri berdiri pertama kali pada tanggal 1November 1991 (sesuai akte pendirinya) dan beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (OJK, 2017). Adanya g*hirah* keislaman masyarakat muslim Indonesia dalam perekonomi syariah menjadi salah satu alasan dorongan untuk mendirikan perbankan syariah. Dalam pengembangan sektor keuangan syariah secara umum telahterangkum pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020 - 2025

* Email: riolaksamana@ekonomi.untan.ac.id

(RP2SI) dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021- 2025 untuk industri BPR dan BPRS, serta *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020- 2024 (RPMS) bagi sektor pasar modal yang merupakan terjemahan lebih detail dari *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 (OJK, 2022).

Dalam pemulihan ekonomi nasional ditengah badai pandemi Covid-19bank syariah di tahun 2021 mampu bertahan dan bertumbuh dengan memanfaatkan momentum, terlihat dari aset industri keuangan syariah yang tumbuh positif 13,82%(*yoy*) mencapai Rp2.050,44 triliun. Tentunya hal tersebut didukung dengan strategi yang terbilang efektif bagi industri keuangan syariah dalam beradaptasi di tengah pandemik Covid-19 (OJK, 2022). Seiring dengan pertumbuhannya, data Otoritas. Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan bahwa saat ini ada 12 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia, serta 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Data tersebut dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah – Bank Pembangunan Daerah	2	2	2	184	195	190
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	10	1721	1825	1833
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	164	163	164	619	627	659

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dalam mengimplementasikan strateginya, perbankan syariah harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Ini dikarenakan SDM merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional. Produk-produk yang dimiliki perbankan syariah sangat berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan bank konvensional.

Gambar 1.1 Perbankan Syariah
Sumber : *Otoritas Jasa Keuangan*

Berdasarkan gambar 1.1 tentang penghimpunan dana, penyaluran danaserta produk-produk yang ditawarkan, pegawai bank syariah dituntut mampu menghafal, memahami serta dapat menjelaskan produk-produk maupun transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Basyariah, 2018). Tingkat pemahaman dan pengetahuan tersebut bisa didapat melalui banyak hal, seperti jenjang pendidikan yang ditempuh, adanya pelatihan-pelatihan, ataupun lamanya berkerja dibidang tersebut.

Mengingat pentingnya SDM perbankan syariah dalam menunjang perekonomian syariah, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman SDM yang dimiliki oleh bank syariah terhadap produk-produk perbankan Syariah, sehingga mendapatkan SDM yang berkualitas dengan berkerja secara produktif, inovatif dan kreatif, menghasilkan kepuasan kerja dan membentuk komitmen perkerja yang loyal serta profesional.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Bank Syariah

Merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2008, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta gak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (Wardana, 2020). Selain menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan, tujuan bank syariah juga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraanrakyat. Setidaknya ada3 fungsi dari bank syariah menurut OJK, yaitu :

1. Wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang danmenyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Penghimpunan dana bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsipnya operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*. Berikut ini gambaran skema operasional pada bank syariah :

Gambar 2.1 Gambar Skema Operasional Bank Syariah

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya; *pertama*) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, *kedua*) Pembiayaan dengan prinsip sewa, *ketiga*) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *keempat*)

Pembiayaan dengan akad pelengkap (OJK, 2017).

2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia juga dapat diartikan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berprilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya (Admin, 2021). SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kretifitas dibandingkan dengan sumber daya lainnya (sumber daya modal dan sumber daya alam). Contohnya peranan setiap manusia terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan terus menerus. Salah satu fungsi umum dari SDM adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi agar lebih kompetitif sehingga tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari SDM tersebut, misalnya seperti:

1. Pendidikan. Umumnya pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik pula, berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dengan mudah untuk tercapai.
2. Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karaktermanusia. Dengan keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik pula dan sebaliknya, sehingga ketika manusia berada dalam lingkungan yang baik dan berkualitas maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing pula.

Untuk meningkatkan kualitas SDM disuatu organisasi terkhusus pada penelitian kali ini, umumnya organisasi berfokus pada Pendidikan dan Pelatihan pada bidangnya masing-masing, dalam upaya mencapai target atau tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

2.3. Kajian Empiris

Suatu penelitian harus berdasarkan dukungan jurnal-jurnal, atau sejenisnya, yang berisi variabel yang relevan dengan penelitian tersebut. Ada terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian kali ini.

Penelitian yang dilakukan Leni Oktaviani dan Suazhari pada tahun 2019 berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh". Penelitian menggunakan metode kualitatif deskritif dengan sampel sebanyak 5 orang karyawan melalui teknik *purposive sampling*. Dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk kredit pemilikan rumah (KPR) masing sangat kurang. Penjelasan karyawan terhadap akad (KPR) (akad murabahah) masih belum sesuai dengan syariah dan fatwa DSN-MUI No: 4/DSNMUI/2000 tentang Murabahah (Oktaviani, 2019).

Penelitian berikutnya dilakukan pada tahun 2019 berjudul "Relevansi Pemahaman Pegawai Tentang Produk Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Di Bank NTB Syariah).". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasilnya penelitian ini Pemahaman pegawai di Bank NTB Syari'ah Cabang Selong masih rendah, hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami tentang Bank Syari'ah baik dari produk-produk dan akad- akadnya, sedangkan sebagian hanya sekedar tahu tentang Bank Syari'ah, namun tentang produk dan akad-akad masih kurang

paham, itupun setelah menempuh pelatihan di Bank NTB Syari'ah Cabang Selong. Pemahaman pegawai terhadap produk Bank NTB Syariah berpengaruh kepada Meningkatkan jumlah nasabah dan Meningkatkan volume pendapatan Bank (Kir, 2019).

"Diferensiasi Dan Tingkat Pemahaman Produk, Serta Kualitas Sumber Daya Manusia Atas Keputusan Nasabah Perbankan Syariah" penelitian kualitatif tahun 2019, membuktikan prespsi nasabah dalam diferensiasi produk, tingkat pemahaman produk, dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap keputusan nasabah pada Perbankan Syariah. Artinya menurut konsumen ketiga komponen tersebutdianggap penting ketika akan menggunakan jasa pada Perbankan Syariah(Khasanah, 2019).

"Analisi PemahamanKaryawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Prilaku Organisasi" yang diteliti pada tahun 2021. Jenis penelitian *field research* dengan kerangka penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 55 responden. Hasil penelitian menemukan: tingkat pemahaman karyawan terhadap produk tabungan wadiah berada pada skala nilai paham dan sangat paham (Hadi, 2018).

Penelitian berikutnya "Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Terhadap Produk Tanbungan Wadiah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta". Jenis penelitian field research dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam lima kriteria likert dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta pada produk tabungan wadiah termasuk pada kriteria paham terhadap ketujuh pertanyaan yaitu definisi secara bahasa (194.359), definisi wadiah menurut Imam Syafi'i (77.459), indikator tabungan (163.818), biaya administrasi (151.347), jenis tabungan (185.582), bentuk penarikan (110.167), serta karakteristik akad tabungan wadiah (136.297). Dan untuk ketiga pertanyaan tentang penarikan tabungan (192.369), ciriciri tabungan wadiah (93.246), landasan tabungan (33.333), jenisjenis tabungan (Wadiah Yad Al-Amanah) (30.083) dan jenis-jenis tabungan (Wadiah Yad Dhamanah) (27.000) termasuk dalam kriteria sangat paham (Basyariah, 2018).

Penelitian berikutnya berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Syariah Pada Karyawan Perbankan Syariah Di Indonesia", dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan *purposive dan accidental sampling*. Hasilnya, pengetahuan terhadap produk bank Syariah berpengaruh postif terhadap persepsi dan pemahaman karyawan bank Syariah tentang produk pembiayaan bank syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan Syariah tidak berpengaruh terhadap persepsi dan pemahaman tentang produk pembiayaan bank syariah. Pelatihan berpengaruh secara positif terhadap persepsi dan pemahaman tentang produk pembiayaan bank syariah. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi dan pemahaman tentang produk pembiayaan bank Syariah (Masriyanda, 2017).

3. METODA PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian survei langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau keadaan yang

sebenarnya. Sedangkan deskriptif kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Hidayat, 2012).

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi penelitian ini berlokasi Bank Muamalat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

3.3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dan diperoleh dari narasumber dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara dan observasi. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka seperti penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal penelitian terkait, buku-buku, majalah, surat kabar, internet, dan sebagainya yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian ini.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Muamalat di Provensi Kalimantan Barat. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010), adapun sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu seluruh karyawan Bank Muamalat Cabang Pontianak Provensi Kalimantan Barat yang berjumlah 15 karyawan menjadi sampel. Sampling jenuh sendiri adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang (Hidayat, 2017).

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang akan diteliti, sehingga permasalahan penelitian dapat dirumuskan dengan jelas.
2. Melakukan Survei, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dan terstruktur (melalui daftar pertanyaan) terhadap objek penelitian. Guna membantu peneliti dalam hal mengingat pertanyaan yang akan diajukan, menghimpun jawaban untuk dibandingkan, dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dijumpai, maka input data dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (menggunakan kuesioner).
3. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan menjamin kelengkapan data dan informasi yang diperlukan, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan penggunaan catatan - catatan yang diperoleh dari data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh di lapangan yang dapat mendukung dari data penelitian.

3.6. Analisa Data

Proses analisis data kualitatif berjalan dengan proses sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telahdibuat berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.

2. Reduksi dan kategonisasi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data.
3. Display data, merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dankategorisasi dalam matriks berdasarkan kritenia tertentu.
4. Penarikan kesimpulan, apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yangdibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakar teori dan hasil data di lapangan (DosenSosiologi.Com, 2018).

3.7. Alat Analisis

Alat analisis di penelitian ini menggunakan Skala *Guttamn*, yang disebut juga skala *scalogram* atau analisa skala (*scale analysis*) sangat baik untuk menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti. Skala *Guttman* merupakan skala yang digunakan unutk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten, adapun kata-kata yang digunakan, pada penelitian ini yaitu 'benar-salah'.

Tabel 3.1 Nilai Skala *Guttman*

Pilihan Jawaban	*Favourable*	*Unfavourable*
Benar	1	0
Salah	0	1

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Didirikan dengan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Izin beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah (Muamalat, 2022).

BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya seperti Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat dengan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat dengan layanan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

BMI memiliki visi "Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional". Dan misinya "Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan."

4.2 Analisis Survey Responden

Peneliti menggunakan kuiesioner yang disebarkan kepada seluruh karyawan dalam melakukan penggalian informasi tentang pemahaman pegawai bank Syariah terhadap produk-produk perbankan syariah. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2.1. Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	11	73,33
2	Perempuan	4	26,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 responden atau 73,33 % dari total responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah 4 responden atau 26,67 % dari total responden. Jadi sebagian besar responden yang dijadikan sapel dalam penelitian ini adalah karyawan laki-laki.

Tabel 4.2.2 Lama Masa Berkerja Pada BMI Cabang Pontianak

No	Lama Berkerja	Jumlah	Persentase (%)
1	10 Tahun	3	20,00
2	11 Tahun	7	46,67
3	12 Tahun	2	13,33
4	14 Tahun	2	13,33
5	15 Tahun	1	6,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.2 diketahui bahwa responden yang memiliki masa kerja paling lama selama 15 tahun sebanyak 1 responden dan jumlah responden yang paling banyak pada masa kerjanya sebanyak 7 responden yaitu 11 tahun.

4.2.3 Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Yang Mana Dalam Kegiatannya Memberikan Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran Berdasarkan Prosedur Dan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Adalah Pengertian Dari Bank Syariah.

Sistem antara bank syariah dan bank konvensional ada kesamaan dalam beberapa aspek, baik secara standar operasional peralatan ataupun lainnya. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa secara praktek dan teori tentu saja bank konvensional dan bank syariah berbeda. Oleh karena itu, pegawai bank syariah seharusnya sudah memiliki ilmu tentang perbankan syariah sehingga akan lebih muda menjalankan pekerjaannya.

Tabel 4.2.3 Pemahaman Responden Tentang Pengertian Bank Syariah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
0	Benar	0	0
1	**Salah**	15	100
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.3 seluruh responden atau 15 responden semuanya menjawab salah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden telah mengetahui perbedaan pengertian dari bank konvensional dan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha.

4.2.4 Segala Aktifitas di Bank Muamalat Indonesia Sudah Sesuai Berdasarakan Prinsip Syariah dan Prinsip Hukum Islam Yang Diatur Dalam Majelis Ulama Indonesia.

Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (CIMB, 2008).

Tabel 4.2.4. Pemahaman Responden Tentang Aktifitas BMI Yang Sudah Sesuai Prinsip Syariah dan Hukum Islam

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	**Benar**	15	100
0	Salah	0	0
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.4 seluruh responden atau 15 responden semua menjawab benar. Hal ini menunjukan bahwa seluruh reponden telah memahami bahwa prinsip syariah dan prinsip hukum islam yang berlaku pada BMI semuanya diatur dalam Majelis Ulama Indonesia.

4.2.5 Keuntungan Menabung Di Perbankan Syariah Yaitu Berinvestasi Pada Usaha Yang Halal Dan Atas Dasar Bagi Hasil, *Margin* Keuntungan dan *Fee.*

Sama halnya dengan bank konvensional yang memiliki keunggulan masing-masing, simpanan nasabah di bank syariah juga dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), tidak hanya dengan tabungan yang bersifat investasi namun juga simpanan yang sifatnya titipan. Bank syariah menginvestasikan dananya kepada usaha-usaha yang hala, serta membagi keuntungan dengan cara bagi hasil sesuai syariah.

Tabel 4.2.5 Pemahaman Responden Tentang Keuntungan Menabung Di Perbankan Syariah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	**Benar**	15	100
0	Salah	0	0
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.5 seluruh responden atau 15 responden menjawab benar. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden telah memahami keuntungan yang ditawarkan pada perbankan syariah.

4.2.7 Berasaskan Demokrasi Ekonomi Dengan Menggunakan Prinsip Kehati-hatian Adalah Bagian Dari Asas Bank Konvensional.

Salah satu asas-asas hukum perbankan konvensional adalah asas demokrasi ekonomi. Asas

demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (LPS, 2022).

Tabel 4.2.7 Pemahaman Responden Tentang Asas Bank Konvensional

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	**Benar**	2	13,33
0	Salah	13	86,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.7 yang menjawab benar sebanyak 2 responden atau 13,33% dan yang menjawab salah sebanyak 13 responden atau 86,67%. Hasil ini menggambarkan 86,67% tidak mengetahui tentang asas-asas hukum di perbankan konvensional.

4.2.8 Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Bank adalah Bank Syariah

Perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam, pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal (Rulanda, 2020).

Tabel 4.2.8 Pemahaman Responden Tentang Otoritas Pengawasan Pada Bank Syariah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
0	Benar	11	73,33
1	**Salah**	4	26,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.8 yang menjawab benar sebanyak 11 responden atau 73,33% dan sebanyak 4 responden atau 26,67% menjawab salah. Tabel ini menggambarkan responden banyak belum memahami tentang otoritas pengawasan bank syariah yang seharusnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4.2.9 Produk iB Muamalat, iB Muamalat Rencana dan iB Gadai Muamalat adalah Produk Dari Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan merilis produk keuangan syariah, antara lain Asuransi Syariah (Asuransi Tafakul), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia). Berjalannya waktu BMI meluncurkan berbagai produk-produk lainnya antara lain Share-e pada tahun 2004 dan Shar-e Gold Debit

Visa tahun 2011 (Lifepal, 2020).. Dan kini BMI memiliki sejumlah produk simpanan yaitu Tabungan Prima Berhadiah, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Haji, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan IB Simpel, Tabungan iB Hijrah payrol dan TabunganKu (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.9 Pemahaman Responden Tentang Produk-produk BMI

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
0	Benar	3	20
1	**Salah**	12	80
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.9 yang menjawab benar sebanyak 3 responden atau 20% dan sebanyak 12 responden atau 80% menjawab salah. Tabel ini menggambarkan masih adanya responden yang belum mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan oleh BMI, padahal pengetahuan tentang nama-nama produk BMI adalah hal yang sangat penting untuk memperkenalkan kepada nasabah maupun calon nasabah.

4.2.10 Syarat membuka Tabungan iB Hijrah Hanya Menggunakan KTP Wilayah Setempat/SIM/PASPOR dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) serta Paspor/KITAS/KITAP dan Tax Registration bagi Warga Negara Asing (WNA).

Tabungan bank kini bukan hanya berfungsi untuk menabung atau menyimpan uang namun kini dapat difungsikan sebagai layanan seperti transfer, bayar tagihan, isi pulsa, berbelanja dan lainnya. Fasilitas tersebut kini sangat dibutuhkan, terlebih zaman belanja *online* seperti sekarang memiliki rekening bank sudah seperti keharusan. Untuk itu awal dari pembukaan rekening sesuai persyaratan haruslah memiliki identitas, ini dikarenakan identitas nasabah yang akurat merupakan aspek yang terpenting menunjukan kepemilikan tabungan baik berkaitan dengan administrasi ataupun keamanan.

Tabel 4.2.10 Responden Mengetahui Syarat Pembukaan Tabungan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	**Benar**	15	100
0	Salah	0	0
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.10 yang menjawab benar sebanyak 15 responden atau 100%. Ini menggambarkan bahwa seluruh responden telah paham dan mengetahui tentang syarat utama dari pembukaan tabungan di BMI.

4.2.11 Produk iB Muamalat adalah Tabungan yang dapat mewujudkan rencana dan impianmu di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

Tabungan iB Hijrah adalah salah satu tabungan yang dimiliki BMI dengan menawarkan kenyaman penggunaan dalam kebutuhan transaksi dan berbelanja, menggunakan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa sudah dapat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Berdasarkan tabel 4.2.11 yang menjawab benar sebanyak 9 responden atau 60% dan sebanyak 6 responden atau 40% menjawab salah. Ini menggambarkan bahwa masih banyaknya responden yang masih belum mengetahui pengertian dari iB Muamalat.

Tabel 4.2.11 Responden Mengetahui Pengertian Produk iB Muamalat

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	**Benar**	9	60
0	Salah	6	40
Total		**15**	**100**

4.2.12 Produk Tabungan iB Mualamat Haji dan Umrah yang mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.

Ada 11 bank yang menyediakan layanan tabungan haji antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTN, Bank Mega, dan Bank BCA. Ada juga Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Panin, dan Bank CIMB. Institusi lain yang memiliki tabungan haji adalah Pegadaian (katadata, 2022). BMI sendiri dalam mendukung ibadah selama di tanah suci memberikan souvenir haji seperti kain ihram, kain seragam batik haji Indonesia, mukena dan tas serut. BMI juga memberikan layanan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Jamaah dapat menggunakan Kartu Shar-E Debit 1HRAM Muamalat yang dapat dinikmati langsung oleh para jamaah di Tanah Suci (Puspaningtyas, 2022).

Tabel 4.2.12 Mengetahui Produk iB Muamalat Haji dan Umroh

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	15	100
0	Salah	0	0
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.12 yang menjawab benar sebanyak 15 responden atau 100%. Ini menggambarkan bahwa seluruh responden telah mengetahui dan paham tentang produk yang ditawarkan oleh BMI khususnya Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah.

4.2.13 Produk Tabungan iB Muamalat Rencana Mudharabah iB yang berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif.

Dengan setoran awal 1 juta rupiah/USD 2.500 nasabah sudah dapat menikmati produk tabungan berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Ini menjadi sarana bagi nasabah Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.13 Pemahaman Responden Tentang iB Muamalat Rencana Mudharabah iB Yang Berbasis Akad Mudharabah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	1	6,67
0	Salah	14	93,33
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.13 yang menjawab benar hanya 1 responden atau 6,67% dan sebanyak 14 responden atau 93,33% menjawab salah. Ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh responden masih belum mengetahui iB Muamalat rencana Mudharabah iB adalah berbasis akad mudharabah.

4.2.14 Produk giro Muamalat yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management* menggunakan akad Wadiah.

Sistem yang mudah dalam menjalankan usaha yang terbilang kompleks merupakan sebuah keuntungan bagi nasabah. Selain menghemat tenaga dan waktu, sistem yang sederhana akan membuat usaha yang dijalankan menjadi sedikit lebih ringan. Memiliki simpanan dalam bentuk giro merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil. BMI memiliki produk Giro IB Muamalat yang dapat dimiliki oleh perusahaan ataupun perorangan. Melalui layanan simpanan ini, BMI mempersembahkan produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Simpanan giro ini merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

Tabel 4.2.14 Pemahaman Responden Tentang Produk Giro

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	2	13,33
0	Salah	13	86,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.14 yang menjawab benar 2 responden atau 13,33% dan sebanyak 13 responden atau 86,67% menjawab salah. Data ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh responden masih belum memahami produk giro Muamalat oleh fasilitas *Cash Management* menggunakan akad wadiah.

4.2.15 Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman, dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan dan mata uang (IDR atau US$).

Deposito syariah merupakan bentuk produk investasi syariah dengan konsep keadaan shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan (mudharabah mutlaqqah). Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau non-perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 4, 6 dan 12.

Tabel 4.2.15 Pemahaman Responden Tentang Produk Deposito

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	12	80
0	Salah	3	20
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.15 yang menjawab benar 12 responden atau 80% dan sebanyak 3 responden atau 20% menjawab salah. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih ada responden yang masih belum memahami produk Deposito Hijrah Muamalat simpanan berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan, seharusnya semua karyawan dapat memahami produk-produk yang ia tawarkan.

4.2.16 KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantumu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain, menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah.

Bank Muamalat merupakan salah satu bank di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam setiap produknya, tak terkecuali KPR. Produk KPR yang ditawarkan terdiri atas dua pilihan akad, yakni

akad murabahah (jual-beli) atau akad musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa). Tenor yang ditawarkan juga cukup bervariasi tergantung pilihan produknya, 5 hingga 15 tahun. Persyaratan pengajuan KPR BMI pun terbilang mudah, asal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Tabel 4.2.16 Pemahaman Responden Tentang KPR Muamalat iB

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	11	73,33
0	Salah	4	26,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.13 yang menjawab benar 10 responden atau 73,33% dan sebanyak 4 responden atau 26,67% menjawab salah. Hasil ini mengindikasikan masih ada responden yang masih belum memahami tentang produk KPR Muamalat iB, baik dari pengertian produk atau tentang akad yang digunakan.

4.2.17 Pembiayaan jual beli antara Bank dan Nasabah dimana Bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang/unit dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh Nasabah Adalah pengertian dari Murabahah.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang/unit sesuai kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh nasabah. Setelah barang dibeli dan dimiliki bank, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.17 Pemahaman Tentang Pembiayaan Dengan Akad Murabahah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	9	60
0	Salah	6	40
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.17 yang menjawab benar 9 responden atau 60% dan sebanyak 6 responden atau 40% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan masih adanya ketidaktahuan responden tentang pembiayaan dengan akad murabahah.

4.2.18 Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu yang disepakati kedua pihak adalah pengertian dari akad Wakalah.

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Nasabah bertindak sebagai penerima wakalah dari bank untuk mencari barang/unit yang diinginkan, dalam pemenuhan akad jual beli antara nasabah dan bank. Secara singkat pembiayaan wakalah dikombinasikan dengan murabahah dapat dipahami bahwa bank menguasakan kepada nasabah untuk mencari barang yang dinginkan nasabah untuk dilakukan jual beli dengan Nasabah (Muamalat, 2022). Berdasarkan tabel 4.2.18 yang menjawab benar 9 responden atau 60% dan sebanyak 6 responden atau 40% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan masih adanya ketidaktahuan responden tentang pembiayaan dengan akad wakalah.

Tabel 4.2.18 Pemahaman Tentang Pembiayaan Dengan Akad Wakalah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	9	60
0	Salah	6	40
Total		**15**	**100**

4.2.19 Akad Jual Beli Atas Barang Pesanan Yang Dibayar Tunai Di Awal Dengan Penangguhan Pengiriman Penjual Fiih Diterima Sesuai Dengan Syarat-Syarat Tertentu Adalah Akad Salam.

Salam ialah akad jual beli atas barang pesanan yang dibayar tunai di awal dengan penangguhan pengiriman penjual, diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad salam atau biasa disebut jual beli pesanan dimana nasabah yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang-barang industri bisa mengajukan permohonan pembiayaan ke bank dengan akad jual beli salam, bank sebagai pemesan sekaligus pembeli barang yang akan diproduksi oleh nasabah, maka bank membayar harganya secara kontan. Pada waktu yang ditentukan, nasabah menyerahkan barang pesanan tersebut kepada bank. (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.19 Pemahaman Tentang Pembiayaan Dengan Akad Salam

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	7	46,67
0	Salah	8	53,33
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.19 yang menjawab benar 7 responden atau 46,67% dan sebanyak 8 responden atau 53,33% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang pengertian dari akad salam, bisa jadi dikarenakan akad salam pada produk-produk yang di tawarkan BMI tidak ada.

4.2.20 Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antaran pemesan dan penjual. Pembiayaan jual beli dengan akad isthisna' dimana Nasabah melakukan pemesanan atas suatu barang kepada Bank dengan menjelaskan spesifikasi dan jumlah adalah Akad Istishna'

Istiishna' ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antaran pemesan dan penjual. Nasabah melakukan pemesanan atas suatu barang kepada bank dengan menjelaskan spesifikasi dan jumlah. Kemudian bank dan nasabah melakukan negosiasi sampai dengan tercapainya kesepakatan. Setelah disepakati bank membeli (memesan) barang pesanan nasabah kepada supplier/produsen, selanjutnya nasabah membayar ke bank (di muka atau dicicil atau dibayar di belakang), lalu produsen mengirim barang sesuai pesanan ke nasabah, dan produsen mengirim dokumen pembuatan dan pengiriman barang tersebut ke bank. Pada Bank MUAMALAT terdapat pembiayaan istishna' dengan jenis produk-produk seperti; Pembiayaan KPR iB Muamalat indent (Muamalat, 2022).

Berdasarkan tabel 4.2.20 yang menjawab benar 6 responden atau 28,57% dan sebanyak 9 responden atau 71,43% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan masih banyak responden yang tidak mengetahui tentang akad istisha'. Ketidaktahuan tersebut bisa jadi dikarenakan akad istishna' yang ada

pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat indent belum ada di BMI cabang Pontianak.

Tabel 4.2.20 Pemahaman Tentang Pembiayaan Dengan Akad Istiishna'

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	6	28,57
0	Salah	9	71,43
Total		**15**	**100**

4.2.21 Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Akad yang digunakan oleh Nasabah untuk menggunakan jasa bank yang dimana Bank mendapatkan ujrah dari penggunaan jasa tersebut adalah Akad **Ijarah.**

Ijarah ialah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Akad yang digunakan oleh nasabah untuk menggunakan jasa bank yang dimana bank mendapatkan ujrah dari penggunaan jasa tersebut. Akad ini dilakukan dengan cara; pertama, nasabah mengajukan penggadaian emas kepada bank, yang kemudian dilakukan akad ijarah antara nasabah dan bank. Selanjutnya nasabah menyerahkan emas sebagai objek gadai dan bank memberikan uang pinjaman gadai kepada nasabah. Terakhir, nasabah mengembalikan uang gadai beserta dengan uang sewa penyimpanan kepada bank dan bank mengembalikan barang gadai berupa emas kepada nasabah. Akad Ijarah ini digunakan pada Pembiayaan iB Muamalat Multiguna seperti save deposit box juga dalam gadai (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.21 Pemahaman Tentang Pembiayaan Dengan Akad Ijarah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	8	53,33
0	Salah	7	46,67
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.21 yang menjawab benar 8 responden atau 53,33% dan sebanyak 7 responden atau 46,67% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan masih banyaknya responden tidak mengetahui tentang akad ijarah yang digunakan BMI pada pembiayaan iB Muamalat Multiguna produk save deposit box dan gadai. Diduga ketidaktahuan ini dikarenakan BMI khusus di cabang Pontianak tidak menawarkan produk-produk tersebut ke masyarakat.

4.2.22 Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan adalah Akad Musyarakah

Musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah pada bank syariah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muamalat, 2022). Berdasarkan tabel 4.2.22 yang menjawab benar 14 responden atau 93,33% dan sebanyak 1 responden atau

6,67% menjawab salah. Hasil ini mengindikasi hampir semua responden mengetahui tentang akad musyarakah, yang ada pada produk pinjaman.

Tabel 4.2.22 Pemahaman tentang pembiayaan dengan akad Musyarakah

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	14	93,33
0	Salah	1	6,67
Total		**15**	**100**

4.2.23 Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Obyek Sewa Dan Penyewa Untuk Mendapatkan Imbalan Atas Obyek Sewa disebut dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Akad ini dilakukan dengan cara nasabah melakukan permohonan pembiayaan kepemilikan objek sewa kepada bank, kemudian bank membeli objek sewa sesuai dengan pesanan nasabah kepada pihak pemilik objek sewa. Lalu bank menyewakan barang tersebut dengan akad ijarah dan janji hibah/jual di akhir masa sewa kepada nasabah. Nasabah pun menyetujui dan melakukan pembayaran sewa cicilan berdasarkan masa sewa yang telah disepakati. Setelah di akhir masa sewa, objek sewa dihibahkan atau dijual kepada Nasabah (Muamalat, 2022).

Tabel 4.2.23 Pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Nilai	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Benar	6	40
0	Salah	9	60
Total		**15**	**100**

Berdasarkan tabel 4.2.23 yang menjawab benar 6 responden atau 40% dan sebanyak 9 responden atau 60% menjawab salah. Hasil ini menggambarkan banyak responden masih belum mengetahui tentang pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

4.3 Pembahasan

Hasil analisa survey reponden diatas dapat dibagi menjadi tiga :

1. Pertanyaan kuiesioner yang menjelaskan secara umum tentang penguasaan seputar produk-produk *(product knowledge)* BMI ada 10 pertanyaan yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12. \

Berdasarkan tabel 4.3.1 tentang produk-produk BMI dari seluruh responden dengan hasil rata-rata 75,3% (hasil dari rata-rata persentase jawaban responden yang benar) dijawab responden dengan hasil yang memuaskan, dan dari 10 pertanyaan tentang produk-produk BMI yang diajukan hanya 5 pertanyaan yang dijawab dengan benar oleh seluruh responden. Ini mengindikasikan masih belum meratanya pengetahuan tentang seluruh produk yang ditawarkan BMI Cabang Pontianak pada setiap responden (pegawai). Bisa jadi, salah satu faktornya adalah responden berkerja hanya fokus pada bidangnya masing-masing.

Tabel 4.3.1 Pengusaan Secara Umum Tentang Produk-Produk BMI

Responden	Item Soal										Total
	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A12	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
13	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
3	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
4	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
5	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
7	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
8	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
12	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	8
9	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	7
10	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	7
6	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	6
15	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	6
14	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5
TOTAL	**15**	**15**	**15**	**4**	**12**	**15**	**9**	**15**	**1**	**12**	**113**

2. Pertanyaan kuiesioner yang menjelaskan penguasaan seputar akad-akad diperbankan syariah yang ada pada produk BMI ada 10 pertanyaan yaitu nomor 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20.

Tabel 4.3.2 Akad-Akad di Perbankan Syariah

Responden	Item Soal										Total
	B4	B11	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7
3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
5	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7
9	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	7
2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6
10	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
14	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5
7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4
11	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
12	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2**	**2**	**11**	**9**	**9**	**7**	**6**	**8**	**13**	**6**	**73**

Berdasarkan tabel 4.3.2 tetang akad-akad seputar perbankan syariah pada produk-produk BMI dari seluruh responden dengan hasil rata-rata 48,67% (hasil dari rata-rata persentase jawaban responden yang

benar) dijawab responden dengan hasil yang kurang memuaskan, dan dari 10 pertanyaan yang diajukan ada 1 responden yang tidak menjawab dengan benar sama sekali. Ini mengindikasikan masih banyaknya responden tidak mengetahui tentang akad-akad/istilah-istilah yang ada di perbankan syariah, khususnya di BMI.

3. Secara keseluruhan dari 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan seputar produk-produk BMI dan 10 pertanyaan tentang akad-akad yang ada pada perbankan syariah (khususnya BMI) dapat dilihat pada tabel 4.3.3.

Tabel 4.3.3 Produk-Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah

Responden	Item Soal		Total	Persentase (%)
	A	B		
1	8	7	15	75,00
2	8	6	14	70,00
3	8	7	15	75,00
4	8	7	15	75,00
5	8	7	15	75,00
6	6	6	12	60,00
7	8	4	12	60,00
8	8	2	10	50,00
9	7	7	14	70,00
10	7	6	13	65,00
11	9	3	12	60,00
12	8	3	11	55,00
13	9	0	9	45,00
14	5	5	10	50,00
15	6	3	9	45,00
Total				**930,00**
Rata-rata				**62,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase jawaban responden secara keseluruhan adalah sebesar 62,00%. Nilai ini mengindikasikan secara keseluruh jawaban responden tentang produk-produk dan akad-akad di perbankan syariah masih rendah.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak masih rendah, baik itu pengetahuan secara umum tetang produk BMI ataupun pada penguasaan tentang akad-akad yang ada pada produk-produk perbankan syariah (khususnya BMI). Temuan hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti lainnya dengan subjek yang berbeda yakni; masih sangat kurangnya tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad (Oktaviani, 2019) dan hanya sebagian kecil pegawai yang benar-benar memahami produk-produk serta akad-akad perbankan syariah (Kir, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

CIMB. (2008). *https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/*. Diambil kembali dari https://www.cimbniaga.co.id/: https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya

Hadi, S. N. (2018). Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Perilaku Organisasi. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, 1-17.

Haryono, E. (2021, Februari 05). *https://www.bi.go.id/id/publikasi/*. Diambil kembali dari https://www.bi.go.id/: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx

Hidayat, A. (2012). *https://www.statistikian.com/2012/*. Diambil kembali dari https://www.statistikian.com: https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html

Hosen, M. N. (2008). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkes publishing).

katadata. (2022, 05 25). *https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/*. (T. Redaksi, Editor) Dipetik 10 08, 2022, dari https://katadata.co.id/: https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/628d9af89002e/tabungan-haji-pengertian-hingga-cara-buka-rekening-haji#:~:text=Tabungan%20Haji%20Terbaik&text=Setidaknya%20ada%2011%20bank%20yang,Bank%20Panin%2C%20dan%20Bank%20CIMB.

Khasanah, U. (2019, 11). Diferensiasi Dan Tingkat Pemahaman Produk, Serta Kualitas Sumber Daya Manusia Atas Keputusan Nasabah Perbankan Syariah. *UHAMKA*, 152. Dipetik 05 30, 2022

Kir, M. Z. (2019). Relevansi Pemahaman Pegawai Tentang Produk Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Di Bank NTB Syariah). *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah,*, 83-100.

Lifepal. (2020, 08 25). *https://lifepal.co.id/media/bank-muamalat-syariah/*. Dipetik 10 07, 2022, dari https://lifepal.co.id/: https://lifepal.co.id/media/bank-muamalat-syariah/#Pilihan_tabungan_Bank_Muamalat_Syariah

LPS. (2022, 10 06). *https://lps.go.id/ketentuan-terkait/*. Diambil kembali dari https://lps.go.id/: https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992

Masriyanda. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Syariah Pada Karyawan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Liquidity, 6*, 12-18. Dipetik 05 30, 2022, dari https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/download/36/11

Muamalat. (2022, 10 07). *https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/*. Diambil kembali dari https://www.bankmuamalat.co.id/: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-hijrah

Muamalat, B. (2016). *https://www.bankmuamalat.co.id/*. Diambil kembali dari https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat#:~:text=Bank%20Muamalat&text=Perseroan%20merupakan%20bank%20pertama%20d

i,SH%2C%20Notaris%2C%20di%20Jakarta.

Muamalat, B. (2022, 10 09). *https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/*. Diambil kembali dari https://www.bankmuamalat.co.id/: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan-corporate/tabungan-muamalat-mudharabah-corporate-ib

OJK. (2017). Dipetik 05 19, 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx

OJK. (2017). *https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/*. Diambil kembali dari https://www.ojk.go.id/: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx

Oktaviani, L. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 127-144. Dipetik 05 30, 2022, dari http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/download/13023/5210

Puspaningtyas, L. (2022, 06 06). *https://ihram.republika.co.id/berita/*. (M. Hafil, Editor) Dipetik 10 09, 2022, dari https://ihram.republika.co.id/: https://ihram.republika.co.id/berita/rd20k2430/bank-muamalat-pastikan-pemenuhan-kebutuhan-jamaah-haji

Rulanda. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *SUPREMASI, 10*. doi:https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

ISSN 2986-920X